02

10 TAHUN MENAKAR EKONOMI SYARIAH
DARI UJUNG JAWA TIMUR

Membangun Masyarakat Madani

Khairunnisa Musari

KATA PENGANTAR
Kepala KPwBI Provinsi Jawa Timur
Ketua DPW IAEI Jawa Timur
Ketua Umum MES PW Jawa Timur

KATA PENGANTAR

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur

"Ekonomi Syariah sebagai Ekonomi Silaturahmi"

Memahami ekonomi ibarat menelusuri pendewasaan kita sebagai insan manusia. Kita belajar mengenal diri kita sendiri baru kemudian belajar mengenal orang lain dan akhirnya berinteraksi atau bersilaturahmi dengan orang lain sebagai masyarakat bersama berbagai manfaatnya, baik untuk sendiri maupun bersama-sama. Kita belajar ilmu ekonomi berawal dari teori untuk kemudian menerapkannya dalam kehidupan sosial kita dan juga akhirnya memadukan prinsip ekonomi dengan berbagai bidang ilmu yang lain, guna memaksimalkan kehidupan kita sebagai masyarakat dan bernegara.

Hal yang sama dan terlebih lagi dengan ekonomi syariah. Tambahan istilah syariah lebih memperkuat makna interaksi antarmanusia, khususnya melalui jalur silaturahmi di atas. Saya menekankan sekali silaturahmi ini, karena bagi saya ekonomi syariah atau boleh disebut juga ekonomi madani adalah ekonomi silaturahmi. Silaturahmi menambah amal ibadah dan menghapus

dosa. Oleh karenanya, ekonomi syariah harus memberikan manfaat dan menghilangkan yang mudarat.

Manfaat apa dari ekonomi syariah? Untuk menjawabnya saya jadi ingat akan sebuah kuis televisi yang pernah populer. Kuis ini intinya menanyakan persepsi pertama kita akan sebuah pertanyaan akan kehidupan sehari-hari, sedangkan jawabannya beragam bergantung apa yang ada di benak kita pada saat itu.

Nah, kalau kuis itu adalah *"Apa yang Anda tahu mengenai ekonomi syariah?"* Saya bisa tebak akan ada kumpulan jawaban atau istilah sebagai berikut; bank syariah, akad syariah, ekonomi madani, halal, wakaf, keadilan, berkah, dan lain sebagainya.

Anggap berbagai istilah ini sebagai kepingan *puzzle* dalam sebuah permainan waktu kita kecil dulu. Maka kita akan mendapatkan berbagai kepingan istilah yang baru sebagian, kecil menggambarkan ekonomi syariah. Namun walaupun sepotong-sepotong, kepingan *puzzle* ini akan mengantarkan kita kepada gambaran menyeluruh. Oleh karenanya, permainan ini mengarahkan kita merangkaikan berbagai keping *puzzle* ini sampai jadi, mencapai gambaran akhir yang utuh yang diminta.

Proses menyusun *puzzle* inilah yang menjadi silaturahmi antar berbagai keping dan makna yang ada. Silaturahmi yang saling memperkuat dan melengkapi. Ibarat *puzzle* tadi, ekonomi syariah adalah silaturahmi bank syariah dengan halal, prinsip keadilan, wakaf, berkah, dan yang lain. Setelah semuanya saling melengkapi maka kita bisa memperoleh gambaran indahnya ekonomi syariah atau ekonomi madani sebagai sebuah ekosistem. Ekosistem yang

di dalamnya masing-masing individu memperoleh manfaat dari silaturahmi yang terjaga.

Inilah ekosistem yang di dalamnya individu dan masyarakat hidup secara madani, hidup dengan menyadari pentingnya kebergantungan, bukan saling mengeksploitasi. Adanya manfaat yang membuat anggota ekosistem termotivasi untuk saling menjaga agar berkesinambungan.

Harapan saya adalah bahwa pengembangan ekonomi syariah merupakan sebuah *road map* yang dalam perjalanannya menyambungkan berbagai kegiatan ekonomi syariah yang sudah, belum ada dan juga yang akan ada. Sebuah *road map* menuju terbentuknya sebuah ekosistem.

Merupakan cita-cita kita agar ekosistem ekonomi syariah ini bisa diwujudkan. Dan agar bisa terwujud tentunya *road map* ke arah ekosistem ini haruslah yang konkret dan dapat dirasakan kehadirannya.

Inilah yang menjadi fokus utama saya selaku kepala Bank Indonesia Jawa Timur dalam pemberdayaan ekonomi syariah khususnya di Jawa Timur. Dalam berbagai interaksi dan diskusi saya selalu menantang para pegiat syariah untuk eksis dan konkret. Kegiatan ekonomi syariah yang tidak hanya teori tetapi juga praktik yang dirasakan masyarakat.

Alhamdulillah di Jawa Timur ini saya bertemu banyak pegiat ekonomi syariah yang membuat saya semangat dan optimis akan masa depan masyarakat yang madani. Termasuk dengan penulis buku ini, Dr. Khairunnisa Musari, yang pertemuan pertamanya

adalah di Jember awal tahun 2017. Bersamaan dengan awal jabatan saya di Jawa Timur.

Saya bersyukur kesempatan saya di Jawa Timur ini adalah rencana Allah swt. yang mempertemukan saya dengan Mbak Nisa dan teman-temannya dalam satu keluarga besar yang sangat hangat dan produktif. Satu keluarga yang tidak berhenti bersilaturahmi dan saling memberi inspirasi serta masukan.

Wa bil khusus dengan Mbak Nisa ini, saya merasakan getaran dan aura semangat yang luar biasa dalam mengembangkan ekonomi madani. Sebuah semangat dan tekad yang jauh melebihi batas-batas keterbatasan yang ada. Mbak Nisa adalah akademisi dan juga sekaligus praktisi yang menambah nilai seorang Khairunnisa dalam geliat ekosistem ekonomi syariah di Jawa Timur.

Tulisan-tulisan dan pemikiran Mbak Nisa ini menggambarkan gelombang semangat yang ada. Berbagai gelombang yang menjadikan Buku ini ibarat sebuah sungai yang selalu mengalir mengantarkan pemikiran menjadi perjalanan ke bahtera masyarakat madani.

Saya katakan sebuah sungai karena saya yakin masih banyak sungai lain yang saling menyambungkan silaturahmi, yang menuju bahtera yang sama, bahtera *rahmatan lil alamin* yang selalu kita cita-citakan dan perjuangkan. Sungai yang tidak akan surut tetapi sebaliknya memberi manfaat bagi daratan yang dilaluinya.

Selamat ya, Mbak Nisa. Buku pertama ini adalah sebuah inspirasi dan langkah awal Mbak Nisa ke arah impian dan cita-cita kita bersama. Bagi pembaca, saya harapkan buku ini akan

menjadi sumber inspirasi dan referensi yang membuat pembaca rindu akan karya-karya Mbak Nisa selanjutnya. Inspirasi yang tidak hanya menghasilkan karya akademis tapi juga karya nyata dalam masyarakat yang syariah dan madani. Maju terus dan berkah.

Difi Johansyah

Bank Indonesia Jawa Timur

KATA PENGANTAR

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah
Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia
Jawa Timur

Alhamdulillah, atas rahmat dan karunia dari Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang, akhirnya hasil goresan pena Mbak Khairunnisa Musari ini dapat hadir di tangan kita semua. Sebuah maha karya yang luar biasa, karena dihasilkan oleh seorang perempuan yang luar biasa pula.

Karya yang dipersembahkan kepada para pembaca ini dibagi dalam dua seri. Buku “Membangun Kekuatan Daerah” adalah seri pertama dari Seri 10 Tahun Menakar Ekonomi Syariah dari Ujung Jawa Timur yang memuat 60 tulisan, dalam rentang waktu 2007-2012. Sedangkan buku “Membangun Masyarakat Madani” adalah seri kedua yang memuat 60 tulisan yang ditulis dalam rentang waktu 2013-2020. Kumpulan tulisan dalam kedua buku ini merupakan hasil kontemplasi dan respon penulisnya atas berbagai persoalan umat selama sepuluh tahun lebih, dari 2007 hingga 2020. Menurut penuturan penulisnya, tulisan-tulisan ini sejatinya mengangkat isu-isu nasional dan global, namun dikemas

bercita rasa lokal dan regional, karena awalnya memang ditujukan kepada pembaca di wilayah Jawa Timur, khususnya di Tapal Kuda.

Buku seri pertama, ingin mengajak pembacanya untuk mengenali kekuatan dan kapasitas sumber daya daerah untuk dikembangkan sehingga berdaya. Sedangkan buku seri kedua, ingin mengajak pembacanya untuk berbuat lebih besar lagi dengan melihat kekuatan dan kapasitas diri lebih luas lagi. *think globally*, *act locally*, jelasnya. Banyak persoalan yang dihadapi dunia hari ini, sejatinya adalah persoalan yang sama yang dihadapi di sekitar kita. Pada tataran inilah, tulisan-tulisan pada buku “Membangun Masyarakat Madani” dapat menjadi *trigger* sekaligus peneguh untuk kita mau berbuat baik untuk sesama, terutama bagi kelompok masyarakat yang termarjinalkan dan turut berpartisipasi membangun ekonomi halal, baik untuk pribadi, keluarga, juga masyarakat, tutur penulisnya.

Seperti disebutkan di awal tulisan ini, bahwa karya yang ada di tangan pembaca ini merupakan mahakarya yang luar biasa, karena dihasilkan oleh seorang perempuan yang luar biasa pula. Predikat “Luar Biasa” pantas disematkan buat karya-karya yang dihasilkan ini, karena lima alasan.

Pertama, buku ini langsung diterbitkan dalam dua seri sekaligus, seri pertama dan seri kedua. Seri pertama, berjudul “Membangun Kekuatan Daerah,” sedangkan seri kedua berjudul “Membangun Masyarakat Madani”. Bagi sebagian penulis, terutama bagi penulis pemula, meluncurkan dua buku sekaligus dalam satu tahun merupakan sebuah kebanggaan dan tidak

banyak yang mampu melakukannya, meskipun ini merupakan kumpulan tulisan yang dihimpun dari tulisan-tulisan yang sudah ada sebelumnya. **Kedua,** jumlah tulisan yang ada dalam kedua buku ini, total berjumlah 120 tulisan dalam rentang waktu sekitar 12 tahun lebih. Ini artinya, penulisnya adalah penulis yang sangat produktif, di mana penulisnya rata-rata mampu menerbitkan 10 tulisan setiap tahunnya. Ini berarti pula, penulisnya mampu mempersembahkan satu tulisan setiap bulannya. Tulisan yang bukan sekadar tulisan, tetapi tulisan yang kemudian dipublikasikan di media massa dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, dan ini tentu sesuatu yang luar biasa.

Ketiga, luasnya bidang yang dikaji beragam dan meliputi berbagai aspek. Mulai dari ekonomi makro, mikro, fiskal, moneter, kebijakan pemerintah, sosial, politik, ekonomi kerakyatan dan problematika yang dihadapi umat, termasuk tentunya bidang ekonomi dan keuangan syariah, perbankan syariah, pariwisata syariah, koperasi syariah, *nanofinance*, umrah dan haji, juga ekonomi sosial Islam, filantropi Islam, *syukuk* dan wakaf, baik dari segi tataran teori maupun praktiknya di lapangan, sekaligus dilengkapi dengan tawaran solutif.

Keempat, tema-tema tulisan yang diangkatkan sangat aktual dan solutif, serta dihiasi dengan bahasa yang lugas, mudah dipahami dan sangat mengasyikkan membacanya. Ketika menikmati satu demi satu tulisan yang ada di kedua buku ini, tidak terasa kita terhanyut dan menyatu dengan ide sang pemiliknya. Dan tanpa terasa waktu telah bergulir sedemikian jauhnya.

Kelima, karya-karya ini ditulis oleh seorang perempuan, bukan oleh seorang pria. Bagi seorang perempuan yang harus berperan ganda dalam kehidupan—berperan sebagai ibu sekaligus seorang istri—melahirkan sebuah tulisan bukanlah perkara mudah, karena waktunya telah habis di ruang dapur, sumur dan kasur. Dalam konteks inilah, hadirnya tulisan-tulisan ini sangat mengagumkan kita semua. Kalau hanya sebagai perempuan biasa, tidak akan mungkin melahirkan karya-karya yang mengasyikkan ini. Jadi dengan demikian, penulisnya masuk kategori Perempuan Luar Biasa.

Julukan sebagai Perempuan Luar Biasa memang pantas disematkan kepada penulis buku ini, karena memang perjalanan hidupnya penuh dengan seabrek aktivitas, amanah dan karya. Selain sebagai dosen Ekonomi Syariah Pascasarjana dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, dalam waktu yang bersamaan ia juga mengemban amanah sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Provinsi Jawa Timur 2017-2021, Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Jember 2019-2022, dan anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Lumajang 2018-2021. Saat ini juga, ia adalah Pemimpin Redaksi dari *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* (IJIEF). Dia juga menjadi inisiator pendirian Rumah Qardhul Hassan untuk membantu pembiayaan masyarakat miskin.

Khusus di lingkungan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Provinsi Jawa Timur,

sepanjang perkenalan saya dengan penulis buku ini—kurang lebih lima tahun lamanya—saya selalu kagum, salut dan terkadang tersipu malu atas komitmen dan perhatiannya. Terutama dalam mensyiarkan dan memajukan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jawa Timur. Misalnya saja, dia tidak akan berpikir banyak dan akan berangkat dari Lumajang menuju Surabaya atau ke tempat lainnya hanya untuk mewakili Pengurus DPW IAEI Jawa Timur, karena tidak ada yang dapat mewakili. Contoh lainnya adalah hampir semua kegiatan yang ada di lingkungan DPW IAEI Jawa Timur, semuanya adalah berkat sentuhan dan orkestrasi dari tangan beliau. Bila kemudian, DPW IAEI Jawa Timur, mendapatkan anugerah penghargaan dari DPP IAEI sebagai DPW terbaik dan teraktif selama dua periode berturut-turut, semuanya itu tiada lain karena komitmen, perhatian dan kepiawaian Mbak Khairunnisa dan beliaulah yang sepantasnya menerima dua penghargaan itu. Terima kasih banyak Mbak Nisa atas semua dedikasi dan kontribusi yang telah dan akan terus disumbangkan buat kemajuan DPW IAEI Jawa Timur.

Khusus dalam bidang tulis-menulis, bila dihitung hingga awal tahun 2020, sudah ada 170 tulisan dari alumni Ilmu Ekonomi Islam Universitas Airlangga ini yang sudah dipublikasikan oleh media cetak lokal dan nasional, majalah, jurnal internasional, dan *book chapter* nasional dan internasional. Ia juga telah mempresentasikan riset-risetnya pada sejumlah konferensi yang disponsori oleh *Islamic Research & Training Institution* (IRTI) – *Islamic Development Bank* (IDB). Melihat pada tulisan-tulisannya,

aktivitas dan kontribusi dalam berbagai hal, maka dia pantas menyandang gelar Perempuan Luar Biasa. Kalau di lingkungan perguruan tinggi, bila ada akademisi yang memiliki prestasi luar biasa, apalagi di bidang akademik, maka kepadanya sudah pantas dianugerahi gelar Guru Besar, Guru Besar bidang ekonomi dan keuangan syariah. Kita doakan bersama semoga Gelar Guru Besar secara legal-formal segera beliau dapatkan.

Sebagai pengakuan atas kiprah dan karya-karyanya, ia mendapat anugerah penghargaan "WOMANi 300 for 2019" sebagai *the Top 300 List of the Most Influential Women in Islamic Business and Finance* dari lembaga analisis keuangan asal Inggris, Cambridge-IFA, bersanding dengan para akademisi, praktisi keuangan syariah, penasihat dan pelaku jasa syariah dari seluruh dunia. Dia terseleksi dalam "WOMANi 300 for 2019" berdasarkan tiga faktor dasar penilaian yang ditetapkan pihak Cambridge IFA, yaitu kepemimpinan, advokasi dan pengakuan dari industri, dan khusus bagi akademisi, penilaian juga difokuskan pada seberapa besar kontribusi keilmuan dan riset yang dilakukan.

Atas hadirnya buku ini di tangan kita semua, mewakili seluruh Keluarga Besar DPW IAEI Jawa Timur kami sampaikan salam hangat dan salut kepada Mbak Khairunnisa, semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mampu mengikuti jejak beliau. Kami selalu berdoa, kiranya Mbak Khairunnisa Musari, bersama suami dan anak-anak semua, selalu diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah dan barokah serta semua yang dicita-citakan dan diimpikan mendapat rida dari Yang Mahakuasa. Sekali lagi, kami sampaikan

selamat dan sukses selalu buat Mbak Khairunnisa Musari bersama Keluarga.

Makarya Binangun, Waru,
Sidoarjo, 21.02.2020
Mewakili Keluarga Besar
DPW IAEI Jawa Timur
Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.

KATA PENGANTAR

Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Pimpinan Wilayah Jawa Timur

"Dakwah Ekonomi"

Setiap muslim memiliki kewajiban dakwah. Tak terkecuali perempuan. Ini sesuai hadis Rasulullah Muhammad, *ballighuu 'anny walau aayatan. Fiil amar* (perintah) ini bermakna umum, meski menggunakan *khitab* laki-laki.

Kesadaran itulah yang dimiliki penulis buku ini, Dr. Khairunnisa, yang saya kenal sejak tahun 2000-an. Saat saya masih bekerja di Jawa Pos, dan Iis—panggilan akrabnya—masih berstatus mahasiswi teknik industri Ubaya. Saat bertemu lagi sekian tahun kemudian, saya lebih mengenal Iis sebagai pribadi yang menggebu-gebu. Menikah, ambil master dari ITS, semangatnya semakin menyala-nyala.

Awalnya, perjuangan Iis adalah "melawan" ketidakadilan dunia kerja terhadap perempuan. "Saya ingin membuktikan bahwa perempuan yang sudah menikah dan punya anak itu bisa bekerja profesional," begitu katanya. Maka, perjalanan perjuangan itu dimulai dengan bekerja jadi konsultan, lalu wartawan Jawa

Pos, dan televisi di Jakarta, yang rata-rata "menolak" hanya karena dia sudah menikah dan punya anak.

Singkat cerita, saya bertemu lagi saat sama-sama mengambil Program Doktor Ekonomi Islam di Universitas Airlangga. Saat itu, Iis kuliah di Surabaya sambil mengurus anak-anaknya sendiri, yang kini berjumlah lima. Luar biasa. Lulus pertama seangkatan, dia sempat hendak melanjutkan perjuangannya melalui partai dan berjuang untuk ekonomi Islam, namun akhirnya ia memilih berlabuh di IAIN Jember sebagai staf pengajar.

Tulisan-tulisan dalam buku ini adalah bagian dari dakwah ekonomi Iis. Sebagai mantan wartawan dan dosen ekonomi syariah, Iis mencoba berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dari daerah, utamanya Jember-Lumajang. Sebagian besar tulisannya pernah dimuat media lokal, Radar Jember, anak usaha Jawa Pos. Tulisan-tulisannya mencoba untuk mengkritisi hal-hal yang ada di masyarakat dan pemerintahan, sekaligus mencarikan solusinya.

Sebagai pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Lumajang, tampaknya, Iis begitu memahami motto MES. Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Di antara puluhan tulisannya, sebagian adalah bagian dari dakwah ekonomi Islam. Tulisannya ringan, tapi bernas, menjadikan siapa pun yang membaca bisa memahami fenomena ekonomi yang terjadi dan bagaimana seharusnya menyikapinya.

Dr. Imron Mawardi, SP., MSi.

Ketua Umum MES PW Jawa Timur

KATA PENGANTAR PENULIS

Salah satu sarana untuk memelihara ilmu adalah dengan menulisnya. Ali bin Abi Thalib r.a. memberi nasihat, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Imam Syafi'i mengumpamakan ilmu yang tidak ditulis sebagai orang bodoh yang memburu kijang liar di hutan, mendapatkannya, tapi tidak mengikatnya. Sayyid Quthb mengatakan, *"Satu peluru hanya menembus satu kepala, tapi satu telunjuk (tulisan) bisa menembus jutaan kepala."*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *'Azza wa Jalla*. Atas izin-Nya, berbagai tulisan yang selama 10 tahun terakhir menghiasi koran dan dunia maya dapat terangkum dalam buku berseri ini. Buku "**Membangun Masyarakat Madani"** adalah seri kedua dari Seri 10 Tahun Menakar Ekonomi Syariah dari Ujung Jawa Timur yang memuat 60 tulisan. Sebagian besar tulisan dalam Seri 10 Tahun Menakar Ekonomi Syariah dari ujung Jawa Timur sudah dimuat pada media cetak lokal dalam durasi waktu 2013 hingga awal 2020. Tulisan-tulisan ini tidak hanya mencermati isu-isu nasional dan global, tetapi juga turunannya kepada daerah. Buku "**Membangun Masyarakat Madani"** ingin mengajak pembacanya untuk berbuat lebih besar lagi dengan melihat kekuatan dan kapasitas diri lebih luas lagi. *Think globally, act locally*. Banyak

persoalan yang dihadapi dunia hari ini, sejatinya adalah persoalan yang sama yang dihadapi sekitar kita. Pada tataran inilah, tulisan-tulisan pada buku "**Membangun Masyarakat Madani"** dapat menjadi *trigger* sekaligus peneguh untuk kita mau berbuat baik untuk sesama, terutama bagi kelompok masyarakat yang termarjinalkan, dan turut berpartisipasi membangun ekonomi halal, baik untuk pribadi, keluarga, juga masyarakat.

Lewat tulisan, saya bersuara. Karena dengan pena, saya menjadi ada. Namun, menulis sejatinya bukan sekadar bicara. Menulis, sejatinya bukan sekadar mengurai kata-kata. Menulis, sejatinya juga adalah ibadah untuk membaca ayat-ayat *kauliyah* dan *kauniyah*-Nya. Menulis, sejatinya juga juga adalah dakwah. Menulis, sejatinya juga adalah wakaf. Jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kurang benar, kurang baik pada tulisan-tulisan ini, sesungguhnya semua itu adalah karena kelemahan saya sebagai manusia biasa. Jika terdapat kebaikan dan kebermanfaatan, semua itu sejatinya adalah dari Allah. Semoga tulisan-tulisan yang terangkum dalam buku "**Membangun Masyarakat Madani"** ini dapat berkontribusi pemikiran dan menjadi ikhtiar nyata dari saya untuk ambil bagian dalam membangun peradaban masyarakat madani.

Terima kasih tidak terhingga kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Timur, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Jawa Timur, dan Pimpinan Wilayah (PW) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Timur yang telah berkenan memberi kata pengantar untuk buku ini. Pentingnya kata pengantar dari *panjenengan*

semua selaku mitra dalam membumikan ekonomi syariah di Jawa Timur menjadi parameter bagi saya untuk memperbaiki diri. Semoga ekonomi syariah ke depan dapat berbuat nyata untuk masyarakat. Buku ini menjadi bukti cinta dari pegiat ekonomi syariah di Jawa Timur untuk Indonesia.

Khairunnisa Musari

Lumajang-Jember, Maret 2020

DAFTAR ISI

2013

1
KAKAO DAN COKELAT UNGGULAN JEMBER[1]

Bukan tiba-tiba jika saya ingin kembali menulis tentang kakao dan cokelat. Sejak lebaran kemarin, kakao dan cokelat memang sudah membayangi isi kepala saya untuk dituangkan dalam tulisan. Berawal dari hadiah parsel kue dari Dokter Dita, seorang Spesialis Kandungan, yang berupa kurma isi mente berlapis cokelat kepada suami saya. Tak lama berselang, Dokter Rini, seorang Spesialis Patologi Klinis, yang juga bersuamikan Dokter Hasan, seorang Spesialis Tulang, kembali memberikan tiga kotak tempat makan plastik yang masing-masing berisikan cokelat dengan varian berbeda untuk putri-putri saya.

Setelah itu, lagi-lagi kami memperoleh hadiah cokelat. Kali ini dari sahabat saya Madha Yudi, seorang pegawai di Inspektorat Kabupaten Jember, yang mengirimkan setoples cokelat buatan Puslitkoka (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia). Madha

1 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 16 September 2013. Judul asli "Menggagas Kakao dan Cokelat sebagai Komoditas Unggulan Jember, Mungkinkah?"

tidak tahu bahwa kami sebenarnya sering membeli cokelat Puslitkoka. *Nah*, lebaran kemarin, Madha ternyata memborong cokelat untuk dikirimkan kepada sejumlah temannya yang berada di luar kota, salah satunya adalah untuk putri-putri saya. "*Biar sekalian memperkenalkan cokelatnya Jember, Mbak Iis,"* katanya.

Terakhir, awal September, usai mengikuti rangkaian kegiatan *OJK Goes to Pesantren* di Ma'had Tahfiz Quran Ibnu Katsir, tiba-tiba seorang teman di jejaring *facebook* yang belum pernah saya temui di dunia nyata, mendatangi saya dan menyerahkan lima toples cokelat dengan warna yang berbeda.

"Lho, kok tiba-tiba ngasih cokelat sampai banyak begini? Apa maksudnya nih?" tanya saya pada Mas Ahmad Nur Hasan.

"Saya ingin menunjukkan cokelat buatan saya ke Mbak Iis. Mbak Iis bisa menyicipi cokelat ini. Saya ingin buktikan bahwa saya sungguh-sungguh ingin membuat cokelat khas Jember. Kita belum punya produk cokelat khas sini, Mbak. Padahal ada Puslitkoka. Saya butuh masukan Mbak Iis," tuturnya.

"Masukan seperti apa yang Mas Ahmad butuhkan dari saya? Tentang bagaimana menjualnya? Tentang pengemasannya? Atau tentang bagaimana memperoleh bubuk kakaonya? Apa enggak salah minta masukan ke saya? Ini bukan bidang saya. Mmm ... buat cokelat ini, bubuk kakaonya beli di mana? Produknya siapa?" tanya saya bertubi-tubi.

"Beli di toko, Mbak. Ya ... bubuk kakaonya ya seperti yang banyak dijual di toko-toko itu, Mbak. Iya Mbak, saya butuh masukan apa saja dari Mbak Iis. Apa saja. Semuanya ...," jawab Mas Ahmad.

Hmph ....

Baru kali ini saya memperoleh hadiah cokelat dengan perasaan berbeda. Menyicipi cokelat pemberian Mas Ahmad selalu diikuti dengan perasaan campur aduk dan pikiran yang melanglang buana. Urusan rasa, agar objektif, saya minta suami dan anak-anak untuk menyicipinya. Semua satu suara. ENAK. Cokelat tersebut kini masih bersisa. Sengaja dihemat karena cokelat itu bukan hadiah, tetapi ada amanah di baliknya. Saya berharap akan ada sesuatu yang bisa saya bagi kepada Mas Ahmad sebelum cokelat itu benar-benar habis dicicipi oleh banyak orang.

Jujur saja, setiap kali melihat lima toples cokelat tersebut, yang terbayang di wajah saya adalah Pak Mirfano, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinkop & UMKM) Kabupaten Jember. Setahun lalu, saya diundang Pak Mirfano dalam *Cocoa Morning* di Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Semangatnya dalam menggagas kakao sebagai komoditas unggulan Jember dan upayanya untuk membumikan minuman cokelat agar menjadi minuman sehari-hari sekelas kopi atau susu patut diapresiasi. Bahkan, upaya beliau saat itu untuk mengumpulkan *stakeholders* dari industri kakao di Jember untuk menyamakan visi misi, sangat saya hargai. Saya tidak tahu bagaimana progres dari wacana yang beliau paparkan untuk mengangkat kakao dan cokelat sebagai ikon baru bagi Jember itu.

Setelah lama tak memperoleh kabar berita dari Pak Mirfano dan sempat terpikir bahwa gagasan tersebut mungkin pupus, tiba-tiba kembali saya dipertemukan dengan Ketua Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI) Pusat. Saya juga tidak tahu mengapa Sang Ketua APKAI *belanin* menemui saya jauh-jauh ke Lumajang,

padahal kami tidak pernah saling mengenal. Usai mengikuti Simposium Nasional tentang Kakao selama lima hari di Padang, Ketua APKAI meluangkan datang ke rumah Lumajang sebelum pulang kembali ke daerah asalnya di Blitar. Lagi-lagi gagasan tentang kakao dan cokelat yang dituturkannya pada saya. Kali ini, gagasannya adalah menjadikan Jember sebagai *pilot project* untuk membangun industri hilir kakao.

Dukungan yang beliau inginkan dari saya hanyalah sebuah proposal. Berbekal keinginan untuk dapat memberi nilai tambah bagi petani dan produknya melalui penyediaan infrastruktur dan edukasi untuk menjadikan produk biji kakao menjadi produk setengah jadi, kemudian menciptakan pasar domestik melalui sejumlah diversifikasi lini usaha sebagai percontohan dalam membangun industri hilir kakao, serta keinginan untuk menjadikan petani berjaya dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri melalui jaminan pasar dan harga jual petani yang kompetitif dengan harga pasar internasional sehingga dapat meningkatkan nilai tukar petani (NTP) kakao, saya tentu dengan suka cita membantu misi mulia tersebut dalam tulisan.

Tapi ... lagi-lagi semangat membara itu tak terhirup kembali. Saya juga tidak tahu bagaimana progres dari cita-cita untuk menjadikan kakao dan cokelat menjadi komoditas unggulan di tapal kuda ini. Sampai akhirnya, dalam dua bulan terakhir ini, beruntun saya memperoleh hadiah cokelat dari orang-orang istimewa. Dan ... pemberian lima toples dari Mas Ahmad membuat saya berkeinginan kuat untuk menyapa kembali mereka-mereka

yang pernah menggagas kakao dan cokelat sebagai ikon baru komoditas unggulan Jember dan sekitarnya.

Sebagai salah satu komoditas perkebunan yang penting bagi perekonomian nasional, potensi kakao belum tergarap secara optimal. Banyaknya perusahaan asing yang melirik bisnis kakao di Indonesia menunjukkan bahwa bisnis ini sesungguhnya merupakan lahan subur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Setidaknya ada tiga alasan utama bagi Kabupaten Jember untuk merespon kakao sebagai salah satu ikon daerah yang baru.

Pertama, Jember selama ini lebih dikenal sebagai kota tembakau. Namun mengingat prospek tembakau yang selalu sarat kontroversi, pemerintah daerah tampaknya perlu mencari ikon baru yang dapat mengangkat keunggulan potensi lokal ke kancah nasional dan dunia.

Kedua, Jember memiliki potensi sebagai pemasok kakao hasil perkebunan rakyat. Bahkan di hampir semua wilayah tapal kuda juga ikut menjadi pemasok. Sayang, produksi kakao Jember menunjukkan kecenderungan turun. Padahal, Jember sebelumnya merupakan penopang utama produksi kakao Indonesia yang dikirim ke Amerika dan Eropa. Setidaknya ada enam lokasi di wilayah Jember yang memiliki karakter geografis yang sesuai untuk dijadikan lahan pengembangan kakao. Mumbul Sari, Umbul Sari, Keputren, Kotta Blater, Jenggawah, dan Silo adalah wilayah yang sementara ini terpetakan dapat menjadi sentra produsen kakao.

Ketiga, kehadiran Puslitkoka merupakan faktor utama sekaligus faktor unggulan yang seharusnya mampu menjadikan

Jember eksis dalam industri kakao nasional dan internasional. Visi Indonesia yang ingin menjadi produsen kakao terbesar di dunia merupakan *trigger* bagi Jember untuk muncul dalam ranah global. Industri kakao harusnya dapat mengambil peran dalam mendorong pengembangan wilayah dan agroindustri.

Ya, semoga sapa melalui tulisan ini dapat kembali menggugah semangat dari *stakeholders* untuk bersilaturahmi dan bertukar pikiran untuk kembali merapikan tebaran *puzzle* tentang bagaimana mengembangkan kakao dan cokelat sebagai komoditas unggulan daerah. Paling tidak, mohon dukungannya agar Mas Ahmad-Mas Ahmad di wilayah ini yang memiliki keinginan kuat untuk menjadikan cokelat sebagai produk unggulan daerah dapat terwujud. *Wallahua'lam bish showab.*

2
MENAKAR PANGAN HALAL DI INDONESIA[2]

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi…" (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

Akhir Agustus lalu, pemberitaan tentang sebuah rumah makan terkenal yang dikabarkan menggunakan minyak babi dan angciu *(red wine)* menyeruak. Berawal dari seorang Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis di sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terkemuka di Surabaya mengirimkan email kepada sebuah situs Islam dengan menceritakan pengalamannya ketika hendak mengajukan *franchise* pada rumah makan tersebut. Persoalan menguak ketika kontrak perjanjian hendak dibuat, sang pemilik *franchise* mensyaratkan penggunakan minyak babi dan angciu dalam sejumlah masakan.

Bagi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini, kehalalan pangan nyatanya masih memiliki banyak ruang

2 Dimuat Republika, Opini, 27 September 2013, Hlm. 6.

dan peluang untuk diabaikan. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam di Indonesia nyatanya tidak serta merta membuat pengusaha rumah makan menghormatinya dengan menyediakan makanan halal sebagaimana yang harus dipatuhi oleh seorang muslim. Dalam bahasa Alquran, makanan atau *tha'am* adalah segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi. Karena itu, minuman pun dapat dimasukkan dalam konteks *tha'am*. Dalam Islam, di dalam Alquran telah dijelaskan agar umat Islam memakan makanan yang halal dan *thayyib.*

Industri Pangan

Mengacu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, makanan atau pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Dengan jumlah penduduk muslim sekitar 89,1 persen, sudah selayaknya Indonesia menjamin ketersediaan pangan yang halal dan *thayyib.* Kesadaran akan pangan yang halal dan *thayyib* merupakan salah satu dampak ikutan dari *booming* industri perbankan dan keuangan berlabel syariah. Ketersediaan pangan halal dan *thayyib* menjadi potensi, peluang, sekaligus tantangan bagi kalangan dunia usaha untuk meningkatkan kualitas produknya

dengan berbasis syariah pula. Dalam perkembangannya, halal dan *thayyib* kini bukan saja menjadi simbol agama dan acuan normatif semata, tetapi juga menjadi simbol bagi kualitas, higienitas, dan keamanan bagi konsumen.

Di Inggris, ketersediaan produk daging halal mencapai 15 persen dari seluruh daging yang dijual dan dipasok untuk penduduk muslim yang hanya sebanyak 4 persen dari total populasi penduduk. Menariknya, sisanya, ternyata juga ikut dikonsumsi oleh penduduk nonmuslim. Ketertarikan masyarakat nonmuslim mengkonsumsi daging berlabel halal didorong oleh faktor kualitas daging yang dinilai kaya rasa, lebih lembut, dan diyakini lebih aman dan lebih higienis.

Industri pangan halal di Indonesia dan dunia memang kini berada pada perkembangan yang kian menggembirakan. Kesadaran konsumen untuk menyeleksi makanan semakin tinggi. Saat ini, pangsa pasar produk halal global diperkirakan hampir mencapai USD 800 miliar per tahun dan menjadi potensi yang besar bagi para produsen produk halal di seluruh dunia. Negara muslim menjadi target segmen pasar yang efektif untuk dibidik, terutama yang berada di wilayah Asia yang saat ini memiliki penduduk muslim terbesar. Tahun 2050, diperkirakan benua Eropa yang akan memiliki penduduk muslim terbesar di dunia.

Reorientasi menjadi Produsen

Tidak bisa dipungkiri, Indonesia merupakan *the largest market* untuk industri pangan halal. Sayang, industri pangan di negara ini masih banyak yang belum bersertifikasi halal. Jika

jumlah perusahaan kosmetika dan *toiletries* di Indonesia yang bersertifikat halal berkisar 3 persen, maka industri pangan yang bersertifikasi halal ternyata tidak sampai 1 persen. Sedihnya lagi, Indonesia saat ini baru sebatas menjadi target pangsa pasar potensial bagi impor produk pangan halal. Kesadaran Indonesia untuk mentransformasi diri menjadi produsen pangan halal masih minim. Hal ini salah satunya ditandai oleh ketidakmampuan menyediakan sumber pangan berbasis domestik. Tingginya impor bahan pangan mengindikasikan bahwa Indonesia tak mustahil akan tertinggal dibanding negara nonmuslim yang memiliki kemampuan lebih untuk mengekspor bahan pangannya ke Indonesia dan mengantongi sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Upaya pemerintah untuk melakukan ekspansi ekspor pangan halal ke sejumlah negara yang memiliki penduduk muslim mayoritas, tentu patut diapresiasi. Indonesia memiliki potensi produk makanan dan minuman yang halal untuk mengisi pasar negara muslim lainnya. Indonesia pun memiliki potensi menjadi pusat halal dunia. Standar halal Indonesia sudah diterima, diakui, dan diimplementasikan oleh lebih 43 lembaga dunia dari 22 negara. Namun demikian, nyatanya ketersediaan bahan pangan halal di dalam negeri sendiri nyatanya tidak begitu mudah untuk ditemukan. Membanjirnya produk pangan impor, termasuk rumah makan dengan label impor, tidak semuanya patuh terhadap pentingnya kehalalan.

Melihat besarnya pendapatan industri pangan nasional dan global, maka sesungguhnya terdapat pula peluang pendapatan

bagi industri halal mengingat jumlah penduduk muslim dunia saat ini diperkirakan sudah lebih dari 1,57 milyar penduduk di dunia yang merepresentasikan 23 persen dari total keseluruhan penduduk bumi. Dalam sebuah laporan berjudul *Mapping the Global Muslim Population*, 1 dari 4 orang di dunia adalah muslim. Dengan demikian, bagi Indonesia, peluang untuk mengakses pasar pangan halal global terhampar di depan mata. Tapi jangan bermimpi untuk menjadi pusat pangan halal dunia jika urusan domestik masih belum tertangani dan terjamin ketersediaannya. *Wallahua'lam bish showab.*

3
DEINDUSTRIALISASI GULA TEBU RAKYAT[3]

Sebuah pesan masuk ke *mobil phone* milik saya sekitar tiga pekan lalu:

"Bu, harga gula lagi jatuh. Karena gula rafinasi impor. Gula rafinasi impor sekarang sudah masuk wilayah konsumsi. Padahal peraturannya kan gula rafinasi hanya untuk ranah produksi makanan minuman. Ini petani sampai demo ke Jakarta, tapi gak ngefek. *Gak diperhatikan sama pemerintah. Padahal Jatim kan penghasil gula terbesar. Sekarang gula-gula numpuk di gudang. Kuota gula keluar Jatim dibatasi. Padahal produksi gula Jatim dari PTPN X dan XI bisa menutup 35persen kebutuhan gula nasional. Buatkan tulisan dong, Bu…".*

Pesan pendek itu berasal dari salah satu pegawai sebuah pabrik gula (PG) di Jember. Saya tidak tahu, apa yang sesungguhnya ia harapkan dengan tulisan saya yang pasti tak punya taring untuk menggugah regulator di Jakarta. Ya, persoalan

3 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 17 Desember 2013.

gula adalah masalah nasional. Komoditas yang sangat politis dan strategis. Saya juga bukan pelaku atau pengamat pergulaan yang memiliki kemampuan membangun kekuatan untuk memobilisasi aksi untuk menekan pemegang kebijakan. Namun demikian, saya menangkap adanya harapan dari pengirim pesan tersebut agar masyarakat mengetahui tentang keresahan petani tebu dan pegawai pabrik gula berbasis tebu rakyat yang terimbas oleh gula rafinasi impor. Terlebih lagi, wilayah Lumajang, Jember, dan Bondowoso memiliki basis petani tebu yang di masing-masing wilayah juga memiliki PG.

Ancaman Gula Rafinasi Impor

Saya membahasakan situasi yang tengah terjadi saat ini sebagai deindustrialisasi gula tebu rakyat. Salah satu pelaku utamanya adalah (oknum) pemegang kebijakan. Cerita tentang merembesnya gula rafinasi untuk keperluan industri ke pasar gula konsumsi sesungguhnya bukan cerita baru. Cerita ini adalah versi lain atau cerita turunan dari persoalan pergulaan nasional.

September lalu, pemberitaan tentang ribuan petani tebu dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) berunjuk rasa di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) sempat mewarnai media massa. Petani menghambur-hamburkan gula pasir impor dan menginjak-injaknya. Tuntutannya adalah agar Kemendag menekan impor gula rafinasi. Teriakan salah satu orator yang sempat menjadi judul salah satu media cetak adalah "Gantung Menteri Perdagangan!"

Ya, harga gula pada tahun 2013 ini mengalami keanjlokan. Beredarnya gula rafinasi impor di pasar konsumsi ditengarai sebagai penyebabnya. Di Yogyakarta, petani tebu sampai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa pasar tradisional dan memang menemukan peredaran gula rafinasi di sana. Tak pelak lagi, akibat perembesan ini, gula produksi milik pabrik gula berbasis tebu rakyat menjadi kalah bersaing karena harganya lebih mahal dibandingkan gula rafinasi. Gula konsumsi hasil produksi menjadi tidak terserap. Inilah yang meresahkan para petani tebu maupun pegawai pabrik gula berbasis tebu rakyat!

Awal Oktober, kembali mencuat pemberitaan bahwa Kemendag menemukan dari 11 perusahaan yang mengimpor gula rafinasi untuk keperluan industri dengan total kapasitas lima juta ton, terdapat indikasi lima perusahaan memasarkan gula rafinasi ke pasar gula konsumsi. Saat itu, belum bisa terungkap berapa jumlah gula rafinasi yang merembes ke pasar. Namun demikian, mengacu informasi dari Dewan Gula Indonesia (DGI) yang memperkirakan kebutuhan konsumsi industri besar dan menengah pada 2013 hanya sebesar 2,64 juta ton, maka terindikasi adanya kelebihan 2,36 juta ton gula rafinasi di pasar domestik yang bisa mengalir ke pasar konsumsi.

Sejauh ini Kemendag hanya menyatakan akan mengenakan sanksi berupa pencabutan izin Importir Produsen (IP) dan Importir Terdaftar (IT), bahkan bisa dilakukan pembekuan izin, bila ditemukan bukti pelanggaran dan praktik nakal yang menyebabkan merembesnya gula rafinasi ke pasar-pasar di Indonesia. Pernyataan Kemendag ini tak banyak menuai simpatik

dari petani tebu. Betapa tidak, mengalirnya gula rafinasi impor ke pasar konsumsi sesungguhnya adalah dampak dari kebijakan pemerintah sendiri. Pemerintah memberi insentif kepada importir gula rafinasi. Kemendag bahkan memberi izin pendirian sejumlah pabrik gula rafinasi di Indonesia.

Deindustrialisasi

Pemerintah tampaknya memang memberlakukan standar ganda dan tidak fokus membangun kemandirian di bidang gula. Di satu sisi, pemerintah mencanangkan swasembada gula pada tahun 2009 dan kemudian *molor* ke 2014. Namun, di sisi lain, pemerintah justru memberi izin impor dan pendirian pabrik gula rafinasi yang berpotensi menggagalkan program swasembada gula. Di satu sisi, pemerintah menggaungkan semangat untuk revitalisasi pabrik gula di Indonesia. Tapi, di sisi lain, kebijakan pemerintah untuk gula rafinasi justru berpotensi menurunkan produksi pabrik gula akibat produknya yang tidak terserap pasar.

Ya, inilah salah satu penyebab terjadinya deindustrialisasi yang disebabkan kebijakan (oknum) otoritas itu sendiri. Ditambah lagi paket Bali hasil pertemuan *World Trade Organization* (WTO) yang baru saja menyepakati poin fasilitasi perdagangan. Dengan kesepakatan ini, maka salah satu dampak ikutan yang akan terjadi adalah kemudahan bagi produk negara maju untuk masuk ke Indonesia.

Tak pelak lagi, liberalisasi pertanian dan perdagangan menjadi semakin nyata. Meski kita memiliki Undang-Undang (UU) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mewajibkan

pemerintah mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan melakukan pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri, tapi melihat fenomena yang banyak terjadi, saya pun tidak begitu yakin di tataran implementasi UU tersebut akan berlaku.

Meski kita juga memiliki UU Pangan yang menyatakan impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri, saya pun tidak begitu yakin regulasi itu akan mulus di lapangan mengingat realitas yang ada justru menunjukkan membanjirnya buah-buahan dan sayur-mayur impor.

Mungkin rekomendasi yang akan saya tulis tentang apa yang seyogyanya dilakukan pemerintah terkait dengan gula nasional akan bak kata berbusa. Pasalnya, saya yakin, para pelaku pergulaan dari hulu juga sudah terlebih dahulu menyuarakan ini. Ya, hentikan peredaran gula rafinasi di pasar konsumsi, audit distribusi gula rafinasi, cabut izin usaha pabrik gula rafinasi, batasi dan awasi aktivitas impor gula rafinasi, serta hentikan penyelundupan gula ilegal. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pun pernah menyuarakan hal ini.

Jika pemerintah pusat tak bergeming, mungkin pemerintah daerah perlu membangun keberanian untuk melindungi petani tebu rakyat dan PG di daerahnya dengan penegakan hukum terhadap peredaran gula rafinasi di pasar konsumsi. Kita semua tentu tidak menghendaki pabrik gula di Pulau Jawa, terutama di wilayah Lumajang, Jember, dan Bondowoso, akan menyusul PG

milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV di Makasar yang tutup karena terimbas PG rafinasi yang didirikan di wilayahnya kan? *Wallahua'lam bish showab.*

4
PEREMPUAN DAN LITERASI KEUANGAN[4]

Upaya membuka peluang ekonomi bagi perempuan merupakan isu global yang saat ini mengemuka. Pentingnya meningkatkan literasi keuangan diyakini menjadi kunci pemberdayaan ekonomi perempuan. Kesadaran tentang perlunya mengenali kebutuhan perempuan melalui edukasi keuangan telah dideklarasikan dalam Pertemuan Pemimpin G-20 pada Juni 2012.

Sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2015 dalam *Millenium Development Goals* (MDG's) adalah mendorong pemberdayaan perempuan, Indonesia dalam hal pendidikan telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Hal ini tercermin salah satunya dengan membaiknya rasio partisipasi pendidikan dan tingkat melek huruf penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki, kontribusi

---

4 Dimuat Jawa Pos, Opini, 28 Desember 2013. Ditulis dalam Rangka Hari Ibu dan Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan.

perempuan dalam sektor nonpertanian, serta partisipasi perempuan di bidang politik dan legislatif.

Namun demikian, di bidang ekonomi, perempuan Indonesia masih mengalami banyak ketertinggalan. Hal ini ditandai di antaranya dengan rendahnya akses perempuan terhadap lembaga keuangan. Dalam struktur angkatan kerja, perempuan memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibanding laki-laki.

Hasil Studi dan Survei

Studi *International Network and Financial Education* (INFE) dan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) tahun 2013 berjudul *Addressing Women's Needs for Financial Education* menunjukkan kebutuhan akan literasi keuangan bagi perempuan sangat akut dalam isu kesetaraan gender. Studi ini menunjukkan bahwa wanita memiliki pengetahuan keuangan yang lebih rendah daripada laki-laki di sejumlah besar negara, baik negara maju dan berkembang.

Studi ini menyimpulkan perempuan tidak hanya memiliki pengetahuan keuangan yang lebih rendah daripada laki-laki, tetapi juga memiliki kurang ketertarikan sekaligus kurang kepercayaan diri dan keterampilan terhadap masalah keuangan dibanding laki-laki. Meski perempuan lebih baik dalam menjaga keuangan daripada laki-laki, namun perempuan cenderung rentan dalam beberapa aspek perilaku keuangan, termasuk dalam hal menabung dan memilih produk keuangan. Di negara berkembang, perempuan cenderung menabung secara informal dibanding laki-laki. Ketika hendak memilih produk keuangan, wanita cenderung

kurang piawai dalam memilih lembaga keuangan atau layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya, termasuk untuk mengambil keputusan keuangan.

Sementara itu, survei yang dilakukan Bank Indonesia (BI) pada 2012 menunjukkan literasi keuangan di Indonesia dipengaruhi oleh usia, tingkat pendidikan, gender, dan jarak rumah ke kantor cabang bank. Hasil survei juga menunjukkan perempuan lebih dominan dalam mengelola keuangan meskipun laki-laki lebih paham tentang keuangan. Senada dengan itu, survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2013 memperlihatkan literasi keuangan di kalangan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Survei yang dilakukan di 20 provinsi dan diikuti 8 ribu responden itu menunjukkan hanya 19 persen perempuan yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan perilaku literasi keuangan. Jumlah itu lebih sedikit dibanding laki-laki yang memiliki literasi keuangan sebesar 25 persen.

Kesejahteraan Perempuan

Jumlah perempuan berusia di atas 60 tahun di Indonesia lebih besar dibandingkan laki-laki. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2009 menunjukkan ada 10,4 juta lanjut usia (lansia) perempuan dan 8,8 juta lansia laki-laki. Sebagian lansia perempuan itu telantar dan menerima bantuan pemerintah. Berdasarkan catatan Kementerian Sosial tahun 2011, penerima jaminan sosial lansia sebesar 71 persen perempuan dan sisanya laki-laki. Banyaknya lansia perempuan ini kian mengukuhkan bahwa literasi keuangan menjadi keniscayaan bagi perempuan

muda dan produktif untuk mempersiapkan masa tua agar tidak termarjinalkan.

Bagi pekerja migran Indonesia, literasi keuangan menjadi penting dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan dana remitansi yang mereka kirim ke Indonesia. Laporan BI menunjukkan pada Q1-2012 terdapat lebih dari empat juta pekerja migran Indonesia di luar negeri yang 68 persen di antaranya adalah perempuan yang sebagian besar berasal dari daerah pedesaan dan dari keluarga miskin. Mereka umumnya memiliki akses informasi tentang layanan keuangan, seperti saluran pengiriman uang, tabungan, kredit, dan asuransi, namun memiliki keterbatasan pengetahuan perencanaan keuangan dan manajemen.

Dengan menimbang peran perempuan yang cukup dominan dalam mengelola keuangan rumah tangga, kiprahnya dalam sektor usaha, jumlahnya yang besar dalam komposisi lansia maupun pekerja migran Indonesia, maka perempuan perlu diberi kesempatan untuk meningkatkan literasi keuangan dalam rangka membangun kemandirian ekonomi.

Kajian Hung, Yoong & Brown (2012) berjudul *Empowering Women through Financial Awareness and Education* menunjukkan rendahnya literasi keuangan perempuan memiliki potensi untuk mengurangi: (1) partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi; (2) kekuatan ekonomi rumah tangga; (3) transmisi pengetahuan kepada generasi masa depan; dan (4) memperburuk kesenjangan sosial. Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan publik yang dilakukan banyak negara memberi beban yang lebih besar

atas keputusan keuangan jangka panjang kepada konsumen individu. Hal ini yang membuat kebutuhan perempuan atas keterampilan literasi keuangan meningkat karena perempuan lebih rentan daripada laki-laki.

Dengan demikian, perempuan sebagai individu memiliki kepentingan untuk meningkatkan literasi keuangan dalam rangka memperbaiki manajemen keuangan secara personal dan mengembangkannya melalui pemilihan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Sebagai istri, perempuan memiliki kepentingan untuk terampil mengelola anggaran rumah tangga sehingga dapat mengalokasikan dana yang cukup bagi anggota keluarga untuk mengakses layanan dasar pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Lebih daripada itu, perempuan sebagai guru pertama dan utama bagi buah hatinya memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan keuangan sejak dini guna menciptakan generasi yang memiliki penguasaan ilmu serta terampil mengelola keuangan. Ya, edukasi keuangan akan efektif jika diperkenalkan sejak dini dan diyakini menjadi jalan ampuh untuk meningkatkan kecerdasan dan mengakselerasi pemberdayaan perempuan dalam memperbaiki kesejahteraan hidup diri, keluarga, dan masyarakat.

2014

5

ZAKAT UNTUK EKONOMI BENCANA[5]

Pekan lalu, saya menghadiri ujian terbuka bupati Mamuju di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Saya termasuk dari 15 orang yang menjadi undangan akademik. Hari itu kampus Pasca benar-benar tumpah ruah. Dari 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Kabupaten Mamuju, tidak ada satu pun kepala dinas yang absen menghadiri ujian terbuka Sang Bupati dua periode tersebut.

Mungkin ada sekitar 300 orang lebih yang datang. Ruangan untuk undangan umum dan semua kursi yang berada di sepanjang koridor kampus Pasca dipenuhi oleh para tamu. Nuansa warna biru cukup kental. Beberapa di antaranya bermotif perahu pinisi. Selidik penuh selidik, ternyata Bupati Mamuju ini juga adalah petinggi partai politik berkuasa di daerahnya.

Bukan soal politik yang ingin menjadi bahan diskusi tulisan saya kali ini. Saya tertarik dengan bahasan zakat yang menjadi judul disertasi Sang Promovendus tersebut. Dalam paparannya,

5 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 28 Januari 2014.

Sang Promovendus menceritakan perolehan zakat dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Mamuju sebelum dan sesudah diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Mamuju.

Tahun 2008, pengumpulan zakat terutama dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) dan individu-individu yang menyalurkan zakatnya pada BAZDA sebanyak Rp212,625 juta. Tahun 2010, pasca penetapan Perda, meningkat menjadi Rp567 juta. Tahun 2012 meningkat lagi menjadi Rp1,657 miliar dan tahun 2013 meningkat menjadi Rp2,2 miliar.

Yang menarik dari informasi kinerja pengumpulan zakat tersebut adalah menyandingkannya dengan data jumlah penduduk Kabupaten Mamuju yang bahkan tidak sampai 400 ribu jiwa dengan jumlah PNS sekitar 6.075 orang atau hanya sekitar 1,52 persen dari total jumlah penduduk. Sayang, saya tidak memiliki data perolehan zakat dari BAZDA Jember, Lumajang, dan Bondowoso. Namun, dengan jumlah penduduk Kabupaten Jember yang hampir 2,5 juta jiwa, Kabupaten Lumajang yang lebih dari satu juta jiwa atau Kabupaten Bondowoso yang hampir 750 ribu jiwa, maka tiga kabupaten ini dengan sejumlah asumsi memiliki potensi perolehan zakat yang seharusnya jauh melampaui perolehan zakat BAZDA Mamuju.

Ekonomi Bencana

Mengaitkan fenomena darurat bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia dengan bahasan potensi dan

pengelolaan zakat menjadi intisari dari tulisan ini. Menyimak keluhan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyesalkan sejumlah pemerintah daerah (Pemda) di wilayah rawan bencana yang kurang sigap dalam penganggaran untuk penanggulangan bencana, maka masyarakat perlu kelembagaan lain yang dapat menginisiasi kegiatan tersebut.

Sebagaimana diberitakan, kebanyakan Pemda hanya menganggarkan 0,1 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dana penanganan awal bencana. Menurut BNPB, Pemda seyogyanya menyiapkan dana minimal satu persen dari APBD untuk penanganan awal bencana yang harus sudah disiapkan di setiap awal tahun di mana siklus bencana sering terjadi. Namun, yang berlangsung, ketika bencana terjadi di awal tahun, APBD belum ditandatangani sehingga Pemda belum memiliki cadangan dana untuk penanganan awal bencana.

Tak berbeda jauh dengan Pemda, pemerintah pusat pun minim menganggarkan dana penanggulangan bencana. Alokasi dana mitigasi dan penanggulangan bencana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 berkisar tujuh triliun rupiah atau 0,38 persen dari total belanja APBN yang mencapai 1.842 triliun rupiah. Padahal, mengingat pengelolaan bencana termasuk dalam daftar sebelas prioritas pembangunan nasional pemerintah dan mengingat sebagian wilayah Indonesia termasuk rawan bencana, maka anggaran sebesar 7 triliun rupiah dinilai tak cukup memadai.

Pada tataran inilah, maka diperlukan instrumen atau kelembagaan lain yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat

dalam mengantisipasi bencana. Mengaitkan kembali dengan pengelolaan zakat yang peruntukkannya jelas untuk delapan *asnaf*, maka sesungguhnya zakat memiliki potensi untuk menjadi instrumen dalam ekonomi bencana.

Zakat Produktif

Menutup tahun 2013 dan mengawali tahun 2014, tercatat sejumlah wilayah yang terkena bencana di Kabupaten Lumajang, Jember, dan Bondowoso. Di Lumajang, banjir terjadi di empat desa di Kecamatan Yosowilangun dan dua desa di Rowokangkung. Selain itu, siaga banjir lahar dingin juga digaungkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyusul volume daerah aliran sungai (DAS) yang menampung material vulkanis Gunung Semeru meningkat dan berpotensi mengancam keselamatan warga desa di enam kecamatan.

Di Jember, banjir terjadi di Kecamatan Kencong dan Gumuk Mas yang kemudian meluas ke Semboro dan Tanggul. Terdapat 19 kecamatan di kabupaten ini yang memang rawan banjir genangan, banjir bandang, dan tanah longsor. Panti adalah kecamatan yang kerap kali mengalami banjir bandang.

Di Bondowoso, BPBD masih memberlakukan status siaga darurat untuk bencana banjir, longsor, dan puting beliung hingga akhir Januari karena intensitas hujan dan angin yang masih tinggi. Terdapat 12 kecamatan yang rawan banjir dan longsor serta lima kecamatan yang rawan puting beliung. Prajekan adalah kecamatan yang sering mengalami banjir bandang.

Terkait dengan tiga kabupaten yang rawan bencana ini, maka pengelolaan zakat daerah perlu dioptimalkan sebagai salah satu instrumen dari ekonomi bencana. Peran zakat harus diperluas. Alquran memang tidak menyebut spesifik bahwa korban bencana sebagai pihak yang berhak menerima zakat. Sebagaimana pengertian fakir dan miskin menurut jumhur ulama adalah orang-orang yang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan, maka korban bencana sangat dimungkinkan memperoleh bagian dari dana zakat dengan menganalogikannya sebagai golongan fakir dan miskin.

Dalam hal ini, BAZDA perlu berkoordinasi dengan komunitas zakat untuk bekerja sama dalam penanggulangan bencana. Setiap lembaga amil zakat (LAZ) harus mengambil posisi sebagai bagian dari sistem penanggulangan bencana di wilayahnya. Tidak bisa dimungkiri, bencana dapat mengubah kondisi status ekonomi masyarakat sehingga masuk dalam *asnaf* mustahik. Mengingat kondisi geografis di tapal kuda yang rawan bencana, sudah selayaknya kontribusi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah untuk kebencanaan juga dioptimalkan.

Untuk itu, ke depan, BAZDA dan LAZ perlu meningkatkan pengelolaan zakat produktif daripada zakat konsumtif. Yang dimaksud zakat produktif adalah penyaluran dana zakat yang diberikan kepada para mustahik untuk pengembangan usaha sehingga usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara terus-menerus. Pada akhirnya, para mustahik ini berubah menjadi wajib zakat.

Dalam hal ini, peran kepala daerah sangat strategis untuk menjadi regulator sekaligus fasilitator untuk mensinergikan semua pemangku kepentingan. Zakat, infak, dan sedekah barulah akan mampu mengentas kemiskinan bila dapat menjadi pengungkit ekonomi skala besar dengan difungsikannya peran instrumen ini sebagai penggerak perekonomian mustahik. Bila Perda dapat bekerja optimal untuk kegiatan kemanusiaan, mungkin Pemda Jember, Lumajang, dan Bondowoso dapat menyusun Perda yang lebih baik daripada Mamuju yang baru pada tataran penguatan pengumpulan zakat. *Wallahua'lam bish showab.*

6
POLITIK EKONOMI BANSOS[6]

Pemilihan Legislatif (Pileg) baru saja usai. Kita semua menunggu hasil hitungan final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) meski *quick count* maupun *real count* dari sejumlah lembaga sudah memberikan peta prediksi hasil. Bukan bermaksud ikut-ikutan menjadi pengamat politik dadakan, tapi banyak hal yang memang menarik untuk dicermati pada masa-masa menjelang maupun pascapileg. Selain beragam rupa *black campaign* pada media maupun masyarakat, juga maraknya aktivitas mendukung VS mem-*bully* partai tertentu di sosial media yang kerap mengundang ketegangan antara *Lovers VS Haters* maupun antara *Voters VS Golputers*.

Salah satu hal lain yang menarik untuk disimak dalam masa Pileg 2014 adalah munculnya himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penyaluran bantuan sosial (bansos) atau hibah dihentikan sementara hingga usai Pemilihan Umum (Pemilu). KPK menyebutkan adanya hubungan antara kenaikan dana bansos

6 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 19 April 2014.

dan hibah dengan pelaksanaan Pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah. KPK mencium gelagat potensi penyelewengan karena adanya lonjakan dana dari Rp55,86 triliun yang meningkat menjadi Rp91,8 triliun.

Dana bansos dan hibah memang krusial dalam tahun politik. Selain nominalnya yang besar dan jumlah penerimanya banyak, juga penyalurannya diberikan kepada ragam kalangan. Sayangnya, tak semua dana tersebut sampai ke penerima yang berhak. Penyaluran kadang diberikan bukan pada kelompok rentan, melainkan pada kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak memiliki masalah ekonomi, sosial maupun kesejahteraan. Bahkan, tidak sedikit proposal yang diduga fiktif.

Politik Ekonomi VS Politisasi Ekonomi

Politik ekonomi mengacu pada interaksi antara aspek politik dan ekonomi, yaitu bagaimana pengaruh aspek politik terhadap kebijakan ekonomi suatu negara. Secara sederhana, politik ekonomi dapat diterjemahkan sebagai hubungan antara kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah dimungkinkan memiliki sejumlah cara untuk mempengaruhi secara langsung kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk dalam penyaluran dana bansos dalam rangka memberi stimulan kepada masyarakat untuk memberdayakan potensi sumber-daya lokal untuk peningkatan kesejahteraan bersama.

Model pengelolaan bansos atau hibah selama ini adalah berbasis kelompok. Umumnya ada dua mekanisme yang berlangsung, yaitu melalui eksekutif (kementerian atau lembaga

negara atau pemerintah daerah) atau melalui legislatif. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri, penggunaan dana bansos atau hibah untuk kepentingan partai politik menghadapi Pemilu marak terjadi. Hal ini ditengarai tidak saja terjadi di tataran eksekutif, tapi juga tataran legislatif. Mungkin inilah yang bisa kita sebut sebagai politisasi ekonomi yang dicurigai KPK tengah terjadi belakangan ini.

Politisasi ekonomi bansos atau hibah terjadi ketika dana yang merupakan hak rakyat tersebut digunakan untuk membangun popularitas dengan program-program yang tampak populis. Distribusinya tersebar pada kelompok masyarakat berbasis massa. Bagi kepala pemerintah pusat maupun daerah yang berasal dari partai penguasa, mereka memiliki banyak peluang dan ruang untuk melakukan politisasi ekonomi ini.

Tidak hanya itu. Di kalangan legislatif, bansos sering dijadikan sebagai alat dan modal politik calon legislatif *incumbent* untuk menuai popularitas dan suara dalam pileg (pilihan legislatif). Tidak jarang seorang anggota legislatif (aleg) mengklaim bahwa penyaluran dana bansos merupakan jasa mereka melobi eksekutif. Pada tataran inilah seorang aleg dapat dikatakan telah melakukan politisasi ekonomi untuk kepentingan diri atau kelompoknya. Padahal, dana bansos memang adalah hak rakyat dan ada atau tiada aleg tersebut, maka rakyat tetap berhak untuk menerimanya

Bansos untuk Kesejahteraan Masyarakat

Tulisan ini tidak bermaksud untuk berkutat pada bahasan politisasi ekonomi bansos. Tulisan ini ingin masuk pada ranah

politik ekonomi yang mendiskusikan model-model penyaluran dana untuk direkomendasikan kepada penyelenggara penyalur dana bansos atau hibah.

Setidaknya terdapat tiga panduan dasar untuk meminimkan politisasi ekonomi bansos dan mengedepankan politik ekonomi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta eksekutif untuk masyarakat. **Pertama,** dana bansos disalurkan dalam bentuk *public goods.* Dengan *public goods,* maka hal ini akan memberi manfaat kepada siapa saja penggunanya, baik yang merupakan basis pemilih atau tidak. Hal ini juga menghindari diskriminasi bantuan dalam bentuk *cash* atau barang tertentu yang sangat mungkin hanya akan tersalur pada masyarakat pemilihnya saja. Salah satu *public goods* yang tepat sasaran, misalnya, penyediaan mobil *water tank* untuk pengadaan air bersih di daerah-daerah yang kekurangan air.

Kedua, bantuan dalam bentuk prasarana atau sarana yang sesuai dengan basis usaha kelompok. Misalnya, pada kelompok tani yang bergerak dalam usaha kopi atau kakao, maka dapat diberikan bantuan berupa pengadaan bibit, pupuk, penyediaan mesin pengolah atau memfasilitasi terbangunnya *networking.* Bantuan juga dapat berupa penciptaan *softskill,* misalnya berupa pelatihan terkait pengolahan limbah agar produk menjadi *zero waste.* Dengan demikian, bantuan pada kelompok usaha ini bukan berupa binatang ternak atau lainnya yang tidak terkait dengan basis usaha.

Ketiga, memfasilitasi pengembangan sumber daya lokal yang belum dikelola secara optimal. Konteks ini memiliki ruang

lingkup luas. Jujur saja, hal ini tercetus ketika berdiskusi dengan Yulyani, Ketua Pengembangan Indonesia Bagian Barat Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Bagi masyarakat yang tidak berbasis kelompok, namun lingkungannya memiliki kesamaan sumber daya lokal, maka seharusnya dapat dikondisikan untuk menerima bansos yang dapat mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada. Setidaknya ada tiga contoh di lapangan yang dapat dimasukkan dalam kategori ini.

Pernahkah Anda menemukan sebagian masyarakat yang menanam buah-buahan di sekitar rumah lalu menawarkannya di pinggir jalan kepada pengguna lalu lintas? Pernahkah Anda menemukan produk pertanian yang berlimpah di musim panen raya namun harga pasarannya jatuh terpuruk? Pernahkan Anda menemukan sebagian masyarakat yang memproduksi makanan atau minuman tertentu dengan kemasan plastik seadanya dan dijual ke warung-warung di dekat rumahnya? Kegiatan ekonomi individual yang belum berbasis kelompok inilah yang juga patut memperoleh pencerahan dan pengembangan usaha melalui dana bansos.

Melalui kepala desa, lurah atau camat setempat, masyarakat dengan usaha sporadis ini dapat didesain ke dalam kelompok usaha yang dapat mengakses dana bansos untuk pengembangan usaha mereka. Masyarakat yang di lingkungannya banyak memiliki buah-buahan dapat diedukasi bagaimana memproduksi keripik buah. Masyarakat yang menjadi petani cabai, misalnya, dapat diedukasi untuk membuat cabai kering ketika harga pasaran cabai mentah mengalami kejatuhan pasa saat panen raya. Bagi

masyarakat yang sudah kerkecimpung dalam produksi makanan minuman skala *home industry* dapat diedukasi bagaimana membuat *packaging* yang *marketable.*

Secara keseluruhan, kehadiran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD menjadi rujukan utama bagi seluruh kepala daerah dalam menyalurkan dana bansos. Dalam hal ini, kepala daerah harus menyusun sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban melalui Peraturan Kepala Daerah. Perubahan mendasar dengan regulasi baru ini adalah semua penerima hibah harus dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sampai dengan rincian objek. Selanjutnya, setelah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD ditetapkan, maka kepala daerah akan menerbitkan daftar penerima dana bansos dan hibah. Adapun anggaran dana tidak dapat dalam bentuk gelondongan.

Secara prinsip, program bansos harus tepat sasaran dan efektif untuk menggerakkan ekonomi produktif guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sebab, bansos hakikatnya adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada konteks inilah, anggota DPD/DPD serta eksekutif harus memiliki pemetaan yang baik pada titik-titik mana saja yang

membutuhkan pendanaan bansos dengan meminimkan ruang terjadinya politisasi karena dana bansos sesungguhnya adalah uang rakyat. *Wallahua'lam bish showab.*

7
MEWASPADAI TAWARAN UMROH DAN HAJI DENGAN MLM[7]

"Iis kan temannya banyak. Cukup butuh 11 orang, nanti Iis bisa berangkat umroh gratis ...."

Itulah salah satu kalimat persuasif yang saya terima dari seorang famili suami yang mengasuh sebuah pondok pesantren di sebuah kecamatan di Jember. Saya diminta membawa dua tumpuk kartu nama dan sejumlah brosur yang memuat nominal biaya plus jadwal pemberangkatan umroh ke tanah suci untuk dibagi kepada kenalan-kenalan saya. Saya melirik nama perusahaan travel yang tertera di kartu nama tersebut. *Mmm,* rasanya nama tersebut cukup familiar. Rasanya saya pernah membaca nama tersebut ....

Selisih tiga bulan, nama perusahaan tersebut kembali muncul dalam promosi seorang kenalan di jejaring *facebook* di Lumajang. Ia mengatakan ada cara gampang bagi siapa saja yang ingin ke tanah suci dengan cara murah. Cukup mengumpulkan sejumlah

---
7 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Opini, 2 Mei 2014.

orang tertentu yang ingin bepergian, maka kita akan dapat berangkat ke tanah suci dengan harga miring, bahkan gratis!

Tepat sepekan lalu, plang nama perusahaan travel tersebut tak sengaja saya temukan di sebuah rumah di pusat Kota Lumajang. *Yup,* tawaran umroh atau haji berbiaya murah atau gratis dengan mencarikan jamaah sejumlah tertentu tampaknya kian marak di wilayah Jember dan Lumajang oleh perusahaan travel tersebut. Iming-iming ini pun sudah merambah pada wilayah-wilayah pelosok.

Saya mencoba mencari informasi tentang perusahaan tersebut di Google. Ya, ternyata benar, perusahaan travel tersebut pernah menjadi pemberitaan di media sekitar dua tahun lalu karena menawarkan umroh dengan sistem berjenjang atau yang lazim disebut *multi level marketing* (MLM). Perusahaan ini adalah salah satu dari dua perusahaan yang memperkenalkan sistem MLM umroh dan haji yang rekomendasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan sertifikasi syariahnya dicabut oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Agustus 2012.

MLM

MLM adalah kegiatan menjual atau memasarkan langsung suatu produk, baik berupa barang ataupun jasa, kepada konsumen. Salah satu ciri MLM adalah terdapat produk yang diperjualbelikan. Hal inilah yang dinilai tidak ditemukan dalam MLM umroh dan haji yang berlangsung saat ini sehingga salah satu syarat dari rukun jual beli, yaitu adanya objek jual beli, tidak terpenuhi. Sulit untuk menentukan jenis produk apa yang sesungguhnya

diperjualbelikan. Beberapa pihak bahkan menyamakan bisnis MLM umroh dan haji menjurus kepada *money game.*

Dalam kaidah *fiqih,* semua bentuk bisnis memiliki hukum asal halal, kecuali jika terdapat dalil yang melarangnya. Halal dalam konteks ini tentu saja berarti bebas dari *maghrib* (*maysir, gharar,* dan *riba), tadlis, zalim*, dan tidak mengandung unsur haram. Terkait dengan tawaran umroh dan haji berbasis MLM, maka pada tataran inilah muncul ruang perdebatan lantaran dalam mekanisme MLM memfasilitasi seseorang beribadah umroh dengan "berutang" kepada *down line* dan terdapat potensi terjadinya *tadlis.*

Tidak hanya itu, dalam MLM umroh dan haji, penekanannya bukan lagi pada urusan jual beli dan distribusi produk sebagaimana MLM murni, melainkan tentang bagaimana cara *member get member.* Dengan memperhatikan faktor ekonomi eksternal, rasanya sulit diterima logika bahwa bepergian umroh cukup dengan biaya Rp2,5-3,5 juta dan haji dengan biaya Rp5 juta sebagaimana yang kerap dipromosikan oleh perusahaan travel. Jelas, sistem MLM umroh dan haji yang berkembang ini memiliki potensi untuk terjadinya *tadlis* (penipuan) oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Polemik penyelenggaraan umroh dan haji berbasis MLM memang dipicu oleh sertifikat yang diterbitkan DSN-MUI. Seiring laporan dari masyarakat, juga semakin menguaknya pro dan kontra dari berbagai pihak terkait penerbitan sertifikat tersebut, maka mekanisme ibadah umroh dan haji dengan sistem berantai itu dibahas dalam *ijtima'* ulama nasional pada tahun 2012.

Hasil *ijtima'* ulama akhirnya berbuah larangan resmi penyelenggaraan MLM umroh dan haji melalui surat edaran dari Kementerian Agama (Kemenag) Nomor Dj.VII/Hj.09/10839/2012 tanggal 26 Desember 2012. MUI pun memfatwakan agar umat Islam menghindari MLM umroh dan haji karena lebih banyak mudharat ketimbang manfaat. Namun demikian, meski larangan telah diterbitkan, nyatanya tawaran umroh dan haji berbiaya murah ala MLM terus bergulir dan merambah ke daerah-daerah.

Waspada

Seperti halnya mewaspadai tawaran investasi bodong, maka masyarakat perlu pula memiliki literasi tentang tawaran umroh atau haji berbasis MLM yang dapat merugikan. Untuk mengenalinya, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui. **Pertama,** perusahaan penyelenggara umroh dan haji harus memperoleh izin dari Kemenag. Belakangan kian marak biro travel umroh dan haji yang tidak memiliki izin, tetapi tetap memberangkatkan jamaah dan berujung pada akibat yang fatal. **Kedua,** perusahaan yang menggunakan sistem MLM harus memiliki surat izin usaha penjualan langsung (SIUPL) dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag). **Ketiga,** dalam jenjang *up line* dan *down line*, maka masing-masing harus memiliki kesempatan sama untuk berhasil. **Keempat,** insentif yang diterima *up line* tidak boleh berasal dari pengurangan hak *down line*. **Kelima,** biro travel mampu memberangkatkan dan tidak memberi masa tunggu yang panjang kepada jamaah.

Dalam sebuah kesempatan berdiskusi dengan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember terkait dengan keberadaan MLM umroh dan haji yang mulai marak ditemukan di wilayah Tapal Kuda, masyarakat yang merasa dirugikan dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi. Meski kegiatan bisnis tersebut tidak berhubungan langsung dengan sektor keuangan, namun laporan yang masuk kepada Satgas dapat ditindaklanjuti oleh OJK yang memiliki nota kesepahaman kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan lembaga lainnya untuk penindakan.

Terkait dengan MLM umroh dan haji, masyarakat juga dapat mencari informasi atau menyampaikan keluhan kepada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Ya, tawaran beribadah umroh atau haji dengan biaya murah memang menggiurkan. Namun, sistem yang digunakan tersebut cenderung menimbulkan bahaya. Dengan uang muka yang sangat rendah, calon jamaah direkrut tanpa melihat apakah yang bersangkutan termasuk dalam kategori mampu atau tidak mampu secara finansial.

Terlebih terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, maka mekansime MLM ini tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. UU tersebut mengatur haji sebagai kewajiban sekali seumur hidup dan hanya diperuntukkan bagi mereka yang mampu. Mampu dalam konteks ini dapat ditafsirkan mampu secara fisik, finansial maupun kuota. *Wallahu a'lam bish showab.*

8
RAMADAN TIBA, YUK BERINVESTASI!!![8]

Ramadan tiba ...
Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba bulan yang ada
Karena besarnya setiap pahala, yang dijanjikan kepada kita ....
Banyakkan amal, hari-harinya pahala datang berlipat ganda
Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nanti gantinya ....

Itulah bait-bait Ramadan Tiba yang dilantunkan Opick, penyanyi religi asal Jember. Pesan tentang besarnya pahala di bulan Ramadan merupakan "iming-iming" yang diberikan Allah kepada umat-Nya untuk mempersiapkan bulan penuh berkah tersebut, baik fisik maupun ruhiyah.

Layaknya sebagai bulan yang penuh dengan bonus pahala, maka sesungguhnya dibutuhkan perencanaan investasi keuangan

8 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 28 Juni 2014.

agar belanja di bulan Ramadan dapat optimal. Konteks optimal di sini tentu saja berdimensi dunia dan akhirat. Oleh karena itu, momen Ramadan perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk berbelanja dijalan-Nya dalam rangka optimalisasi belanja modal investasi tersebut.

Isu aktual terkait investasi keuangan dalam perspektif ekonomi Islam yang menjadi tema dari *World Islamic Economic Forum* (WIEF) yang diselenggarakan *Islamic Development Bank* (IDB) di Jakarta awal Juni lalu adalah wakaf. Dalam *Awqaf Roundtable*, wakil menteri keuangan RI menyampaikan bahwa salah satu instrumen kunci bagi pengembangan ekonomi negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) adalah wakaf.

Nah, Ramadan sudah tiba. Ramadan dapat menjadi momen untuk umat Islam mengalokasikan belanja investasi pada instrumen wakaf. Instrumen ini memiliki peran sebagai alat pengentas kemiskinan karena berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan berupa pendanaan atau aset untuk dikelola bagi kepentingan masyarakat. Sebagai salah satu instrumen keuangan Islam yang orisinal, amalan wakaf akan terus mengalir karena manfaatnya berkesinambungan. Pada tataran inilah wakaf dapat dikatakan sebagai produk investasi yang patut menjadi pilihan di bulan Ramadan.

Wakaf

Dalam perspektif kekinian, wakaf sudah mengalami sejumlah evolusi. Jika wakaf di masa lalu cenderung berbentuk lahan, mesjid atau uang tunai, kini sudah mulai berkembang wakaf

saham dan wakaf korporasi. Peruntukannya pun kini semakin beragam. Jika dulu masih cenderung terbatas pada lahan atau properti, kini wakaf digunakan lebih luas untuk pendidikan, kesehatan, riset, perpustakaan, hingga pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan mikro.

Merujuk data Kementerian Agama (2011) yang dikutip oleh Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kegiatan WIEF, aset wakaf di Indonesia mencapai Rp660 triliun. Wakaf tunai bank syariah di Indonesia mencapai USD 3 miliar dan tahun 2013 diperkirakan sudah mencapai USD 6 miliar atau sama dengan 45 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Angka ini lebih dari cukup untuk mengembangkan perekonomian berbasis wakaf. Untuk itulah, OJK turut mendorong lembaga keuangan Islam untuk bekerjasama dengan lembaga wakaf untuk pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Wakaf Tahun 2004 yang menjadi tonggak modernisasi aset wakaf di Indonesia. Sinergi ini memberi peluang untuk terbukanya saluran pemberdayaan wakaf produktif dan dapat menjadi motor pembangunan ekonomi nasional.

Nah, terkait dengan ramai-ramai Debat Calon Presiden (Capres) RI, isu kepemimpinan politik memang menjadi topik menarik. Bagi para penggiat ekonomi Islam, kepemimpinan politik menjadi isu penting dalam membuat *political will* yang dapat menyediakan *level of playing field* yang setara antara kelembagaan ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Melalui *political will* inilah, wakaf dapat diberdayakan untuk membantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengurangi

defisit pembiayaan dan berkontribusi langsung terhadap pembangunan. Hanya dengan kepemimpinan politik, maka negara terdorong untuk mengoptimalkan potensi wakaf sebagai komponen penting dalam strategi ekonomi nasional.

Investasi Abadi

Di wilayah Lumajang, Jember, dan Bondowoso, terdapat sejumlah lembaga amil zakat (LAZ) yang biasanya juga akan sekaligus menyediakan jasa penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf. Sebut saja di antaranya adalah Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), Dapur Dhuafa, Rumah Itqon Zakat Infak (RIZKI), Rumah Zakat (RZ), Baitul Maal Hidayatullah (BMH), AZKA Al Baitul Amien, dan Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF).

Di Jember, gaung wakaf sempat menjadi pembicaraan ketika pasangan suami istri dr. Suharman dan Ibu Aliyah mewakafkan sebuah rumah besar senilai Rp2 miliar kepada Mahad Tahfiz Quran (MTQ) Ibnu Katsir untuk menjadi pondok pesantren bagi santri perempuan. Rumah besar yang diberi nama Gedung Quran Aliyah menjadi simbol bahwa peruntukan wakaf dapat digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan seperti halnya yang lazim terjadi di Turki dan Mesir. Terlebih dengan pemanfaatannya untuk mencetak para penghafal Alquran. *Masya Allah*, berapa banyak aliran pahala dari *multiplier effect* yang tercipta dari wakaf gedung tersebut ...

Namun demikian, jangan menunggu memiliki lahan atau properti untuk berwakaf seperti dr. Suharman dan Bu Aliah. Melalui wakaf tunai, tidak ada alasan untuk menunda wakaf. Wakaf dapat dilakukan sesuai kemampuan anggaran. Dengan dana

puluhan ribu hingga ratusan ribu pun wakaf dapat terealisasi. Dengan berjamaah, maka dana yang terhimpun tersebut hingga cukup modal akan dikelola oleh *nazhir* menjadi aset wakaf yang produktif untuk kemudian didayagunakan sesuai peruntukkan manfaatnya. Inilah esensi wakaf, pokok harta akan ditahan dan dikelola sehingga hasilnya akan terus mengalirkan manfaat.

Yup, inilah investasi abadi yang sesungguhnya. Manfaat wakaf yang terus mengalir akan menjadi tambahan tabungan pahala ketika pemilik harta tersebut telah tiada. Bukankah perjalanan abadi juga membutuhkan bekal yang abadi pula? Selain ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang saleh dan salihah, mungkin kita perlu pula memastikan apakah kita sudah menunaikan wakaf? Mumpung Ramadan, yuk sisihkan dana kita untuk berinvestasi abadi dengan wakaf biar pahalanya semakin berlipat-lipat. *Insya Allah*.

9
WISATA SYARIAH DI TAPAL KUDA, KE MANA?[9]

Dalam Konferensi Internasional dan Pembangunan Islami (KIPI) yang diselenggarakan Universitas Jember (Unej) dalam rangka Dies Natalis ke-50, ada beberapa sosok yang tampak mencolok tampilannya daripada yang lain. Dengan pakaian berwarna gelap, terdapat sejumlah orang yang senantiasa mengelompok dan mengenakan songkok putih yang seragam. Mereka selalu duduk berjejer dan cenderung untuk diam mendengarkan. Sesekali mereka tersenyum atau manggut-manggut ketika saling berpandangan dengan peserta konferensi lainnya. Kental sekali terlihat bahwa mereka "orang asing".

Lantunan nasyid sebagai pembuka konferensi yang dikumandangkan salah satu dari kelompok bersongkok putih itu menjelaskan bahwa mereka berasal dari negeri jiran. Ya, sosok-sosok bersongkok putih itu adalah para Doktor dan Profesor dari

9 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 20 September 2014. Sudah dilakukan pembaruan.

Universiti Sains Malaysia yang menjadi pemateri KIPI bersama sejumlah tokoh penggiat ekonomi Islam di tanah air yang diundang Unej untuk berbagi pandangan tentang situasi ekonomi Islam terkini, baik di Indonesia, Malaysia, dan dunia. Dari dalam negeri, para pemateri terwakili oleh beberapa tokoh ekonomi Islam nasional yang merepresentasikan unsur akademisi, praktisi, dan otoritas.

Tidak bisa dimungkiri, momen KIPI merupakan salah satu geliat dari kegiatan ekonomi syariah di Tapal Kuda. Setelah setahun sebelumnya muncul Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) yang memang dicanangkan sebagai program nasional, kini hadir Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Besuki Raya yang tidak tangung-tanggung membawahi Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi yang menjadi cikal bakal terbentuknya IAEI Jawa Timur.

Nah, mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu dari sembilan destinasi wisata syariah di Indonesia. Ya, bersama Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Makassar, dan Lombok, Jawa Timur ditetapkan sebagai destinasi wisata syariah nasional. Dengan dijadikannya Jawa Timur sebagai destinasi wisata syariah, maka provinsi ini bukan hanya dituntut untuk memiliki daya tarik objek wisata religi atau wisata ziarah semata, tetapi juga dituntut untuk menyediakan fasilitas pendukung yang memenuhi standar berdasarkan ketentuan syariat.

Eits, jangan menganggap wisata syariah ini latah mengekor *booming* ekonomi syariah, *lho. Hayooo,* siapa yang sudah pernah

ke Thailand? Pasti belum banyak yang tahu bahwa Negeri 1000 Pagoda tersebut sudah menerapkan konsep wisata syariah lebih dahulu ketimbang Indonesia. Thailand kini bahkan mereposisi diri untuk menjadi *"Halal Thailand to kitchen of the world".* Hal ini bukan sekedar *lip service.* Thailand terbukti menjadi salah satu pengekspor produk halal utama di dunia.

Ya, wisata syariah adalah potensi pasar yang banyak dilirik saat ini, bahkan oleh negara berpenduduk mayoritas nonmuslim. Thailand, Singapura, Jepang, Korea, Taiwan bahkan China sekalipun adalah negara-negara yang saat ini agresif menangkap ceruk pasar wisatawan muslim global dan gencar menawarkan *Islamic tourism tour.*

Di Indonesia, sejumlah pemerintah daerah juga sudah mulai kencang mempromosikan wisata syariah, utamanya Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Di Jawa Barat terdapat 14 kabupaten halal. Bahkan, Walikota Bandung, Ridwan Kamil, sudah berkomitmen untuk menjadikan Bandung sebagai kota halal.

Sejauh ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun turut memberi dukungan terhadap pengembangan wisata syariah mengingat banyaknya unsur dalam wisata syariah yang erat kaitannya dengan peradaban Islam, selain adanya inisiasi yang didorong untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Terlepas bahwa pemicu lahirnya wisata syariah adalah motif ekonomi yang melihat peluang pasar wisatawan muslim, kehadiran wisata syariah sepatutnya memperoleh apresiasi guna membumikan ekonomi syariah dan nilai-nilai syariah. Lalu, kalau wisata syariah di Tapal Kuda, ke mana?

Tapal Kuda?

Ya, salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki banyak potensi wisata syariah adalah Tapal Kuda. Tapal Kuda yang meliputi Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi ini semuanya memiliki tempat wisata religi dan ziarah disamping masyarakat setempat yang masih lekat kultur keislamannya.

Namun demikian, perlu diingat, wisata syariah bukan sekadar dimaknai sebagai wisata religi dan ziarah semata. Wisata syariah juga bukan sekadar paket wisata yang mengunjungi objek-objek wisata Islam. Lebih jauh, wisata syariah adalah jenis wisata yang memegang prinsip syariah Islam dengan tanpa mengubah objek wisata pada umumnya. Syariah Islam dalam konteks ini di antaranya meliputi jaminan kehalalan makanan, ketersediaan tempat salat, kebersihan tempat wudhu, hotel yang tidak menjual minuman keras atau kolam renang yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan.

Ya, sebagai sebuah industri, wisata syariah hendaknya menjadi upaya bagi para penggiat ekonomi Islam untuk pengembangan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan bisnis yang kerap dipandang miring. Komponen-komponen dalam wisata syariah berhubungan dengan nilai dan budaya masyarakat lokal yang perlu dilestarikan dalam rangka membangun nilai-nilai positif bagi lingkungan. Wisata syariah dinilai strategis dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai syariah kepada masyarakat lokal dan internasional.

Sebagai sebuah produk yang universal, wisata syariah seyogyanya menjadi gaya hidup halal yang kini makin mendunia.

Meningkatnya wisatawan muslim dunia mendorong munculnya kebutuhan wisata yang *islamic friendly* yang semakin besar. Mengingat telah dicanangkannya Jawa Timur sebagai destinasi wisata syariah nasional, maka pemerintah daerah dan pelaku usaha wisata perlu bergandengan dengan pihak terkait, termasuk perguruan tinggi dan lembaga keuangan, untuk menjadi motor penggeraknya.

Jadi, kalau wisata syariah di Tapal Kuda, ke mana? Tamu-tamu KIPI Unej dari Malaysia, Jakarta, Bogor, Surabaya, Malang tersebut akan kita ajak kemana? Kalau saya, mengingat mereka saat ini hanya diagendakan untuk berada di Jember saja oleh panitia, saya mungkin akan mengajak mereka untuk mengunjungi Masjid Raudhotul Muchlisin, Masjid Cheng Hoo, Manaqib Pondok Pesantren Al-Qodiri atau ke pantai Papuma. Andaikan saja di Jember juga sudah berdiri pasar syariah sebagaimana yang dibangun oleh guru saya, Prof. Suroso Imam Zadjuli, tentu saja saya juga akan merekomendasikannya. *Wallahua'lam bish showab.*

2015

10
MEWASPADAI IKLAN DESTRUKTIF ...[10]

Pagi itu, ketika memasuki pelataran parkir Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jember, sayup-sayup terdengar suara seseorang tengah berceramah. Mendekati gedung serba guna yang berada di halaman belakang KPwBI, suara itu semakin jelas terdengar. Saya merasa familiar sekali dengan suara tersebut. Pikiran saya terus bekerja untuk mengingat-ngingat siapa pemilik suara. Akhirnya, tepat di teras gedung serba guna yang lantai bawahnya menjadi tempat kegiatan di mana sumber suara itu berada, saya baru sadar. Ya Allah, ini kan suaranya Ustaz Abu Hasan Ibnu Katsir ....

Ya, beberapa pekan lalu saya memang mengajak sekitar 150 mahasiswa IAIN Jember untuk mengunjungi KPwBI Jember guna mengikuti kuliah umum terkait kebanksentralan, kebijakan moneter, dan hal lain-lain terkait dengannya. Nah, Senin kemarin, saya kembali mengunjungi KPwBI Jember dalam rangka bersilaturahmi dengan Bapak Muhammad Lukman Hakim, Plt.

10 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 8 Januari 2015.

Deputi Kepala Perwakilan Tim Ekonomi dan Keuangan yang baru saja pindah ke Jember. Dalam perjalanan dari Lumajang menuju Jember, tepatnya di perempatan Tanggul, saya melintasi sebuah papan reklame besar di pinggir jalan yang sangat mencolok mata.

Ya, papan reklame besar yang sangat mencolok mata inilah yang sesungguhnya ingin saya ceritakan dalam tulisan ini. Entah mulai kapan iklan itu muncul. Saya yang hampir setiap pekan melewatinya, baru mengetahui keberadaanya pada hari Senin lalu. Buat saya yang berkacamata minus tiga campur silinder, melihat iklan tersebut dari jarak jauh saja sudah menimbulkan gemuruh marah di dada. Meski gambar tak terlihat secara jelas, bahkan sekali pun mobil yang membawa saya sudah berada tepat di seberang jalan iklan itu berdiri, bahasa tubuh dari gambar tersebut sudah menunjukkan perilaku yang tak patut untuk ruang publik. Setidaknya buat saya pribadi, terlebih dalam kapasitas seorang ibu, muatan iklan rokok tersebut membawa pesan tak pantas.

Hari Selasa, ketika saya kembali melintasi perempatan Tanggul menuju Jember untuk bertemu dosen-dosen dari Unit Pelayanan Bahasa (UPB) IAIN Jember, iklan tersebut masih bertengger dan membuat saya semakin gelisah. Betapa tidak, jalan utama lintas kabupaten yang sekitarnya juga banyak terdapat sekolah-sekolah tentu akan membuat para pelajar yang melintasi jalan tersebut akan melihatnya secara terang benderang.

Selasa malam, saya memperoleh kabar bahwa iklan tersebut mengundang protes masyarakat di ibukota. Iklan *billboard* itu ternyata juga sudah bermunculan di sejumlah wilayah Indonesia,

terutama di Jakarta. Alhamdulillah, petisi melalui Change. Org sudah digulirkan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga sudah menyatakan dukungan terhadap petisi untuk mengecam reklame iklan rokok yang mengusung *tagline* “Mula-Mula Malu-Malu, Lama-Lama Mau”. Media *online* paling berjasa dalam mengangkat penolakan masyarakat atas iklan destruktif tersebut. Pada malam itu pula, sudah beredar berita bahwa perusahaan rokok tersebut berjanji akan menurunkan iklan-iklannya.

Rabu pagi, hati saya sedikit *deg-degan* ketika kembali hendak melintasi jalur perempatan Tanggul. Saya ingin tahu apakah janji perusahaan rokok tersebut untuk menurunkan iklannya pada papan reklame pascapenolakan sebagian masyarakat akan berlaku pula di jalur yang akan saya lalui itu. Dan ... *taraaa* ... alhamdulillah, sudah tidak ada lagi.

Kontrol Sosial

Siapa yang paling bertanggung jawab dalam mengizinkan munculnya papan reklame dengan gambar yang mengarah pada pergaulan bebas itu dapat berdiri di ruang publik seperti perempatan Tanggul tersebut? Apakah dengan gaung otonomi darah sejak berapa tahun lalu itu membuat pemerintah daerah ciut nyali untuk mengambil sikap terhadap korporasi yang berpotensi menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun kegiatan ekonomi yang mempromosikan produknya bersifat destruktif?

Yup, kontrol sosial masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan untuk menghadapi gencarnya produk jualan yang terselubung

dalam beragam wujud rupa. Terlebih lagi bagi para wakil rakyat, hal demikian sudah seharusnya mendapat porsi untuk dikritisi. Sinergi inilah yang dapat menjadi tameng penetrasi budaya yang mengusung degradasi moral, terutama yang berani mempromosikannya di ruang publik.

Di tengah hegemoni kapitalisme, promosi yang berbenturan dengan nilai-nilai normatif tidak bisa dihindari, namun bukan tidak dapat pula kita waspadai dan antisipasi. Agama dan pendidikan adalah kunci kontrol sosial dalam melawan kearusutamaan budaya maupun *mindset* yang dapat mendestruksi perilaku dan ketenangan masyarakat.

Tidak bisa dimungkiri, globalisasi menyebabkan banyak perubahan di berbagai lini kehidupan, baik dalam ranah individu, kelompok, maupun negara. Globalisasi dengan serta merta membawa paham ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, dan bahkan standar norma masyarakat. Perubahan tidak saja mengubah pola pikir, gaya hidup, tetapi juga perubahan struktural di masyarakat dalam berkehidupan. Pada akhirnya, siapa yang berkuasa adalah mereka yang mampu mengendalikannya.

Dalam hal ini, ketahanan keluarga dan masyarakat harus selalu siaga dalam membangun benteng pertahanan terbesar. Masyarakat dalam konteks ini adalah utamanya mereka yang merepresentansikan eksekutif maupun legislatif yang memiliki kekuasaan paling besar untuk menegakkan kontrol sosial. Hal ini mengingat respon masyarakat terhadap berbagai promosi destruktif beragam, bergantung pada tingkat pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan pemahaman agama yang mereka

miliki. Strategi promosi pada ruang publik acap kali sangat halus sehingga kerap tidak disadari adanya pesan yang berpotensi mendegradasi perilaku dan adab pergaulan di masyarakat.

So ... setidaknya ada dua pesan negatif yang dibawa oleh iklan rokok yang mengundang kontroversi selama tiga hari terakhir. **Pertama,** pesan untuk merokok itu sendiri. **Kedua,** pesan untuk bertindak tidak patut antara dua lawan jenis di muka umum. Jadi, pesan opini yang selama ini digaungkan oleh pemerintah untuk ramah pasar, dalam hal ini haruslah ada pengecualian. Sebab, daulat pasar tidak boleh menggusur daulat rakyat. Dan bila ingatan terhadap iklan destruktif tersebut tidak lekang dalam ingatan para pelajar dan menjadikan mereka permisif terhadap pergaulan bebas, maaf, maka kita semua akan dimintai pertanggungjawaban pula oleh-Nya bila tidak mengingatkan dan meluruskan para pelaku ekonomi dan birokrasi yang membiarkan dan abai terhadap upaya-upaya menyelamatkan akhlak masyarakat, utamanya generasi muda. *Wallahua'lam bish showab.*

11
(LUMAJANG) MERINTIS BANK WAKAF INTERNASIONAL (?)[11]

Assalaamu'alaikum. Maaf mengganggu, Is. Ada amal saleh untuk membentuk konsep Bank Wakaf Internasional. Indonesia terpilih dalam forum wakaf dunia untuk menjadi pilot project. Ikhwah dari Malaysia yang pekan lalu terpilih menjadi ketua forum, mengajak kerjasama. Beliau teman suami saya. Iis kan punya latar belakang pendidikan tersebut, mesti bisa membantu Ustaz Syadid dan istrinya, Ustazah Atikah yang baru saja pulang dari Mesir yang diamanahi Prof. Biddin untuk membuat konsep. Kapan Iis bisa ketemu? Jazakillah.

Pesan yang masuk dalam telepon genggam itu membuat dahi saya berkerenyit. Bank wakaf internasional? Gagasan bank wakaf ini memang bukan hal baru. Sejak lima tahun lalu, sejumlah penggiat ekonomi syariah sudah mewacanakannya. Forum wakaf dunia? Mmm, biasanya saya selalu *update* sejumlah kegiatan berbasis ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional

11 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 25 Februari 2015.

maupun internasional, tapi rasanya saya belum mengetahui adanya penyelenggaraan forum wakaf dunia dalam sebulan terakhir. Prof. Biddin? Ustaz Syadid? Ustazah Atikah? Mmm, siapa mereka?

Belajar dari pengalaman, saya harus mengecek informasi. Meski saya mengenal dengan sangat baik sang pengirim pesan tersebut, tapi informasi yang beliau sampaikan itu masih terasa ganjil untuk saya. Mengapa ketua forum kelas internasional sampai harus membuat konsep hingga merambah kepada orang di Lumajang? Wacana bank wakaf internasional itu juga bukan isu *ecek-ecek*. Beberapa minggu lalu, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat menemui Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk meminta dukungan pendirian bank wakaf internasional di Indonesia. Wacana bank wakaf internasional di Indonesia memang kembali menguat dalam sebulan ini.

Sejumlah pertanyaan terus mengemuka di kepala saya. Penasaran? Ya, jelas saya penasaran. Ditambah lagi, tidak banyak informasi yang bisa saya peroleh dari Google terkait kejelasan hubungan Prof. Biddin dengan forum yang disebutkan oleh pesan yang saya terima itu. Saya hanya menemukan sebuah nama Dato' Dr. Hj. Abdul Rahman Bidin yang merupakan salah satu *Board of Trustees* dari organisasi nirlaba terkemuka di Inggris untuk Malaysia.

Koperasi Jasa Keuangan Wakaf Internasional

Sebuah naskah yang direncanakan untuk terbit menjadi buku sekaligus *company profile* dari organisasi yang diketuai Prof. Biddin

sudah di tangan saya, baik dalam bentuk *hardcopy* mau *softcopy.* Ustaz Syadid meminta saya berkontribusi melengkapinya dengan skim-skim yang dimungkinkan untuk diaplikasikan, termasuk *best practices* di negara lain. Ia mengiyakan pertanyaan saya bahwa apakah Prof. Biddin adalah penggiat *Islamic Relief Worldwide* Malaysia.

Melalui naskah yang saya peroleh, saya mengetahui bahwa Prof. Biddin bersama jaringannya yang terdiri dari serikat/organisasi/perkumpulan dari beberapa negara yang mendorong pendirian "Bank Wakaf Internasional" itu mendirikan *International Social Investment Enterprise Ltd*. (ISIE) di Kuala Lumpur, Malaysia. Perusahaan tersebut mengemban misi untuk menjadi *Fund Promoter, Fund Manager, Investment Manager* dan *Distributor of Investment Result* dari dana wakaf tunai global.

ISIE ternyata sudah masuk ke Indonesia dengan status sebagai investor Penanaman Modal Asing dan terdaftar dalam Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dinyatakan dalam naskah tersebut bahwa dana wakaf global akan dikelola oleh manajemen dari ISIE bersinergi dengan sektor riil dan lembaga keuangan lokal untuk mengurangi kemiskinan melalui pengembangan dana wakaf tunai produktif. Pada tahap pertama, mereka akan fokus untuk Indonesia. Tahap berikutnya adalah wilayah ASEAN, lalu kemudian tingkat global.

Di Indonesia, mengingat lembaga yang akan didirikan oleh ISIE dinyatakan otoritas tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai bank, maka perusahaan ini kemudian menggagas Koperasi Jasa Keuangan Wakaf Internasional (KJKWI) Indonesia

sebagai *nazhir* lokal yang akan menjadi mitra dan representasi ISIE dalam bekerjasama dengan lembaga keuangan lokal dan otoritas lokal untuk memastikan pengelolaan dana wakaf adalah sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang ditetapkan oleh peraturan lokal dan otoritas.

"Kenapa orang Lumajang yang diamanahi untuk menyusun konsep bank wakaf internasional atau KJKWI ini?" tanya saya. Ustaz Syadid menyampaikan bahwa *pilot project* KJKWI Indonesia itu direncanakan akan didirikan di Lumajang. Didirikan di Lumajang? Kenapa Lumajang? Kok bisa Lumajang? Melihat raut wajah saya yang mungkin tampak tak puas dan masih menyimpan banyak pertanyaan, Ustaz Syadid menjanjikan saya untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan Prof. Biddin.

"InsyaAllah akhir bulan ini beliau akan datang lagi ke sini. Sebelumnya sudah 3 atau 4 kali beliau ke mari. Mungkin beliau tertarik dan punya pertimbangan mengapa memilih Lumajang. Nanti bisa ditanyakan langsung ...," kata Ust Syadid.

Bank Wakaf untuk Semua

Pasca pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Tunai di era Presiden SBY tahun 2010, sejumlah pihak memang mendorong pemerintah untuk memiliki bank wakaf mengingat Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Sejumlah duta besar negara muslim juga menyampaikan dukungannya. Bank wakaf diyakini akan cepat mengembangkan perekonomian umat di Indonesia maupun dunia,

Sejumlah konsep tentang bank wakaf memang masih dalam tataran penggodokan. Namun, yang jelas, kegiatan bank wakaf berbeda dengan bank syariah, apalagi bank konvensional meski dalam beberapa hal memiliki persamaan. Bank wakaf akan menghimpun dana wakaf tunai tanpa mengembalikannya kepada para wakif. Bank wakaf kemudian menyalurkan dana tersebut kepada yang membutuhkan pembiayaan produktif. Pada jangka waktu yang telah ditentukan, peminjam mengembalikan dana wakaf tersebut dan bank wakaf tidak perlu memberikan bagi hasil kepada wakif. Aset dan dana kelola yang bertumbuh dari pembiayaan produktif ini akan membuat dana wakaf semakin berkembang dan dapat membantu masyarakat lebih banyak dan lebih besar.

Ya, segala gerakan kebaikan yang ditujukan untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat tentu harus disambut dan didukung. Terlepas apakah kelak KJKWI Indonesia itu benar-benar akan berdiri di Lumajang, setidaknya semangat pemberdayaan umat dengan menggalang kekuatan dari instrumen yang *syari* itu dapat tersebar luas. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sendiri menyatakan bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp3 triliun per tahun. Ditambah lagi dengan dana wakaf tunai global, maka bank wakaf internasional tentu dapat menjadi kekuatan ekonomi dunia, terutama dalam membantu negara-negara miskin dan terbelakang.

Sungguh, membicarakan dan mendirikan bank wakaf bukan mutlak mengemban kepentingan masyarakat muslim. Jika wakaf bagi masyarakat muslim merupakan derma untuk kesejahteraan

dunia dan akhirat, maka wakaf bagi masyarakat nonmuslim dapat menjadi sarana peningkatan kesejahteraan dengan membuka jalan bagi pemberian pelayanan kepada kemanusiaan. Setidaknya bagi bagi bangsa Indonesia, instrumen wakaf telah menjadi bagian dari sejarah di mana pesawat kenegaraan pertama Republik Indonesia adalah pesawat Seulawah yang merupakan wakaf dari rakyat Aceh.

Lebih jauh, saya berharap bank wakaf atau KJKWI Indonesia dapat benar-benar berdiri, tidak hanya di Lumajang, di Tapal Kuda, di Jawa Timur, tapi juga di wilayah Indonesia lainnya. Dengan rekam jejak *Islamic Relief* yang sukses menerbitkan sertifikat wakaf tunai dan pernah berhasil menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 7.000 warga di Bosnia melalui program *Income Generation Waqf,* kita berharap figur lembaga tersebut dapat hadir di sekitar kita untuk menginspirasi untuk membantu mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat yang mungkin tak semuanya mampu tersentuh oleh negara. *Wallahua'lam bish showab.*

12
PAK RIDWAN KAMIL, MARI KE JEMBER![12]

"Tahu Erdogan kan? Ada yang tahu kan siapa itu Erdogan?"

Pertanyaan itu saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa di lima kelas yang saya ajar. Respon mereka ada yang berkernyit, menggeleng atau menunduk. Barulah di kelas terakhir ada yang mengacungkan telunjuk. *"Menterinya Israel, Bu ...,"* jawab seorang mahasiswi setengah ragu.

Ya, mungkin menjawab siapa itu Erdogan jauh lebih sulit ketimbang menjawab siapa itu Ridwan Kamil. Yakin sekali, jika saya menanyakan siapa itu Ridwan Kamil, akan banyak yang mengacungkan jari di lima kelas yang saya ajar tersebut, terutama dari kalangan mahasiswi. Kiprah Ridwan Kamil dalam memimpin Kota Bandung beberapa kali menjadi *trending topic*. Beliau juga aktif di *social media* sehingga mengakses kinerja dan pikiran-pikirannya cepat tersebar pada dunia maya.

12 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 12 Juli 2015.

Dari sekian gebrakan Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung, salah satu yang menarik untuk dibahas adalah Program Melawan Rentenir atau Program MELATI. Pertengahan Mei lalu, Ridwan Kamil meresmikan program ini untuk merespon keluhan para pelaku usaha kecil di pasar-pasar tradisional, utamanya para pedagang kaki lima (PKL) Cicadas yang 70 persen terjerat utang rentenir. Tidak sedikit dari mereka ini yang akhirnya berujung kepada perceraian atau kehilangan rumah mengingat bunga yang ditetapkan rentenir dapat mencapai 30 persen.

Melalui Program MELATI, para PKL di Bandung dapat mengajukan kredit secara kelompok atau perorangan. Jumlah kredit yang diberikan mulai dari Rp500 ribu hingga Rp30 juta. Ridwan Kamil menjanjikan proses peminjaman modal akan dibuat mudah dengan jaminan yang ringan, yaitu berupa alat-alat rumah tangga. Syarat lainnya, para peminjam wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandung, Kartu Keluarga (KK), surat izin dari suami bagi ibu rumah tangga yang ingin usaha, harus memiliki rencana usaha yang jelas, dan dana pinjaman harus benar-benar digunakan untuk modal usaha.

Mekanisme pembayaran yang digunakan dalam Program MELATI adalah tanggung renteng bagi kredit kelompok dan melalui tabungan bagi kredit perorangan. Mengawali program ini, Pemerintah Kota Bandung menggelontorkan dana Rp32 miliar sebagai pinjaman kepada masyarakat dengan bunga rendah sekitar 4-6 persen yang peruntukkan bunganya akan disalurkan untuk operasional Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Bandung.

10 Tahun Bank GAKIN

Jika Kota Bandung memiliki Program MELATI, Kabupaten Jember memiliki Bank Keluarga Miskin atau Bank GAKIN. Keduanya memiliki misi yang sama, yaitu melawan rentenir. Tahun ini, Lembaga Keuangan Masyarakat Mikro (LKMM) bentukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinkop & UMKM) Kabupaten Jember sudah berusia 10 tahun. Nasabahnya kebanyakan perempuan dari keluarga miskin. Merekalah yang menyebut LKMM ini dengan Bank GAKIN.

Mengawali Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) yang kemudian dikenal dengan Bank GAKIN, ada dua dusun yang dipilih sebagai *pilot project.* Modal awal mereka masing-masing sebesar Rp25 juta dari Dinkop & UMKM ditambah simpanan sukarela 80 anggota awal. Terinspirasi Grameen Bank, Bank GAKIN juga menggunakan prinsip tanggung renteng diantara para anggotanya. Kelompok usaha yang terdiri atas 5-10 orang dapat mengajukan kredit usaha tanpa agunan antara Rp50.000 hingga Rp1.000.000. Masyarakat yang mengajukan kredit tidak perlu menyerahkan proposal usaha, apalagi melalui survei yang berbelit. Proposal bisa diajukan secara lisan. Dana kredit bisa langsung cair setelah diadakan survei sekilas terhadap usaha yang dijalankan. Kucuran kredit berjangka waktu 10 minggu yang diangsur setiap minggu dengan bunga 0,5 persen. Mekanisme ini sangat membantu kelompok usaha mikro.

Meski pengurus Bank GAKIN didominasi perempuan hingga 90 persen dan 46 persen diantaranya adalah lulusan sekolah dasar serta 5 persen tidak pernah menjalani pendidikan sekolah formal,

namun perkembangan omzet Bank GAKIN terus bertambah dan setia melayani maksimal 200 orang warga miskin per lembaga. Dalam kurun waktu 10 tahun, jumlah Bank GAKIN sudah sebanyak 454 lembaga yang membawahi 6.424 kelompok masyarakat dengan total anggota sebanyak 29.410 orang. Total pendapatan jasa dan administrasi mencapai Rp2,16 miliar dan sisa hasil usaha (laba berjalan) yang terkumpul mencapai Rp1,11 miliar. Lembaga ini bahkan dengan dananya sendiri turut berkontribusi dalam program pemerintah melalui pendirian Posyandu.

Melirik Pembiayaan Mikro Syariah

Banyak kesamaan dari Program MELATI dengan Bank GAKIN. Selain sama-sama mengemban misi melawan rentenir, segmen pasar yang dibidik dari program ini juga adalah masyarakat bawah, nominal pinjamannya kategori super mikro, mekanisme pembayarannya juga tanggung renteng, dan bunga yang dibebankan relatif rendah. Jelas, program ini adalah program humanis yang memanusiakan manusia.

Ya, pembiayaan super mikro sesungguhnya sejalan dengan ajaran Islam. Pembiayaan super mikro syariah sejatinya tidak hanya memperhatikan aspek pemberian pinjaman tetapi juga membawa pesan untuk peduli terhadap orang miskin dengan sikap proaktif atau tidak menunggu untuk diminta. Syariat lebih mengutamakan *qardh hasan* daripada infak karena *qardh hasan* menimbulkan kehormatan diri pada peminjam dan meninggalkan dorongan dalam dirinya untuk menghidupkan perjuangan dan usaha kembali. Merujuk pada riwayat dari Abu Usamah bahwa

Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sedekah itu dibalasi sebanyak sepuluh kali lipat dan satu pinjaman itu dibalasi sebanyak delapan belas kali lipat. Hal tersebut karena peminjam itu tidak datang kecuali bila ia dalam keadaan membutuhkan, sedangkan sedekah itu diberikan kepada penerima yang belum tentu membutuhkannya.

Namun demikian, dalam perspektif keuangan Islam, praktik Program MELATI dengan Bank GAKIN masih belum memenuhi *sharia compliance* karena adanya bunga atas pinjaman meski relatif ringan dan dinilai tidak memberatkan peminjam. Sejatinya, perbankan syariah maupun lembaga amil zakat infak sedekah wakaf (ZISWAF) atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) perlu didorong untuk bersinergi guna mem-*back up* Program MELATI maupun Bank GAKIN dalam bentuk *linkage program* untuk mobilisasi dana murah termasuk penyalurannya dalam bentuk *return bearing financing, return free financing* atau *charity financing*.

Ke depan, misi kemanusiaan layaknya Program MELATI maupun Bank GAKIN ini perlu mendapat dukungan kuat dari masyarakat dan harus dipertahankan sebagai program prioritas pemerintah. Pak Ridwan Kamil, mari ke Jember! Program anda tepat! Sepuluh tahun Bank GAKIN berkiprah, lembaga ini mendapat tempat di hati masyarakat miskin. Sungguh, Allah pasti akan menolong dan memberi rezeki kepada mereka-mereka yang memuliakan dan berbuat baik kepada orang-orang miskin. *Wallahua'lam bish showab!*

13
DILEMATIKA TRADISI HAJI[13]

"Saya hanya tukang pijat bayi. Untuk bisa mendaftar haji, saya dan suami harus menabung bertahun-tahun. Ketika mendaftar, saat itu saya bersama suami. Tapi sekarang, ketika hendak berangkat ... saya sendirian".

Itulah sedikit cerita dari seorang ibu dalam pertemuan bimbingan manasik haji tingkat kecamatan di Kelurahan Tompokersan, Lumajang, beberapa pekan lalu. Suasana haru kemudian menyelimuti. Bercampur isak, si ibu menyampaikan bahwa ruhiyahnya sudah melalui berbagai ujian kehidupan yang menempanya untuk senantiasa bersabar.

Ya, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lumajang selama dua pekan berturut-turut pada awal Agustus menyelenggarakan Bimbingan Manasik Haji, baik di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan. Bimbingan manasik haji mengemban misi agar calon jamaah benar-benar memahami

13 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 26 Agustus 2015.

proses yang akan dilalui sejak pemberangkatan hingga proses kepulangan sampai di rumah.

Uniknya, salah satu materi yang khusus dibahas langsung oleh kepala kantor Kemenag Lumajang adalah terkait acara *selametan* atau *tasyakuran* atau *walimatussafar* yang lazim dilakukan oleh calon jamaah haji sebelum pemberangkatan serta kebiasaan memberi beragam oleh-oleh setiba pulang di tanah air. Saya menangkap pesan tersirat bahwa beliau mengajak calon jamaah untuk tidak membiarkan tradisi tersebut sebagai kebiasaan, apalagi kewajiban, terlebih bila sebenarnya memberatkan. Kalaupun harus dilakukan, lakukanlah secara sederhana sesuai kemampuan dan tidak perlu memaksakan diri.

Ya, saya membayangkan bila Ibu, si Tukang Pijat Bayi yang menjanda itu harus mengikuti tradisi masyarakat, maka hal tersebut tentu akan membebaninya. Padahal, beliau mungkin juga harus menyiapkan *sangu* selama 40 hari bagi keluarga yang ditinggalkan, ditambah lagi *sangu* untuk kebutuhannya selama di tanah suci. Biaya tradisi ritual sebelum dan sesudah ibadah haji, yang sesungguhnya bukan bagian dari rukun, wajib atau sunnah haji tersebut bisa jadi setara atau malah lebih mahal daripada biaya haji itu sendiri.

Tidak bisa dimungkiri, tradisi haji yang berkembang luas dan sarat biaya ini menjadi isu sensitif. Hal tersebut tercermin dari beberapa respon calon jamaah terhadap bahasan kepala kantor Kemenag Lumajang. Beberapa manggut-manggut, beberapa secara lisan mengakui bahwa tradisi tersebut memberatkan, beberapa hanya diam menerawang, dan beberapanya lagi

meradang serta bersikukuh dengan tradisi tersebut karena "nanti diomongin orang". *Hmm*...

Fenomena Masyarakat

Banyak studi menunjukkan bahwa masyarakat memahami ibadah haji sebagai pilar agama dan menjadi perintah bagi seorang muslim. Namun, sejumlah studi juga menunjukkan adanya pemaknaan lain yang dikonstruksi masyarakat bahwa ibadah haji ternyata juga menjadi simbol kedudukan sosial-ekonomi. Bagi masyarakat etnis tertentu, pergi haji bukan sekedar berorientasi ibadah, tetapi juga sebagai upaya memiliki posisi terhormat dalam stratifikasi sosial. Ada juga yang terobsesi pada aspek-aspek simbolik serta paham-paham keberkahan benda-benda tanah suci. Bahkan, pada profesi tertentu, pergi haji menjadi upaya membangun kepercayaan terhadap pelanggan.

Ragam motif beribadah haji pada gilirannya berdampak pada perbedaan ekspresi dalam menjalankan ibadah tersebut. Salah satunya termanifestasi dalam menyikapi tradisi masyarakat. Jamak terjadi bagi calon jamaah haji menggelar *selametan* atau *tasyakuran* atau *walimatussafar* sebelum pemberangkatan. Beberapa pihak menyebutkan bahwa fenomena ini dalam 15 tahun terakhir menjadi marak, bahkan seolah menjadi rangkaian wajib bagi siapa saja yang akan pergi haji. Semakin tinggi tingkat sosial-ekonomi seseorang, maka semakin besar perhelatannya, baik dari jumlah undangan, penceramah, hidangan, hingga menu *berkatan*.

Manifestasi lainnya juga tercermin pada "oleh-oleh" dari tanah suci yang sesungguhnya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dengan berbelanja di toko-toko suvenir haji di dalam kota atau di kota lain yang tidak jauh dari domisili. Oleh-oleh ini seolah menjadi syarat wajib bagi mereka yang pulang haji untuk memberi buah tangan kepada para tamu di rumah maupun kepada kolega dan handai taulan.

Terlepas dari berbagai pandangan maupun rujukan hukum yang digunakan dalam menilai tradisi *selametan* atau *tasyakuran* atau *walimatussafar* termasuk oleh-oleh, fenomena masyarakat ini patut disikapi secara arif. Selayaknya masyarakat tetap diedukasi dalam memaknai penyelenggaraan tradisi. Pasalnya, dari aspek sosial-ekonomi, tradisi ini dapat menjadi beban bagi sebagian masyarakat karena realitasnya pergi haji tidak selalu berkorelasi dengan peningkatan kemampuan ekonomi maupun perubahan perilaku sosial.

Sejumlah studi membuktikan tingginya jumlah jamaah haji di wilayah tertentu ternyata tidak dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketakwaan dan peningkatan perekonomian sebuah masyarakat. Motif non ibadah menjadi penyebabnya. Bahkan, sebagian dari mereka mengkonsentrasikan keuangan rumah tangga untuk kebutuhan ibadah haji (dan tradisi masyarakat) hingga mengabaikan biaya pendidikan anak, termasuk mengabaikan perintah zakat. Oleh karena itu, Kemenag, alim ulama dan tokoh masyarakat seyogyanya juga mengedukasi masyarakat, terutama calon jamaah haji, untuk meluruskan niat dan memprioritaskan persiapan pelaksanaan rukun, wajib dan

sunnah haji serta peningkatan kesalehan sosial-ekonomi pasca ibadah.

Kesalehan Sosial-Ekonomi

Pasca ibadah haji, layaknya seseorang memiliki kesalehan sosial-ekonomi yang lebih baik. Sejatinya, ritual haji berdampak kepada kehidupan mereka yang telah menjalaninya karena semua praktek ibadah haji mengandung pesan tertentu. Implikasi ibadah haji seharusnya berbanding lurus dengan kesalehan sosial-ekonomi, termasuk dalam menahan diri untuk tidak melakukan haji berulang dengan memberi kesempatan kepada kaum muslimin lainnya untuk menunaikan.

Ya, kesalehan sosial-ekonomi dapat berwujud aneka rupa. Prinsipnya, perjalanan ibadah haji harusnya membawa pengalaman kemanusiaan dan ketauhidan yang luar biasa yang membawa perubahan perilaku. Implikasi dari ibadah haji seyogyanya dapat meningkatkan kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat, membantu mengurangi ketimpangan antara Si Kaya dan Si Miskin, senantiasa mengingatkan tentang misi persamaan dan persaudaraan, serta memerangi berbagai ketidakadilan dalam masyarakat.

Selamat mengunjungi *Baitullah* untuk para calon jamaah haji. Semoga menjadi haji mabrur. *Labbaik allaahumma labbaik* ....

14
KRISIS DAN KEMISKINAN[14]

"Bu, Ibu tahu enggak, di desa itu banyak yang dapat uang hanya cukup untuk satu hari. Jangankan menabung, untuk makan saja, mereka masih kesulitan. Upah yang mereka dapat hanya cukup untuk makan hari itu saja. Enggak bisa mereka itu seperti yang Ibu bilang untuk menyisihkan tabungan dulu, baru sisanya dikonsumsi ...."

Demikian salah satu komentar yang masuk dari pendengar setia Radio Republik Indonesia (RRI) Jember ketika saya melakukan wawancara *on air* di studio beberapa waktu lalu. Ya, untuk kesekian kalinya saya mengisi acara bincang-bincang selama satu jam bersama *host* Pak Kirin Prawira dan Mbak Dea pada acara pagi hari.

Jujur saja, komentar pendengar tersebut cukup menonjok hati saya. Dan saya harus mengakui, saya belum tahu apa yang dapat saya tawarkan kepada mereka untuk bisa mengelola

---

14 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 25 Desember 2015.

keuangan rumah tangga. *"Iya Pak, untuk kelompok masyarakat demikian, seharusnya negara yang hadir menolong mereka ...,"* jawab saya terbata.

Apa yang disampaikan pendengar radio tersebut adalah realitas. Terlebih, belakangan, semakin banyak keluhan yang muncul terkait melambatnya pertumbuhan ekonomi. Pada sosial media, seorang kawan yang beternak kambing dan ayam pelung di daerah Grenden, Puger, menuliskan status pada *facebook*: *Sudah capek hidup kembang kempis, harga-harga kebutuhan naik, pendapatan menurun, jualan gak laku, angsuran numpuk, kambing habis terjual tinggal kandangnya. Tabah Sampai Akhir!*

Indonesia Krisis?

Pertanyaan tersebut dalam beberapa bulan terakhir memang banyak mengemuka. Terutama, setelah nilai tukar rupiah terhadap USD menembus Rp14.000. Jauh sebelumnya, akhir Desember 2014, seorang kawan di Surabaya meminta saya memprediksi nilai tukar rupiah dan meminta rekomendasi kapan waktu yang tepat untuk membeli USD berkenaan dengan rencananya umroh. Melemahnya rupiah memang menjadi variabel penting saat ini untuk mengambil keputusan.

Namun demikian, melemahnya nilai tukar rupiah tidak serta merta dapat disebut krisis. Secara teoretis, krisis ekonomi ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang jatuh, inflasi tidak terkendali, melemahnya mata uang, dan terjadi kekacauan politik dan keamanan. Menyimak kondisi ekonomi makro terakhir, Indonesia masuk kategori siaga. Bila pelemahan nilai tukar rupiah

sudah berdampak besar bagi dunia usaha, maka perekonomian Indonesia memperoleh lampu merah. Apalagi, sebelumnya, masyarakat sudah terkena imbas harga-harga yang meningkat. Belum lagi di beberapa daerah yang mengalami pemutusan hubungan pekerjaan (PHK) dan harga jual produksi pertanian yang anjlok.

Lalu, bagaimana dengan keluarga miskin? Masih banyak masyarakat yang rawan miskin dan berpotensi kembali miskin. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penduduk miskin sepanjang 2009-2014 secara persentase maupun jumlah cenderung menurun. Hanya pada tahun 2013 yang mengalami pertambahan. Mayoritas penduduk miskin berupah rendah lantaran tidak tamat sekolah dasar. Parahnya, satu kepala keluarga miskin masih harus menanggung hidup 4-5 anggota keluarga.

Bantuan sosial dari pemerintah adalah keniscayaan. Namun, sifatnya hanya membantu dalam jangka pendek. Kedermawanan masyarakat kelas menengah ke atas adalah salah satu cara untuk mengentas kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Agar bersifat jangka panjang, maka perlu pendanaan yang bersifat produktif yang disertai pula dengan pendampingan. Pada titik inilah negara perlu memfasilitasi dan memberi insentif kepada berbagai program yang digiatkan masyarakat.

Sektor Riil

Panduan normatif yang lazim diberikan oleh konsultan perencana keuangan untuk pengelolaan keuangan keluarga antara lain: susun rencana keuangan atau anggaran, bedakan

antara kebutuhan dan keinginan, hindari utang, kurangi belanja konsumtif, tetapkan tujuan atau cita-cita finansial, menabung, dan berinvestasi. Lalu, bagaimana dengan warga miskin yang upah hariannya hanya cukup untuk makan satu hari?

Sebuah tesis dari ilmu kesejahteraan sosial tentang manajemen keuangan keluarga miskin menyebut aspirasi atau tujuan keluarga miskin masih pada taraf pemenuhan kebutuhan dasar dengan nilai acuan relatif rendah. Pendapatan mereka bersifat fluktuatif dan cenderung rentan terhadap perubahan kondisi alam. Dari segi *troughput,* meski keluarga miskin tidak melakukan perencanaan keuangan dan implementasinya tidak sesuai anjuran normatif, namun mereka mempunyai sistem sendiri dalam menjaga dan mengelola keuangan keluarga. Mereka menjalani suatu proses yang tidak didasarkan pada catatan tertulis tentang apa yang direncanakan atau akan dilakukan, akan tetapi berdasar pengalaman dan rutinitas yang mereka lakukan.

Menghadapi perekonomian yang tumbuh melambat dan tekanan kuat dari dari faktor eksternal, maka peran pemerintah sebagai wujud kehadiran negara adalah wajib menghadirkan berbagai program yang berpihak kepada masyarakat luas. Bagi pemerintah daerah, memproteksi pelaku usaha di wilayahnya dapat dilakukan di antaranya dengan membangun jaring distribusi dan pasar antar daerah. Sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) tidak selalu harus diajak untuk menembus pasar internasional. Pasalnya, pasar Indonesia sendiri sangat luas dan justru menjadi rebutan produsen mancanegara. Terlebih, ke depan, kondisi demografi Indonesia bukan lagi berbentuk

piramida, tetapi serupa wajik, yang menunjukkan bahwa struktur masyarakat Indonesia akan mengalami bonus demografi. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk produktif yang sangat besar.

Jadi, jargon "Cintai Produk Dalam Negeri" atau "Cintai Produk Lokal" hendaknya tidak menjadi pepesan kosong. Himbauan ini juga harus menjadi program kerja bersama untuk membantu sektor UMKM di daerah. Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), kita berharap akan banyak tawaran program kerja cerdas inspiratif yang tidak sekadar mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan. Jaringan, informasi, reputasi, ide, pengetahuan, kreatifitas adalah sebagian dari sumber daya yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian, termasuk untuk menolong penduduk miskin. Kembali pada sektor riil adalah kuncinya. *Wallahua'lam bish showab.*

2016

15
CROWDFUNDING [15]

Buat ukhti manis Gita Ayu Pratiwi
Semoga memperoleh umur yang berkah
Dan jadilah muslimah sejati
Agar Allah selalu besertamu
Sun sayang
Mas Ikhwan, eh Mas Gagah!

Demikian secuplik epilog berupa ucapan milad dari Mas Gagah kepada adiknya, Gita, pada novel *best seller* Ketika Mas Gagah Pergi (KMGP) karya Helvy Tiana Rosa (HTR). Novel yang bercerita tentang hijrahnya Mas Gagah itu ditulis tahun 1992. Setidaknya ada 11 rumah produksi yang pernah meminta HTR untuk menfilmkan novel tersebut. Namun, idealisme untuk menjaga keutuhan cerita yang memiliki pesan sarat moral tersebut mendorong HTR untuk memproduksi sendiri novel KMGP. *Crowdfunding* menjadi pilihannya.

15 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 1 Februari 2016

Patungan

Crowdfunding sejatinya adalah mobilisasi dana masyarakat untuk membiayai suatu usaha atau kegiatan atau proyek tertentu. Sederhananya, *crowdfunding* adalah investasi bersama; pendanaan dengan patungan; pembiayaan dengan cara gotong royong. Model penggalangan dana seperti ini mulai marak beberapa tahun belakangan. Internet menjadi mediatornya.

Industri kreatif dan pebisnis pemula merupakan peminat teraktif dalam menggunakan pendanaan ala *crowfunding.* Namun demikian, metode ini sesungguhnya dalam skala besar dapat diadopsi dan dikembangkan oleh pemerintah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Timur, lembaga kemanusiaan asal Belanda menyumbang 10 mesin penghasil biogas di sejumlah desa melalui *crowdfunding* di media sosial dan konser amal. Di Australia, sebuah komunitas menawarkan sejumlah investasi dalam proyek infrastruktur di daerah pedesaan dengan mengadopsi prinsip *crowdfunding* agar tidak bergantung kepada pendanaan dari pemerintah. Di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Selatan, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), ESQ, dan Asosiasi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Seluruh Indonesia (ABSINDO) menggagas program membangun Desa Emas. Terdapat 400 Desa Emas percontohan yang tersebar di dua provinsi tersebut. Salah satu cara yang akan dilakukan untuk menggalang dana adalah melalui *crowdfunding.*

Potensi & Regulasi

Konsep *crowdfunding* pertama kali dicetuskan di Amerika Serikat pada tahun 2003 melalui sebuah situs bernama Artistshare. Secara umum, *crowdfunding* dapat diklasifikasikan ke dalam empat model. **Pertama,** *equity-based crowdfunding.* Model ini memberi saham bagi para donatur atas proyek tersebut dan juga bagi hasil sesuai kontrak yang disepakati. **Kedua,** *lending-based crowdfunding*. Model ini juga memberi bagi hasil kepada donatur dalam jangka waktu tertentu yang dikuti dengan pengembalian uang. **Ketiga,** *reward-based crowdfunding.* Model ini paling diminati di Indonesia. Donatur akan memperoleh *reward* nontunai berupa barang, piagam atau pemuatan nama di jaringan sosial media. **Keempat**, *charity-based crowdfunding*. Model ini menyerupai derma; amal; infak; sedekah. Donatur pada model ini memberikan dukungan tanpa harapan adanya kompensasi.

Di Indonesia, *crowdfunding* masih memiliki celah untuk munculnya persoalan hukum, utamanya pada jenis *equity-based crowdfunding. Crowdfunding* jenis ini dapat dipastikan sudah masuk ranah sektor jasa keuangan. Konsep *crowdfunding* mirip dengan ide yang digagas Ustadz Yusuf Mansyur (UYM) tiga tahun lalu yang menuai kontroversi karena dinilai melanggar regulasi. Seiring dengan tren *crowdfunding* yang nyatanya kini kian marak digunakan oleh pekerja kreatif dan pebisnis pemula, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meresponnya. Permasalahan yang mungkin dihadapi dalam implementasi *crowdfunding* adalah legalitas dan keamanan.

Lebih jauh, *crowdfunding* sesungguhnya bukan sesuatu yang baru bagi bangsa Indonesia. Semangat *crowdfunding* sejalan dengan semangat ekonomi konstitusi. Koperasi yang merupakan soko guru perekonomian Indonesia adalah filosofi dalam *crowdfunding* yang dikemas dengan menggunakan teknologi informasi. Bagi ekonomi syariah, *crowdfunding* dapat menjadi alat untuk menggerakan perekonomian dan mendorong *velocity of money*. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengatakan, *"Siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikannya. Dan siapa saja yang memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya".* Diriwayatkan pula dari Aisyah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang tidak menjadi milik seseorang, maka ia lebih berhak (atas tanah itu).*" Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah menganjurkan agar seluruh komponen modal dapat digunakan pada kegiatan produktif.

Ke depan, pemerintah daerah dengan semangat otonomi daerah yang berorientasi pada kemandirian dapat memanfaatkan metode *crowdfunding* sebagai alat pembiayaan alternatif bagi pembangunan. Aparatur Sipil Negara (ASN) atau masyarakat umum dapat dilibatkan untuk membantu pembangunan. *Equity-based crowdfunding* atau *lending-based crowdfunding* merupakan model yang paling rasional untuk dipilih agar masyarakat dapat menerima manfaat finansial dari usaha atau kegiatan atau proyek yang dibiayai melalui nilai saham atau imbal hasil yang mereka peroleh. Kalaupun harus menggunakan *charity-based*

crowdfunding, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga amil zakat (LAZ) untuk menjadikannya sebagai program wakaf atau infak atau derma untuk mendanai usaha atau kegiatan atau proyek tertentu yang tidak mengurangi nilai pokoknya. *Wallahua'lam bish showab.*

16
ASURANSI PERTANIAN[16]

"I think one of the solutions for such situations is the takaful idea to overcome time of hardship together through contributions from the whole community to cover those who are less fortunate ….'' – Issam Al-Tawari (2012)

Demikian sebagian komentar *Brother* Issam, begitu saya memanggilnya, seorang alumnus Durham *University* yang selama 10 tahun menjabat sebagai *chief executive officer* (CEO) sebuah perusahaan investasi keuangan dan *chairman* sebuah bank investasi di Kuwait. Melalui surat elektronik, saat itu saya menceritakan tentang petani cabai di Indonesia yang mengalami gagal panen karena terendam air akibat curah hujan yang tinggi.

Pada surat tersebut, saya ceritakan pula tentang petani cabai di Jember yang meminta penundaan pelunasan utang kepada bank lantaran lahan yang gagal panen menggunakan kredit bank. Saya menyampaikan kepada *Brother* Issam bahwa keuangan

16 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 21 Maret 2016.

mikro syariah seharusnya hadir membantu para petani tersebut. Ya, takaful (asuransi) mikro untuk pertanian merupakan kata kuncinya.

Selang tiga tahun dari diskusi saya dan *Brother* Issam, sejumlah media nasional memberitakan bahwa pemerintah telah menunjuk badan usaha milik negara (BUMN) asuransi, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), sebagai penjamin asuransi tunggal bagi petani yang mengalami gagal panen. Asuransi pertanian ternyata menjadi salah satu paket kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia jilid III di sektor keuangan. Akhirnya ....

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Pelaksanaan asuransi pertanian ternyata merupakan amanat dari undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pemerintah dan pemerintah daerah (Pemda) sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian. Asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim, dan/atau jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Untuk itu, pemerintah dan Pemda sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi setiap petani untuk menjadi peserta asuransi pertanian. Namun demikian, saat ini, asuransi pertanian yang menjadi program pemerintah pusat hanya berlaku untuk tanaman padi. Melalui Asuransi Usaha Tani

Padi (AUTP), pemerintah memberi perlindungan kepada petani padi yang telah menerapkan *good agricultural practices*.

Surat Menteri BUMN pada September 2015 menjadi dasar pelaksanaan AUTP yang menugaskan Jasindo sebagai pelaksana. Polis AUTP yang diterbitkan Jasindo kemudian mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Oktober 2015. Melalui AUTP, petani kini dimungkinkan mengakses sumber-sumber permodalan formal. Dengan jaminan Jasindo, petani menjadi *bankable* sehingga dapat memperoleh pinjaman bank. Bank memberi pinjaman karena dapat mengalihkan kredit ke Jasindo.

Adapun tarif premi yang harus dibayar petani sebesar tiga persen dari harga pertanggungan. Harga pertanggungan yang menjadi santunan pemerintah sebesar Rp6 juta per hektar. Artinya, tarif premi yang harus dibayar adalah Rp180 ribu per hektar. Namun, petani cukup membayar 20 persen tarif premi atau setara Rp36 ribu per hektar dan sisanya yang 80 persen atau Rp144 ribu dibayar pemerintah melalui subsidi.

Stakeholders

Pada Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan di wilayah kerja Kantor OJK Jember akhir Februari lalu terungkap bahwa Jasindo di Tapal Kuda barulah meng-*cover* Kabupaten Jember dan Bondowoso. Yang menarik untuk dikaji adalah besaran lahan per masa tanam Oktober 2015-Maret 2016 di Kabupaten Jember yang mengikuti AUTP baru seluas 293,5 hektar dengan total premi yang dibayarkan petani sebesar Rp10,564 juta.

Adapun besaran klaim lahan yang telah dibayarkan Jasindo seluas 8,47 hektar senilai Rp50,838 juta dan klaim yang *on process* untuk dibayarkan sebesar Rp60,1 juta untuk lahan seluas 10,01 hektar.

Sementara itu, di Bondowoso, pada periode tanam yang sama, besaran lahan yang mengikuti AUTP sudah seluas 3.561,39 hektar dengan total premi yang dibayar petani sebesar Rp128,18 juta. Hingga saat ini belum ada pengajuan klaim. Adapun jumlah Poktan yang mengikuti AUTP sebanyak 163 kelompok dengan anggota sebanyak 1.412 petani. Sedangkan jumlah Poktan di Jember yang mengikuti AUTP hanya 71 kelompok dengan anggota sebanyak 643 petani.

Mengingat asuransi pertanian merupakan amanat UU dan menjadi kewajiban pemerintah pusat dan Pemda, maka seyogyanya *stakeholders* di daerah bekerjasama dengan perusahaan asuransi yang telah ditunjuk untuk mensosialisasikan program AUTP. Ke depan, asuransi pertanian diharapkan tidak terbatas pada tanaman padi saja. Bila pemerintah pusat telah menanggung klaim untuk lahan pertanian padi, maka Pemda dapat mengupayakan untuk menanggung lahan dengan tanaman jenis lainnya.

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa “manusia berserikat pada air, padang rumput, dan api”. Makna “padang rumput” secara luas dapat diinterpretasikan sebagai segala bentuk pemenuh kebutuhan hidup manusia yang memiliki fungsi pangan. Hal ini relevan dengan persoalan di Indonesia yang dalam dasawarsa terakhir mengalami krisis ketahanan pangan yang tercermin dari naiknya harga dan langkanya sejumlah kebutuhan bahan makanan

pokok. Isu yang menguak berkutat pada ketergantungan impor, ketidakmampuan berswasembada pangan, dan makin sedikitnya penduduk yang berminat pada sektor pertanian.

Untuk itu, pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), tidak bisa tidak, penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang menjalankan fungsi pangan patut mendapat perhatian lebih, termasuk dalam upaya melindungi kesejahteraan pelaku di sektor tersebut. Dalam hal ini, negara perlu hadir karena terkait dengan hajat hidup orang banyak dan pengelolaan SDA yang mengemban kepentingan umum menjadi tanggung jawab negara. *Wallahua'lam bish showab.*

17
AYO DUKUNG SENSUS EKONOMI![17]

Sepucuk surat undangan dialog bisnis berwarna merah hitam tergeletak di meja kantor saya. Penyelenggaranya BPS. "*Semoga Pak Dekan memberi izin untuk saya menghadirinya ya, Mas. Kebetulan pagi itu jadwal mengajar saya kosong. Tapi saya tidak bisa memenuhi undangan bila tidak ada izin dari Pak Dekan. Tentu senang sekali kalau bisa bertemu langsung dengan Kepala BPS untuk mengetahui lebih banyak tentang pelaksanaan sensus ekonomi. Saya ingin kenalan juga, mungkin beliau bisa membantu kalau suatu hari nanti saya butuh data sesuatu,*" kata saya kepada pengantar undangan akhir pekan lalu.

Ya, buat saya yang senang berkutat dengan *paper,* undangan dari *event organizer* (EO) untuk menghadiri Dialog Bisnis Badan Pusat Statistik (BPS) tentu bergayung sambut. Data sekunder BPS adalah salah satu sumber rujukan utama yang pasti dicari dan digunakan oleh semua peneliti sosial-ekonomi di Indonesia.

17 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 25 April 2016.

Begitu pula dengan saya. Penting bagi kami untuk mengetahui data yang *up to date* dan informasi terkini dari produk BPS.

Undangan Dialog Bisnis dari BPS ternyata terkait dengan hajatan Sensus Ekonomi. BPS akan menyelenggarakan Sensus Ekonomi yang akan berlangsung pada 1-31 Mei. Perhelatan 10 tahunan ini nantinya akan menggambarkan kondisi terkini dari perekonomian Indonesia. Kita semua menanti gambaran struktur ekonomi nasional terbaru. Saya pribadi pun menanti gambaran perkembangan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). BPS memperkirakan akan terdata 24 juta usaha di seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan total usaha pada sensus sebelumnya yang sebesar 22,7 juta usaha.

Bagi pemerintah, hasil sensus ekonomi akan berkontribusi bagi pengambilan kebijakan terkait penyederhanaan peraturan perizinan, pemberian insentif, pemberian bantuan kredit atau pembiayaan, dan pembangunan infrastruktur. Bagi dunia usaha, hasil sensus akan membantu dalam memberi informasi untuk pengembangan usaha, mengetahui daya saing, dan peluang usaha di masing-masing daerah. Bagi peneliti, (mungkin) hasil sensus bak *ghanimah* yang ingin segera dianalisis untuk disajikan dalam kajian akademis.

Apa itu Sensus Ekonomi?

Sensus menurut Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia (RI) untuk memperoleh karakteristik

suatu populasi pada saat tertentu. Sensus Ekonomi adalah salah satu amanah UU Statistik kepada BPS yang dilaksanakan untuk mendapat potret utuh perekonomian bangsa sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun regional.

Tahun ini adalah pelaksanaan sensus ekonomi ke-5. Sebelumnya, sensus ekonomi telah dilaksanakan pada tahun 1976, 1986, 1996, dan 2006. Metode pendataan Sensus Ekonomi tahun ini menerapkan: (1) metode *listing* usaha dengan pencacahan yang dilakukan di seluruh wilayah RI untuk seluruh usaha ekonomi. (2) Metode pendataan karakteristik usaha mikro dengan pencacahan yang dilakukan secara sampel berdasarkan kerangka hasil *listing* dari metode pertama. (3) Metode pendataan karakteristik usaha menengah besar yang dilakukan secara sensus untuk seluruh usaha skala menengah dan besar.

Adapun cakupan sensus ekonomi tahun ini meliputi seluruh usaha non pertanian dan pelaku usaha. Buat Kabupaten Jember yang pemerintah daerah barunya hendak mengembangkan warung kopi dan sembako berjaringan, maka hasil sensus ini akan sangat membantu menyajikan data dan informasi pelaku usaha mikro dan nano. Bagi Kabupaten Lumajang yang kini sudah hadir usaha jasa transportasi OwJek ala Gojek di Jakarta, ditambah lagi sektor pariwisata yang menggeliat, maka bisa jadi akan ada perubahan struktur perekonomian di wilayah ini. Selain sektor perdagangan dan jasa yang diperkirakan akan meningkat pesat, keberadaan industri kreatif diprediksi akan mulai dominan di seluruh wilayah Indonesia.

Nantinya, keseluruhan hasil Sensus Ekonomi diharapkan menghasilkan sejumlah *output*. Yaitu, pemetaan potensi ekonomi menurut wilayah, jenis dan pelaku usaha; *benchmarking* untuk produk domestik regional bruto (PDRB), ketenagakerjaan, dan lain-lain; tersedianya *sampling frame* untuk berbagai kegiatan survei bidang ekonomi (survei harga, survei produksi, survei distribusi, survei jasa, dan lain-lain); terbangunnya basis data dan pembaharuan *integrated business register* (IBR); karakteristik usaha menurut skala usaha; pemetaan daya saing bisnis menurut wilayah; serta tinjauan prospek bisnis dan perencanaan investasi di Indonesia.

Dijamin Kerahasiaan

Tantangan terberat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi adalah penolakan responden. Salah satu persoalan utama di lapangan adalah sulitnya mengakses perusahaan menengah dan besar. Petugas sensus kerap tak dapat bertemu dengan pemilik atau petinggi perusahaan. Hal ini dapat dipahami karena kekhawatiran pelaku usaha bila data riil yang mereka sampaikan akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menarik pajak usaha yang lebih tinggi. Pertanyaan seperti, "jumlah omset usaha" adalah pertanyaan sensitif bagi mereka.

Untuk itu, perlu sosialisasi dan edukasi bagi para pelaku usaha untuk memahami bahwa sensus ekonomi akan menghasilkan data agregat, bukan data entitas individu. Selain tidak ada pungutan biaya, data individu perusahaan akan dijamin kerahasiaannya oleh UU. Variabel "jumlah omset usaha" penting untuk disampaikan

dengan jujur agar dapat diperoleh angka riil untuk dijadikan acuan penghitungan PDRB. BPS menjamin tidak ada konsekuensi pajak terhadap pengusaha yang menjadi objek sensus. BPS akan merahasiakan nama dan alamat objek survei.

Maraknya bisnis *online* tak lepas pula dari target yang disasar BPS. Meski tak berbentuk nyata karena memanfaatkan dunia maya, namun petugas survei telah dibekali keahlian menginvestigasi data penghasilan mereka. Tahun ini terdapat 19 sektor usaha yang akan disensus dan beberapa di antaranya adalah sektor usaha baru seperti: Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah, reparasi dan perawatan mobil motor, jasa persewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya, jasa perorangan yang melayani rumah tangga, serta kegiatan badan dan organisasi internasional.

Ya, sensus ekonomi memiliki arti strategis sebagai barometer perekonomian Indonesia. Harapannya, pemegang kebijakan kelak dapat membuat keputusan tepat karena berbasis data mutakhir yang akurat, terkini, dan terpercaya. Begitu pula dengan publik yang dapat mengkritisi arah perkembangan kinerja perekonomian selama 10 tahun terakhir. Jadi, ayo dukung Sensus Ekonomi!

18
EKSTERNALITAS NEGATIF REMAJA[18]

B*raaak!*

"Astaghfirullaah ... kalian ini ya! Umur berapa kalian ini kok sudah dibolehkan naik sepeda motor! Sudah enggak pakai helm, sembarangan di jalan! Lihat ini sampai nabrak-nabrak begini ... Mana orang tua kalian, kok biarkan anaknya di bawah umur bisa naik sepeda motor. Kalian pasti belum punya KTP, SIM ... Enggak bener ini orang tuanya yang biarkan anaknya naik motor bercanda-bercanda di jalan ... dst."

Saya sudah tidak ingat sepenuhnya kalimat tinggi nan cepat yang muncul dari bibir saya ketika mengomeli enam orang anak yang dari posturnya seperti masih anak sekolah menengah pertama (SMP). Saat itu beberapa hari menjelang bulan puasa. Setelah mengambil laptop di tempat servis di Jalan Kalimatan, saya mampir di pedagang cilok. Sembari menunggu dilayani, kemudian dua sepeda motor yang saling berboncengan *cekakak-cekikik* menghampiri. Mereka parkir tepat di belakang mobil saya

18 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 27 Juni 2016.

dan tepat di depan rombong. Saya pun kemudian masuk agak ke dalam rombong karena pengendara dan penumpang dua sepeda motor tersebut sepertinya akan turun sehingga area saya berdiri menunggu ketambahan dua sepeda motor dan empat orang tersebut.

Tak lama, tiba-tiba sepeda motor lain yang juga penumpangnya berboncengan muncul dengan kondisi mengerem kuat karena laju kecepatannya cukup tinggi. Sepeda motor tersebut lalu menabrak dua sepeda motor yang parkir dan sepeda motor yang paling depan menyeruduk mobil saya. Emosi tergugah bukan karena mobil yang ringsek (karena masih ada asuransi), tetapi karena pengendara sepeda motor paling depan itu sampai terjungkal. Yang lainnya berhasil menyingkir. Saya pun kalau tidak berinisiatif masuk ke dalam rombong, kemungkinan akan tertabrak. Emosi kian melangit karena sepeda motor penabrak tersebut ternyata adalah bagian dari rombongan dua sepeda motor yang *cekakak-cekikik*. Total dari enam anak tersebut tidak ada satu pun yang mengenakan helm. Mereka berkendara sambil bercandaan dengan mengenakan *earphone* dan *mobile phone* ditangan.

Ya, fenomena anak di bawah umur mengendarai sepeda motor menjadi konsumsi saya yang selalu menyusuri rute Lumajang-Jember pulang pergi setiap hari. Pada saat hari sekolah, anak-anak bercelana pendek biru berboncengan di jalan selalu menjadi tayangan rutin. Jalan yang mereka susuri adalah jalan provinsi yang selalu melalu-lalang bis besar, truk, dan aneka kendaraan roda empat lainnya. Semakin miris karena mereka berkendaraan tanpa helm dan melaju kencang.

Di bulan Ramadan ini yang bersamaan dengan liburan sekolah, fenomena tersebut bukannya mereda. Di beberapa titik, kemunculan anak-anak di bawah umur berkendara sepeda motor semakin terlihat kala *ifthar* (jelang berbuka puasa) a.k.a *ngabuburit* dan usai tarawih. Hal ini menambah masalah-masalah sosial ekonomi di bulan Ramadan. Ramadan yang esensinya adalah momentum untuk perbaikan diri, kemunculan eksternalitas negatif dari anak-anak di bawah umur akan menjadi beban publik hari ini dan masa depan.

Eksternalitas Negatif

Dalam teori ekonomi mikro, eksternalitas dapat didefinisikan sebagai kerugian atau keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain yang tidak tercermin dalam harga pasar. Eksternalitas juga dapat diartikan sebagai biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi pihak lain. Eksternalitas menjadi sering disinggung ketika muncul dampak negatif di pasar.

Eksternalitas negatif muncul karena adanya dampak yang merugikan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap orang lain tanpa adanya kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Sebagai contoh, ketika anak di bawah umur mengendarai sepeda motor dan kemudian menabrak seseorang hingga korban mengalami cedera dan harus masuk rumah sakit. Maka, biaya yang dikeluarkan korban untuk penyembuhan dirinya merupakan eksternalitas negatif. Contoh lain, ketika seorang

anak bermain mercon atau petasan dan kemudian melukai anak lain yang tidak sengaja berlalu di dekatnya, maka biaya yang dikeluarkan orangtua dari korban untuk memulihkan kondisi anaknya adalah eksternalitas negatif.

Di bulan Ramadan, sesungguhnya eksternalitas positif juga terjadi. Utamanya bagi mereka-mereka yang menerima berkah paket sembako, parsel, santunan, dan bentuk pemberian sosial lainnya. Ketika hal itu berlangsung, maka sesungguhnya terjadi aliran distribusi kekayaan berbonus pahala berlipat ganda bagi si pemberi yang menjadi salah satu keistimewaan Ramadan. Namun, eksternalitas negatif juga marak terjadi. Sebut saja harga sembako yang melesat, iklan televisi yang *jor-joran* mendorong konsumerisme, SMS “minta duit” yang kian intens, meluasnya peredaran uang palsu, termasuk angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi.

Optimalisasi Liburan Sekolah

Tidak ada yang tidak senang dengan liburan. Tetapi bila masa liburan sekolah dan Ramadan hanya dihabiskan dengan duduk manis depan televisi, cangkruk, tidur sepanjang hari atau keluar masuk pusat perbelanjaan, maka tentu bukan ini yang kita harapkan dari generasi muda. Ramadan dan liburan sekolah seyogyanya menjadi momentum untuk menimba ilmu, utamanya ilmu agama.

Ilmu adalah cahaya jiwa. Ilmu adalah penjaga diri. Ilmu pula yang akan menuntun setiap pribadi berperilaku. Eksternalitas negatif dapat direduksi secara massif bila pelaku-pelakunya

berilmu. Peperangan hari ini adalah *ghazwul fikri.* Anak-anak dan remaja menjadi korban utama. Ilmu adalah senjata untuk memeranginya. Ilmu pula yang akan menjadi perisai menghadapi derasnya arus informasi dan teknologi yang tanpa sadar mengubah cara pandang, prinsip, nilai, dan keyakinan diri dan lingkungan. Berbagai aksi asusila, gaya hidup konsumtif, dan tindak kriminalitas kini merambat kepada anak-anak dan remaja sebagai pelaku sekaligus korban.

Untuk itu, besar harapan, pemerintah daerah bersama institusi pendidikan dan pihak swasta bersama masyarakat perlu bersinergi untuk menyemarakkan majelis ilmu bagi para remaja. Paradigma Ramadan dan liburan sekolah sebagai masa istirahat, harus berubah menjadi sarana produktif untuk memperkaya pikiran, melembutkan hati serta mengasah jiwa. Pembangunan tidak hanya membutuhkan sumber daya insani yang memiliki *intelligence quotient* (IQ), tetapi juga *emotional quotient* (EQ) dan *spiritual quotient* (SQ) yang baik. Keselarasan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual adalah kunci anak-anak kita menghadapi masa depannya. *Wallahua'lam bish showab.*

19
YUK, PERANGI RIBA DAN RENTENIR![19]

"Iya, Mbak. Pak Kyai yang mengadakan istighosah itu juga bahas soal rentenir. Pak Kyainya bilang, kalau dari yang hadir di acara tersebut punya tetangga atau saudara yang punya tanggungan utang ke rentenir dan tidak mampu membayar, disuruh menghadap Pak Kyai. Pak Kyainya mau membayarkan ...."

Demikian cerita Mas Chandra, sopir yang selama 1,5 tahun lebih bekerja pada keluarga besar saya. Saya menanyakan tentang acara *istighosah* yang ia ikuti pekan lalu. Lantaran mengikuti kegiatan tersebut, Mas Chandra terlambat menjemput Bapak Ibu saya hingga dua jam karena kendaraannya terjebak di dalam halaman parkir. Penjelasannya kemudian menyinggung topik rentenir yang beberapa bulan belakangan intens menjadi bahan kajian akademis saya bersama

19 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 18 Juli 2016.

nanofinance dan *waqf-sukuk* untuk konferensi yang diprakarsai *Islamic Development Bank* (IDB).

Saya menemukan profesi rentenir banyak terdapat di negara-negara Asia. Sebut saja di antaranya Bangladesh, India, Pakistan, Afghanistan, Philipina, Thailand, dan tentu saja Indonesia. Banyak lembaga keuangan mikro (LKM) yang didirikan untuk mereduksi rentenir. Namun, sebagian besar masih mengenakan bunga juga. Sebagian kecil sudah ada yang menginisiasi pinjaman bebas bunga dan administrasi, sebagian lagi ada yang hanya mengenakan biaya administrasi.

Praktek *rente* di Indonesia biasanya mematok bunga kisaran 10-30 persen per bulan. Ilustrasinya sebagaimana yang diceritakan Mas Chandra tentang tetangga sekitar rumah yang meminjam uang pada rentenir. Ketika sang tetangga meminjam uang Rp3 juta, maka rentenir menyerahkan uang sebesar Rp2,7 juta. Rp300 ribu adalah bunga 10 persen yang langsung dipotong dari uang pokok untuk pelunasan bunga bulan ke-1. Sebulan kemudian, si peminjam ternyata berhasil memiliki uang dan ingin melunasi utang. Si rentenir meminta pengembalian uang sebesar Rp3,2 juta. Jadi, total bunga yang dibayarkan kepada rentenir hampir 17 persen untuk pinjaman selama satu bulan.

Dalam ekonomi syariah, pinjaman berbasis bunga inilah yang disebut dengan riba. Larangan riba bukan absolut ajaran Islam semata. Dalam agama Kristen, Hindu, Budha, Yahudi, riba juga dikecam. Bahkan, para filsuf Yunani di masa lalu, baik Plato, Aristoteles, dan Cato juga mencela praktik ini. Tersirat bahwa

praktik *rente* ini sama tuanya dengan usia peradaban di muka bumi.

Penyakit Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rentenir berarti orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang; tukang riba; pelepas uang; lintah darat. Dalam praktiknya, mereka-mereka yang memiliki profesi atau menjadi bagian dari kaki tangan pelaku *rente* ini ada di sekitar kita. Profesi tersebut tidak hanya dilakukan individu per individu, tetapi juga kelompok, bahkan korporasi. Perbedaannya, pelaku rente individu atau rentenir tidak berbadan hukum dan mengelola usaha dengan kebijakannya sendiri. Bisnis mereka perlu mendapat perhatian pemerintah karena mayoritas nasabahnya adalah kelompok masyarakat marginal. Mereka didesak oleh kebutuhan darurat untuk mencari pinjaman. Kelompok masyarakat peminjam ini lazimnya adalah mereka yang tidak *feasible* dan *bankable* bagi perbankan sehingga mencari pinjaman dari sektor informal. Ciri utama pinjaman dari sektor ini adalah tidak ada agunan, proses cepat, dan mengenakan tingkat bunga yang sangat tinggi.

Negara sesungguhnya telah hadir terhadap aktifitas ekonomi rentenir melalui Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Bab 3 Tugas dan Wewenang disebutkan dalam Pasal 15 bahwa kepolisian memiliki wewenang untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Adapun salah satu penyakit masyarakat tersebut adalah penghisapan/ praktik lintah darat.

Namun demikian, realitas menunjukkan rentenir masih terus eksis. Mereka tidak pernah kehabisan nasabah. Kehadiran mereka ada yang berkedok koperasi simpan pinjam. Ada yang menyebutnya Bank *Titil,* Bank Keliling, Bank Harian, Bank *Plecit* atau Bank Kredit. Peminatnya adalah ibu rumah tangga, pedagang kecil, pedagang kaki lima, dan kelompok masyarakat mikro lainnya yang kebanyakan minim tabungan dan aset sehingga harus mencari pinjaman eksternal untuk memenuhi kebutuhan darurat. Para rentenir bak gula yang dikerumuni semut lantaran tidak membatasi nilai pinjaman dan uang dapat diterima hari itu juga.

Tingginya bunga pinjaman rentenir terkadang membawa konsekuensi kaburnya sang peminjam karena enggan atau tidak sanggup membayar. Bahkan ada yang lebih memilih meregang nyawa. Hal ini mengingat konsep bunga berbunga yang banyak diterapkan oleh rentenir. Aksi rentenir menjadi meresahkan masyarakat kala mereka menyertakan *debt collector* selayaknya tukang pukul untuk menagih atau menyita barang. Jika disimak, masing-masing pihak, baik si rentenir yang memberi pinjaman maupun yang menerima pinjaman pada akhirnya berpeluang menjadi korban.

Memerangi Bersama

"Di sini banyak lho Bu yang menjadi rentenir. Mungkin mereka tidak tahu bahwa yang mereka kerjakan itu adalah riba yang dilarang agama. Jadi mereka tidak merasa bersalah, apalagi berdosa. Seharusnya informasi terkait praktik riba ini perlu kita sebarkan

kepada masyarakat luas ....″ Demikian komentar *host* Radio Suara Muslim di Lumajang yang beberapa waktu lalu memandu saya ketika mengisi *talkshow* di studio. Benarkah para pelaku *rente* ini tidak tahu? Entahlah.

Namun demikian, saya sepakat bahwa informasi terkait riba dan aksi rentenir sebagai penyakit masyarakat perlu disebarluaskan. Maraknya gerakan anti riba oleh mahasiswa maupun pengusaha belakangan ini juga layak diapresiasi. Namun, gerakan ini lebih baik lagi bila diiringi dengan tawaran solusi yang kongkret bagi masyarakat marginal. Gerakan ini seyogyanya juga tidak bekerja sendiri. Pada tataran inilah, pemerintah daerah perlu dilibatkan sembari bergandengan tangan dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), institusi zakat infak sedekah wakaf (ZISWAF), komunitas pelaku usaha, akademisi, aparat hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan *stakeholder* lainnya untuk bersama memerangi rentenir dan merumuskan institusi pengganti yang dapat melayani kebutuhan darurat masyarakat mikro tanpa bunga.

Yup, meski berbunga selangit, namun pinjaman uang tanpa jaminan dari rentenir bak "dewa penolong" bagi masyarakat saat terdesak oleh kebutuhan darurat. Jika penghasilan tak cukup, maka berutang pun dilakukan. Kemudahan dan cepatnya proses meminjam pada rentenir tampak menjadi solusi indah. Namun, bila sudah masuk perangkap riba, maka jeratannya akan mencekik leher dan meluntürkan nurani serta akal sehat. Belum lagi tanggungan dosanya yang paling ringan setara dengan dosa menzinahi ibu kandungnya sendiri. *Astaghfirullaah* ....

20
JANGAN MEROKOK DI KAWASAN PENDIDIKAN![20]

"Anda tahu sendiri kan orang Indonesia itu bagaimana? Mereka merokok di mana-mana. Tidak bisa diberi tahu. Bila diberi tahu, mereka malah marah-marah...."– Mekkah, 13 Dzulhijjah 1436H/2015

Itulah kalimat pamungkas dari manajer hotel tempat pemondokan haji saya setahun yang lalu. Saat itu, untuk yang kedua kalinya, saya menyampaikan komplain kepada pengelola pemondokan karena semua area lobi dipenuhi jamaah haji yang dibiarkan bebas merokok dalam ruangan yang terdapat pendingin. Setelah berulang kali berpindah sofa untuk duduk manis bekerja mengoreksi tesis mahasiswa, akhirnya saya tidak tahan juga untuk tidak menyampaikan aspirasi kepada pengelola hotel. Kepada sang manajer yang seorang Pakistani tersebut, saya meminta agar disediakan area bebas rokok di sekitar lobi hotel.

20 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 24 Oktober 2016.

Kisah tersebut sesungguhnya sudah saya tuliskan dalam blog pribadi yang berafiliasi dengan situs jurnalisme warga yang punya nama. Pembacanya hingga hari ini telah mencapai 2.100 lebih. Jumlah pembaca yang cukup fantastis untuk saya. Benar kata Sayid Quthb bahwa satu peluru dapat menembus satu kepala, tetapi satu telunjuk (tulisan) dapat menembus ribuan, bahkan jutaan kepala.

Topik rokok menjadi hangat kembali untuk saya pasca mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) selama hampir tiga minggu di Surabaya. Ada penuturan dari seorang teman dosen ketika forum testimoni di penghujung kegiatan yang cukup menggelitik. Ia mengatakan bahwa para peserta Diklat dari seluruh perguruan tinggi agama negeri se-Jawa Timur tersebut memiliki gerak-gerik unik bila saya akan melintas ketika mereka sedang merokok. Ada yang mengubah posisi duduknya agar saya tidak melihat rokok di jemarinya. Ada yang menyembunyikan tangannya ke bawah meja. Ada yang langsung menyembunyikan dirinya di balik tanaman tinggi. Ada yang langsung membuang ke tempat sampah. Ada juga yang menyelipkan rokoknya ke antara dedaunan tanaman.

"Saya mengenal Bu Nisa 2 tahun lalu. Sejak itu pula Bu Nisa suka mengingatkan saya soal rokok. Saya membatin, 'Ayo, kuat-kuatan! Kuat gak negur saya!'. Ternyata, sampai 2 tahun sekarang, saya dan Bu Nisa sama-sama kuat. Bu Nisa kuat mengingatkan saya. Saya juga tetap kuat untuk merokok ...." Begitu tutur Pak Imron Fauzi, dosen CPNS yang menjadi kolega saya di kampus, ketika menutup testimoninya.

Kawasan Tanpa Rokok

Sejak mengetahui keberadaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah, saya sungguh berharap peraturan tersebut juga muncul untuk lingkungan perguruan tinggi. Di Aceh, tiga perguruan tinggi telah memberlakukan larangan merokok sesuai peraturan walikota Aceh. Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah menetapkan delapan kawasan tanpa rokok, yakni perkantoran pemerintah, sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, sarana olahraga, angkutan umum, dan tempat umum yang tertutup.

Jauh sebelumnya, 10 tahun lalu, Jakarta melalui Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 telah menetapkan Kawasan Dilarang Merokok. Rokok diakui sebagai salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa udara yang sehat dan bersih hak bagi setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.

Ya, tentu saja saya mendorong pemerintah daerah untuk menyusul menetapkan kawasan dilarang merokok. Bukan semata karena saya punya asma sehingga mudah berwajah masam kepada mereka yang merokok tidak pada tempatnya. Tetapi, untuk kepentingan lebih besar, yaitu untuk mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta menurunkan angka perokok

dan mencegah perokok pemula. Ya, mewujudkan generasi muda yang sehat adalah keniscayaan. Untuk itulah, kawasan pendidikan seharusnya juga menjadi kawasan tanpa rokok, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan perguruan tinggi.

Kawasan Pendidikan

Yup, saya yakin akan banyak yang meradang ketika membahas rokok. Ujung-ujungnya akan menyinggung hak asasi manusia, nasib petani tembakau, nasib ekonomi rakyat, bahkan mungkin muncul tudingan menzalimi rakyat kecil. Saya tidak hendak mendebatkan hal yang sukar berujung. Saya menghormati pilihan sikap untuk terus merokok. Tapi, hormati juga mereka yang terganggu dengan sikap tersebut.

Penetapan kawasan pendidikan menjadi kawasan tanpa rokok tentu bukan tanpa alasan. Sebagaimana yang saya amati di pemondokan haji, mereka-mereka yang tidak sungkan, kerap arogan, bahkan ada yang marah-marah ketika ditegur untuk tidak merokok di ruang ber-AC justru adalah mereka-mereka yang dari pakaian atau pekerjaannya menunjukkan bahwa ia berpendidikan.

Di lingkungan pendidikan, para pendidik juga kerap melakukan hal tersebut. Pada ruangan berpendingin, entah mungkin lupa, langsung menyalakan rokok. Kalaupun tidak lupa, umumnya mereka akan membuka sebuah jendela dan merokok di pinggirnya meski pendingin tetap menyala. Ketika dalam forum-forum internal skala besar, bahkan tidak jarang pemimpin rapat langsung mengepulkan rokok dan membuang abunya di lantai.

Dalam forum-forum internal skala kecil, *huft* ... semua berlomba saling mengepulkan asap.

Jika kita sepakat bahwa pendidikan hari ini banyak menghasilkan output yang cerdas akal tetapi tidak terasah hatinya ... Jika kita sepakat bahwa murid atau mahasiswa hari ini lebih mengagungkan nilai akademis tinggi tetapi tidak mengedepankan budi. Jika kita sepakat bahwa pendidikan hari ini kehilangan *"soul"*. Jika kita sepakat bahwa profesi guru atau dosen adalah profesi mulia. Jika kita sepakat bahwa guru atau dosen adalah *uswah*. Jika kita sepakat bahwa amanah yang diemban institusi pendidikan harus mampu memberikan pendidikan dan pengajaran sebagai alat perubahan yang lebih baik bagi murid atau mahasiswa. Jika kita sepakat untuk bertanggung jawab terhadap keilmuan. Jika kita sepakat untuk jujur pada nurani, maka selamatkan anak-anak kita dari bahaya rokok. Salah satunya adalah dengan menetapkan kawasan pendidikan sebagai kawasan tanpa rokok. *Wallahua'lam bish showab.*

21
WAKAF UNTUK INSTITUSI PENDIDIKAN[21]

"... She is a lecturer from ... State Institutes of Islamic Studies ... Mmm ... Ai Ei Ai N ... Jember ...."

Demikian seorang profesor dari Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dari pihak *host* yang didapuk menjadi moderator pekan lalu ketika memperkenalkan diri saya. Huruf 'e' pada kata 'Jember' dibacanya dengan pengucapan sebagaimana penyebutan 'e' pada kata 'Jengkol' dan 'r' sebagaimana pengucapan dalam bahasa Inggris. Tak apalah. Paling tidak, beliau dan seluruh peserta yang hadir kini mengetahui bahwa ada kota bernama Jember di Indonesia dan ada perguruan tinggi bernama IAIN di kota tersebut.

Yup, tidak terduga, dalam sebulan terakhir, saya berkesempatan mengunjungi Malaysia dua kali. Bulan lalu, saya menghadiri *11th International Conference on Islamic Economics and Finance* (ICIEF) dengan tuan rumah *International Islamic*

21 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 28 November 2016.

University Malaysia (IIUM), Kuala Lumpur. ICIEF yang usianya tahun ini tepat 40 tahun adalah konferensi yang diselenggarakan *Islamic Development Bank* (IDB) melalui lembaga risetnya *Islamic Research and Training Institute* (IRTI). Terdapat sekitar 90 pembicara dari 30 negara di dunia yang hadir.

Selang sebulan, konferensi kedua yang saya hadiri adalah *2nd World Islamic Countries University Leaders Summit* (WICULS) 2016. Semula, tidak ada rencana untuk menghadiri kegiatan tersebut. Sepekan sebelum acara, seorang kolega mewakili Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT), semacam Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Malaysia menawarkan untuk *submit* abstrak. Dari tema yang tersedia, saya mengajukan judul yang masih erat kaitannya dengan bidang keilmuan saya, "*Waqf-Sukuk, Enhancing The Islamic Finance for Economic Sustainability in Higher Education Institutions*". Selisih sehari, ternyata nama saya sudah masuk dalam *timetable* kegiatan. Tak mungkin mundur. Pengajuan izin juga disetujui oleh Dekan. Akhirnya ....

Wakaf

Paparan dari sejumlah pembicara dalam *presummit* yang berlangsung dua hari kental dengan pendidikan tinggi Islam. Isu yang diangkat mengenai *qalb (virtues)-guided leadership & academic ethics*. Wajar, mengingat penyelenggaranya adalah AKEPT yang mengurusi perguruan tinggi dan kini tengah giat menggaungkan *ehsan* dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sedangkan USIM selaku *host*, saat ini gencar membangun

kurikulum yang mengintegrasikan *aqli* dan *naqli* pada semua bidang ilmunya. Ya, Malaysia sepertinya ingin membangun *soul* pendidikan tinggi berbasis Alquran dan As-Sunnah.

Pada sesi *main summit*, barulah tema beralih kepada isu yang mulai *nyerempet* bidang keilmuan saya, yaitu *equity and access to education, wisdom and leadership,* dan *waqf in higher education.* Ketiga isu ini diangkat dalam rangka menciptakan *sustainable development* pada pendidikan tinggi. Paparan saya dimulai dengan Al-Qarawiyyin di Moroko, perguruan tinggi tertua di dunia yang didirikan dari wakaf seorang wanita bernama Fatimah al-Fihri sekitar tahun 841-857. Seratus tahun kemudian, barulah berdiri Al-Azhar di Mesir yang juga menjadi *role model* perguruan tinggi berbasis wakaf.

Pasca Perang Salib, peradaban keilmuan Islam memberi pengaruh bagi kemunculan perguruan tinggi di dunia Barat 300 tahun kemudian. Oxford (1096-1167), Cambridge (1209), Harvard (1636), Yale (1701) adalah perguruan tinggi tertua di sana yang juga kemunculannya mengadopsi konsep wakaf. Keberadaan seluruh perguruan tinggi tersebut masih eksis hingga hari ini dan lulusannya diakui memiliki kecerdasan yang tinggi.

Ya, kini sejumlah perguruan tinggi di luar mencari alternatif dalam rangka mencapai *sustainability,* termasuk dalam hal pembiayaan. Pemangkasan dana tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga Malaysia. Sinyal yang sama sepertinya terpancar pula dari negara lainnya, terutama negara *petrodollar* yang selama ini menikmati harga minyak dan mensubsidi sejumlah lembaga internasional. Wakaf diangkat sebagai salah satu isu

sentral dalam WICULS untuk mencari alternatif pendanaan. Isu lainnya adalah bagaimana mengelola wakaf dan bagaimana mengintegrasikannya dengan kelembagaan lain. Bagaimanapun, aset wakaf akan mampu bermakna bagi *sustainability* bila *nadzir* atau *mutawalli* memiliki kemampuan yang baik dalam mengelolanya menjadi aset produktif.

Mengobarkan *Ghirah*

Selain semangat untuk membangun kejayaan ekonomi wakaf, para penyaji yang diundang untuk berbicara di WICULS juga mengisyaratkan ajakan untuk kembali pada tradisi pendidikan Islam. Pada tataran ini, wilayah Tapal Kuda memiliki keeratan dengan isu tersebut. Pasalnya, wilayah Tapal Kuda banyak memiliki pondok pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama yang *notabene* adalah institusi pendidikan. Hal ini merupakan anugerah, tapi juga sekaligus dapat menjadi ujian.

Ya, di luar sana, banyak perguruan tinggi yang mereformulasi penyelenggaraan pendidikan tingginya dengan mencoba membangun *ghirah* agama. Dalam konteks inilah, bagi institusi pendidikan yang sudah berbasis agama, bisa jadi *ghirah* tersebut tidak sebesar di luar sana karena pengetahuan agama sudah diperoleh sejak dini dan inheren dalam keseharian. Bahayanya apabila pengetahuan agama dirasa menjadi biasa-biasa saja karena lingkungan yang sudah sejalan dan senantiasa kondusif sehingga melenakan.

Atas dasar *ghirah* itulah, upaya kreativitas untuk mengembangkan wakaf dan pencarian alternatif lainnya dalam

agama menjadi misi serius. Ditambah lagi, kondisi ekonomi dan keuangan dunia yang mengalami tekanan. Pemangkasan anggaran terjadi di mana-mana. Institusi pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan dana pemerintah pusat. Belajar mandiri, belajar mengelola keuangan secara produktif, berhemat, dan terus bersinergi dengan *stakeholde*r lainnya menjadi kunci *survive*. Dalam rangka mencapai *economic sustainability* atau *financial sustainability*, perlu ada portofolio sehingga institusi pendidikan dapat mengelola dan meminimalkan risiko. Keterampilan ini pula yang harus dimiliki *nadzir* atau *mutawalli* sehingga aset wakaf dapat menciptakan *sustainable development.* Ya, wakaf sejatinya adalah *sustainable instrument* yang memiki kapasitas tidak hanya untuk kepentingan dunia, tetapi juga untuk kampung akhirat. *Wallahua'lam bish showab.*

22
2017, KENCANGKAN IKAT PINGGANG![22]

"…. karena yang hadir di sini banyak orang Ekonomi, maka saya menambahkan satu lagi ancaman krisis yang sekarang kita hadapi. Yaitu, krisis moneter …."

Demikian Prof. Sri-Edi Swasono dalam paparan rangkaian kuliah umum berjudul "Kontemporerisme Pengembangan Kurikulum dan KeIndonesiaan" di STIE Mandala dan kuliah umum "Kebangsaan, Persatuan, Stabilitas Nasional" di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember akhir November lalu. Saya cukup terkejut sekaligus besyukur karena apa yang saya risaukan dalam beberapa bulan terakhir ini ternyata diamini beliau. Gelisah ini menghangat karena belum ada media massa atau ekonom nasional yang terang benderang menyampaikan hal tersebut.

Akhir tahun lalu, sejumlah lembaga keuangan internasional telah menyampaikan bahwa 2016 adalah tahun pesimis bagi

22 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 19 Desember 2016.

pertumbuhan ekonomi global. Laju pertumbuhan perdagangan dunia yang melambat dan penurunan harga minyak mentah memberi dampak buruk bagi perekonomian negara yang mengandalkan ekspor bahan mentah tersebut. Beberapa negara yang menjadi barometer ekonomi global juga mengalami pelambatan dan menaikkan suku bunga.

Di dalam negeri, *shortfall* penerimaan perpajakan dan penghematan anggaran berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2016. Pemangkasan anggaran pada hampir semua lembaga dan kementerian serta munculnya *tax amnesty* sejatinya menjadi sinyal adanya masalah fiskal yang membelit anggaran. Kebijakan fiskal dan moneter hanya bisa mengendalikan perekonomian dalam jangka pendek. Lalu, bagaimana dengan 2017?

Literasi dan Inklusi

Hampir semua *outlook* ekonomi 2017 memprediksi ruang fiskal domestik masih terbatas bagi pemerintah untuk menstimulus perekonomian. Faktor eksternal masih memberi tekanan. Resiko terbesar diperkirakan masih berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Amerika Serikat (AS). Jelas, pelambatan ekonomi masih belum beranjak. Apalagi, Pertamina mewacanakan kenaikan harga BBM tahun depan, khususnya solar. Ditambah lagi pemerintah akan mencabut subsidi listrik golongan 450 VA dan 900 VA.

Hal sederhana yang bisa diupayakan untuk masyarakat di daerah adalah melakukan literasi dan inklusi keuangan. Beberapa bulan terakhir, saya selalu mengingatkan mahasiswa saya untuk

belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mereka harus belajar skala prioritas dalam membelanjakan dana yang diberikan orang tua mereka. Gaya hidup konsumtif harus dilawan. Kecuali bila ingin berbelanja dalam rangka kebaikan sosial, maka sejatinya hal tersebut akan menjadi alat distribusi kekayaan yang setara dengan memberi "pinjaman kepada Allah" dan akan "diganti langsung oleh Allah".

Hadirnya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan beranggotakan hampir semua *stakeholder* di daerah seyogyanya menjadi alat strategis untuk melaksanakan literasi dan inklusi keuangan. Bagi masyarakat yang rumah tangganya rentan secara sosial ekonomi, maka perlu ada kelembagaan sosial ekonomi yang terorganisir untuk membantu pemberdayaan finansial. Bukan rahasia, bila kondisi terpuruk, maka kelompok masyarakat ini akan terjebak masuk dalam jaring lintah darat demi memenuhi kebutuhan yang bersifat darurat. Memberi pinjaman ala koperasi atau lembaga keuangan mikro (LKM), apalagi bank, ternyata juga bukan opsi yang menolong.

Bagi masyarakat usaha mikro kecil menengah (UMKM), literasi dan inklusi keuangan juga sangat diperlukan. Sebagai kelompok usaha yang mendominasi perekonomian nasional dan regional, hasil survei OJK pada 2013 yang menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang hanya 21,8 persen dengan indeks inklusi keuangan sebesar 59,7 persen masih relevan untuk menggambarkan tingkat literasi dan inklusi UMKM secara nasional dan regional.

Untuk Jember, merujuk indeks literasi keuangan komposit pada 12 wilayah kajian yang mewakili 4 kantor OJK di Jawa Timur, indeks literasi keuangan komposit tertinggi adalah di Jember disusul Surabaya, Pasuruan, dan Sidoarjo. Indeks literasi keuangan komposit di Jember ditopang oleh indeks keyakinan keuangan yang besar dengan indeks pengetahuan dan indeks keterampilan keluarga yang relatif lebih baik pula dibanding 11 wilayah kajian lainnya.

Hati-hati dengan Utang!

"Bukan tidak percaya pada Bapak Ibu, memang aturan di bank kami hanya mencairkan 80 persen dari pengajuan. Kami malah heran, kenapa kok ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak punya catatan cicilan utang sama sekali ....", jelas petugas dari bank yang memiliki kerjasama Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan *developer* komplek perumahan yang kami beli beberapa tahun lalu. Jika petugas tersebut mengaku terkejut, demikian pula dengan saya. Adalah pengetahuan baru bagi saya. Ternyata ada fakta bahwa "PNS pasti punya utang ke bank".

Setelah banyak berkutat dengan ekonomi makro, terutama yang terkait fiskal, kondisi utang yang membengkak pada anggaran negara ternyata memang mewujud pada banyak rumah tangga keluarga. Jika pembengkakan utang pada rumah tangga negara banyak disebabkan faktor pinjaman baru, bunga serta nilai tukar rupiah yang anjlok, maka rumah tangga keluarga juga disebabkan faktor pinjaman baru dan bunga. Survei Bank Indonesia (BI) tahun 2014 berhasil mengidentifikasi kelompok

masyarakat tertentu yang memiliki tingkat utang cukup tinggi. BI mewaspadai rasio utang rumah tangga yang tidak bisa memenuhi kewajibannya. Itu juga yang kemudian membuat bank sentral membatasi penggunaan kartu kredit.

Ya, hati-hati, jangan besar pasak daripada tiang. Gaya hidup, pergaulan, dan status sosial kerap menjadi pemicu utama rumah tangga keluarga terjebak perangkap utang. Tidak jarang berujung pada korupsi. Menteri Keuangan Sri Mulyani secara gamblang sudah menyebutkan bahwa sektor konsumsi diproyeksi tidak akan bertahan lama dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dalam ekonomi Islam, utang diperkenankan, tapi bukan prioritas apalagi kebiasaan. Sudah diingatkan dalam hadis bahwa mereka yang berutang akan cenderung berdusta dan ingkar janji. Utang membuat sedih di malam hari dan hina di siang hari.

Jadi, mari kencangkan ikat pinggang! Perekonomian ke depan masih tak menentu. Sisihkan untuk pos berjaga-jaga. Apalagi, di luar sana, banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. *Wallahua'lam bish showab.*

2017

23
NANOFINANCE, PARADIGMA BARU PENGENTASAN KEMISKINAN

"Encourage all microfinance institutions interested in serving the poor to create programs to identify, attract, and assist the very poorest clients, the 'ultra poor', to get ready for a microloan. Traditional microfinance programs tend to attract borrowers who are above the poorest level. So we need programs that get the 'ultra poor' ready for a microloan." ~ Bob Sample (2011)

Tahun ini, tepat 20 tahun usia *Microcredit Summit*. Pada 2-4 Februari 1997, lebih 2.900 orang dari 137 negara berkumpul untuk mengampanyekan pengentasan kemiskinan bagi 100 juta keluarga termiskin di dunia. Harus diakui, *microcredit* atau *microfinance* berkontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Namun, terdapat kelompok masyarakat

yang masih belum terjangkau oleh *microfinance.* Mereka adalah kelompok masyarakat sangat miskin. Padahal, *Microcredit Summit* juga menempatkan kelompok masyarakat tersebut sebagai target. Hal ini tercermin dari definisi yang mereka sematkan pada *microfinance,* yaitu *"the extension of small loans to the very poor, in combination with other financial services, such as savings facilities, training, health services, networking, and peer support ...."*

Microfinance Gap

Keterbatasan mengakses fasilitas perbankan menghadirkan tiga opsi bagi kelompok masyarakat sangat miskin ketika berhadapan dengan kebutuhan darurat: (1) Mencari pinjaman kepada saudara atau teman; (2) Mencari pinjaman pada *microfinance institutions* (MFIs); (3) Mencari pinjaman kepada lembaga nonformal atau individu yang memang menawarkan jasa pinjaman. Bila opsi pertama terpenuhi, masalah sementara mungkin akan selesai. Bila opsi pertama tidak terpenuhi, maka mereka akan berpindah ke opsi kedua atau ketiga.

Sejumlah studi di beberapa negara Asia, termasuk di Indonesia, menunjukkan bahwa opsi ketiga adalah pilihan yang kerap ditempuh oleh masyarakat sangat miskin. Kelompok masyarakat menengah juga kerap memilih pembiayaan dari opsi ketiga. Pada tataran inilah yang menjadi sinyal bahwa MFIs gagal membantu masyarakat sehingga mencari jalan keluar dengan meminjam kepada rentenir.

Menyimak latar belakang kelahiran Grameen Bank, salah satu tujuannya adalah melindungi masyarakat miskin dari rentenir.

Semangat inilah yang kemudian menular dan menyebar luas. Namun, MFIs faktanya juga belum mampu menolong kelompok masyarakat sangat miskin. MFIs dinilai masih tidak kondusif dan terlalu birokratis bagi kelompok masyarakat tersebut.

Negara sesungguhnya telah hadir terhadap aktivitas ekonomi rentenir melalui Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disebutkan pada Penjelasan Bab 3 Pasal 15 bahwa salah satu penyakit masyarakat yang harus dicegah dan ditanggulangi oleh kepolisian adalah penghisapan/praktik lintah darat. Namun, faktanya, praktik lintah darat terus eksis dan diminati kelompok masyarakat mikro yang kebanyakan minim tabungan dan aset sehingga harus mencari pinjaman eksternal untuk memenuhi kebutuhan darurat.

Nanofinance

Nanofinance adalah paradigma baru. Kehadirannya melengkapi keterbatasan *microfinance* dalam menjangkau kelompok masyarakat sangat miskin. Misi utamanya adalah menghindarkan mereka terjerat rentenir, mendorong untuk mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan minimum serta menjalani kehidupan yang layak.

Tidak banyak literatur yang membicarakan *nanofinance.* Istilah ini juga masih belum sefamiliar *microfinance*. Kebanyakan *text book* dan konferensi akan mengangkat *microfinance* sebagai isu pengentasan kemiskinan atau keberpihakan lembaga keuangan kepada kelompok usaha mikro. Namun, secara empirik, sejumlah negara di Asia sudah menerapkan *nanofinance.*

Di India, *nanofinance institutions* (NFIs) telah dirintis Aamara Biswas dengan menyasar pada perempuan miskin. Konsep *nanofinance* kemudian menyebar ke Uganda oleh Our Biswas dengan *global partners* Clover Foundation dan Bliss Femme. Di Thailand, pemerintah bersama bank sentral bahkan telah meluncurkan *Nanofinance Project*. Di Indonesia, sejumlah MFIs juga menawarkan *nanofinance* dengan pinjaman di kisaran Rp50ribu-Rp1juta meski tidak menggunakan istilah tersebut.

Nanofinance di India bisa menjadi *best practice.* Atas nama kemanusiaan, mereka tidak menerapkan bunga. Pinjaman hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan bersifat mendesak. Konsep inilah yang seharusnya menjadi keunggulan dari *nanofinance*. NFIs bukan berorientasi keuntungan, tetapi murni sosial. Untuk itu, NFIs bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mencari dana murah guna membantu masyarakat sangat miskin. Sumber dana dapat diperoleh dari hibah, sumbangan, *corporate social responsibility* (CSR), institusi filantropi, *crowdfunding,* infaq, sedekah, wakaf produktif, dan lain sebagainya. Konsep inilah yang perlu digaungkan secara masif di Indonesia sebagai paradigma baru pengentasan kemiskinan.

24
PERDA HALAL, PERLUKAH?[23]

"Matur nuwun, Bu Nisa. Malaysia sudah melangkah lebih maju. Mereka tidak hanya konsen pada makanan dan minuman halal. Tapi sudah masuk juga pada sumber pendapatan yang dijadikan belanja untuk dikonsumsi. Kira-kira gimana ya kalau sumber pendapatan kita juga disertifikasi halal?"

Demikian seloroh kolega saya, Dr. Misbahul Munir, dosen yang baru saja pindah dari UIN Sunan Ampel ke IAIN Jember, atas artikel berjudul *'Muslims care more about halal food than halal income, Deputy Minister says'* yang saya *share* untuknya di grup Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Jawa Timur. Ya, buat saya, Pak Munir ini identik sebagai penggiat halal. Setiap kali ada konferensi atau artikel atau apa saja yang membawa isu halal, saya biasanya akan membagi informasi untuk beliau.

23 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 28 April 2017.

Isu halal memang menjadi salah satu primadona seiring gencarnya sejumlah negara dengan penduduk mayoritas nonmuslim mengembangkan wisata syariah atau wisata halal. Kritik dari Wakil Menteri Malaysia Urusan Islam pada artikel tersebut di atas sesungguhnya juga disampaikan oleh Pak Munir dalam Rapat Kerja IAEI Jawa Timur di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Timur dua pekan lalu.

Ya, halal sejatinya adalah substansi dari semua kegiatan ekonomi umat Islam. Halal bukan hanya tentang makanan minuman semata, namun juga semua produk, baik barang dan jasa, dari hulu hingga hilir, termasuk juga industri keuangan, bisnis, pemasaran, dan lainnya, termasuk sumber pendapatan dan belanja rumah tangga.

Tren Halal

Lombok mungkin menjadi daerah pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai Pariwisata Halal. Melalui Perda Nomor 2 Tahun 2016, Lombok menata sektor ini menjadi andalan. Mengulang prestasi di 2015, Lombok di akhir 2016 kembali dinobatkan sebagai *World's Best Halal Honeymoon Destination*.

Mengawali 2017, Banyuwangi juga membuat gebrakan dengan menawarkan pantai halal pertama di Indonesia. Pemerintah Daerah (Pemda) setempat menjadikan isu halal untuk pengembangan pariwisata daerah. Pulau Santen, bekas kawasan lokalisasi, kini disulap sebagai destinasi wisata halal. Konsep ini dikembangkan sebagai diferensiasi sekaligus segmentasi

pariwisata Banyuwangi yang ditandai di antaranya dengan jaminan fasilitas halal, seperti makanan halal, tidak menjajakan alkohol, menghentikan aktivitas ketika azan, tempat bersuci lengkap dengan tempat ibadah, serta konsep pemisahan antara laki-laki dan perempuan.

Di Medan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat tengah menyiapkan Rancangan Perda tentang Pengawasan Produk Halal dan Higienis. Selama ini, makanan dan minuman yang beredar di pusat perbelanjaan masih bercampur antara halal dan non halal. Ditengarai juga 80 persen daging yang beredar di pasar, tidak dapat dipastikan higienis dan kehalalannya.

Begitu juga di Batam, Rancangan Perda tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis tengah digodok. Perda yang diinisiasi juga oleh DPRD ini menjadikan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai rujukan.

Menyimak *Global Islamic Economy Report* 2016, tren halal di seluruh dunia terus meningkat. Secara berturut-turut, industri yang diprediksi akan mengalami pertumbuhan paling pesat hingga 2021 adalah *halal cosmetics, Islamic finance, halal pharmaceuticals, halal food, halal travel, modest fashion,* lalu *halal media & recreation.* Namun demikian, dari seluruh pasar produk halal global, daging dan pangan olahan mengambil pangsa terbesar di antara produk-produk tersebut.

Perda Halal?

Ya, Perda halal sejatinya dapat dimanifestasikan dalam beragam rupa, bergantung pada arah kebijakan Pemda. Yang lazim adalah pangan halal. Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia, nyatanya tidak begitu sensitif terkait jaminan pangan halal. Empat tahun lalu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga sempat meramaikan media karena kerabatnya yang hendak mengajukan *franchise* rumah makan terkenal. Persoalan menguak ketika kontrak perjanjian mensyaratkan penggunaan minyak babi dan *angciu* dalam sejumlah masakan. Ternyata hidangan ala Oriental berpotensi menggunakan bahan-bahan tidak halal. Pandangan kebanyakan umat Islam bahwa tidak mengandung babi, sudah cukup menjadi acuan bahwa suatu sajian layak dikonsumsi menjadikan sikap permisif terhadap kemungkinan lain.

Tidak hanya itu. Sebuah *bakery* yang cukup legendaris di Indonesia akhir tahun 2016 lalu juga membuat pengakuan bahwa kandungan salah satu rotinya menggunakan rum setelah isunya bergulir di sosial media. Setelah bertahun-tahun menjadi bagian dari masyarakat perkotaan, publik dibuat tercengang karena baru menyadari bahwa *bakery* tersebut ternyata memang tidak memiliki sertifikasi halal selama berkiprah.

Sungguh, masalah halal bukan hanya dalam rangka melindungi umat Islam. Di Inggris, ketersediaan produk daging halal mencapai 15 persen dari seluruh daging yang dijual untuk penduduk muslim yang jumlahnya hanya empat persen dari

total populasi. Faktanya, daging halal juga ikut dikonsumsi oleh penduduk nonmuslim. Ketertarikan mereka mengonsumsi daging berlabel halal didorong oleh faktor kualitas daging yang dinilai kaya rasa, lebih lembut, dan diyakini lebih aman, dan lebih higienis.

Dengan jumlah penduduk muslim Indonesia sekitar 89,1 persen dan jumlah penduduk muslim Jawa Timur sekitar 97,19 persen dengan sebaran terbesar berturut-turut berasal dari Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Jember, dan Sidoarjo, maka sudah selayaknya isu halal mendapat perhatian besar. Halal dan *thayyib* hari ini bukan saja menjadi simbol agama dan acuan normatif semata, tetapi juga menjadi simbol bagi kualitas, higienitas, dan keamanan bagi konsumen. Jadi, apakah perlu kita membuat Perda mengenai halal? Saya kira itu harusnya bukan lagi menjadi pertanyaan, tapi keniscayaan untuk menjadi sesuatu yang diperjuangkan. *Wallahuaonlinelam bish showab*.

25
TANTANGAN SOSIAL JAWA TIMUR MENJADI KEK SYARIAH

Jawa Timur kembali mendapat kehormatan sebagai tempat penyelenggaraan ekonomi syariah nasional. Kemarin, 30 Mei 2017, program Akses Keuangan Syariah untuk Masyarakat Mandiri Berbasis Masjid (AKSI UMMAD) diluncurkan. Ini menjadi sinyal kuat bagi Jawa Timur berpeluang menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Syariah ke depan.

Menggeliatnya program studi ekonomi dan keuangan syariah di tanah air, yang juga diikuti perkembangan sektor riil dan penduduk muslim yang terus bertumbuh, menjadi perhatian pelaku industri jasa keuangan syariah. Kesadaran untuk mengembangkan kegiatan ekonomi halal, termasuk setelah ditetapkannya 12 destinasi wisata syariah nasional, semakin mendorong otoritas untuk membuat KEK syariah sebagai cikal bakal Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global.

Potensi Jawa Timur

Dalam visi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, Jawa Timur dirancang untuk dikembangkan sebagai salah satu regional ekonomi syariah. Dari 12 destinasi wisata syariah nasional, Jawa Timur juga masuk diantaranya. Sejak 2014, Jawa Timur digadang menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah nasional. Dimotori oleh Bank Sentral Republik Indonesia, kota Surabaya berturut-turut dipilih sebagai tempat penyelenggaraan *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF).

Semangat untuk menjadikan Jawa Timur sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah juga mendapat dukungan pemerintah provinsi (Pemprov). Setahun lalu, melalui Keputusan Gubernur Nomor 188/600/KPTS/013/2016, Jawa Timur sudah memiliki Satuan Tugas (Satgas) Akselerasi Ekonomi Syariah yang menghimpun *stakeholders* ekonomi syariah.

Jawa Timur memang potensial menjadi motor bagi perkembangan ekonomi syariah nasional yang mengintegrasikan sektor riil berbasis ekonomi rakyat dengan bermitra sektor keuangan. Hal ini setidaknya didukung oleh tiga hal. **Pertama,** jumlah penduduk muslim Jawa Timur adalah peringkat kedua setelah Jawa Barat. Jumlah penduduk Jawa Timur hingga akhir 2015 sebesar 38.847.561 jiwa dengan sebaran terbesar berturut-turut berasal dari Surabaya, Malang, Jember, dan Sidoarjo. Merujuk data Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk muslim di Jawa Timur sebanyak 36.113.396 jiwa atau 17,43 persen dari total penduduk muslim di Indonesia atau 97,19 persen dari total penduduk Jawa Timur.

Kedua, Jawa Timur adalah kantong organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia. Meski tidak ada yang bisa memastikan berapa jumlah persisnya, namun diperkirakan jumlah warga Nadhlatul Ulama (NU) di Jawa Timur mencapai lebih dari 60 juta. Meski jumlah warga Muhammadiyah tidak sebanyak warga NU, namun di antara 33 wilayah Muhammadiyah se-Indonesia, Muhammadiyah Jawa Timur dinilai paling militan dalam menjalankan roda organisasi dan unggul dalam kerja-kerja pendidikan, sosial, dan keagamaan.

Ketiga, Jawa Timur memiliki jumlah pesantren terbanyak nomor dua di Indonesia. Menurut Statistik Pendidikan Islam Kementerian Agama 2011-2012, populasi pondok pesantren di Jawa Timur selama periode 2011-2012 sebanyak 6.003 atau 22,05 persen di bawah Jawa Barat yang sebanyak 7.624 atau setara 28 persen dan di atas Jawa Tengah yang sebanyak 4.276 atau sekitar 15,70 persen dari total pondok pesantren di Indonesia.

Tantangan

Sebagai *pilot project* pelaksanaan program percepatan pembangunan ekonomi syariah, capaian Jawa Timur akan menjadi *role model* bagi provinsi lainnya. Namun, peluang Jawa Timur menjadi KEK Syariah dibayangi oleh tiga tantangan sosial besar. **Pertama,** masalah sosial ekonomi. Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur terbesar se-Jawa. Indeks Kedalaman Kemiskinan Jawa Timur (p1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan Jawa Timur (p2) yang mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk

miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin melebar.

Kedua, masalah sosial kemasyarakatan. Secara nasional, Jawa Timur menempati peringkat kedua tertinggi jumlah korban penyalahgunaan narkotika, peringkat kedua untuk jumlah penderita HIV, peringkat teratas jumlah pengidap AIDS, dan memiliki angka perceraian tertinggi dengan kontribusi sebanyak 47 persen. Belum lagi masih masifnya perilaku rente dan angka kriminalitas yang tinggi.

Ketiga, masalah sosial keagamaan. Konflik berlatar belakang agama di Jawa Timur relatif tidak banyak meski ada juga yang mencuat menjadi masalah nasional. Namun demikian, potensi ini tetap ada. Perhatian besar justru perlu diberikan kepada organisasi-organisasi Islam yang kian beragam untuk berusaha saling menghormati perbedaan sikap dan pandangan.

Sungguh, Jawa Timur memperoleh amanah yang berat bila menjadi KEK Syariah. Pasalnya, ekonomi syariah sejatinya harus juga mampu menjawab berbagai tantangan sosial yang dihadapi Jawa Timur tersebut. Memang sulit, tapi bukan tidak bisa. Untuk itu, butuh langgam yang selaras dan harmoni dari *stakeholders* untuk bersama-sama bekerja keras mengimplementasikan kebermanfaatan ekonomi syariah dalam menolong sektor riil. *Wallahua'lam bish showab.*

26
MENYAMBUT KREDIT UMI

Guna mendampingi program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah menyediakan dana bergulir dalam bentuk kredit usaha ultra mikro (UMI). Menurut rencana, kredit UMI akan diluncurkan bulan Mei ini. Bagaimana kabarnya?

Kredit UMI menjadi harapan bagi terwujudnya inklusi keuangan bagi semua kalangan. Jika selama ini kredit berbiaya rendah yang menjadi andalan pemerintah, yaitu KUR menyalurkan pembiayaan di atas Rp10 juta, maka kredit UMI membawa misi untuk menjaring sektor usaha dengan plafon di bawah Rp10 juta dan tanpa agunan.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menggodok kredit UMI. Tahun ini, mengawali program kredit UMI, pemerintah mengalokasikan dana Rp1,5 triliun. Kredit ini menyasar 44,2 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang

belum berkesempatan mengakses KUR dan menginginkan plafon pembiayaan yang lebih kecil.

Terdapat perbedaan mendasar antara KUR dan UMI. Jika KUR disalurkan dengan menggunakan jaringan perbankan, maka kredit UMI menggunakan jaringan koperasi dan industri keuangan non bank (IKNB), termasuk yang menjadi jaringan usaha organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk mempercepat perluasan jangkauan kredit. Peluang bagi koperasi pondok pesantren (Kopontren) juga terbuka lebar untuk mengakses dana bergulir ini.

Jika KUR menggunakan bunga pada kisaran 9 persen dan masih akan mengupayakan untuk turun ke 7 persen, maka UMI akan berada di bawahnya. Bunga kredit UMI berkisar 4,5 persen dengan jangka waktu yang lebih pendek sekitar 6 bulan. Pada tahap awal penyaluran, pemerintah akan memberi bunga 2 persen per tahun.

Menjangkau Masyarakat Sangat Miskin

Merujuk pada *Microcredit Summit* 1997, keuangan mikro sejatinya diperuntukkan bagi kelompok *very poor.* Dalam forum internasional, *very poor* kerap juga disinonimkan dengan istilah *super poor* atau *ultra poor.* Secara substansi, kelompok masyarakat ini tergolong kelompok sangat miskin, bukan sekadar miskin. Secara filosofis, keuangan mikro adalah pembiayaan dalam nominal kecil untuk membantu kelompok masyarakat ini.

Pada praktiknya, keuangan mikro yang menjadi produk keuangan perbankan masih menyasar pada kisaran yang tidak

terjangkau oleh kelompok masyarakat miskin, apalagi masyarakat sangat miskin. Kelompok masyarakat miskin maupun sangat miskin dapat dipastikan tidak *feasible* dan *bankable* untuk mengakses pembiayaan mikro dari perbankan.

Kehadiran lembaga keuangan mikro (LKM) sejatinya menjadi harapan agar kelompok masyarakat mikro dapat mengakses pembiayaan. Kerap kali mereka membutuhkan dana pinjaman hanya sekitar Rp1-5 juta, Rp500 ribu, bahkan mungkin Rp50-100 ribu untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak. LKM kerap kali masih dipandang terlalu birokratis dan tidak kondusif untuk pembiayaan di kisaran "kecil" tersebut. Pada konteks inilah, maka masyarakat miskin dan sangat miskin rentan masuk dalam perangkap jasa rentenir.

Kredit UMI menjadi secercah harapan bagi kelompok mikro untuk mengakses pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Nilai kredit yang kecil inilah yang rasional dijangkau oleh mereka. Menggandeng koperasi dan IKNB merupakan terobosan pemerintah yang patut diapresiasi karena keberadaan lembaga ini juga lebih merakyat.

Nanofinance

Aktivitas rentenir tidak hanya marak ditemui di Indonesia. Kebanyakan negara wilayah Asia juga lazim ditemui praktek sejenis ini. Sasarannya adalah kelompok masyarakat miskin dan sangat miskin yang membutuhkan dana mendesak. Sejumlah LKM menggaungkan *nanofinance* untuk menyatakan perang melawan rentenir.

Istilah *nanofinance* memang belum familiar di Indonesia. Kredit UMI secara filosofis sudah mengarah kepada praktek *nanofinance* yang berpihak pada kelompok mikro yang membutuhkan plafon pembiayaan dengan nominal kecil. Berbeda dengan kredit UMI yang hanya menarget sektor produktif, *nanofinance* juga mengemban misi untuk membantu masyarakat miskin terhindar dari jasa rentenir.

Ke depan, pemerintah seyogyanya tidak hanya berhenti berinovasi pembiayaan kredit UMI. *Nanofinance* juga harus menjadi misi selanjutnya, bahkan seharusnya menjadi program andalan pengentasan kemiskinan. Jika kredit UMI masih menerapkan bunga, maka *nanofinance* harus bebas bunga. Untuk itu, pemerintah harus menggunakan *low cost fund* sebagai sumber pembiayaan.

Ya, bulan Mei sudah berjalan. Semoga kredit UMI segera diluncurkan. Seluruh jaringan koperasi dan IKNB harus diberdayakan untuk penyebaran dan pemerataan. Jika kredit UMI diawali dengan bunga dua persen, maka angka ini jangan merangkak naik kedepannya. Karena, sejatinya kelompok mikro membutuhkan uluran pertolongan dan bukan menjadi objek untuk meraih keuntungan. *Wallahua'lam bish showab.*

27
MENYAMBUT EKONOMI RAMADAN[24]

"Kalau Iis, mungkin sejak kecil, beli baju baru bisa kapan saja. Di luar sana, banyak yang harus nunggu lebaran dulu supaya punya baju baru. Ya, kayak saya, baru beli baju, celana, sarung, kopiah, ya nunggu lebaran dulu ...."

Percakapan kami pun menjadi hening. Saya sudah tak berhasrat melanjutkan obrolan ketika kalimat-kalimat tersebut terucap dari bibir suami. Ada situasi yang baru dapat dipahami ketika diam yang bekerja. Mengkritisi, tetapi juga harus mau mengerti. Jangan menggeneralisasi. Mungkin itulah pesan tersirat yang ingin disampaikan suami beberapa tahun lalu ketika saya menanyakan mengapa ia setiap kali lebaran harus membeli pakaian baru.

Ya, bila Ramadan, pertokoan kerap penuh sesak. Itu pula yang membuat saya enggan mendatangi toko-toko, kecuali untuk belanja kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Bahwa lebaran

24 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 2 Juni 2017.

identik dengan pakaian baru, itu tidak ada dalam kamus saya. Anak-anak pun pada akhirnya memahami. Tapi, suami saya punya kebiasaan berbeda.

Ya, sekarang sudah bulan Sya'ban. Ramadan tinggal menghitung hari. Seperti tahun-tahun sebelumnya, geliat ekonomi masyarakat sudah terbaca. Di pasar ritel, berbagai promo berkelebatan di setiap sudut toko, mulai dari sirup, kue kaleng, kurma, hingga sembako. Pada sosial media dan situs belanja *online,* juga sudah berseliweran berbagai tawaran produk kue, toples, baju, sepatu, gamis, sarung, dan jilbab yang dapat membuat para ibu rumah tangga khilaf dalam berbelanja.

Deflasi VS Inflasi

Bulan Ramadan kerap ditandai dengan aktivitas ekonomi yang dinamis seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Inflasi menjadi fenomena yang lumrah terjadi. Namun demikian, tahun ini, bulan Ramadan sempat disambut dengan deflasi. Meski selama Januari hingga Februari terjadi inflasi, namun di bulan Maret, Jawa Timur mengalami deflasi sebesar 0,09 persen. Angka ini lebih tinggi dari deflasi nasional yang sebesar 0,02 persen. Sedangkan Jember mengalami deflasi sebesar 0,15 persen.

Adapun penyumbang deflasi tertinggi di Jawa Timur adalah kelompok bahan makanan bergejolak *(volatile foods)*. Sedangkan deflasi terendah terjadi pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Di Jember, salah satu penyebab terjadi deflasi adalah turunnya harga beras karena panen raya di beberapa

wilayah sehingga harga gabah kering panen di tingkat petani mengalami penurunan.

Secara teoretis, meningkatnya jumlah barang di pasaran menjadi salah satu penyebab deflasi. Jika inflasi kerap diidentikkan sebagai masalah dalam perekonomian, maka deflasi bukanlah berarti sesuatu yang diidamkan dalam perekonomian. Deflasi juga merugikan sejumlah pihak. Petani atau produsen pasti akan "menangis" bila hasil produksi mereka tidak diimbangi oleh permintaan masyarakat dan tidak dihargai secara layak untuk menutupi biaya produksi mereka.

Namun demikian, inflasi tetaplah harus dijaga. Momentum Ramadan hingga lebaran umumnya mendorong tingkat konsumsi tinggi. Kenaikan harga pada *volatile foods* masih berpotensi besar. Apalagi beberapa bulan terakhir beberapa kali terjadi penyesuaian *administered prices* sebagai bentuk kebijakan reformasi subsidi energi pemerintah. Dampak kenaikan tarif listrik secara berkala diyakini masih akan terasa hingga Juni mendatang. Tekanan inflasi berkurang bulan lalu lebih karena pengaruh panen raya yang menyebabkan harga *volatile foods* melandai. Terbukti, April 2017, tarif listrik menjadi penyumbang terbesar inflasi di Jember sebesar 0,28 persen. Jawa Timur juga mengalami inflasi 0,29 persen jauh melampaui nasional yang sebesar 0,09 persen.

Distribusi ZISWAF

Ya, meski bulan Ramadan memberi dampak penguatan kinerja ekonomi, namun tetap saja ada imbas negatif bila keuangan rumah tangga tidak dikelola secara bijak. Bulan Mei

hingga Juli tahun ini masa yang agak panjang bagi ibu rumah tangga untuk bersiasat mengelola keuangan. Setelah Ramadan diikuti lebaran, maka hampir bersamaan para ibu rumah tangga kemudian dihadapkan oleh belanja pendidikan anak di tahun ajaran baru.

Seperti yang lalu-lalu, inflasi melekat dengan Ramadan. Fakta empirik menunjukkan permintaan pada hampir seluruh rantai distribusi akan melonjak pada masa tersebut. Inilah ujian pengendalian diri yang sejati dari bulan Ramadan. Seyogyanya yang ditingkatkan pada bulan ini adalah belanja zakat infak sedekah wakaf (ZISWAF), bukan konsumsi pribadi. Yang terjadi berikutnya adalah tidak hanya penguatan ekonomi, tetapi juga distribusi kekayaan. Jika meminjam Teori Kuantitas Uang milik Irving Fisher, maka dalam rumus M x V = P x T, variabel V inilah yang akan bekerja menggerakkan perekonomian. Inilah esensi dari ekonomi Islam dimana uang akan mengikuti sektor riil.

Mengutip tembang Deen Squad yang digemari para remaja belakangan ini *"The blessed month has come. Lets read Quran. Alhamdulillah it's time for Ramadan. These 30 days, we pray, lets feed the poor. Alhamdulillah, it's time for Ramadan ...,"* Ya, esensi dari Ramadan adalah meningkatkan ketakwaan dengan memperbanyak ibadah melalui pengendalian diri. Salah satu indikator keberhasilan pengendalian diri tercermin dari stabilitas konsumsi pribadi dan kerelaan membagi konsumsinya untuk mereka yang membutuhkan.

Ya, saya dan suami masih beruntung karena dapat membeli pakaian baru ketika lebaran. Tapi, di luar sana, masih banyak yang

menganggap baju baru adalah hal mustahil untuk didapatkan. Pada titik inilah ekonomi Ramadan harus menjadi momentum penggerak bagi kemanusiaan dan keadilan sosial melalui distribusi ZISWAF, termasuk mungkin menyenangkan mereka-mereka yang tak berpunya dengan baju, sarung, jilbab atau mukena baru. Ya, mari mengkritisi konsumerisme Ramadan. Tetapi, mari juga mencoba mengerti apa yang terjadi. Jangan menggeneralisasi. *Wallahua'lam bish showab.*

28
BELAJAR DARI WU DA YING (1)[25]

Assalamu'alaikum. Ibu di Jember? Saya sedang di Jember. Saya bawakan buku Pak That Ngo .... Baik, Bu. Nanti saya titipkan ke Pak Budhy FISIP Unej .... Ibu, mohon maaf. Bukunya kemarin saya titipkan Prof. Halim. Kata Prof. Halim, Ibu satu kantor dengan beliau ....

Demikian pesan beruntun dari seorang dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) via *Whatsapp* (WA). Saya memanggilnya Pak Tonny. Beliau alumni HI Universitas Jember (Unej). Beliau tengah menempuh S3 di Universiti Sains Malaysia (USM). Pak Tonny ke Jember dalam rangka konsultasi karena Sang *Supervisor* yang kebetulan juga menjadi kenalan baik saya tengah berkunjung ke Jember.

Mengetahui saya dari Lumajang, Pak Tonny menghubungkan saya dengan Prof. That Tjien Ngo. Saya semakin tertarik berkenalan

25 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 7 Juli 2017.

karena bidang ilmu beliau sama dengan yang digeluti suami saya. Ya, beliau adalah ahli biokimia dari Amerika Serikat (AS) yang menjadi penemu sejumlah produk kesehatan yang juga memegang 14 paten. Prof. That Tjien Ngo beberapa waktu lalu mengunjungi beberapa perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan bedah buku, salah satunya adalah kampus Pak Tonny. Pak Tonny mendapatkan sejumlah buku yang kemudian hendak dibaginya satu untuk saya.

Buku yang dijanjikan Pak Tonny akhirnya sampai di tangan. Prof. Halim, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jember yang juga menjadi Guru Besar di IAIN Jember, mengantarkannya ke ruangan kerja saya. *Subhanallah,* seharusnya saya yang menemui beliau, tetapi justru beliau yang mengantarkannya sendiri ke ruangan saya. *Jazakallaah* ya, Prof...

Kladura, Lumajang di Masa Lalu

"Di sebuah desa dekat kaki Gunung Semeru, Jawa Timur, Wu Da Ying lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga pedagang Tionghoa. Desa yang menyimpan kenangan sekaligus membangun keterikatan sejarah dan emosionalnya, meski ia sekarang tak lagi berteduh di atas rumah desanya. Kehidupannya beserta keluarga besar sarat tantangan dan peluh, namun mereka mampu menikmatinya. Bisnis dan hubungan mereka dengan warga pribumi pun terajut indah. Nenek moyang Wu Da Ying ikut merintis roda perekonomian di sebagian wilayah Jawa Timur ...."

Demikian paragraf pembuka dari sinopsis buku yang mengisahkan pengembaraan seorang keturunan Hakka bernama

Wu Da Ying. Mengawali membaca, saya larut dalam imajinasi ke awal tahun 1900-an. Ahgong (kakek) dan Ahpo (nenek) dari Wu Da Ying meninggalkan Tiongkok Selatan menuju Kepulauan Indonesia dan menetap di sebuah kota yang disebut Kladura.

Di pusat kota Kladura, terdapat taman rumput luas yang disebut alun-alun yang banyak berdiri beringin tua dan tinggi dengan akar menyerupai batang tebal. Di ujung bagian barat Kladura terdapat jalan sempit yang mengarah ke Tampe, Pasiran, Candopura, Tortoyudo, Jampit, kota-kota kecil dan desa lainnya yang menembus ke Malang. Ruas-ruas jalan berkelok mengelilingi lereng yang curam.

Wilayah Kladura di masa itu memproduksi pisang agung, jenis pisang dengan bobot tujuh ons dan panjang hingga dua kaki, kelapa, nangka, belimbing, rambutan, sawo, mangga, manggis, dan durian. Singkong, wortel, dan kentang juga banyak ditanam. Ratusan telaga di Kladura banyak berisi ikan air tawar. Sayuran seperti seledri, bayam, kangkung, dan genjer tumbuh subur di sungai, kolam, dan telaga. Di bukit-bukit sekitar, terdapat hutan jati yang lebat dan bambu. Perkebunan kopi, gula aren, karet, dan tembakau sudah bertebaran dan dimiliki penjajah Belanda.

Ya, tidak salah lagi. Kladura adalah Lumajang dimasa lalu. Geliat perekonomiannya yang menghubungkan desa dan kota terpapar nyata dari kisah Wu Da Ying tentang bagaimana Ahgong dan Ahpo merintis toko dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kladura dan sekitarnya. Properti Ahgong dan Ahpo salah satunya terletak di dekat stasiun kereta api, tepatnya di seberang kantor pos yang berluas 100 x 400 kaki.

Menghindari Bunga dan Minyak Babi

Wu Da Ying mengisahkan Ahgong hidup sangat hemat. Dalam berdagang, ia menyimpan setiap satu sen keuntungan untuk dapat membeli barang lebih banyak dengan harga lebih baik di Surabaya, kota pelabuhan yang berjarak 100 mil di utara Kladura. Ahgong secara perlahan mulai menjual beragam barang tahan lama seperti mie gandum kering, mie beras, biji kopi, daun teh, ekstrak daun gambir (untuk nginang), tawas (untuk menjernihkan air), tepung gandum (untuk membuat roti dan kue), perisa buah (untuk membuat sirup), pencelup makanan, dan rokok cengkeh.

Setidaknya ada dua catatan penting yang saya petik dari penuturan Wu Da Ying tentang kiprah Ahgong menjalankan roda perekonomian di Kladura. **Pertama,** menyediakan kredit bebas bunga. Di tahun 1920-an, semakin banyak orang Hokkian datang ke Jawa Timur. Mereka mulai membangun toko dan persaingan bisnis kian memanas. Ahgong meresponnya dengan menyediakan kredit bebas bunga selama seminggu kepada siapa pun yang berbelanja di tokonya. Ahpo menceritakan bahwa bisnis Ahgong mengalami kemajuan besar dalam volume dan laba. Banyak pedagang berkerumun di toko Ahgong. Ahgong sampai mengembangkan metode akuntansi sendiri untuk mencatat model kredit yang dirintisnya.

Kedua, Ahgong berencana membangun pabrik pengolahan minyak kelapa di belakang rumah. Banyaknya permintaan untuk minyak goreng ini dari penduduk Muslim mendorong Ahgong untuk membangunnya. Apalagi, di Kladura belum ada pabrik

serupa. Sementara, masyarakat Tionghoa banyak menggunakan minyak babi.

Ya, untuk saya pribadi, catatan pertama tentang kredit bebas bunga Ahgong memberi sumbangan empirik bagi bidang keilmuan saya. Terlepas apakah Ahgong ternyata memiliki pemahaman bersumber dari agama yang melatarbelakangi keputusan bisnisnya untuk menghadapi persaingan, tetapi praktik kredit Ahgong yang tidak lazim di masa itu membuktikan bahwa kredit bebas bunga adalah pilihan logis yang nyatanya dapat membawa keuntungan finansial jika dikelola dengan baik.

Pada catatan kedua, terlepas penduduk muslim merupakan pasar besar bagi Ahgong, namun setidaknya kita dapat menangkap bahwa Ahgong memiliki keinginan mulia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang dilarang agama mengonsumsi babi. Ahgong yang merasa damai berdagang dan berinteraksi dengan masyarakat setempat juga mengindikasikan bahwa penduduk Muslim menghormati perbedaan keyakinan dan etnis Ahgong. Saling memahami dan menghargai perbedaan inilah kunci kedamaian masyarakat plural di Kladura saat itu.

29
BELAJAR DARI WU DA YING (2)[26]

"Ahpo sering bertanya tentang rencana karirku. Ia tahu bahwa aku tidak lama akan meninggalkan kampung halaman untuk menempuh SMA di Surabaya karena sekolah Tionghoa lokal hanya menyediakan untuk SMP. Ahpo tidak berkeinginan aku menjalankan bisnis keluarga. Ia berulang kali mengatakan bahwa pendidikan adalah harta yang tidak dapat dirampas oleh siapa pun. Ini adalah gagasan segar progresif dari seorang perempuan yang buta huruf sepanjang hidupnya!"

Pesan Ahpo, juga setelah melakukan perjalanan ke Hongkong, Wu Da Ying semakin memantapkan hatinya untuk tidak berhenti hanya pada pendidikan menengah. Ying melihat mereka yang berkontribusi pada masyarakat dan membuat perbedaan di kehidupan orang lain, semuanya memiliki pendidikan. Setelah lulus SMP, Ying melanjutkan ke *Sin Hwa High School* (SHHS) di Surabaya yang menekankan pendidikan dan

26 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 28 Juli 2017.

pembangunan karakter. SHHS menanamkan Ying tentang etika kerja keras, hasrat akan pengetahuan baru, dan keinginan untuk mencari kebenaran. Inilah kawah keilmuan bagi Ying untuk kian bersemangat melanjutkan studi pendidikan tinggi.

Untuk meraih cita-citanya, Ying memiliki dua opsi, yaitu melanjutkan studi di universitas di Indonesia atau di luar negeri. Untuk mempersiapkan itu semua, Ying sempat mengikut les privat bahasa Inggris pada guru pribumi Muslim yang juga menjadi Kepala Sekolah SMA negeri di Kladura.

Namun, lama dan alotnya negosiasi Perjanjian Kewarganegaraan Ganda tahun 1956 antara Indonesia dan Tiongkok mengubah kehidupan sosial politik kaum Tionghoa-Indonesia, utamanya bagi mereka yang menjalankan usaha kecil dan hidup di pedesaan. Hingga puncaknya, Tragedi 1965 membuat perubahan besar-besaran bagi masyarakat Tionghoa-Indonesia. Pergantian presiden menjadi titik balik bagi kebijakan pemerintahan Indonesia atas Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Tionghoa-Indonesia di Indonesia.

Akhirul kalam, menggelegaknya kekerasan Anti-Tiongkok yang sarat rasisme dan kebencian, dibatasinya orang Tionghoa-Indonesia kuliah di universitas negeri, dan berbagai hal lainnya yang membuat Ying tertekan, terhina, terzalimi hanya karena ia seorang Tionghoa-Indonesia, memaksa Ying membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Situasi saat itu sangat berat, tidak hanya pada Ying, tetapi juga jutaan Tionghoa-Indonesia lainnya yang sedang berjuang. Terlebih puncaknya, peristiwa G30S dan peristiwa-peristiwa lain yang mengikutinya menyisakan

trauma dan ketakutan mendalam. Kecintaannya pada Indonesia ternyata tak berbalas. Surabaya dan Jakarta bukan tempat kondusif untuknya memperoleh pendidikan tinggi. Ying akhirnya memberanikan diri mengambil langkah seperti Ahgong satu abad sebelumnya, meninggalkan tanah kelahiran dan mencari kehidupan lebih baik di tanah asing.

Ilmuwan Biokimia, Ahli Enzim

Punya anggota keluarga yang memiliki penyakit diabetes? Atau pernahkah anda cek gula darah? Jika ya, ingatkah dengan lembaran strip "One Touch" seukuran ruas kelingking orang dewasa yang oleh petugas laboratorium diteteskan darah dari ujung jari kita, kemudian lembaran strip tersebut dimasukkan ke dalam alat pembaca hasil? Ya, ternyata salah satu penemunya adalah Wu Da Ying, nama Tionghoa dari Prof. That Tjien Ngo, PhD. Penemuannya bermanfaat sekali untuk melakukan tes kuantitatif glukosa darah yang diaplikasikan di rumah. Saat itu, hasil uji milik Prof. That Ngo menjadi yang pertama dan satu-satunya yang dapat digunakan dalam mengukur glukosa darah. Sedangkan tes kuantitatif glukosa lainnya masih memerlukan serum atau plasma.

Selain menjadi dewan editorial dari sejumlah jurnal biokimia terkemuka, Prof. That Ngo telah mempublikasi lebih dari seratus empat puluh artikel dan tujuh buku teks berkaitan dengan biokimia. Tidak hanya itu, ia juga beberapa kali memperoleh penghargaan, baik dari perguruan tinggi maupun masyarakat industri kimia, atas berbagai temuannya. Setelah melalui berbagai pengujian, temuan-temuannya mendapat pengakuan dan hak

paten. Beberapa bahkan diproduksi massal oleh perusahaan alat kesehatan.

Momen “Eureka” bagi Ngo terus berlanjut. Salah satunya adalah penggunaan *2-fluoro-1-methylpyri-dinium toluene-4-sulfonate* (FMP) dalam bioteknologi yang kemudian menghasilkan temuan pemurnian antibodi dan gel afinitas lainnya. Ah, saya tidak paham semuanya. Bukan bidang saya. Intinya, temuan Prof. That Ngo tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, tetapi juga bagi orang banyak.

Build your legacy!

Membaca penuturan Prof. That Ngo dalam bukunya, jelas terpampang perjalanan berliku dan terjal yang ia lalui. Kerja keras dan kemandirian yang terus ia perjuangkan menjadi kunci keberhasilannya menapak tangga keilmuan yang ia citakan. Ngo datang ke Kanada dengan hanya bekal keyakinan bahwa pendidikan akan menjadi penyelamat masa depannya. Ah, Ahpo pasti bangga kepada cucunya karena telah berhasil memenuhi cita-cita Sang Nenek.

Tiba-tiba saya teringat ilmuwan muslim kimia di masa kejayaan ilmu pengetahuan Islam menjadi cahaya peradaban dunia. Tersebut nama Jabir Ibn Hayyan yang menemukan asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, asam asetat, dan larutan aqua regia. Ia menciptakan alat untuk melakukan proses distilasi, evaporasi, dan kristalisasi. Jabir yang dikenal Barat dengan Ibnu Geber telah mampu mengaplikasikan proses pembuatan logam serta pencegahan karat. Termasuk juga teknik penggunaan mangan

dioksida pada pembuatan kaca. Ia yang mula menyuarakan bahwa air dapat dimurnikan melalui penyulingan. Ia juga berhasil memanaskan *wine* untuk menghasilkan gas yang mudah terbakar dan Al-Kindi menjelaskan detil proses distilasi *wine* sehingga menjadi jalan bagi Al-Razi untuk menemukan etanol.

Ya, penemuan-penemuan Jabir menjadi landasan untuk berkembangnya ilmu dan teknik kimia modern saat ini. Dan Prof. That Ngo juga telah menanamkan landasan berkembangnya ilmu dan teknik biokimia untuk masa depan. Inilah pelajaran mahal untuk kita semua. *Build your legacy!* Inilah wakaf ilmu yang menjadi amal jariah bagi si penemunya.

Untuk Prof. That Ngo, terima kasih untuk kisahnya. Ini juga *your legacy*. Terima kasih masih mengakui Lumajang atau Kladura sebagai tanah kelahiran. Terimakasih atas kecintaannya pada Indonesia meski luka masa lalu itu masih membekas. Membangun rasa ingin tahu, kerja keras, mandiri, dan menjaga etika keilmuan adalah karakter ilmuwan sejati. Semoga kami juga mampu meninggalkan jejak ilmu pengetahuan yang memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat dunia, tanpa rasisme, tanpa kebencian, tanpa menyakiti.

30
MEWASPADAI PROMO MURAH BIAYA UMROH[27]

Menyusul pembekuan penawaran perjalanan umroh berpromo murah milik PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel oleh Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Agama (Kemenag) kemudian ikut mencabut izin penyelenggaraan perjalanan umroh berpromo murah tersebut melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 yang ditetapkan sejak 1 Agustus 2017. Meski kegiatan bisnis ini tidak berhubungan langsung dengan sektor keuangan, namun laporan yang masuk kepada Satgas dapat ditindaklanjuti oleh OJK yang memiliki nota kesepahaman kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan lembaga lainnya untuk penindakan, termasuk dengan Kemenag.

27 Dimuat Kontan, Opini, 11 Agustus 2017.

Kasus penelantaran jamaah haji sebagai penyebab pemberian sanksi bagi First Travel bukanlah yang pertama terjadi pada industri penyedia jasa layanan umroh dan haji. Kasus ini muncul tenggelam. Bahkan, belakangan, hampir setiap tahun selalu terjadi kasus senada. Mayoritas memiliki kesamaan, yaitu biaya perjalanannya yang sangat murah.

Seperti halnya mewaspadai tawaran investasi bodong, maka masyarakat perlu pula memiliki kemampuan literasi keuangan terhadap tawaran umroh atau haji berbiaya murah. Calon jamaah seyogyanya tidak tergiur dengan iming-iming harga penawaran yang jauh di bawah harga pasar. Situasi yang muncul biasanya akan berujung pada kasus penelantaran jamaah atau bahkan penggelapan.

Model Pembiayaan

Model pembiayaan berpromo murah memiliki ragam modus. Promo murah First Travel disinyalir dengan memberi subsidi calon jamaah yang mendaftar di awal dengan menggunakan dana dari calon jamaah yang baru mendaftar. Calon jamaah yang mendaftar terakhir adalah yang paling dirugikan. Beberapa kali pemunduran jadwal keberangkatan mengindikasikan mekanisme yang berjalan mengalami *bottleneck*.

Model pembiayaan lainnya yang memberi iming-iming harga murah adalah dengan memberi jarak antara proses pelunasan pembayaran dengan pemberangkatan yang relatif lama. Kebanyakan sekitar satu hingga dua tahun. Hal ini juga yang ditengarai dilakukan First Travel dalam promo murah perjalanan

umrohnya. Lazimnya, pemberangkatan akan dilaksanakan sebulan setelah pelunasan.

Model pembiayaan lainnya yang dilakukan biro travel dalam memberi harga sangat murah adalah dengan sistem berjenjang atau yang lazim disebut *multi level marketing* (MLM). Sebelumnya, tawaran umroh dan haji berbasis MLM masih memiliki ruang perdebatan. Kritik terhadap MLM umroh dan haji semakin kuat karena model ini memfasilitasi seseorang beribadah dengan berutang kepada *down line* dan terdapat potensi terjadinya *tadlis.* Dalam MLM umroh dan haji, penekanannya bukan lagi pada urusan jual beli dan distribusi produk sebagaimana MLM murni, melainkan tentang bagaimana cara *member get member.* Model ini resmi dilarang melalui surat edaran dari Kemenag Nomor Dj.VII/ Hj.09/10839/2012 tanggal 26 Desember 2012.

Jika disimak, perjalanan umroh atau haji murah kerap diikuti pula dengan keterlibatan tokoh masyarakat, baik artis, ulama atau pejabat, untuk ikut memasarkan produk. Padahal, bisa jadi tokoh masyarakat tersebut tidak tahu menahu bagaimana perusahaan penyedia jasa ini mengelola keuangan sehingga dapat memberi penawaran dengan harga yang sangat murah. Lagi-lagi literasi keuangan terhadap kegiatan umroh atau haji nyatanya tidak hanya dibutuhkan oleh calon jamaah, tetapi juga bagi tokoh masyarakat.

Edukasi

Memang tidak ada harga standar untuk besaran biaya perjalanan umroh, namun pemerintah biasanya sudah memberi batasan harga. Setidaknya terdapat dua langkah sederhana yang

dapat digunakan untuk mewaspadai tawaran biro perjalanan umroh, terutama yang memberi harga sangat murah.

Pertama, pastikan status hukum dan rekam jejak perusahaan penyedia jasa perjalanan umroh dan haji. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari informasi kepada Kantor Kemenag Kabupaten/ Kota. Tidak jarang perusahaan yang menawarkan umroh atau haji ternyata belum memiliki izin resmi, namun sudah melakukan operasional. Tidak sedikit perusahaan yang sudah memperoleh sanksi, bahkan masuk *blacklist,* namun tetap gencar menawarkan produk umroh atau hajinya.

Kedua, pelajari komposisi harga pokok penjualan (HPP) untuk menilai ada tidaknya model pembiayaan yang menyimpang. Paling tidak, biaya umroh memiliki rincian biaya tiket pesawat pulang pergi, biaya penginapan di Mekkah dan Madinah, biaya visa, biaya fiskal, biaya makan, dan biaya jasa perusahaan perjalanan. Jika calon jamaah mendapat harga perjalanan yang hanya setara dengan nilai tiket pulang pergi, tentu calon jamaah perlu mempertanyakan bagaimana biro perjalanan mendanai kebutuhan lainnya.

Ya, bagi umat Islam, mengunjungi Baitullah adalah impian. Dalam konteks Indonesia, ekonomi umroh dan haji menjadi industri dengan ceruk pasar yang sangat besar mengingat jumlah penduduk Muslimnya yang juga terbesar di dunia. Hal ini pula yang menjadi potensi terjadinya *moral hazard* karena kegiatan umroh dan haji bukan lagi dipandang sebagai bentuk ibadah, melainkan sebagai komoditas. *Wallahu a'lam bish showab.*

31
MENCARI DESA MANDIRI BERBASIS EKONOMI SYARIAH[28]

"Bu Nisa ... selamat malam. Salam kenal, saya Robi dari BI Surabaya. Saya dapat info dari Pak Difi bahwa Bu Nisa ... bla bla bla. Kami sangat mengapresiasi bantuan Bu Nisa dan akan menunggu kabar selanjutnya."

Pesan pendek yang masuk via *Whatsapp* (WA) dari sekretaris panitia *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF) itu kemudian berujung diskusi dengan uraian yang cukup panjang. Keesokan harinya, sepucuk surat edaran dari asosiasi profesi kami kepada seluruh jaringan komisariat perguruan tinggi di Jawa Timur sudah disebar. Sebuah *flyer* juga sudah terpasang di sosial media untuk mempercepat penyebaran informasi. Tak lama berselang, sudah ada respon yang masuk. Sebuah desa di wilayah Tapal Kuda diusulkan oleh seorang kolega dosen. Desa?

28 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 6 Oktober 2017.

Ya, panitia ISEF meminta bantuan untuk mengumpulkan desa-desa di Jawa Timur yang diusulkan masyarakat untuk menjadi kandidat Desa Berbasis Ekonomi Syariah. Belum ada kriteria yang ditetapkan. Dengan menggunakan pendekatan *bottom-up,* panitia mengharapkan akan terhimpun kriteria versi masyarakat untuk nanti akan dibahas dalam *focus group discussion* (FGD). Masyarakat dipersilahkan mengusulkan nama desa beserta alasan-alasannya. Masukan kriteria penilaian versi masyarakat inilah yang akan diolah untuk nantinya menjadi konsensus bersama.

ISEF dan Jawa Timur

Bulan Oktober ini, seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) di Jawa Timur akan disibukkan dengan kegiatan *Road to ISEF.* Puncaknya akan berlangsung di pekan pertama bulan November. Perhelatan ini adalah kali keempat diselenggarakan di Surabaya. Wacana yang menguak, ISEF akan dijadikan ikon Jawa Timur.

Sebagaimana provinsi lainnya di Indonesia, Jawa Timur memiliki keunikan dan kekhasan. Jawa Timur memiliki karakteristik kemajemukan penduduk yang menjadi modal sosial untuk pembangunan yang bertumpu pada kearifan dan kebijakan lokal. Islam sejatinya menjadi salah satu karakter Jawa Timur yang melekat jika dilihat dari dinamika sosial budaya kemasyarakatan serta kontribusinya dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia maupun sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa ini.

Dalam konteks Jawa Timur, urgensitas ekonomi syariah implementatif adalah keniscayaan. Hal ini bukan dimaksudkan sekadar membantu pemerintah provinsi dalam menyelesaikan persoalan umat Islam. Tetapi, hakikatnya adalah membantu menyelesaikan persoalan masyarakat Jawa Timur secara umum mengingat jumlah penduduk muslim adalah mayoritas. Hal ini semakin dikuatkan dengan setidaknya tiga fakta.

Pertama, jumlah penduduk muslim Jawa Timur adalah peringkat kedua setelah Jawa Barat. Jumlah penduduk Jawa Timur hingga akhir 2015 sebesar 38.847.561 jiwa dengan sebaran terbesar berturut-turut berasal dari Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Jember, dan Sidoarjo. Merujuk data Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk muslim di Jawa Timur sebanyak 36.113.396 jiwa atau 17,43 persen dari total penduduk muslim di Indonesia atau 97,19 persen dari total penduduk Jawa Timur.

Kedua, Jawa Timur adalah kantong organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia. Meski tidak ada yang bisa memastikan berapa jumlah persisnya, namun diperkirakan jumlah warga Nadhlatul Ulama (NU) di Jawa Timur mencapai lebih dari 60 juta. Meski jumlah warga Muhammadiyah tidak sebanyak warga NU, namun dari 33 wilayah Muhammadiyah se-Indonesia, Muhammadiyah Jawa Timur dinilai paling militan dalam menjalankan roda organisasi dan unggul dalam kerja-kerja pendidikan, sosial, dan keagamaan.

Ketiga, Jawa Timur memiliki jumlah pesantren terbanyak nomor dua di Indonesia. Menurut Statistik Pendidikan Islam Kementerian Agama 2011-2012, populasi pondok pesantren di

Jawa Timur selama periode 2011-2012 sebanyak 6.003 atau 22,05 persen di bawah Jawa Barat yang sebanyak 7.624 atau setara 28 persen dan di atas Jawa Tengah yang sebanyak 4.276 atau sekitar 15,70 persen dari total pondok pesantren di Indonesia.

Menuju Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah

Ya, Jawa Timur menjadi *pilot project* akselerasi ekonomi dan keuangan syariah nasional. Itu juga salah satu yang mendasari ISEF berturut-turut selalu diselenggarakan di Jawa Timur. Tahun ini, salah satu output ISEF adalah peluncuran Desa Berbasis Ekonomi Syariah. Penyelenggara mengharapkan akan dihasilkan indikator kunci dalam menentukan kriteria penilaian-nya. Sebagaimana ilmu ekonomi secara umum, ilmu ekonomi syariah juga sangat luas. Perbankan syariah yang selama ini menjadi motor ekonomi syariah, sesungguhnya adalah bagian kecil dari ilmu ekonomi syariah itu sendiri. Dengan demikian, Desa Berbasis Ekonomi Syariah tidak selalu diindikasikan dengan kehadiran lembaga keuangan syariah semata.

Apakah lembaga keuangan syariah tidak menjadi variabel dan/atau indikator? Ya, tentu saja menjadi variabel/indikator. Tetapi bukan itu saja. Pasalnya, tujuan ekonomi syariah sejatinya merujuk pada *maqasid shari'ah*. Artinya, dalam ruang lingkup luas, ekonomi syariah dapat memiliki beragam variabel/indikator yang membentuk mata rantai sehingga unsur *maqasid shari'ah* termanifestasi di dalamnya. Salah satu tantangan bagi ekonom syariah adalah menjadikan variabel dalam *maqasid shari'ah* ini menjadi terukur.

Lalu, bagaimana memilih desa berbasis ekonomi syariah? Ya, dari usulan-usulan desa yang masuk beserta alasan-alasannya itu kemudian dilakukan klasifikasi variabel dan indikator pengukurnya. Dari proses inilah kemudian disusun draf Arsitektur Desa Berbasis Ekonomi Syariah dengan pilar-pilarnya sebagai wujud variabel. Selanjutnya dilakukan penguatan data dengan memformasi ulang informasi desa sesuai dengan pilar yang telah terbentuk. Dari proses inilah kemudian dilakukan skoring terhadap desa-desa yang diusulkan untuk menemukan indeksnya. Pada *screening* awal, panitia ISEF merencanakan mengambil empat desa dengan indeks tertinggi. Selanjutnya akan dilakukan kunjungan lapangan untuk menghimpun data dan informasi lebih jauh. Dari proses inilah kemudian nanti akan dipilih satu dari empat desa tersebut untuk diusung sebagai *pilot project* Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah.

Harus diakui, program ini sangat strategis dalam membumikan ekonomi syariah, utamanya dalam menggerakkan perekonomian desa berbasis sektor riil. Dengan hadirnya bank sentral sebagai pengusung dan menjadi garda terdepan, maka ke depan diharapkan dapat dimunculkan desa-desa binaan yang mempertemukan perguruan tinggi, lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan *stakeholder* ekonomi syariah untuk bahu-membahu membangun desa mandiri, berdaulat, dan humanis.

Ya, sejatinya Islam menjadi salah satu karakter Jawa Timur. Tidak jarang kita temukan kearifan lokal yang sejatinya adalah cermin ajaran agama Islam. Untuk itu, sudah selayaknya ekonomi syariah diberi ruang untuk menjadi bagian dari solusi atas

berbagai persoalan sosial ekonomi kemasyarakatan. Tidak hanya untuk Jawa Timur, tetapi juga untuk Indonesia. *Wallahua'lam bish showab.*

32
MENAKAR EKONOMI SYARIAH MASUK DESA[29]

Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) kembali akan digelar pada 7-11 November 2017. Jawa Timur berturut-turut mendapat kehormatan sebagai tuan rumah. Tahun ini, salah satu *output* dari ISEF adalah *kick-off* program Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah.

Program Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah diinisiasi oleh Bank Indonesia Jawa Timur. Program ini menjadi salah satu upaya menjawab pertanyaan *stakeholders* tentang apa aksi nyata dari perhelatan tahunan ISEF kepada masyarakat Jawa Timur. Sebagai salah satu dari 12 destinasi wisata syariah di Indonesia, Jawa Timur memang digadang menjadi pusat akselerasi pengembangan ekonomi syariah nasional.

Selain memiliki jumlah pesantren terbanyak nomor dua di Indonesia, jumlah penduduk muslim di Jawa Timur menempati peringkat kedua pula. Sejumlah penghargaan tingkat nasional

29 Catatan untuk ISEF 2017.

juga banyak diperoleh *stakeholders* Jawa Timur atas eksistensinya dalam pengembangan ekonomi syariah. Berbagai modal sosial ini mengindikasikan Jawa Timur memiliki kapasitas membangun ekonomi perdesaan dengan ekonomi syariah. Ditambah lagi dukungan pemerintah provinsi melalui Keputusan Gubernur Nomor 188/600/KPTS/013/2016 tentang Satuan Tugas (Satgas) Akselerasi Ekonomi Syariah Provinsi Jawa Timur yang menghimpun *stakeholders* ekonomi syariah untuk mengintegrasikan sektor riil berbasis ekonomi rakyat dengan sektor keuangan melalui pengembangan sistem ekonomi syariah.

Pilot Project

Dari berbagai usulan yang masuk melalui jaringan perguruan tinggi yang tergabung dalam organisasi profesi ekonomi Islam di Jawa Timur, diperoleh sejumlah nama dan kriteria kandidat desa mandiri berbasis ekonomi syariah. Melalui *focus group discussion* (FGD) bersama regulator, disepakati variabel dan indikator untuk pengukuran sehingga tersusunlah Arsitektur Desa Berbasis Ekonomi Syariah dengan lima pilar, yaitu akses keuangan, potensi ekonomi, kelembagaan masyarakat, lingkungan biotis & infrastruktur, serta sumber daya manusia (SDM) & kondisi sosial.

Berikutnya, dilakukanlah skoring terhadap desa-desa yang telah diusulkan. Berdasarkan Indeks Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah (IDMBES), lalu dipilih desa dengan indeks tertinggi di setiap wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) di Jawa Timur untuk menjadi *pilot project*. Kemudian dilakukanlah survei lapangan untuk penguatan data. Dari rangkaian *mixed method*

ini kemudian disusun *roadmap* untuk menentukan kebutuhan desa, program kerja, waktu, dan keterlibatan *stakeholders* dalam pengembangannya melalui sejumlah FGD.

Harus diakui, program ini sangat strategis dalam membumikan ekonomi syariah, utamanya dalam menggerakkan perekonomian desa berbasis sektor riil. Dengan hadirnya regulator sebagai pengusung dan menjadi garda terdepan, maka diharapkan akan mempermudah untuk mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, otoritas lainnya, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dunia usaha, dan *stakeholders* ekonomi syariah lainnya untuk bahu-membahu membangun desa mandiri berbasis ekonomi syariah yang berkelanjutan dan dapat berkontribusi bagi perekonomian regional dan nasional.

Tantangan Sosial

Dalam merintis *pilot project* desa mandiri berbasis ekonomi syariah di Jawa Timur, terdapat tiga tantangan sosial yang seyogyanya menjadi perhatian. **Pertama,** tantangan sosial ekonomi. Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur terbesar nasional dengan GINI Ratio per Maret 2017 turun sedikit menjadi 0,396 dari 0,402 di September 2016. Angka ini masih tertinggi dalam kurun 10 tahun terakhir. Ditinjau dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) antar perkotaan dan perdesaan di Jawa Timur menunjukkan kesenjangan kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dari perkotaan.

Kedua, tantangan sosial kemasyarakatan. Secara nasional, Jawa Timur menempati peringkat kedua tertinggi jumlah

peredaran narkotika, peringkat teratas jumlah pengidap HIV/AIDS, dan memiliki angka perceraian tertinggi pula. Belum lagi masifnya perilaku rente dan angka kriminalitas yang masih marak. Per 2016, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur mencapai 69,74 yang masih di bawah sebagian besar provinsi di Sumatra dan Sulawesi.

Ketiga, tantangan sosial keagamaan. Jawa Timur adalah kantong organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia. Konflik berlatar belakang agama di Jawa Timur relatif tidak banyak meski ada juga yang mencuat menjadi masalah nasional. Namun demikian, potensi ini tetap ada. Perhatian besar justru perlu diberikan kepada organisasi-organisasi Islam yang kian beragam untuk berusaha saling menghormati perbedaan sikap dan pandangan sesama saudara muslimnya sendiri. Ekonomi syariah masuk desa mengemban misi untuk memperbaiki dan meningkatkan kapasitas ekonomi seluruh warga desa, bukan satu persatu golongan.

Ya, *pilot project* desa mandiri berbasis ekonomi syariah di Jawa Timur dibayangi tiga tantangan sosial besar tersebut. Butuh langgam yang selaras harmoni dari regulator bersama *stakeholders* untuk bekerja keras, cerdas, dan ikhlas untuk pengembangan ekonomi perdesaan melalui ekonomi syariah yang mengedepankan sektor riil sebagai kekuatan ekonomi regional dan nasional. *Wallahua'lam bish showab.*

33
NANOFINANCE[30]

Dear Sister

Assalam-o-Elaikum

Would you please note that the last date of submission for book on women empowerment is 31st October. Waiting for your response anxiously.

Wa assalam

Toseef

Sebuah pesan masuk via *email* dari Dr. Toseef Azid, *Professor of Economics* dari *College of Business and Economics, Qassim University, Kingdom of Saudi Arabia*. Beliau bersama Dr. Jennifer L. Ward-Batts akan menjadi editor sebuah buku berjudul *"Economic Empowerment of Women in The Islamic World: Theory and Practice"* yang akan diterbitkan oleh *World Scientific Publishing Company* Pte Ltd. di Singapura. *Biidznillah,* saya berkesempatan menyumbang satu tulisan mengenai *nanofinance*

30 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 4 November 2017.

untuk buku tersebut.

Selain sukuk dan wakaf, salah satu konsen saya dalam tiga tahun terakhir memang adalah menulis tentang *nanofinance*. Tidak banyak literatur yang membahasnya. *Nanofinance* belum sepopuler *microfinance* yang sampai hari ini masih dipandang sebagai alat paling efektif untuk pengentasan kemiskinan. Namun demikian, sudah banyak *microfinance institutions* (MFIs) di sejumlah negara yang dalam prakteknya telah melakukan *nanofinance*, termasuk di Indonesia.

Bank Gakin, Kredit Melati, hingga Kredit Mesra

Tahun 2015, kiprah lembaga keuangan mikro (LKM) yang dibentuk oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop & UKM) Kabupaten Jember yang kerap disebut dengan Bank Keluarga Miskin atau Bank Gakin pernah saya presentasikan pada konferensi *Islamic Development Bank* (IDB) di Islamabad. Saat itu, saya menyampaikan bahwa praktek Bank Gakin dengan pinjaman Rp50 ribu hingga Rp1 juta dapat dikategorikan sebagai *nanofinance* (atau bahkan *picofinance*) yang perlu diadopsi oleh keuangan syariah.

Kehadiran Bank Gakin sejatinya adalah salah satu jawaban pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sosial kemasyarakatan, dalam hal ini memerangi praktek rente yang bunganya mencapai 30 persen per minggu. Dengan Bank Gakin, masyarakat bawah dapat mengakses pinjaman tanpa agunan dengan prosedur yang mudah dan cepat untuk memenuhi

kebutuhan mendesaknya, terutama dalam memenuhi modal usaha.

Tahun 2016, pada konferensi IDB di Kuala Lumpur, saya mencoba membangun definisi tentang *nanofinance*. Kali ini, kiprah Kredit Melawan Rentenir (Melati) yang digagas Ridwan Kamil bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung yang saya kisahkan. Juga kiprah bank sentral di Thailand bersama pemerintahnya yang memiliki *Nanofinance Project* untuk melawan rentenir.

Ya, saya tidak bisa tidak mengapresiasi Ridwan Kamil yang meminta PD BPR untuk fokus pada pemberian kredit menengah ke bawah. Bahkan Sang Walikota meminta dilakukan pendampingan terhadap bisnis para nasabah. Ia bahkan mendorong PD BPR untuk menjalankan *mobile marketing* sebagaimana pola yang dilakukan rentenir dengan mendatangi warga untuk menawarkan Kredit Melati.

Tahun 2017, lagi-lagi Ridwan Kamil meluncurkan program yang patut diapresiasi karena mencoba memberdayakan 4.000 masjid di Kota Bandung untuk membantu usaha masyarakat kecil. Kredit *Mesjid* Sejahtera (Mesra) dihadirkan Pemkot Bandung bersama PD BPR bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada jamaah masjid tanpa bunga dan denda. Setiap jamaah dapat mengajukan secara berkelompok, 5-25 orang, dengan pinjaman mulai Rp500 ribu hingga Rp2,5 juta per orang. Kredit akan diberikan pada jamaah melalui koperasi masjid dengan persetujuan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).

Ya, Kredit Mesra ini sangat menginspirasi. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, program ini juga mendekatkan masyarakat dengan masjid. Mesjid menjadi modal sosial dalam mendorong ekonomi umat. Sebagaimana di masa lalu, ketika masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga memiliki peran sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan menumbuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Program ini sepatutnya dapat diadopsi pula di wilayah Tapal Kuda dalam rangka inklusi keuangan syariah.

Melawan Rentenir

Apa yang dilakukan PD BPR sejalan dengan misi *nanofinance* yang ingin meningkatkan kapasitas ekonomi dan modal sosial masyarakat bawah, utamanya dengan melindungi mereka dari jeratan rentenir. Tentu saja, praktik ini harus diperangi oleh ekonomi syariah. PD BPR mencoba mengambil peran rentenir dalam hal memberi kemudahan pinjaman. Namun, jika rentenir mencekik rakyat kecil dengan bunga yang berlipat-lipat, maka BPR tidak memberikan bunga karena Kredit Melati dan Kredit Mesra adalah pinjaman kebajikan.

Dalam bahasa keuangan syariah, pinjaman kebajikan inilah yang disebut dengan *qardh* atau *qardhul hassan.* Sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Majah, sedekah memperoleh balasan 10 kali lipat, maka *qardh* memperoleh balasan 18 kali lipat. Pada Kredit Melati, BPR masih memberikan denda, namun pada Kredit Mesra tidak ada pemberlakuan denda. Keduanya tidak meminta agunan dan masa pinjaman berjangka waktu 12 bulan.

Ya, masyarakat bawah tidak membutuhkan pinjaman hingga puluhan juta. Mereka bahkan terkadang hanya membutuhkan pinjaman Rp100.000 untuk modal jualan atau kebutuhan mendesak lainnya. Jika masyarakat ini mencari pinjaman dalam bentuk *microfinance* kepada lembaga keuangan formal, kerap disyaratkan jaminan dengan nilai pembiayaan yang masih terlampau tinggi untuk ukuran kebutuhan dan kemampuan mereka. Pada tataran inilah *nanofinance* dapat hadir melengkapi *microfinance* dengan memberi pinjaman bernominal lebih kecil.

Akhirul kalam, *nanofinance* seyogyanya berbasis *qardh* atau *qardhul hassan*. Pembiayaan jenis ini tidak boleh ada bunga dan tidak menuntut bagi hasil. Bahkan, perlu diupayakan untuk ditiadakannya *administration fee* ataupun denda. Hal ini mengingat penerima manfaat *nanofinance* adalah masyarakat miskin Pada tataran inilah *nanofinance* dapat menjadi *meeting point* antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional dengan menjauhkan bunga dari masyarakat bawah. Sebab, atas nama kemanusiaan, tidak selayaknya mereka menjadi objek untuk mengais profit. *Wallahua'lam bish showab.*

34
MEWASPADAI INVESTASI BODONG[31]

"Bu, dia sudah 3 bulan tidak membayar kos. Makanya dia bingung kalua mau pulang ke kos untuk bisa kuliah. Orang tuanya sudah enggak punya uang, sudah habis-habisan karena tertipu investasi bodong sampai Rp 250 juta, Bu ...."

Demikian Risma dan Rizna, pasangan Ketua dan Wakil Ketua Kelas, menjawab pertanyaan saya tentang keberadaan anggota kelasnya yang tidak hadir selama lima pertemuan terakhir berturut-turut. Secara terpisah, mereka saling mengamini bahwa orang tua temannya yang tinggal di Garahan tersebut mengalami masalah keuangan. Tidak adanya kendaraan pribadi yang bisa digunakan membuatnya kesulitan untuk menempuh pulang pergi ke kampus.

Topik investasi bodong yang memakan korban juga tercetus oleh perwakilan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) yang hadir dalam *Focus Group Discussion (*FGD) dan Survei Persepsi

31 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 24 November 2017.

Kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hari Senin lalu di Kantor OJK Jember. Diceritakannya tentang sebuah perusahaan investasi internasional yang bergerak di bidang jual beli pulsa elektronik yang dipasarkan secara *online* yang memakan sejumlah korban di wilayah Jember. Korbannya tidak tanggung-tanggung, yaitu sejumlah dosen yang notabene adalah kalangan terdidik.

Jika dilacak, ternyata perusahaan investasi yang disebut oleh perwakilan PCNU itu telah resmi diumumkan sebagai perusahaan yang ilegal dan dilarang beroperasi oleh OJK sejak Januari 2017 lalu. Perusahaan investasi tersebut kemudian melakukan klarifikasi bahwa kegiatan yang mereka lakukan murni perdagangan seperti pada umumnya dan bukan jenis arisan ataupun investasi penghimpunan dana. Namun, mereka mengakui adanya salah kaprah di masyarakat yang menyebabkan bisnisnya terindikasi negatif.

Secara keseluruhan, dua kisah ini menunjukkan betapa literasi keuangan menjadi salah satu tantangan besar bagi otoritas. Maraknya investasi bodong menjadi salah satu penjelasan mengapa indeks inklusi keuangan melampaui indeks literasi keuangan meski keduanya sama-sama mengalami peningkatan dibanding 2013.

Sinergi dengan Simpul Masyarakat

Berdasarkan hasil Survei Literasi Keuangan Nasional 2016, Indeks Literasi Keuangan di Indonesia mencapai 29,66 persen dan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 67,82 persen. Kondisi ini serupa pula dengan Indeks Literasi Keuangan Syariah yang mencapai 8,11

persen dan Indeks Inklusi Keuangan Syariah sebesar 11,06 persen. Untuk Jawa Timur, Indeks Literasi dan Inklusi melampaui nasional. Dari 100 orang yang disurvei, tingkat inklusi berada di angka 73 orang. Sedangkan untuk literasi, berada di angka 70 orang.

Secara keseluruhan, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat mengakses layanan jasa keuangan kerap tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai. Beberapa riset menyimpulkan bahwa masyarakat cenderung latah terhadap tren atas produk keuangan yang mengiming-iming *return* yang menggiurkan.

Salah satu rekomendasi yang banyak mendapat dukungan dari 10 *stakeholders* yang diundang dalam FGD di Kantor OJK Jember dalam pertemuan dengan OJK Pusat tersebut adalah sinergi dengan simpul-simpul masyarakat, termasuk di antaranya adalah organisasi masyarakat (Ormas), Majelis Ulama Indonesia (MUI), pesantren, dan sejumlah organisasi berbasis massa lainnya. Rekomendasi lain adalah publikasi perusahaan-perusahaan yang merugikan masyarakat melalui sejumlah media dan aksi-aksi preventif berupa pengenalan produk-produk dan layanan jasa keuangan yang dapat menjadi sarana investasi yang aman sekaligus menguntungkan bagi masyarakat.

Ya, lagi-lagi kuncinya adalah literasi melalui sosialisasi dan edukasi. Dalam hal ini, OJK mustahil bekerja sendiri. Untuk itu, OJK perlu bersinergi dengan simpul-simpul masyarakat, utamanya yang masuk ke kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Waspada Investasi

Masalah perlindungan konsumen memang menjadi salah satu tantangan besar bagi OJK dalam melaksanakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam kurun 10 tahun terakhir, diperkirakan sekitar Rp 105,80 triliun dana masyarakat yang hilang akibat kegiatan investasi bodong. Sepanjang 2017, secara nasional, OJK telah menemukan sekitar 114 perusahaan investasi yang tidak memiliki izin dan 48 entitas ilegal berpotensi merugikan masyarakat serta dihentikan kegiatannya oleh OJK. Kebanyakan korbannya adalah masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah. Untuk perekrutan, sistem *multi level marketing* (MLM) yang paling banyak dilakukan.

Jika disimak, sedikitnya terdapat tiga modus yang saat ini marak dilakukan oleh pelaku investasi bodong. **Pertama,** investasi di pasar uang dengan janji imbal hasil yang tinggi, bahkan melampaui 30 persen per tahun. Investasi yang ditawarkan menyerupai perdagangan berjangka. **Kedua,** investasi emas yang menawarkan produk emas namun tidak diberikan fisiknya. Imbal hasil yang ditawarkan sekitar 5 persen per bulan. **Ketiga,** investasi properti dengan imbal hasil sekitar 5 persen pula per bulan. Masyarakat biasanya diminta membayar Rp6,5 juta dan dijanjikan akan memperoleh uang tunai ratusan juta rupiah.

Catatan lain yang juga perlu diperhatikan adalah kloning situs. Banyak temuan menunjukkan *web* perusahaan resmi, dalam hal ini industri sektor jasa keuangan, yang dibuat dengan domain berbeda sehingga masyarakat salah paham. Padahal, salah satu

upaya untuk mengecek legalitas dan eksistensi perusahaan investasi lazimnya adalah dengan melihat keberadaannya di dunia maya.

Ya, ragam modus yang kini semakin banyak variannya menuntut sosialisasi dan edukasi yang intens dari OJK. Dan OJK mustahil bekerja sendiri. Apalagi, tidak semua lembaga pengumpul dana berada di bawah pengawasan OJK. Bersinergi dengan simpul-simpul masyarakat adalah salah satu kunci untuk mengakselerasinya, termasuk salah satunya dengan perguruan tinggi. *Wallahu a'lam bish showab.*

35
PBB (PUN) MELIRIK KEUANGAN SYARIAH[32]

"... Ada kejadian memilukan seperti ini di Jember. Ke depan, mohon bantuan dan partisipasi aktif warga agar lembaga-lembaga sosial, khususnya BAZNAS dan LAZ, bisa berperan aktif dalam mengantisipasi hal-hal seperti ini. Mohon masukan dan diskusikan agar bagaimana kita penggiat zakat bisa punya mekanisme sistem grassroot *yang mengantisipasi problem-problem kemiskinan absolut seperti ini ...."*

Demikian pesan untuk saya yang masuk *Whatsapp* (WA) dari salah satu Komisioner Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pagi itu. Sebuah *link* dari media daring disertakannya pula tentang pemberitaan seorang nenek di Jember yang meninggal di semak-semak karena diduga kelaparan. Selisih dua hari, seorang kolega dosen dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jember menginfokan kepada saya pada grup WA asosiasi profesi bahwa berita itu tidak benar. Camat

---

32 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 5 Januari 2018.

di wilayah ditemukannya Sang Nenek adalah pamannya yang mengklarifikasi bahwa meninggalnya Sang Nenek bukan karena kelaparan.

Pesan dari Komisioner BAZNAS kepada saya terkait berita Sang Nenek memang sangat beralasan. Kami berdua saat ini terlibat kerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP), salah satu organ milik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk menyusun program nasional berbasis keuangan syariah dalam rangka mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan ke-2 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah *Zero Hunger*. Pantaslah berita tersebut di-*share* kepada saya.

Ya, dalam rangka melaksanakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi pedoman bagi banyak negara di dunia dalam menentukan arah pembangunan nasional, PBB melalui UNDP kini melirik keuangan syariah sebagai salah satu alat untuk mencapainya. Setahun terakhir, UNDP Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan sejumlah lembaga dan perguruan tinggi untuk berkolaborasi memberi ruang lebih besar bagi keuangan syariah untuk berkontribusi dalam pencapaiannya.

Mengenal SDGs

Jika diruntut ke belakang, inisiasi konsep SDGs sesungguhnya diusulkan oleh Kolombia saat berlangsung *government retreat* di Solo pada Juli 2011 sebagai persiapan konferensi Rio. Pada 19 Juli 2014, *Open Working Group* (OWG) PBB meneruskan usulan SDGs kepada Majelis Umum PBB. Lalu, pada 5 Desember 2014,

Majelis Umum PBB menerima usulan OWG sebagai dasar untuk membentuk agenda pasca MDGs. Negosiasi dengan pemerintah berbagai negara dimulai pada Januari 2015 dan berakhir pada Agustus 2015.

Akhirnya, pada 25-27 September 2015, para pemimpin dari 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Markas PBB di New York untuk memulai Agenda SDGs 2030. Suara-suara dari berbagai negara yang menuntut kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim menjadi aksi nyata. Terwujudlah 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Tujuan Global dengan 169 target yang menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan bagi seluruh negara di dunia untuk 15 tahun ke depan

Konsep SDGs sejatinya adalah seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal yang menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial, dan ekonomi. SDGs merupakan kelanjutan dan perluasan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah dilakukan oleh negara-negara di dunia sejak 2001 hingga akhir 2015.

Dari kacamata ekonomi Islam, 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesungguhnya memiliki kedekatan dengan misi yang diemban ekonomi Islam. Seluruhnya memiliki hubungan dan membentuk mata rantai yang saling terikat. Betapa tidak, pembangunan ekonomi tentu akan memberi implikasi kepada hampir semua lini kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lihat saja Tujuan 1 (Tanpa kemiskinan), Tujuan

2 (Tanpa kelaparan), Tujuan 3 (Kehidupan sehat dan sejahtera), Tujuan 6 (Air bersih dan sanitasi layak), Tujuan **7 (**Energi bersih dan terjangkau), Tujuan 8 (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), Tujuan 9 (Industri, inovasi dan infrastruktur), Tujuan 10 (Berkurangnya kesenjangan), termasuk **Tujuan 12 (**Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab).

Keuangan Syariah untuk SDGs

Kehadiran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sesungguhnya menjadi sinyal perubahan paradigma keuangan syariah di Indonesia yang semula mengandalkan *bottom-up approach,* kini menjadi kolaborasi *bottom-up* dan *top-down approach*. Sudah banyak indikasi kuat, perlahan tapi pasti, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan keuangan syariah sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Salah satu wacana yang kini sedang mendapat perhatian banyak pihak adalah integrasi keuangan komersial Islam dengan keuangan sosial Islam. Pada tataran inilah, instrumen-instrumen sosial Islam seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf saat ini menjadi konsen sejumlah pihak, termasuk pemerintah, bahkan pula oleh PBB.

Saat ini, UNDP tengah menggodok instrumen wakaf dan sukuk sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Wakaf dan sukuk dilirik tentu bukan karena tanpa alasan. Instrumen ini dinilai strategis karena memiliki *scale of economics* yang besar untuk mewujudkan target SDGs.

Sebelumnya, PPB juga memberi perhatian kepada zakat. Bahkan, dalam *World Humanitarian Summit* yang diselenggarakan PBB di Istanbul, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) meluncurkan *Zakat Core Principles* (ZCP) yang merupakan kontribusi nyata Indonesia terhadap pengembangan keuangan sosial Islam dan standar pengelolaan zakat yang lebih baik di dunia.

Secara keseluruhan, tulisan ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa ekonomi dan keuangan syariah kini menjadi perhatian dunia. Jika selevel PBB saja sudah meyakini bahwa keuangan sosial dan komersial syariah bisa menjadi salah satu alat untuk menjawab tantangan SDGs, maka kita semua di daerah juga seharusnya dapat juga menjadikan keuangan syariah sebagai gerakan yang lebih kongkret untuk menjawab persoalan-persoalan sosial ekonomi di sekitar kita. *Wallahua'lam bish showab.*

36
LITERASI KEUANGAN, KENAPA HARUS PEREMPUAN?[33]

"Menurut analisis saya, setelah 15 tahun berkecimpung di kredit mikro, yang membuat kesejahteraan mereka tidak menjadi lebih baik itu karena kreditnya dibelanjakan dalam satu dompet, ya untuk investasi, untuk konsumsi, untuk modal, dll. Ada debitur yang bangga mengatakan telah menjadi nasabah peminjam dari sejak 1980-an sampai sekarang, padahal nilai pinjamannya kalau dikonversikan ya hampir sama nilai uangnya saat itu dengan masa kini, paling selisih inflasi …."

Demikian Pak Riz Nurmaji, seorang kepala unit dari sebuah lembaga keuangan yang terkenal dengan kredit mikronya hingga pelosok desa, menjawab pertanyaan saya. Saya bertemu beliau ketika mengunjungi mahasiswa yang melaksanakan praktik pengalaman lapangan

33 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 23 Februari 2018.

(PPL) di lembaga yang dipimpinnya. Dari silaturahim tersebut, saya memperoleh pencerahan atas sejumlah hipotesis yang selama ini ada di benak saya.

Ya, ketika riset lapangan, saya menemukan sebagian masyarakat di daerah yang kerap kali memperoleh kredit, pembiayaan, bahkan hibah dari berbagai pihak selama bertahun-tahun, namun tingkat kesejahteraannya tampak tidak menjadi lebih baik. Hal ini makin dikuatkan oleh informan yang juga praktisi keuangan mikro yang menceritakan bahwa nilai bantuan yang pernah digelontorkan lembaganya untuk masyarakat di suatu wilayah sebuah kecamatan setara dengan total kredit dari sembilan kantor unitnya. Lalu, mengalir ke manakah segala bentuk pinjaman dan bantuan tersebut? Hipotesisnya banyak yang bisa dimunculkan. Sebagian sudah terjawab, namun tetap butuh penguatan untuk menjustifikasinya.

Buat saya, kuncinya adalah edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan. Masyarakat mikro dapat memperbaiki diri, keluarga, dan komunitasnya jika mereka memiliki literasi keuangan. Dan, perempuan adalah ujung tombaknya. Banyak riset dari seluruh dunia yang merekomendasi agar keuangan mikro harus melibatkan perempuan. Kenapa harus perempuan?

Harus Perempuan, Perempuan Harus

Pada Mei 2017 lalu, *Survey on Financial Inclusion and Access* (SOFIA) hasil kerjasama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dibiayai oleh Pemerintah Australia dan

Swiss di empat provinsi di Indonesia, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, menunjukkan 64 persen perempuan lebih aktif menabung dan laki-laki hanya 48 persen. Cara umum bagi perempuan menabung adalah melalui arisan atau menyimpan uang di rumah,

Meski kebanyakan perempuan tidak memiliki tanah, rumah, dan juga rekening bank, SOFIA mengidentifikasi bahwa perempuan lebih banyak peran dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. SOFIA menemukan 61 persen perempuan mengambil keputusan sendiri dalam mengelola keuangan, sedangkan laki-laki 24 persen. Terdapat 59 persen laki-laki berkonsultasi dengan istri dalam mengambil keputusan, sedang istri berkonsultasi dengan suami hanya 31 persen. Kemudian, 11 persen laki-laki mengaku tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, sedangkan perempuan hanya 1 persen yang mengaku tidak terlibat.

Meski hanya dilakukan di empat provinsi, temuan SOFIA ini dapat menggambarkan profil rumah tangga masyarakat Indonesia. Meski perempuan tidak memiliki banyak kepemilikan aset dalam rumah tangga, namun perempuan adalah pengambil keputusan dalam belanja rumah tangga. Pemeran terbesar dalam pengelolaan keuangan rumah tangga adalah perempuan.

Setahun sebelum kemunculan SOFIA, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan kepada 9.680 responden di 34 provinsi yang tersebar di 64 kota/kabupaten di Indonesia. Tingkat literasi keuangan perempuan ternyata rendah, yaitu 25,5 persen, sedangkan laki-laki 33 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan pelajar dan

mahasiswa hanya 23,4 persen. Survei ini juga menemukan 67,8 persen masyarakat menggunakan produk dan layanan keuangan, tetapi hanya 29,7 persen yang paham tentang produk dan layanan tersebut.

Selain itu, OJK juga mencatat sekitar 49,11 persen masyarakat memiliki tujuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, hanya 8 persen yang menyiapkannya untuk dana pendidikan anak. Secara keseluruhan, ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap perencanaan keuangan masih sangat rendah.

Literasi Keuangan Perempuan

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) *Working Papers* merilis kajian Hung, Yoong & Brown (2012) berjudul *Empowering Women Through Financial Awareness and Education* yang menyatakan rendahnya literasi keuangan perempuan memiliki potensi untuk mengurangi: (1) partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi; (2) kekuatan ekonomi rumah tangga; (3) transmisi pengetahuan kepada generasi masa depan; dan (4) memperburuk kesenjangan sosial. Pada 2013, OECD bersama *International Network and Financial Education* (INFE) juga merilis *Addressing Women's Needs for Financial Education* yang menunjukkan kebutuhan akan literasi keuangan bagi perempuan sangat akut dalam isu kesetaraan gender. Menariknya, studi ini menemukan perempuan memiliki pengetahuan keuangan yang lebih rendah daripada laki-laki di sejumlah besar negara, baik negara maju dan berkembang. Kajian ini seluruhnya selaras

dengan hasil survei OJK dan SOFIA yang mengindikasikan bahwa literasi keuangan bagi perempuan menjadi keharusan karena posisi strategisnya dalam mengelola keuangan rumah tangga.

Dengan demikian, perempuan sebagai personal memiliki kepentingan untuk meningkatkan literasi keuangan. Manfaatnya tidak hanya untuk diri pribadi, tetapi juga untuk keluarga dan masyarakat hari ini dan masa depan. Lebih daripada itu, perempuan sebagai *al-ummu madrasatul 'ula* memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan keuangan sejak dini guna menciptakan generasi yang memiliki penguasaan ilmu serta terampil mengelola keuangan. Ya, edukasi keuangan akan efektif jika diperkenalkan sejak dini dan diyakini menjadi jalan ampuh untuk meningkatkan kecerdasan dan mengakselerasi proses perbaikan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan perempuan sebagai agen perubahan. *Wallahua'lam bish showab.*

37
FINTECH, EKOSISTEM BARU EKONOMI NASIONAL DAN DUNIA[34]

"Mbaknya ngajar di IAIN Jember? Eh, kemarin saya naik Grab, ternyata si Bapak yang nganterin saya itu kerja di IAIN Jember juga lho. Katanya lumayan dapatnya nyambi di Grab. Mbaknya kenal gak, namanya Pak………"

Demikian cerita Dokter Spesialis Jantung ketika saya menemani Ibu saya kontrol ke ruang periksanya di rumah sakit (RS). Saya kemudian menyahut bahwa sejumlah teman saya di kota besar menyambi juga menjadi sopir transportasi *online*. Bahkan ada yang memutuskan berhenti kerja di bank dan beralih menjadi sopir transportasi *online* sembari mencoba berwirausaha. Ada lagi yang semula bekerja sebagai manajer di perusahaan ritel di Arab, kemudian hijrah ke Jakarta dan akhirnya memutuskan menjadi sopir transportasi *online* untuk menyambung hidup keluarga.

34 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 11 Mei 2018.

Berbagai kisah seputar transportasi *online* sesekali juga saya ceritakan ketika menjadi pemateri pada beberapa seminar terkait *financial technology (fintech)* ataupun ketika mengajar di kelas. Seperti akhir Maret lalu, saya bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Timur memenuhi undangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan (INZAH) Genggong untuk mengisi seminar *fintech*. Ya, tentu saja topiknya bukan tentang *fintech* pada sektor transportasi, tetapi *fintech* pada industri jasa keuangan. Kehadiran *fintech* merupakan *disruptive innovation* yang jika tidak diantisipasi akan berdampak pada aktivitas lembaga jasa keuangan yang eksis saat ini.

Perusahaan *Fintech* = Rentenir Digital?

Fintech identik sebagai inovasi yang bersifat mengacaukan karena mentransformasi kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis pada suatu sistem atau pasar yang sudah ada. Di Indonesia, perusahaan *fintech* yang bergerak di bidang *payment* berada di bawah wewenang bank sentral. Akhir November 2017, Bank Indonesia meluncurkan *Fintech Office* untuk memfasilitasi perkembangan inovasi dalam ekosistem keuangan berbasis teknologi, mempersiapkan Indonesia untuk mengoptimalkan perkembangan teknologi dalam rangka pengembangan perekonomian, meningkatkan daya saing industri keuangan berbasis teknologi, menyerap informasi dan memberi umpan balik untuk mendukung perumusan kebijakan

Bank Indonesia sebagai respon terhadap perkembangan berbasis teknologi.

Untuk perusahaan *fintech* yang bergerak di bidang *peer to peer lending* (P2P), mereka diwajibkan mendaftar kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK bukan otoritas bagi perusahaan *fintech* karena perusahaan ini bukan lembaga jasa keuangan. Di Indonesia, jumlah perusahaan P2P mencapai ratusan. Namun, merujuk data OJK per 25 Januari 2018, perusahaan *fintech* yang terdaftar resmi memberi layanan P2P di Indonesia sebanyak 32 perusahaan. Dalam rangka perlindungan konsumen, OJK terus memantau perkembangan industri P2P berbasis *fintech* dan gencar melakukan edukasi.

Awal Maret lalu, Ketua Dewan Komisioner OJK menyebut perusahaan dan penyedia platform *fintech* bak rentenir digital. Pasalnya, *fee* pinjaman untuk P2P cukup tinggi, mencapai minimum 19-21 persen per tahun. Untuk itu, OJK akan menerbitkan aturan baru mengenai transparansi *fee* pelaku *fintech*. Meski nilai portofolio pinjaman P2P baru berkisar Rp3 triliun, namun bisnis ini diproyeksi akan terus tumbuh besar. Apalagi kredit bermasalah P2P mulai meningkat.

Ya, sesungguhnya terdapat irisan antara perusahaan *fintech* P2P dengan rentenir konvensional. Mereka sama-sama melayani kelompok masyarakat yang belum atau tidak dijangkau oleh perbankan. Jika P2P menggunakan teknologi informasi, rentenir mengandalkan pertemuan *face to face*. Pengenaan bunga pinjaman yang sama-sama tinggi pada keduanya yang menjadikan OJK menyebut perusahaan *fintech* menyerupai rentenir digital.

Padahal, kelompok masyarakat yang kebanyakan menjadi pasar mereka adalah yang rentan secara ekonomi.

Tidak bisa dimungkiri, kehadiran perusahaan *fintech* menimbulkan disrupsi. Di satu sisi, kehadiran *fintech* berpotensi meningkat inklusi keuangan dan pemerataan pembiayaan bagi masyarakat luas, termasuk dalam menjangkau wilayah yang belum terjamah layanan jasa keuangan. Melalui *fintech,* produk dan jasa keuangan dapat diakses cepat, tidak seperti bank yang memiliki aturan rigid. Namun, disisi lain, kehadiran *fintech* dapat menggerus bisnis ritel bank.

***Fintech* dan Ekonomi Keuangan Islam**

Dalam *fit and proper test* Gubernur Bank Indonesia yang akan dilantik Mei yang akan datang, disebutkan kandidat terpilih bahwa agenda pertama yang harus menjadi konsen Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi adalah pengembangan ekonomi dan keuangan digital. Agenda kedua adalah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kedua agenda ini mengindikasikan bahwa isu *fintech* dan ekonomi keuangan syariah akan menjadi titik perhatian otoritas dalam beberapa tahun ke depan.

Secara global, kedua isu tersebut juga menjadi agenda pembangunan dunia. Hal ini tercermin dari perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui organnya United Nations Development Programme (UNDP) yang tengah menyusun sejumlah *relevant business models for Islamic finance-Sustainable Development Goals (SDGs) and/or fintech initiatives.* Bahkan, Islamic

Development Bank (IDB) tahun lalu juga menyelenggarakan kompetisi *FinTech Islamic Finance Challenge* yang memberi kesempatan kepada siapa saja dari seluruh dunia yang memiliki ide proyek keuangan syariah berbasis teknologi yang memberi dampak sosial bagi masyarakat.

Ya, kehadiran *fintech* membentuk ekosistem baru dalam perekonomian nasional dan dunia. Agar efek disrupsinya tidak menjadi besar dan terasa, maka perlu upaya agar kebermanfaatannya terus dikembangkan, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam. Sepanjang 2018, Malaysia sudah dua kali menyelenggarakan *International Waqf and Blockchain Forum*. Mengingat inovasi dan gangguan yang berkelanjutan dari *fintech*, maka penggiat dan praktisi keuangan Islam di sana berupaya menyusun tata kelola dan regulasi agar wakaf tetap relevan sebagai instrumen sosial ekonomi Islam di tengah-tengah tantangan tren *fintech,* bahkan juga *blockchain,* teknologi basis data terdistribusi yang merupakan loncatan evolusioner *fintech* berikutnya dalam hal optimalisasi proses bisnis. *Wallahua'lam bish showab.*

38
EKONOMI LEBARAN[35]

Libur Lebaran tahun ini bertambah tiga hari menjadi total 10 hari. Sebagian sektor ekonomi menerima manfaat, tetapi juga ada yang terimbas. Hal ini pulalah yang sempat membuat pemerintah mempertimbangkan hendak merevisi keputusannya. Bagaimana sebenarnya ekonomi lebaran tahun ini?

Di Indonesia, termasuk Jawa Timur, momen Ramadan dan Lebaran menciptakan fenomena unik. Mudik menjadi kegiatan ritual dan sektor konsumsi meningkat pesat. Meningkatnya sektor konsumsi lazimnya diikuti dengan meningkatnya inflasi. Namun, tahun ini, polanya sedikit berbeda.

Merujuk rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional di bulan Ramadan yang jatuh pada Mei 2018 sebesar 0,21 persen. Angka ini lebih rendah dibanding inflasi Ramadan tahun 2017 dan 2016 yang masing-masing sebesar 0,39 persen dan 0,66 persen. Kebanyakan menilai inflasi yang rendah mengindikasikan

35 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 29 Juni 2018.

pelambatan konsumsi rumah tangga atau kelesuan daya beli rumah tangga. Padahal, tidak selalu demikian. Struktur perekonomian suatu negara menentukan pula keadaan tersebut.

Dinamika Ramadan hingga Lebaran Ketupat

Di sektor moneter, geliatnya jelang lebaran tidak lepas dari kebiasaan masyarakat yang menarik dan menukarkan uang baru. Berdasarkan histori, uang tunai yang dikeluarkan Bank Indonesia selaku otoritas moneter mencapai puncaknya pada pekan terakhir jelang lebaran. Tahun ini, sejak awal puasa hingga minggu pertama bulan Juni, uang tunai yang sudah dikeluarkan mencapai Rp110 triliun. Angka ini setara dengan 58,4 persen dari total uang tunai yang disiapkan Bank Indonesia selama Ramadan dan lebaran yang sebesar Rp188,2 triliun.

Bila peningkatan kebutuhan uang tunai sepanjang 2013-2017 sebesar 13,9 persen per tahun, maka tahun 2018 diproyeksikan meningkat 15,3 persen dibanding 2017 karena jumlah libur lebaran yang lebih panjang. Selain itu, ditambah pula dengan kenaikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparat Sipil Negara (ASN) dan pensiunan. Hal ini pula yang juga menyebabkan terjadinya penguatan sektor barang konsumsi yang dicerminkan oleh meningkatnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE).

Namun demikian, kebijakan libur lebaran yang lebih panjang memberi imbas bagi industri manufaktur, utamanya industri tekstil, karena peningkatan penambahan biaya tenaga kerja yang dapat mencapai 100 persen. Pasalnya, biaya tenaga kerja di masa

liburan termasuk dalam kategori lembur yang harus dibayar dua kali lipat.

Bagi industri pasar modal, libur lebaran yang lebih lama juga tidak begitu menyenangkan. Sebabnya, pasar keuangan telah setahun sebelumnya menetapkan kalender kerja dan cuti yang menjadi pedoman bagi investor dalam memutuskan kebijakan anggaran, keuangan, dan investasi. Untuk industri perbankan, layanan pada masyarakat ketika liburan biasanya sudah diantisipasi untuk menghindari penurunan kinerja meski aktivitas bisnis menurun seminggu sebelum lebaran sampai seminggu setelah libur panjang berakhir.

Ya, lazim di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Jawa Timur dan Tapal Kuda, aktivitas bisnis kembali normal selang seminggu Hari Raya Idul Fitri yang dikenal dengan Lebaran Ketupat, *Kupatan* atau *Syawalan*. Terdapat sejumlah versi yang mencoba menjelaskan tentang sejarah dan filosofi Lebaran Ketupat. Namun, seluruhnya menyiratkan bahwa Lebaran Ketupat adalah akulturasi kebudayaan Indonesia dengan Islam. Sebagian masyarakat meyakini bahwa tradisi Lebaran Ketupat berasal dari orang Jawa yang kemudian menyebar ke seluruh pelosok nusantara.

Berbeda dengan lainnya, pada industri pariwisata, aktivitas bisnis ini justru menggeliat pada masa Lebaran Idul Fitri hingga Lebaran Ketupat. Libur lebaran umumnya mendongkrak arus wisatawan nusantara, utamanya berkat tradisi mudik. Tahun ini, arus pergerakan mudik meningkat seiring masa liburan yang lebih panjang. Diperkirakan sepanjang H-7 hingga H+7,

terdapat 8,52 juta pemudik menggunakan roda dua atau naik 33,3 persen dibanding tahun 2017. Sedangkan jumlah pemudik yang menggunakan kereta api meningkat 5,84 persen menjadi 4,63 juta, melalui penerbangan meningkat 3 persen menjadi 5,75 juta, melalui kapal meningkat 2,27 persen menjadi 1,77 juta, melalui bis meningkat 1,76 persen menjadi 8,09 juta, dan yang mengendarai mobil sendiri meningkat 16,69 persen menjadi 3,72 juta. Total pemudik yang menggunakan moda transportasi umum mencapai 20,24 juta.

Berkah Tradisi Mudik

Ya, tradisi mudik menjadikan momen Lebaran sebagai sarana redistribusi kekayaan dan pendapatan yang menggerakkan sektor riil di daerah-daerah. Kekayaan yang biasanya terakumulasi di kota, mengalir ke pelosok desa. Tidak hanya itu, momen Lebaran juga menjadi sarana bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (LN) ikut mengungkit ekonomi di daerah. Rata-rata remitansi pada momen Ramadan hingga Lebaran tumbuh hingga menembus dua digit, bahkan di beberapa bank dapat mencapai 20-25 persen.

Ditambah lagi kegiatan zakat, infak atau sedekah dalam bentuk santunan atau donasi dari pemudik atau TKI kepada keluarga atau tetangga yang kurang mampu. Dalam dimensi sosial, seluruh aktivitas ini menjadi media silaturahim yang mampu menguatkan tidak hanya *ukhuwah Islamiyah,* tetapi juga *ukhuwah wathaniyah* dan bahkan *ukhuwah insaniyah*.

Berkat ekonomi lebaran ini pula yang menjadikan pemerintah semakin memberi perhatian pada pembangunan infrastruktur,

terutama yang terkait dengan fasilitas berbagai moda transportasi untuk kelancaran dan kenyamanan para pemudik. Hal ini tentu pada gilirannya akan mendorong penyerapan anggaran dan semakin menggerakkan perputaran uang secara cepat dan besar yang dalam rumus moneter mencerminkan *velocity of money* yang sangat ditekankan oleh ekonomi Islam.

Inilah potret ekonomi lebaran di Indonesia yang menjadi penggerak pembangunan di daerah secara nasional. Redistribusi ekonomi pada gilirannya akan memicu aktivitas produktif masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahap selanjutnya, jika pemerintah daerah mampu mengelola dengan baik, akan meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan daerah kepada pusat. *Wallahua'lam bish showab.*

39
EKONOMI PILKADA[36]

"Nda, teman-temannya Kakak banyak yang pamer jarinya bertinta. Banyak temannya kakak yang sudah pada nyoblos. Kakak sebentar lagi dibuatkan e-KTP ya, Nda. Supaya tahun depan bisa ikut nyoblos. Kata teman-temannya Kakak, tahun depan ada Pemilu …."

Putri sulung saya yang baru saja naik kelas XII mengingatkan bahwa usianya tak lama lagi akan mencapai 17 tahun dan akan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (e-KTP) serta hak politik. Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, penduduk yang berusia 17 tahun yang diperbolehkan memiliki e-KTP. UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, kemudian UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

36 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 8 Juli 2018.

Perwakilan Rakyat Daerah, serta UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin mempunyai hak memilih.

Bagi mereka yang baru genap berusia 17 tahun pada 27 Juni 2018 lalu, maka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kemarin menjadi momen perdana menjalankan hak pilih. Wajar saja, putri saya dan teman-teman sebayanya yang dapat dikategorikan sebagai Generasi Z memandang dua tahun ini yang merupakan tahun politik akan memberi pengalaman pertama dalam menjalankan hak politik.

Dinamika Ekonomi

Tahun Politik selalu menarik untuk disimak. Seperti halnya bulan puasa dan Lebaran, momen Pilkada dan Pemilu juga memiliki pola perekonomian yang khas. Pada Kuartal II 2018 ini, pertumbuhan ekonomi diprediksi sebesar 5,2-5,3 persen. Selain bulan puasa, Lebaran dan panen raya yang bergeser menjadi April-Mei sebagai faktor pendorongnya, pilkada juga menjadi faktor lainnya.

Pilkada kemarin, sebanyak 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati. Bisa dipastikan pesta demokrasi ini mendongkrak perekonomian di daerah. Banyak usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ikut menikmati keuntungan

karena besarnya perputaran uang menjelang dan saat Pilkada berlangsung. Kebanyakan atribut kampanye dibuat oleh UMKM.

Sebagaimana bulan puasa dan lebaran, perputaran uang selama Pilkada juga bergerak cepat. Selain uang yang dikeluarkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pilkada serentak, peredaran uang juga berasal dari kelompok pasangan calon yang mengikuti pilkada.

Namun demikian, menyimak data inflasi pada Juni 2018 dan indikator makro ekonomi lainnya, kontribusi pilkada tahun ini bagi perekonomian mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah media juga memberitakan tentang penurunan permintaan atribut keperluan kampanye, seperti spanduk, baliho, stiker, dan kaos. Metode kampanye sepertinya mengalami pergeseran. Media sosial menjadi pilihan.

Inflasi Juni sebesar 0,59 persen. Angka ini lebih rendah dibanding inflasi Juni tahun lalu yang sebesar 0,69 persen Namun, dibanding dengan inflasi Mei 2018 yang sebesar 0,21 persen, inflasi Juni melonjak cukup besar. Kelompok bahan makanan dan transportasi menjadi penyebabnya. Inflasi di sektor transportasi naik menjadi 1,5 persen dibanding Mei yang sebesar 0,18 persen. Inflasi kelompok bahan makanan naik menjadi 0,88 persen dibanding Mei yang sebesar 0,21 persen. Inflasi ini menyebabkan daya beli masyarakat melemah. Apalagi ditambah dengan depresiasi Rupiah, kenaikan suku bunga, tekanan eksternal, dan tingginya rasio impor terhadap ekspor Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, semakin menekan tingkat investasi dan perekonomian secara nasional.

Waspada Uang Palsu

Hal lain yang menarik disimak dari dinamika ekonomi Pilkada adalah peredaran uang palsu. Banyak pihak, utamanya bank sentral selaku otoritas moneter, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai beredarnya uang palsu menjelang dan saat perhelatan Pilkada. Tidak mustahil mereka yang ingin memenangkan kontestasi politik bertindak tidak benar. Tidak menutup kemungkinan juga bagi mereka yang tidak terkait langsung dengan Pilkada, hendak mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan dengan menyelipkan uang palsu. Uang palsu memang sangat rentan beredar dalam situasi Tahun Politik.

Maret 2018 lalu, diberitakan bahwa Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya menemukan uang palsu sebanyak Rp2,6 miliar dalam bentuk 916 lembar uang pecahan Rp100 ribu. Sebanyak 11 orang yang berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka berasal dari beberapa daerah, mulai dari Situbondo, Jember, Lamongan, Jombang, Ngawi, Madiun, hingga Klaten. Demikian pula di Bogor ditemukan uang palsu sebanyak Rp6 miliar. Namun, ditengarai aksi di dua kota ini tidak terkait dengan Pilkada.

Secara keseluruhan, rasio peredaran uang palsu dari tahun ke tahun mengalami penurunan sejak 2015. Sepanjang 2017, rasionya sebesar 8 lembar per 1 juta uang yang beredar. Tahun 2016, rasionya mencapai 13 lembar per 1 juta uang. Pada 2015, rasionya 21 lembar per 1 juta uang yang beredar. Selama 2015-2017, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) telah menetapkan 574 tersangka dalam kasus peredaran

uang palsu. Penindakan tidak hanya diberikan kepada pengedar, tetapi juga pembuat dan pemodalnya. Sebab, kasus uang palsu sifatnya jaringan sindikat.

Ya, pada Tahun Politik ini, selain edukasi tentang bahaya politik uang, edukasi terkait peredaran uang palsu perlu digencarkan. Jika politik uang berimplikasi pada terpilihnya orang yang tidak memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan kepemimpinan dalam membangun daerah, kemudian berpeluang mengorupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta menguntungkan pemodal, maka peredaran uang palsu cenderung akan mengganggu perekonomian dan merugikan masyarakat kelas menengah bawah. Implikasinya tidak hanya berpotensi menyebabkan terjadinya inflasi, tetapi juga mengganggu suplai uang dan memperdalam kesenjangan sosial. *Wallahua'lam bish showab.*

40
FROM JEMBER TO MECCA[37]

"Jadi Mbaknya ini belum pernah ke luar negeri? Kalau saya sih sudah pernah ke Singapura, Hongkong, dan Malaysia. Bahkan saya sudah beberapa kali mengajak saudara dari Jember untuk kerja di Malaysia ...."

Tiba-tiba saya teringat kembali percakapan dengan seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ketika bertemu di Kantor Imigrasi Jember sekitar 10-11 tahun lalu. Saat itu, untuk pertama kalinya saya membuat paspor. Wajah saya yang tampak kebingungan mungkin mengundang perhatiannya untuk menyapa. Jika ingat pertemuan itu, saya agak geli karena terkenang ekspresinya. Saya menangkap rasa ibanya kepada saya yang belum pernah bepergian ke luar negeri.

Pada tahun-tahun tersebut, dari sebuah diskusi publik yang pernah diselenggarakan oleh Universitas Jember, Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Migran Indonesia (DPW-SBMI) Provinsi Jawa

37 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 17 Agustus 2018.

Timur membuka fakta tingginya keinginan warga Jember bekerja di luar negeri. Rata-rata setiap tahun ada 240 orang warga Jember yang menjadi TKI dan berangkat lewat jalur legal maupun ilegal. Hasil riset SBMI juga mengungkap pemicu warga Jember bekerja ke luar negeri adalah alasan kemiskinan.

Saya jadi mengenang kembali kisah 10-11 tahun lalu itu lantaran pesan *Whatsapp* (WA) dari Pak Roni Subhan, dosen Bahasa Indonesia di kampus, yang menyampaikan salam dari keluarga suami di Mekkah kepada saya. Bersama rombongan jamaah haji asal Jember, Pak Roni saat ini sudah berada di Mekkah. Pak Roni mengirimkan fotonya yang diundang ke rumah oleh keluarga suami saya yang sudah puluhan tahun bekerja dan menetap di sana sebagai TKI.

Ya, saya memiliki cukup kenangan dengan TKI. Ketika bepergian ke luar negeri, baik itu ke Cambodia, Qatar, bahkan Pakistan, apalagi ketika hajian, tidak pernah tidak bertemu TKI. Ketika riset di Bahrain, yang paling banyak menolong dan mendampingi saya selama dua pekan di sana adalah para TKI. Mereka sampai membuat jadwal sesama mereka untuk mengawal saya. Padahal kami sebelumnya hanya berkenalan melalui dunia maya.

Ketika ke Malaysia, yang membantu membawakan barang-barang saya adalah TKI yang padahal baru saja berkenalan dengan saya di pesawat. Ketika mengikuti konferensi yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, TKI yang menjadi petugas *cleaning service* di tempat saya menginap sampai membelikan oleh-oleh untuk saya bawa pulang. Ketika

mengunjungi sebuah kampus di Malaysia, ternyata salah satu pekerja di sana ada yang berasal dari Lumajang dan ia tampak bahagia sekali ketika mengetahui saya juga berasal dari Lumajang.

Arab Saudi

Hingga saat ini, Arab Saudi adalah salah satu negara tujuan utama TKI. Tidak ada data pasti jumlah TKI yang berada di sana. Pihak Arab Saudi juga tak memiliki data rinci terkait jumlah resmi. Sejak diberlakukannya moratorium penempatan TKI pada 1 Agustus 2011 dan penghentian penempatan TKI ke Arab Saudi pada 2015, keberadaan TKI mengalami banyak dinamika. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah semakin sulit mendeteksi jumlah TKI di Arab Saudi karena mereka masuk ke negara tersebut dengan berbagai cara. Pengguna jasa TKI juga banyak yang menghalangi TKI kembali ke Tanah Air meski kontraknya sudah habis.

Selain itu, mengingat kebutuhan akan TKI yang besar di sana, terdapat kecenderungan TKI legal yang mengilegalkan diri agar mereka dapat menetapkan harga lebih tinggi atas jasa mereka. Agen tenaga kerja di Arab Saudi juga memiliki modus untuk membawa TKI dengan menggunakan visa ziarah sekitar 90 hari, selanjutnya, sesampai di sana, visa tersebut dikonversi menjadi izin tinggal.

Akhirul kalam, hingga hari ini, TKI yang masuk ke Arab Saudi masih cukup besar. TKI yang berada di Arab Saudi banyak terkonsentrasi di Provinsi Mekkah, terutama di kota Mekkah, Madinah, dan Jeddah. Terlebih komunitas Madura, seperti keluarga

suami saya, yang jika sudah mampu menghidupi diri, biasanya akan mengajak sanak keluarga lainnya untuk turut bekerja di sana. Itulah sebabnya, tidak sulit menemukan orang Madura di tiga kota ini, apalagi di Mekkah.

Sebagaimana musim haji seperti hari-hari ini, tidak sedikit yang mengatakan bahwa jamaah haji Indonesia harus banyak berterimakasih kepada orang Madura. Pasalnya, mayoritas yang berjualan makanan khas Indonesia di Mekkah dan Madinah adalah orang-orang Madura. Itu pula yang dilakukan keluarga suami saya di sana. Ketika musim haji, mereka banyak menerima permintaan jasa katering.

Membangun Ekonomi Daerah

Tahun ini, membaca pemberitaan, jumlah TKI illegal asal Jember semakin meningkat. Hingga pertengahan 2018, terdapat 21 kasus TKI yang masuk di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Jember yang 20 di antaranya adalah kasus TKI ilegal. Padahal, tahun sebelumnya hanya 3 kasus. Kasus yang paling banyak ditangani terkait TKI ilegal antara lain TKI meninggal di luar negeri yang diakibatkan sakit, kecelakaan dan beberapa penyebab lain.

Membahas topik TKI memang cukup dilematis. Di satu sisi, mereka disanjung sebagai pahlawan devisa. Di sisi lain, mereka adalah kelompok masyarakat yang termarjinalkan. Sejatinya, jumlah TKI yang besar menjadi salah satu potret ketidakberhasilan pembangunan ekonomi di daerah. Rasanya juga tidak bijaksana bila pengiriman TKI menjadi opsi solusi mengatasi kemiskinan

dan pengangguran. Kita belum pernah benar-benar menghitung dampak sosial dan psikologi dari TKI dan keluarganya. Yang selama ini banyak menjadi ukuran adalah dari sisi ekonomi semata.

Dalam jangka panjang, pemerintah bersama para *stakeholder* di daerah memiliki kewajiban untuk memperbesar peluang dan ruang ekonomi daerah sehingga setiap warga mendapat kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Setidaknya, kita sama-sama harus mengupayakan anak turunan para TKI tidak harus mengalami kondisi yang sama di masa depan. Untuk itu, setidaknya ada tiga isu utama TKI yang harus mendapat perhatian serius. Yaitu, bagaimana meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga TKI, meningkatkan ketahanan keluarga TKI, dan memastikan keluarga TKI, terutama anak-anaknya, terpenuhi hak-haknya. *Wallahua'lam bish showab.*

41
MENYAMBUT BUMDES CENTER DAN BANK WAKAF MIKRO[38]

"Bu Nisa, Pak Wimboh sedang ada kegiatan di Jember. Senin malam, beliau ingin bertemu dengan para ulama, kyai, tokoh masyarakat, juga akademisi ekonomi syariah. Kita ngundang mungkin sekitar 13 orang saja. Yang mewakili akademisi, Bu Nisa sama Pak Rozi dari Unej ya …."

Selang sepekan kelahiran *Baby* N6, tiba-tiba saya mendapat kabar bahwa Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan kunjungan dua hari ke Bondowoso dan Jember. Di sela-sela kunjungan tersebut, beliau ingin bersilaturahim dengan *stakeholder* ekonomi syariah. Mendapat undangan, tentu saja merupakan kesempatan yang sulit saya lewatkan meski saat itu masih masa pemulihan pasca operasi persalinan.

38 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 14 September 2018.

Antusiasme itu pun terjawab. Dalam silaturahim berbentuk makan malam, panitia menyiapkan meja persegi panjang dengan para petinggi OJK Pusat dan jajarannya yang saling berhadapan dengan 13 undangan. Pucuk dicinta ulam tiba, saya duduk tepat berhadapan dengan Pak Wimboh. Gayung bersambut, agenda utama yang beliau sampaikan adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Center dan Bank Wakaf Mikro yang keduanya menjadi konsen mini riset saya. Selama dua jam, silaturahim yang dikemas dengan tanya jawab menjadi ajang untuk saya mengonfirmasi langsung beberapa hal terkait agenda OJK yang menjadi konsen saya tersebut.

BUMDes Center

Selain dalam rangka meresmikan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kabupaten Bondowoso, Ketua Komisioner OJK juga meresmikan BUMDes *Mart* dan BUMDes *Center* pertama di Indonesia. BUMDes *Mart* menjadi etalase fisik produk masyarakat desa melalui kelompok-kelompok usaha mikro yang tergabung dalam jaringan BUMDes. Sedangkan BUMDes *Center* adalah cikal bakal platform e-dagang yang akan memfasilitasi pemasaran berbagai produk lokal di seluruh Indonesia melalui jaringan BUMDes *Center*.

Ya, era ekonomi digital juga merambah desa. Wajah ekosistem keuangan desa perlahan berubah. Melalui platform e-dagang BUMDes *Center,* masyarakat desa dapat memasarkan secara *online* produk usahanya ke berbagai daerah, termasuk ke luar negeri.

Masyarakat desa dapat berinteraksi langsung dengan pembeli tanpa perlu mata rantai pemasaran yang panjang.

Pada tataran inilah, TPKAD menjadi substansi untuk penguatan ekonomi desa melalui literasi dan inklusi keuangan. Ke depan, BUMDes diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi di desa. Lembaga ini nantinya tidak hanya membantu permodalan, tetapi juga membantu pendampingan sekaligus pemasaran.

Bank Wakaf Mikro

Pembentukan Bank Wakaf Mikro diinisiasi oleh OJK dengan menggunakan model Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Sejak peresmian perdana Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Kabupaten Serang, oleh Presiden Republik Indonesia pada Maret 2018 lalu, saya sudah bertanya-tanya kapan Bank Wakaf Mikro hadir di Tapal Kuda.

Saat ini sudah 40 Bank Wakaf Mikro yang didirikan melalui dua tahap. Menurut rencana, terdapat dua pondok pesantren yang akan menjadi lokasi Bank Wakaf Mikro di Kabupaten Jember. Tujuan utama pembentukan Bank Wakaf Mikro memang untuk menyediakan permodalan bagi masyarakat yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal, khususnya di lingkungan pondok pesantren yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 28 ribu pondok yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Skema pembiayaan yang akan diterapkan adalah pembiayaan tanpa agunan maksimal Rp3 juta dengan nilai bagi hasil hampir setara 3 persen. Dalam skema pembiayaan ini, Bank Wakaf Mikro nantinya juga menyediakan pendampingan bagi kelompok

usaha ultra mikro. Pada tataran inilah *nanofinance* yang menjadi konsen riset saya bergayung sambut dengan Bank Wakaf Mikro. Hingga pertengahan Maret 2018, 20 Bank Wakaf Mikro tahap pertama yang menjadi proyek percontohan telah menyalurkan total pembiayaan Rp3,05 miliar kepada 3.389 orang nasabah yang tergabung dalam 684 kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren Indonesia.

Pengarusutamaan Ekonomi Syariah

Kehadiran BUMDes *Center* dan Bank Wakaf Mikro sejatinya adalah ikhtiar terwujudnya inklusi keuangan untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang belum mendapat akses keuangan lembaga formal. Lebih khusus, kehadiran Bank Wakaf Mikro sejatinya juga adalah wujud pengarusutamaan ekonomi syariah dalam perekonomian nasional dalam bingkai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ya, ekonomi syariah kini menjadi arus baru perekonomian Indonesia. Otoritas menaruh perhatian besar dan pemerintah hadir secara nyata melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang menjadi wadah koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah.

Namun demikian, perlu diingat bahwa ekonomi syariah sejatinya bukan hanya sektor keuangan syariah semata. Ekonomi syariah sangat luas dan mengatur seluruh nadi perekonomian,

dari hulu hingga hilir, mulai dari sektor produksi hingga konsumsi, termasuk dalam membangun pranata dan etika, bahkan seluruh aspek muamalah. *Wallahua'lam bish showab.*

42
RESILIENSI EKONOMI TERHADAP BENCANA, SUDAHKAH?[39]

Dear Friend Khairunnisa
Hope all of you are safe with the grace of Almighty Allah. We are praying for everyone's safety and May Almighty Allah grant peace of mind to all of you.
Azhar from Sri Lanka

Sebuah pesan masuk via sosial media Linkedin usai gempa di Situbondo dari seorang *brother* di Asia Selatan. Selang beberapa jam, saya kemudian membalas pesan tersebut untuk mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya menduga, ia menemukan informasi bahwa Situbondo berada di Provinsi Jawa Timur sehingga ia langsung mengirimkan pesan empati tersebut untuk saya yang berdomisili di provinsi yang sama.

39 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 19 Oktober 2018.

Ya, belakangan Indonesia mengalami gempa berturut-turut. Hal ini menjadi pemberitaan global. Sejumlah lembaga kemanusiaan internasional ikut berpartisipasi membuka donasi untuk membantu Lombok serta Palu dan Donggala. Terakhir, gempa Situbondo. Meskipun tidak berpotensi tsunami, gempa Situbondo terjadi dalam skala yang cukup besar hingga bisa dirasakan di beberapa daerah. Kabar ini pun menghiasi pemberitaan nasional.

Kerugian Ekonomi

Posisi Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, IndoAustralia, dan Pasifik, menjadikan wilayah Indonesia termasuk dalam *Pacific Ring of Fire* yang rentan terjadi bencana. Bencana bukan hanya gempa bumi atau tsunami, tapi juga letusan gunung berapi, banjir lahar, *amblesan,* letusan lumpur, dan tanah longsor. Dengan berbagai dampak ikutannya, segala bentuk bencana akan berimplikasi bagi perekonomian.

World Bank memperkirakan dampak gempa di wilayah Palu dan Donggala menimbulkan kerusakan secara geospasial di sektor infrastruktur, properti perumahan dan non-perumahan yang terkena dampak tsunami mencapai USD531 juta atau sekitar Rp8,07 triliun. Angka ini belum memperhitungkan kerugian atas hilangnya nyawa, kehilangan lahan, atau gangguan terhadap ekonomi melalui pekerjaan, mata pencaharian, dan bisnis yang hilang.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kerugian ekonomi akibat gempa Lombok lebih dari Rp5,04 triliun. Berdasarkan data sementara yang dihimpun pada 9 Agustus 2018, kerugian tersebut berasal dari sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya, serta lintas sektor. Kerusakan dan kerugian terbesar adalah sektor permukiman sebesar Rp3,82 triliun, disusul infrastruktur Rp7,5 miliar.

Bayangkan angka ini dengan nilai pembangunan Tol Jembatan Suramadu sepanjang 5.438 meter yang menelan anggaran Rp4,5 triliun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, setengah dari biaya pembangunan jembatan harus menggunakan utang. Setiap tahun, penerimaan yang masuk ke negara dari Tol Suramadu sebesar Rp209 miliar. Dari jumlah itu, Rp100 miliar dipakai untuk membayar cicilan utang dan Rp9 miliar untuk biaya perawatan.

Ya, untuk Indonesia, dampak bencana sangat terasa. Oleh karena itu, bisa kita bayangkan betapa besar angka kerugian akibat tsunami di Aceh tahun 2004 yang mencapai Rp42 triliun. Lalu, gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2006 yang menimbulkan kerugian hingga Rp27 triliun, dan gempa bumi Sumatra Barat tahun 2009 sebesar Rp21,6 triliun. Untuk melakukan rehabilitasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mungkin harus mengalami *bleeding* karena belum memiliki resiliensi ekonomi terhadap bencana.

Mengubah Paradigma

Pengalaman menghadapi bencana memberi pelajaran mahal untuk Indonesia. Menghadapi bencana, ternyata bukan hanya dibutuhkan pemulihan ekonomi semata. Lebih dari itu, dibutuhkan pula revitalisasi untuk melakukan resiliensi ekonomi terhadap bencana. Untuk itu, kebijakan APBN seyogyanya harus dibenahi agar penanggulangan bencana menjadi bagian integral dari pembangunan.

Syukurlah, hari ini, pemerintah tengah menyiapkan APBN untuk penanggulangan bencana. Dalam rangkaian *IMF-World Bank Annual Meeting* di Bali, pemerintah menyampaikan rencana pembentukan skema pembiayaan dan asuransi risiko sebagai upaya penanganan dampak bencana alam. Pemerintah sudah mengidentifikasi masalah yang ada, termasuk melakukan kajian terhadap risiko fiskal atas berbagai bentuk bencana yang implikasinya tentu berbeda-beda. Selanjutnya, hal ini seyogyanya perlu diikuti dengan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk menentukan skema pendanaan mitigasi atau penanggulangan bencana.

Ya, pendekatan pasif-reaktif dengan paradigma bahwa bencana tidak bisa diperkirakan, kini terbantahkan. Studi Yasuhide Okuyama dari Graduate School of Social System Studies, University of Kitakyushu, Jepang, yang banyak menulis tentang dampak bencana dari sisi ekonomi, menarik disimak. Maklum, Jepang adalah negara langganan gempa. Kajian terkait bencana mendapat perhatian besar di sana. Studi Okuyama (2004, 2007, 2009, 2016) menunjukkan bahwa pola guncangan akibat bencana

alam dapat dimodelkan sebagaimana guncangan ekonomi lainnya pada siklus bisnis.

Kini, musim hujan sudah di depan mata. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan di Jawa Timur akan terjadi pada bulan November. BMKG bahkan telah memperingatkan delapan wilayah Indonesia yang paling rawan terjadi banjir bandang dan longsor. Meski tidak masuk dalam wilayah yang diberi peringatan, tetap saja kita harus waspada. Apalagi, terdapat titik- titik tertentu yang menjadi langganan banjir di wilayah kita. Yang jadi pertanyaan adalah, sudahkah kita memiliki pendekatan aktif-preventif untuk memiliki resiliensi ekonomi terhadap bencana? *Wallahua'lam bish showab.*

43
GELIAT RS (BERSERTIFIKAT) SYARIAH[40]

"Maaf, mau tanya. Apa benar bangunan besar warna putih menyerupai Masjid di JLT itu nantinya untuk Rumah Sakit (Bersalin) Syariah? Mau saya buat bahan tulisan."

Sebuah pertanyaan diajukan saya pada grup *WhatsApp* (WA) berusia satu pekan yang tengah menginisiasi pembentukan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Lumajang. Meski pertanyaan diajukan terbuka kepada semua anggota grup, namun pertanyaan tersebut sejatinya saya tujukan kepada seseorang yang kabarnya menjadi pemilik bangunan tersebut. Ternyata benar. Tak lama berselang, beliau pun merespon, *"Rencana untuk Rumah Sakit Umum … Konsep Rumah Sakit Wisata dan Syar'i ...."*

Ya, saya yang hampir setiap hari pulang pergi (PP) melalui Jalur Lintas Timur (JLT), selalu melewati bangunan putih megah itu. Sejumlah versi tentang bangunan tersebut yang membuat

40 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 2 November 2018.

saya memberanikan bertanya. Betapa tidak, bangunan bak Masjid itu memiliki kubah menyerupai Pantheon Paris dan menara menyerupai Big Ben London. Pagar-pagar seng yang menutupi bangunan membuat saya yang melintas makin penasaran. Ternyata geliat Rumah Sakit (RS) Syariah juga sampai di Lumajang.

RS Syariah

Sedikitnya sudah 32 RS di Indonesia yang berproses menuju sertifikasi syariah. Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) adalah organisasi yang dikenal sebagai inisiator RS syariah. Bermula pada Juli 1994, hasil Semiloka Pemanfaatan dan Manajemen Rumah Sakit Islam di Indonesia mencetuskan adanya kebutuhan pembentukan forum koordinasi antar upaya kesehatan Islam yang tidak hanya meliputi RS Islam saja. Pada Oktober 1994, disepakati adanya badan koordinasi antar upaya kesehatan Islam yang kemudian dikenal sebagai MUKISI.

MUKISI kemudian bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) untuk mensertifikasi RS secara syariah dengan standar tertentu. Terdapat 51 persyaratan standar dan 173 elemen penilaian. Standar dalam sertifikasi dibagi menjadi lima bab besar sesuai *maqasid syariah*, yaitu *hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-aql, hifdz al-nasl,* dan *hifdz al-maal.*

Selanjutnya, dari masing-masing standar tersebut dibagi lagi menjadi kelompok penilaian manajemen dan penilaian pelayanan. Untuk kelompok penilaian manajemen, meliputi: standar syariah manajemen organisasi, modal insani, manajemen pemasaran, manajemen akuntansi dan keuangan, manajemen fasilitas, serta

manajemen mutu. Sedangkan kelompok penilaian pelayanan, meliputi: standar syariah akses pelayanan dan kontinuitas, asesmen pasien, pelayanan pasien, pelayanan obat, pelayanan dan bimbingan kerohanian, pendidikan pasien dan keluarga, serta pencegahan dan pengendalian infeksi.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, ditetapkanlah sejumlah ketentuan. Ketentuan tersebut meliputi: hal-hal umum, hukum, akad dan personalia hukum, terkait akad, pelayanan, penggunaan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan, hingga ketentuan penempatan, penggunaan, dan pengembangan dana RS.

Adapun standar minimal pelayanan RS syariah meliputi delapan aspek. **Pertama,** membaca basmalah sebelum melakukan sesuatu dan meminum obat bagi perawat, dokter maupun pasien. **Kedua,** memasang *electrocardiograms* (ECG) harus dilakukan oleh gender yang sejenis. **Ketiga,** menyediakan edukasi mengenai keislaman dan kerohanian kepada pasien agar menerima dan memandang sakit sebagai ujian dari Allah. **Keempat,** jadwal operasi tidak boleh bersamaan dengan waktu shalat, kecuali terpaksa dan mendesak. **Kelima**, menjaga dan menyediakan hijab bagi pasien perempuan. **Keenam,** menyediakan pakaian menutup aurat untuk ibu menyusui. **Ketujuh,** petugas menjaga aurat pasien di kamar operasi. **Kedelapan**, menjaga pria dan perempuan bukan mahram untuk melakukan *khalwat* atau *ikhtilat.*

Selain itu, terdapat tiga indikator mutu wajib yang harus dimiliki RS syariah. **Pertama,** pasien sakaratul maut harus didampingi dengan *talqin*. **Kedua,** RS mengingatkan waktu salat bagi pasien dan keluarga. **Ketiga,** pemasangan kateter sesuai *gender.*

Geliat Industri Halal

Geliat RS syariah sejalan dengan isu halal yang kini menjadi tren global. Isu halal hari ini bukan menjadi simbol agama semata, tetapi juga menjadi simbol bagi kualitas, kebersihan, dan keamanan yang universal bagi konsumen. Kebutuhan masyarakat akan produk halal semakin meningkat, tidak hanya dari kalangan muslim, tetapi juga nonmuslim. Adanya regulasi yang memberi jaminan atas produk halal menjadikan halal tidak lagi bersifat *voluntary,* tetapi sudah menjadi *mandatory.*

Sayang, meski Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar dunia, tapi Indonesia belum optimal mengembangkan industri halal. Indonesia saat ini masih menjadi pasar dan belum menjadi pemain yang ikut memanfaatkan besarnya pertumbuhan industri halal global. Justru negara-negara yang minoritas penduduk muslim yang lebih dulu mengambil bagian, utamanya di sektor pariwisata dan makanan. Ya, ekonomi halal kini menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional dan global.

Tiba-tiba saya teringat materi Prof. Abdul Ghafar Ismail dari Malaysia yang mengisi kuliah tamu Studi Produk dan Sertifikasi Halal di kampus pada akhir Oktober lalu. Beliau menyampaikan *"Roadmap of Halal Industry, Toward Halal GNP".* Materi ini ternyata

juga menjadi bahan yang akan disampaikan beliau dalam pertemuan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ya, *Gross National Product* (GNP) akan didorong untuk memisahkan kegiatan ekonomi halal dan nonhalal. Dengan demikian, kita dapat mengukur seberapa besar GNP halal sebagai salah satu indikator pembangunan sosial ekonomi berbasis *maqasid syariah*. Mungkinkah? Entahlah. Namun, bukan mustahil.

Lihat saja fenomena RS syariah hari ini. Jika pada waktu lalu perbankan dan lembaga keuangan syariah menjadi isu sentral untuk ekonomi syariah, mulai 2016 ada kemajuan dengan munculnya RS syariah. Jumlah yang mendaftar sertifikasi terus bertambah, bahkan diantaranya terdapat empat RS umum daerah (RSUD) dan satu RS Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Belum lagi isu *halal testing, halal ingredients, halal animal feed, halal slaughtering, halal logistics, halal pharmaceutical, halal hospitality, halal consumerism, halal retailing, halal warehousing, halal transportation, halal supply chain, halal packaging,* hingga *halal auditing*. Semua mengindikasikan konsep halal dan syariah terus merambah ke berbagai lini dan kian mendapat respon positif dari masyarakat luas, baik muslim maupun nonmuslim. *Wallahua'lam bish showab.*

44
MENUJU EKONOMI HALAL[41]

"Mas Agusta ada kelas hari Jumat kan … duet ya dengan dosen dari Jakarta. Tentang industri halal. Dosen dari Jakarta mengisi agenda pemerintah tentang roadmap industri halal oleh KNKS, otoritas, dll. Mas Agusta mengisi materi dari sisi pelaku usaha … Mau ya … Halal untuk UMKM? Supply Chain untuk UMKM? Iya, boleh … Ketemu besok ya …."

Demikian sebagian obrolan saya dengan Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jember yang saya minta untuk mengisi kuliah tamu. Kami sepakat menggabungkan kelas Kewirausahaan yang diajarnya dengan kelas Manajemen Operasi yang saya ajar dalam bentuk kuliah tamu.

Adapun dosen dari Jakarta yang saya minta untuk mendampingi Mas Agusta adalah Pak Huda, demikian saya memanggilnya, akademisi yang juga menjadi Pengurus Pusat (PP)

41 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 8 Desember 2018.

Masyarakat Ekonomi Syariah dan merupakan salah satu Ketua Harian Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) yang kebetulan memiliki agenda kunjungan ke Jember. Sebagai salah satu penguji *fit and proper test* seleksi Direktur Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) beberapa waktu lalu, saya sengaja "menodong" beliau agar mau *sharing* ilmu di kelas saya.

Ya, keduanya bersanding dalam kuliah tamu bertema "Menuju Sektor Riil Berbasis Halal". Saya meminta Mas Agusta membawakan materi "Problematika UMKM menuju Standarisasi" dan Pak Huda membawakan materi "Industri Halal sebagai Motor Sektor Riil Syariah." Industri halal memang menjadi salah satu isu besar dalam ekonomi dan keuangan Syariah saat ini. Isu ini pula yang diusung Bank Indonesia dalam perhelatan *The 5th Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF) bulan Desember mendatang dengan tema *"Strengthening National Economic Growth: The Creation of Halal Value Chains and Innovative Vehicles."*

Tahun Depan, UU JPH Berlaku

Merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), maka kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia akan diberlakukan tahun depan. Menurut UU, kewajiban ini mulai berlaku lima tahun terhitung sejak JPH diundangkan. Artinya, kewajiban sertifikasi halal pada semua produk di Indonesia akan berlaku 17 Oktober 2019 atau tepat lima tahun setelah UU tersebut disahkan pada 17 Oktober 2014.

Tidak bisa dimungkiri, meski standar halal Indonesia sudah diakui dan diimplementasikan oleh lebih 43 lembaga dunia dari 22 negara, namun sistem halal di Indonesia belum terbangun. Adanya standarisasi halal sejatinya berpeluang memperluas pasar produk Indonesia, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di tingkat global. Pada titik inilah, kiprah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diuji eksistensinya. Sertifikasi halal sejatinya bukan hanya melindungi masyarakat Muslim, tetapi juga melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Sertifikasi halal hari ini bukan sekedar simbol agama, tetapi sudah menjadi simbol bagi kualitas, higienitas, kesehatan, dan keamanan bagi konsumen.

Jelas, kehadiran UU JPH menjadikannya *mandatory* bagi dunia usaha. Urgensitas untuk diakselerasinya standarisasi sertifikasi halal bukan saja dilihat dari *deadline* UU. Lebih dari itu, BPJPH harus hadir bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *stakeholder* lainnya untuk menjadikan produk halal sebagai arus baru ekonomi Indonesia dan menjadi pintu gerbang membangun kedaulatan ekonomi rakyat. Betapa tidak, di luar sana, sudah banyak negara yang berbondong-bondong menjadi pusat halal. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar, tetapi harus menjadi tuan di rumahnya sendiri.

Halal, Arus Baru Ekonomi

Ekonomi halal adalah arus baru ekonomi Indonesia dan dunia. Ekonomi halal memiliki potensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan global. Permintaan konsumen atas produk halal terus meningkat pesat. Hal ini mendongkrak investasi dan perdagangan pada industri halal, baik di negara berpenduduk

mayoritas muslim maupun nonmuslim. Potensi tersebut semakin kuat dengan meningkatnya pertumbuhan populasi Muslim dunia yang diprediksi akan mencapai 27,5 persen dari total populasi dunia pada 2030.

Dalam konteks Indonesia, ketaatan atas agama yang semakin baik menjadi salah satu pemicunya. Hal ini terindikasi dari fenomena perilaku konsumen Muslim di Indonesia yang menunjukkan pola konsumsi yang *halal-oriented*. Ditambah lagi, kesadaran beragama yang tinggi pada generasi Z. Riset Varkey Foundation pada 20 ribu anak muda dari 20 negara yang lahir pada rentang tahun 1995-2001 menunjukkan anak muda di Indonesia menempati peringkat pertama yang menganggap agama penting sebagai kunci kebahagiaan hidup.

Ya, implementasi JPH pada produk-produk Indonesia berpeluang meningkatkan potensi ekspor. Meningkatnya perdagangan global untuk produk halal menjadi salah satu indikator atas kontribusinya bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah hari ini sangat mendorong peningkatan ekspor produk halal guna turut memperbaiki defisit transaksi berjalan. Pada 2017, ekspor produk halal Indonesia mencapai 21 persen dari total ekspor secara keseluruhan. Diperkirakan angka ini akan terus meningkat hingga US$3,08 triliun pada 2022. Sebelumnya, pada 2016, realisasi ekspor produk halal Indonesia mencapai kisaran US$2 triliun. Ekspor produk halal Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini memang menunjukkan tren positif.

Tidak bisa dimungkiri, pemerintah mengharapkan industri halal dapat menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sertifikasi halal sejatinya berimplikasi positif kepada dunia usaha. Dunia usaha berkewajiban memenuhi standar yang telah ditetapkan. Namun, pemerintah juga harus memastikan proses standarisasi tidak membebani pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Ketika pemerintah menuntut dunia usaha menghasilkan produk bersertifikasi halal, maka pemerintah juga seyogyanya menjamin proses sertifikasi halal tidak rumit dan tidak mahal.

Untuk itu, penerapan rantai pasok halal menjadi keniscayaan. Saat ini, rantai pasok halal di Indonesia masih sarat persoalan. Ekosistem halal di Indonesia belum terintegrasi dengan baik antara bisnis hulu dan hilir. Selain belum ada regulasi, implementasinya dikhawatirkan menambah biaya produksi dan logistik sehingga konsumen harus membayar lebih mahal. Menjelang 2019, semoga persoalan-persoalan ini segera teratasi. *Wallahua'lam bish showab.*

2019

45
WAKAF UNTUK PEMBIAYAAN PRODUKTIF[42]

"Salaam … Mbak Iis … Anyway, Mbak Iis punya referensi tentang studi kasus wakaf dan pemberdayaan komunitas di Indonesia? Wakaf tunai dan non-tunai? Kalau buat microfinance*, ada gak?"*

Demikian sebagian pesan pendek dari mantan ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) yang kini menjadi Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) FEB UI. Saya memanggilnya Mbak Rahma. Kami berkenalan ketika sama-sama mengerjakan proyek riset dari United Nations Development Programme (UNDP) setahun lalu.

Ya, wakaf hari ini menjadi fenomenal. Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan organ-organnya melirik wakaf sebagai salah satu instrumen untuk mencapai The *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu agenda yang diamanatkan pemerintah

42 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 11 Januari 2019.

kepada Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dilantik 3 Januari lalu adalah sensus tanah wakaf dan perluasan lembaga keuangan mikro dengan *branding* Bank Wakaf Mikro.

Bank Wakaf Mikro

Pembentukan Bank Wakaf Mikro (BWM) diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BWM bukan lembaga yang menjalankan fungsi wakaf, tetapi lembaga yang menjalankan fungsi keuangan mikro syariah. BWM adalah *platform* dari lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang dibentuk untuk menyediakan permodalan bagi masyarakat yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal, khususnya di lingkungan pondok pesantren.

Di Jember, terdapat dua BWM yang telah dibentuk oleh OJK. Yaitu, LKMS BWM Al Falah di Silo dan LKMS BWM Al Azhar di Kaliwates. Tidak semua pesantren dapat mendirikan LKMS BWM. Mengawali pendirian BWM di Indonesia, OJK bekerjasama dengan Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) untuk melakukan penilaian kesiapan pondok pesantren. Terdapat sejumlah prosedur penilaian tingkat kesiapan yang disusun oleh OJK dan PBNU.

Selain di lingkungan pesantren, OJK juga mendirikan BWM di kalangan ibu-ibu sebagaimana di Yogyakarta dan Tuban. BWM memang fokus pada pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, selain pembiayaan tanpa agunan maksimal Rp 3 juta, BWM juga menyediakan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan serta tidak mengambil simpanan dari masyarakat.

BWM didesain memang untuk tidak menjadi besar. BWM dihadirkan untuk membidik pelaku usaha mikro, tepatnya usaha ultra mikro. Saya cenderung memilih istilah *nanofinance* untuk menyebutkan level pembiayaan yang menjadi target pasar dari BWM. Bagi keuangan syariah, persoalan *nanofinance* masih belum mendapat perhatian. Oleh karena itu, kehadiran BWM menjadi salah satu jawaban atas urgensitas kebutuhan masyarakat akan *nanofinance*. Kelompok masyarakat inilah yang lazim menjadi korban dari praktik rente.

Saat ini, sumber dana BWM berasal dari subsidi dan donasi yang salah satunya adalah dari Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Anggaran dari dana desa juga direncanakan akan dialokasikan untuk BWM. Pasalnya, mayoritas pondok pesantren yang menjadi tempat didirikannya BWM berada di pedesaan. Selama ini, dana desa dikucurkan langsung oleh pemerintah ke aparat desa untuk berbagai program pembangunan. Dengan menyisihkan sebagian untuk BWM, dana desa diharapkan dapat digunakan pula untuk membiayai usaha mikro masyarakat pedesaan.

Wakaf Produktif

Wakaf untuk pembiayaan produktif menjadi salah satu tantangan besar keuangan syariah. Mayoritas pengelola dana wakaf berorientasi pada pembangunan fisik, belum sampai pada kegiatan produktif. Ketika bangunan sudah tersedia, mereka masih terbentur pada dana operasionalnya. BWM yang mengusung nama "wakaf" pada entitas lembaga ternyata juga tidak diposisikan untuk menjalankan fungsi wakaf.

Tidak bisa dimungkiri, kelembagaan dalam ekonomi syariah yang paling strategis untuk dikembangkan adalah wakaf. Wakaf memiliki dimensi sosial ekonomi yang memiliki fleksibilitas, akselerasi, dan keberlanjutan yang lebih dibanding kelembagaan lainnya. Wakaf memiliki potensi besar dalam membantu pengembangan perekonomian daerah, regional, bahkan nasional. Kelembagaan wakaf kini berevolusi dari ranah kegiatan sosial keagamaan menjadi kegiatan ekonomi.

Dompet Dhuafa (DD) dapat menjadi *role model* dalam pengelolaan dana produktif. Selain jejaringnya fokus pada pemberdayaan masyarakat, DD juga membangun jejaring yang berorientasi bisnis. Salah satunya adalah *DD Travel* dan *DD Water*. Untuk jejaring khusus wakaf, DD berekspansi dengan wakaf uang melalui jejaring Tabung Wakaf Indonesia (TWI).

TWI mengalokasikan wakaf uang dalam kegiatan produktif melalui berbagai bentuk sarana dan kegiatan usaha. Bersama mitranya, TWI mengelola wakaf uang pada usaha peternakan, pertanian, perkebunan, perdagangan, dan persewaan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan produktif inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk beragam layanan sosial seperti pembangunan dan pengelolaan masjid, sekolah, klinik, dapur umum hingga taman bermain.

Saat ini, salah satu terobosan pemerintah dalam mengelola wakaf untuk kegiatan produktif adalah *waqf linked sukuk* (WLS). WLS adalah wakaf tunai yang terintegrasi dengan sukuk. Dana wakaf yang dikelola Badan Wakaf Indonesia (BWI) akan diinvestasikan pada instrumen sukuk. Imbal hasil yang diperoleh akan diberikan

kepada *mauquf 'alaih* untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, termasuk untuk pemulihan daerah bencana dan kegiatan lainnya yang sesuai syariat. Pada saat jatuh tempo, dana wakaf akan kembali 100 persen kepada *wakif.*

Ya, WLS boleh dikata merupakan wakaf sementara. Namun, kehadirannya bermanfaat untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah dan meningkatkan partisipasi publik dalam pembiayaan pembangunan. WLS juga sejatinya dapat digunakan sebagai instrumen yang memitigasi keterbatasan *nadzir* dalam mengelola dana atau aset produktif. Pada tataran inilah pekerjaan besar bagi semua pelaku dan penggiat ekonomi dan keuangan syariah, utamanya yang bergiat di bidang filantropi, baik di tingkat nasional dan daerah, untuk menghadirkan inovasi produk atau kegiatan produktif. Sinergi antar *stakeholder* yang berpihak pada kemaslahatan adalah kuncinya. *Wallahua'lam bish showab.*

46
REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN EKONOMI DIGITAL, SIAPKAH KITA?[43]

"Dimana-mana selalu membicarakan Revolusi Industri 4.0 atau tentang Ekonomi Digital, tapi Bu Nisa minta kalian mengirimkan tugas atau skripsi dengan email kok dijadikan masalah ya? Bu Nisa menggunakan plagiarism detector *untuk memeriksa tugas atau skripsi, kok kalian banyak yang enggak senang ya? Bener nih sudah siap dengan Revolusi Industri 4.0 atau dengan Ekonomi Digital?"*

Demikian pertanyaan yang saya ajukan kepada sejumlah kelas beberapa waktu lalu. Saya menjelaskan mengapa mereka harus dibiasakan berinteraksi dengan teknologi. Betapa tidak, sampai hari ini masih banyak ditemukan mahasiswa yang tidak memiliki email, tidak biasa bahkan tidak pernah komunikasi dengan email, termasuk memiliki email dengan nama yang *alay*. Saya katakan, *"Email*

43 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 15 Maret 2019.

itu hari ini sama seperti kartu tanda penduduk (KTP) atau bahkan paspor. Email itu menjadi identitas kita. Email itu pintu gerbang kita masuk ke dunia maya. Suka tidak suka, belajarlah untuk terbiasa berinteraksi dengan email."

Selain itu, saya juga menceritakan berbagai wajah teknologi yang memberi kemudahan sekaligus yang melenakan mahasiswa era milenial hari ini. Saya menggunakan *plagiarism detector* untuk memeriksa skripsi atau tesis, termasuk sejumlah tugas makalah yang dibuat mahasiswa. Alat ini tidak bisa tidak saya gunakan karena prosedur membuat makalah atau karya ilmiah hari ini kerap dilakukan dengan cara yang tidak benar, instan, dan tidak memenuhi etika penulisan. Bayangkan, betapa terkejutnya saya ketika memeriksa sejumlah tugas makalah mahasiswa yang memiliki *plagiarism level* 98 persen! Keterkejutan ini juga saya alami ketika menemukan Bab 4 dari skripsi mahasiswa yang saya bimbing memiliki *plagiarism level* hingga 70 persen! Ini bukan Bab 1 atau Bab 2, ini Bab 4!

Revolusi Industri 4.0

Seluruh dunia hari ini tengah menghamparkan karpet merah pada Revolusi Industri 4.0. Tidak usah heran bila kebanyakan forum yang digelar belakangan selalu mengusung tema tentangnya. Istilah ini awalnya diperkenalkan sebagai integrasi antara teknologi dengan dunia usaha atau produksi pada sebuah industri. Istilah ini mulai familiar seiring gaung *financial technology* sebagai pembuka pintu Ekonomi Digital. Istilah ini dicetuskan kali

pertama pada 2011 oleh Jerman yang kemudian menjadi tema utama pada *World Economic Forum* (WEF) 2016 di Davos, Swiss.

Revolusi Industri 4.0 adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Mahasiswa hari ini harus dipersiapkan untuk menghadapinya karena era tersebut yang tengah berjalan saat ini. Tidak hanya pemerintah dan industri yang dituntut adaptif dengan perkembangan teknologi, dunia pendidikan seyogyanya juga melakukan hal yang sama.

Ke depan, tidak hanya industri otomotif atau manufaktur besar yang menggunakan robot. Tetapi industri jasa pun diprediksi akan menggunakan infrastruktur data dan *artificial intelligence* untuk beroperasi. Meski pada satu sisi Revolusi Industri 4.0 dinilai mengancam serapan tenaga kerja, namun pada sisi lain diyakini Revolusi Industri 4.0 juga akan meningkatkan produktivitas, membuka pasar hingga ke luar negeri, dan menambah lapangan kerja baru yang memerlukan keterampilan khusus.

Meskipun hari ini terdapat banyak hambatan dalam mengimplementasikan Revolusi Industri 4.0, tapi faktanya pemerintah terus gencar mensosialisasikan dan mengedukasi Revolusi Industri 4.0.

Siapkah Kita?

Pertanyaan ini sejatinya bukan retorika, tetapi ajakan untuk mengevaluasi sejauh mana kesiapan kita menghadapinya. Untuk Indonesia, implementasi Revolusi Industri 4.0 sejatinya memiliki potensi besar bagi pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terintegrasi dengan teknologi digital.

Pemerintah telah menyusun *Making Indonesia 4.0* yang diluncurkan April 2018 lalu. *Making Indonesia 4.0* adalah peta jalan yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era industri 4.0. guna mencapai sasaran tersebut, langkah kolaboratif digaungkan dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintahan, asosiasi, pelaku industri, hingga unsur akademisi.

Making Indonesia 4.0 kian memantapkan langkah Indonesia menuju 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada 2030. Pemerintah terus mengupayakan untuk tercapainya berbagai sasaran dengan memastikan *nett export* 10 persen dari produk domestik bruto (PDB), produktivitas naik dua kali lipat, dan anggaran riset sebesar 2 persen dari PDB. Tidak bisa dipungkiri, hari ini revolusi industri 4.0 menjadi kekuatan besar pada sektor industri. Teknologi informasi dan komunikasi hari ini dimanfaatkan untuk proses produksi sekaligus untuk melahirkan model bisnis baru. Industri nasional ke depan akan dituntut untuk menguasai teknologi sebagai sumber efisiensi dan kunci daya saing.

Pada *Making Indonesia 4.0*, salah satu prioritasnya adalah pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sesuai kebutuhan era digitalisasi. Pertanyaan terbesar bagi insan pendidikan tinggi adalah kesiapan kita semua untuk mengantarkan outpun pendidikan tinggi menghadapi era tersebut. Siapkah kita? Mungkin bukan ini yang harusnya menjadi pertanyaan. Sejatinya yang perlu diajukan pertanyaan adalah "apa yang harus atau sudah kita siapkan untuk menghadapinya?" *Wallahua'lam bish showab*.

47
EKONOMI MASJID[44]

"... perkenalkan komunitas kami, Relawan Masjid yang hanya bisa memberi pelayanan bersih-bersih masjid secara gratis. Mungkin bisa diinformasikan kepada relasi Ibu biar agak terkenal ..."

Demikian sebagian balasan Mas Purwoto atas ucapan terima kasih saya pada foto media sosialnya yang menandai saya. Ternyata kami berteman pada *Facebook*. Kami ternyata sama-sama hadir dalam Pelatihan Manajemen Kelembagaan Koperasi bagi Klaster Binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jember. Mas Purwoto menjadi salah satu peserta dan saya menjadi salah satu pemateri untuk tema kelembagaan koperasi syariah.

Keberadaan komunitas Relawan Masjid yang diceritakan Mas Purwoto mengingatkan saya pada Abdul Muis, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah semester lima asal Bondowoso

44 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 2 Agustus 2019.

yang menjadi binaan saya dalam tulis menulis yang sehari-harinya tinggal di asrama masjid kampus IAIN Jember dan bertugas mempersiapkan aktivitas menjelang ibadah lima waktu. Keberadaan komunitas Relawan Masjid dan Abdul Muis tidak boleh dipandang sebelah mata. Mereka sejatinya adalah sumber daya berharga yang berpotensi menjadi penggerak ekonomi masjid.

Masjid, Penggerak Ekonomi

Masjid Jogokariyan di Yogyakarta kerap menjadi *role model* masjid yang berhasil menjadi penggerak ekonomi. Meski hanya berada di tengah kampung, masjid Jogokariyan mampu berperan sebagai pusat ibadah dan dakwah sekaligus sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Pemberdayaan ekonomi menjadi strategi pengelola untuk mengajak jamaah ikut memakmurkan masjid. Jika ekonomi masyarakat meningkat, pengelola meyakini masyarakat akan semakin giat beribadah dan ikut menyejahterakan masjid.

Di Yogyakarta, masjid Jogokariyan menjadi salah satu destinasi wisata religi. Masjid ini menyediakan ruang pertemuan dan penginapan bagi tamu atau wisatawan yang berkunjung. Ruang pertemuan dan hunian sementara tersebut menjadi salah satu unit usaha masjid Jokariyan selain usaha produktif berupa pembuatan pupuk dan olahan ayam potong.

Ya, masjid ini konsen pada pengembangan usaha mikro kecil (UMK). Masjid Jogokariyan menyediakan pinjaman modal usaha dengan bunga 0 persen melalui program dana bergulir atau

qardhul hasan disertai pendampingan hingga mandiri. Bahkan terdapat program pemberian modal usaha kepada warga kategori fakir miskin yang bebas pengembalian melalui pendanaan zakat untuk pemberdayaan. Masjid ini juga mengajak warga untuk membentuk koperasi guna mengelola UMK.

Masjid yang dikenal rutin menyediakan ribuan porsi buka puasa gratis setiap Ramadan, saat ini juga tengah gencar mendorong masyarakat sekitar untuk mendirikan rumah dua lantai. Lantai bawah digunakan sebagai tempat usaha dan lantai atas sebagai tempat tinggal. Sudah ada rumah percontohannya. Bagi warga, khususnya anak-anak muda, yang tidak memiliki usaha, pengelola masjid Jogokariyan mengarahkan mereka untuk menjadi agen pemasaran. Pembinaan kemandirian generasi muda memang mendapat perhatian. Mereka didekatkan dengan masjid diantaranya melalui fasilitas *wifi* gratis dan diminta mengelola media masjid dengan diberi honor serta komisi iklan.

Program masjid Jogokariyan yang tidak kalah menarik adalah mengganti kerugian jamaah yang kehilangan alas kaki atau kendaraan di lingkungan masjid. Program ini bahkan sudah dimulai sejak tahun 2000. Program lain yang kerap menjadi bahan studi banding adalah pengadaan ATM beras. Bagi jamaah dengan kriteria tertentu yang telah lolos survei, masjid Jogokariyan memberikan kartu ATM beras yang dapat dipindai untuk mengeluarkan beras sebanyak dua liter. Bekerjasama dengan toko kelontong di lingkungan sekitar, masjid Jogokariyan menyantuni beras rata-rata 200kg/hari untuk sekitar 400 jamaah yang dapat mengambilnya sesuai jadwal yang telah diatur setiap pekanan.

Ekonomi Masjid

Di Jawa Timur, salah satu masjid yang juga kerap menjadi *role model* penggerak ekonomi masyarakat adalah masjid Namira di Lamongan. Masjid Jogokariyan dan masjid Namira mungkin adalah sedikit di antara 800.000 masjid di Indonesia, menurut data Dewan Masjid Indonesia (DMI), yang dapat kita anggap mampu memakmurkan jamaah sekaligus mengajak jamaah memakmurkan masjid.

Hari ini, gaung untuk membangkitkan masjid sebagai pusat aktivitas keumatan semakin besar. Sepanjang 2018 hingga pertengahan 2019, pelatihan manajemen masjid banyak digelar di berbagai wilayah Indonesia. Dengan menyasar masjid pada perkantoran dan pusat perbelanjaan, bank syariah juga ikut hadir menyelenggarakannya. Materinya tidak hanya terkait manajemen keuangan, organisasi, penyusunan program semata, tetapi juga hingga pengembangan usaha produktif. DMI, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), dan Kementerian Agama (Kemenag) juga belakangan semakin intens mengadakan pelatihan manajemen bagi takmir dan pengelola masjid.

Ya, sejarah mencatat peran masjid dimasa lalu tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga pernah berperan sebagai pusat pendidikan dan pengajaran, pusat informasi Islam, pusat penegakan hukum, pusat militer, termasuk pusat pemberdayaan ekonomi umat. Dengan kata lain, sejarah membuktikan bahwa masjid memiliki peran sentral sebagai pusat peradaban Islam.

Dengan demikian, kehadiran komunitas Relawan Masjid dan figur-figur seperti Abdul Muis sejatinya dapat menjadi motor

bagi pemberdayaan masjid. Kedekatan mereka dengan masjid seyogyanya dapat bersinergi dengan pengelola masjid dan masyarakat sekitar untuk menyelenggarakan aktivitas-aktivitas keumatan yang tidak hanya memakmurkan jamaah, tetapi juga dapat mengajak jamaah memakmurkan masjid. Semoga keberadaan komunitas Relawan Masjid semakin meluas dan kiprahnya tidak hanya pada sebatas bersih-bersih masjid. Semoga pula segera menyusul Jogokariyan-Jogokariyan atau Namira-Namira di Tapal Kuda yang dapat menjadi mesin penggerak ekonomi masyarakat. W*allahua'lam bish showab*.

48
MENYAMBUT QRIS, LAYANAN NON TUNAI 2020[45]

"… Besar harapan, Bapak berkenan mengizinkan karena kegiatan ini akan menambah wawasan dan pengetahuan terbaru untuk bidang keilmuan saya, terutama untuk mata kuliah-mata kuliah yang saya ampu semester ini …."

Demikian sebagian penutup surat izin yang saya serahkan kepada Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember ketika saya mengajukan permohonan untuk menghadiri Forum Diskusi Perkembangan Terkini Ekonomi Indonesia dan Tantangan Ke Depan dan *Workshop* Penulisan Populer yang diselenggarakan Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Forum tersebut dihadiri oleh para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dari perguruan tinggi negeri/swasta di Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali dan Nusa Tenggara Timur. Dari Jember, saya dan Mas Adhitya Wardhono, akademisi

45 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 6 September 2019.

FEB Universitas Jember, yang menjadi peserta forum.

Ya, semester ini saya mendapat amanah mengampu di antaranya mata kuliah Ekonomi Makro, Ekonomi Internasional, dan Ekonomi Makro-Mikro Islam. Mengajarkan matakuliah jenis ini membutuhkan pengetahuan yang *up to date* untuk bisa memberikan gambaran riil dan aktual dari dinamika ekonomi regional, nasional dan global untuk diceritakan dan didiskusikan dengan mahasiswa di kelas.

Salah satu isu yang menarik untuk diangkat adalah implementasi ekonomi digital berupa layanan non tunai berwujud *barcode* dengan nama *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS). Ke depan, QRIS akan menjadi instrumen non tunai utama yang akan diberlakukan oleh Bank Indonesia pada semua aktivitas transaksi pembayaran, termasuk bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM).

QRIS

Digitalisasi telah merevolusi banyak sendi kehidupan, termasuk pada sistem pembayaran. Pembayaran digital di Indonesia tumbuh cukup tinggi, baik yang berbasis *mobile banking* maupun *mobile payment*. Bank Indonesia melihat cara pembayaran digital berbasis QR *code* melalui layanan *mobile banking* maupun *mobile payment* dapat mendorong efisiensi perekonomian, mempercepat keuangan inklusif, dan memajukan UMKM.

QR *code* adalah salah satu inovasi teknologi yang berkembang dan mulai banyak digunakan dalam layanan pembayaran

digital. QRIS adalah *QR code* berstandar nasional yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.

Meski sudah resmi diluncurkan pada 17 Agustus lalu, QRIS baru serentak beroperasi pada 1 Januari 2020. Pada saat itulah semua *merchant* dan setiap penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) berbasis QR *code* wajib menggunakan QRIS. Selama masa transisi hingga 31 Desember 2019, Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran meminta *merchant* mengajukan aplikasi kepada Bank Indonesia dan PJSP melakukan penyesuaian sistem terhadap adanya QRIS.

Bank Indonesia meyakini QRIS dapat menguntungkan dunia usaha karena QRIS memudahkan *merchant* maupun konsumen saat bertransaksi sehingga dapat meningkatkan volume penjualan. QRIS dapat digunakan untuk bertransaksi mulai pada usaha besar hingga level UMKM, baik pada *chain store,* pedagang kaki lima, pasar tradisional, *online market*, donasi, bahkan untuk membayar parkir atau memberi apresiasi pada musisi jalanan. Melalui QRIS, transaksi semakin cepat dengan volume yang terus membesar. Salah satu keuntungan bertransaksi menggunakan QR *code* yang terintegrasi dengan QRIS adalah biaya yang tergolong rendah dan cenderung seragam antarpelaku PJSP.

***Cashless,* Sistem Pembayaran Masa Depan**

Pertumbuhan inovasi berbasis teknologi di Indonesia memang berkembang pesat. Indonesia termasuk dalam kategori

negara dengan pertumbuhan inovasi cepat. Meski punya peluang untuk menjadi negara dengan tingkat kemajuan digital tinggi, tapi saat ini tingkat kemajuan digital di Indonesia masih rendah. Pada sektor pembayaran, hal ini tercermin dari tingkat keuangan inklusif di Indonesia yang sudah mulai meningkat, namun mayoritas masyarakat masih memilih uang tunai sebagai alat transaksi.

Tidak bisa dihindari, era ekonomi digital mengarahkan kita semua pada terbentuknya *cashless society*. Ini sesuai dengan semangat zaman. Layanan non-tunai berbasis digital menjadi keniscayaan. Secara teknis, layanan ini memang memberi kemudahan dan kenyamanan. Sistem pembayaran dengan menggunakan QR *code* berstandar QRIS menjadi opsi paling logis karena tidak membutuhkan investasi dan dapat digunakan pada seluruh segmen masyarakat dan dunia usaha. Disebut tidak membutuhkan investasi lantaran instrumen ini memanfaatkan jaringan *mobile banking* dan *mobile payment*.

Pada tataran inilah, sosialisasi dan edukasi menjadi titik kritis. Pasalnya, perubahan sistem pembayaran dan menjadi bagian dari *cashless society* menuntut perubahan perilaku dan cara pandang dalam menggunakannya. Jika yang menggunakan bijak, paham, dan dapat mengendalikannya, maka akan membawa manfaat. Jika sebaliknya yang terjadi, maka dampaknya mungkin lebih mengerikan daripada penggunaan uang tunai. Yang akan terjadi justru besar pasak daripada tiang sehingga membawa mudarat.

Setidaknya ada tiga hal ikutan yang perlu disiapkan dalam memasuki *cashless society.* **Pertama,** lakukan perencanaan keuangan. Transaksi tunai dan non tunai secara prinsip sama, hanya

prakteknya yang berbeda. Prinsip ini harus benar-benar dipahami. **Kedua,** pilihlah alat transaksi yang sesuai dengan karakter pribadi. Jika berkarakter cenderung boros, hindarkan penggunaan kartu kredit, cukup dengan kartu debit. **Ketiga,** pilih *provider* aplikasi pembayaran yang memiliki kredibilitas dan jangkauan luas. Sistem pembayaran non tunai memiliki *operational risk* yang cukup tinggi sehingga *provider* yang berkredibilitas diharapkan memiliki perlindungan berlapis untuk mitigasi risiko tersebut kepada konsumen. Sedangkan *provider* yang tidak memiliki jangkauan luas tentu akan menyulitkan transaksi jika tidak terjaring dengan banyak *merchant*. *Wallahua'lam bish showab.*

.

49
OKTOBER, EKONOMI HALAL UNTUK CAD[46]

Merujuk Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), maka kewajiban bersertifikat halal pada produk yang masuk dan beredar di seluruh wilayah Indonesia per 17 Oktober 2019 telah berlaku. Artinya lagi, kewajiban tersebut bagi industri makanan dan minuman hanya hitungan dua pekan karena industri ini menjadi yang pertama dikenakan kewajiban lantaran dinilai paling siap dan berhubungan langsung dengan masyarakat.

Meski pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dianggap belum siap melaksanakan UU tersebut, namun bulan Oktober dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendorong dunia usaha, utamanya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebagai penggerak produk halal. Hal ini tidak saja semata untuk memenuhi amanat UU JPH, tetapi juga untuk membantu Indonesia dalam memperbaiki defisit transaksi berjalan atau *current account deficit* (CAD).

46 Dimuat Jawa Pos, Opini, 7 Oktober 2019.

Produk halal Indonesia pada gilirannya akan membantu mengurangi impor produk halal yang sebenarnya juga menjadi penyebab CAD yang membebani neraca perdagangan. Selain diharapkan dapat membantu perbaikan CAD, produk halal Indonesia juga akan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing pada pasar ekspor, terutama pada negara muslim.

Pada semester I-2019, CAD Indonesia menembus 3 persen produk domestik bruto (PDB). CAD pada kuartal II-2019 mencapai 3,04 persen dan menjadi CAD kuartal II terburuk sejak 2014. Faktor pembengkakan CAD ditengarai karena pembayaran bunga utang luar negeri, dampak perlambatan ekonomi dunia, melemahnya harga komoditas, dan repatriasi dividen.

Tahun depan, pembengkakan CAD masih menghantui. Betapa tidak, alokasi belanja pemerintah pusat untuk melunasi bunga utang pada 2020 meningkat Rp295,2 triliun dalam APBN 2020 atau tumbuh 6,9 persen dari *outlook* realisasi pembayaran bunga utang 2019 yang sebesar Rp276,1 triliun. Ketegangan hubungan dagang Amerika Serikat (AS) dan China diperkirakan juga masih terus berlanjut dan semakin menekan volume perdagangan dunia dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Kinerja ekspor Indonesia pun terimbas lantaran turunnya permintaan dunia dan harga komoditas. Repatriasi dividen musiman, biasanya pada awal tahun, dapat menjadi katalis yang kian melemahkan rupiah saat mengawali 2020.

Insentif

Salah satu langkah strategis dalam Masterplan Ekonomi

Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 adalah penguatan sektor UMKM sebagai penggerak utama rantai nilai produk halal. Indonesia berpeluang menjadi pasar produk halal terbesar di dunia sekaligus menjadi produsen utama bagi industri halal global.

Pada 2017, kurang lebih 20 persen PDB Indonesia berhubungan dengan konsumsi produk halal. Konsumsi produk halal Indonesia mencapai US$200 miliar atau 36 persen dari konsumsi rumah tangga. Sayangnya, konsumsi produk halal nasional masih didominasi produk impor luar negeri sebagai komponennya. Orientasi pasar domestik dengan bahan baku impor dalam jangka panjang akan memperburuk struktur ekonomi.

Merujuk State of Global Islamic Economy 2018/2019, pada 2017, dari belanja Indonesia untuk seluruh sektor halal sebesar US$218,8 miliar, Indonesia menghabiskan US$170 miliar untuk belanja produk makanan halal. Hal ini juga yang menempatkan Indonesia pada peringkat pertama dari 10 negara sebagai *Top Muslim Food Expenditure*. Pada periode tersebut, konsumsi makanan halal penduduk dunia mencapai US$1.303 miliar.

Pada tataran inilah, pemerintah melalui BPJPH dapat menjadikan Oktober sebagai momentum bagi dunia usaha, terutama yang bergerak pada industri makanan minuman, untuk peduli sertifikasi halal. Pemerintah pun seyogyanya memberi insentif bagi industri ini, mulai dari sertifikasi gratis, bantuan promosi dan pemasaran produk, bebas pajak atau kemudahan mengakses sertifikat halal. Masa transisi lima tahun bukan waktu yang panjang mengingat proses sertifikasi umumnya

membutuhkan waktu minimal tiga bulan dan jumlah UMKM makanan minuman layak sertifikasi diperkirakan mencapai 1,6 juta.

Rantai Nilai

Perbaikan CAD tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek karena masalahnya adalah pada ekspor komoditas sebagai tumpuan struktur perekonomian. Oleh karena itu, investasi domestik harus diarahkan untuk membangun industri bahan baku bernilai tambah yang mendorong ekspor. Ekspor menjadi opsi terbaik daripada utang luar negeri sebagai variabel perbaikan CAD karena peningkatan ketidakpastian ekonomi global akibat eskalasi perang dagang dapat memicu *capital outflow* dari Indonesia menuju *safe haven.*

Demikian pula dengan sektor halal. Untuk mengarahkan industri halal berkontribusi bagi perbaikan CAD membutuhkan waktu yang tidak pendek. Masa transisi yang diberikan harus dioptimalkan dengan sejumlah insentif untuk mengakselerasinya. Pasalnya, produk halal bukan *an sich* terkait urusan sertifikat belaka, tetapi juga sebagai bentuk transformasi struktural untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing melalui rantai nilai halal sehingga tercipta ekosistem bagi industri halal.

Menyambut 17 Oktober, pemerintah dan BPJPH tidak boleh kehilangan momentum. Meski disangsikan kesiapannya dalam melaksanakan UU JPH, namun amanat ini harus dijalankan karena potensi dan kebermanfaatannya. Ekonomi halal sebagai arus baru perekonomian diharapkan dapat menjadi motor bagi UMKM dan

industri halal untuk turut membantu perbaikan CAD dengan mengerek ekspor Indonesia. Ini juga menjadi ikhtiar untuk menahan meningkatnya suku bunga acuan dan kemungkinan depresiasi rupiah yang semakin dalam bila aksi *capital outflow* semakin besar. *Wallahua'lam bish showab.*

50
UU JPH, DUKUNGAN MAKROPRUDENSIAL BANK SENTRAL[47]

Menjelang 17 Oktober, hiruk-pikuk sertifikasi halal sebagai agenda Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) semakin menguat. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya yang bergerak pada industri makanan minuman (mamin), yang paling resah karena menjadi yang pertama dikenakan kewajiban. Untuk itu, berlakunya UU JPH pada 17 Oktober dapat menjadi momentum bagi Bank Indonesia ke depan untuk mengarahkan kebijakan makroprudensial yang mendukung sektor industri halal.

Meski pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dipandang belum siap melaksanakan UU JPH, namun amanat UU ini harus terus dilaksanakan. Hal tersebut mengingat potensi produk

47 Dimuat Bisnis Indonesia, Opini, 10 Oktober 2019. Dimuat ulang oleh Harian Jogja, 15 Oktober 2019.

halal dalam memasuki pasar ekspor sehingga dapat membantu memperbaiki defisit transaksi berjalan atau *current account deficit* (CAD).

Dalam ketidakpastian ekonomi global, produk halal memiliki peluang pasar yang terus membesar. Selain kesadaran masyarakat muslim dunia untuk menggunakan produk halal yang semakin baik, halal kini juga tidak lagi menjadi simbol agama. Halal saat ini sudah menjadi standar dalam menentukan tingkat kebersihan, keamanan, dan kenyamanan yang diakui masyarakat global.

The State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019 mencatat *market size* untuk seluruh industri halal global pada 2017 mencapai US$2,107 triliun. Pada 2023, *market size* ini diprediksi meningkat menjadi US$ 3,007 triliun. Di Indonesia, belanja industri halal pada 2017 mencapai US$218,8 miliar dengan dominasi konsumsi makanan halal hingga US$170 miliar.

Namun demikian, tidak bisa dimungkiri, perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China sejak 2018 memicu meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Hingga semester I-2019, pertumbuhan ekonomi dua negara tersebut melambat. Perlambatan ini menyebar pada negara lain dan berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi dan perdagangan internasional. Sebagian besar harga komoditas turun tajam. Penurunan ekonomi ini diprediksi masih terus berlanjut hingga 6-12 bulan ke depan.

Oleh karena itu, berlakunya UU JPH pada 17 Oktober merupakan momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial yang akomodatif, utamanya dalam pengembangan industri halal. Pasca krisis

keuangan global tahun 2008, hingga berulang kembali ancaman resesi akibat perang dagang, kebijakan makroprudensial menjadi harapan untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

Makroprudensial untuk UMKM

Dalam melaksanakan kebijakan makroprudensial yang bersifat *countercyclical,* maka kebijakan secara umum yang dilakukan Bank Indonesia pada situasi *bust* saat ini adalah memberi pelonggaran untuk membantu perekonomian bangkit. Bank dapat menggunakan cadangan modal untuk mengurangi kontraksi kredit. Hal ini perlu dilakukan guna mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Pasalnya, perilaku bank cenderung menahan kredit saat kondisi *bust*.

Selanjutnya, jika selama ini mandat stabilisasi harga pada Bank Indonesia selaku otoritas makroprudensial adalah melalui program klaster, kewirausahaan, dan penegasan kembali komitmen perbankan untuk penyediaan kredit UMKM sebesar 20 persen, maka porsi UMKM yang menghasilkan produk halal seyogyanya meningkat porsinya. Terutama pada UMKM mamin. Hal ini perlu dilakukan guna meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Pasalnya, keuangan inklusif dan stabilitas sistem keuangan memiliki hubungan erat.

Untuk itu, berlakunya UU JPH dapat menjadi momentum bagi Bank Indonesia untuk menghasilkan jurus kebijakan makroprudensial bagi UMKM dalam penciptaan rantai nilai halal. Terutama yang berorientasi ekspor. UU JPH sejatinya bukan dipahami sekadar persoalan sertifikat halal semata, tetapi

harus dimaknai sebagai wujud transformasi struktural dalam menciptakan ekosistem industri halal yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing pada setiap mata rantainya.

Dengan demikian, UMKM harus didorong untuk menjadi bagian dari ekosistem halal. Pada tahun 2017, jumlah UMKM telah mencapai 62.922.617 unit. Sedangkan usaha besar hanya berjumlah 5.460 unit. Jumlah UMKM didominasi usaha mikro sekitar 62 juta atau sekitar 98,7 persen. Sedangkan usaha kecil dan menengah sebesar 815 ribu atau sekitar 1,3 persen.

Belum ada data resmi yang dapat menunjukkan seberapa banyak UMKM yang bergerak pada industri halal. Meski UMKM juga kebanyakan belum memiliki kapasitas yang baik dalam melakukan aktivitas ekspor, namun peran UMKM tetap perlu dimaksimalkan dalam pengembangan industri halal. Potensinya yang besar, terlebih dalam rangka melaksanakan amanat UU JPH, maka UMKM yang bergerak pada industri halal berpeluang menjadi penopang perekonomian domestik di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Untuk itu, Bank Indonesia harus menyiapkan sejumlah penyangga untuk mendukung kebijakan makroprudensial. Sasaran utamanya selain mengelola prosiklisitas sistem keuangan karena keterkaitannya dengan makrofinansial, juga mendorong regulasi keuangan secara *system-wide* untuk insentif dan disinsentif para pelaku pasar, dalam hal ini UMKM yang bergerak pada industri halal.

Artinya, UMKM harus diberi insentif untuk masuk dalam ekosistem rantai nilai halal sehingga komponen impor produk

halal nasional juga dapat dikurangi. Harus diakui, salah satu penyumbang CAD ternyata adalah komponen impor dari produk halal domestik. Namun, untuk memperbaiki CAD membutuhkan waktu karena titik kritisnya adalah ekspor komoditas sebagai tumpuan.

Maka, meningkatkan produk halal berorientasi ekspor adalah pilihan logis daripada pinjaman luar negeri berbasis bunga sebagai solusi jangka pendek untuk mengendalikan stabilitas nilai tukar rupiah. Apalagi bila mengingat kemungkinan terjadinya peningkatan *capital outflow* karena eskalasi perang dagang yang dapat memicu depresiasi rupiah dan meningkatnya suku bunga acuan. Pada tataran inilah, kebijakan makroprudensial benar-benar dinanti. *Wallahua'lam bish showab*.

51
MENDORONG UMKM MENEMBUS PASAR EKSPOR[48]

Kinerja ekspor produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) turun. Meski kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat menjadi 61 persen pada Semester I-2019, namun kontribusinya terhadap ekspor nonmigas sebesar 14,17 persen. Angka ini turun dari 15,8 persen pada periode yang sama tahun 2018.

Indonesia mungkin perlu belajar mengelola UMKM pada pemerintah Thailand. Kontribusi ekspor produk UMKM Thailand menempati peringkat pertama di ASEAN. Disusul Malaysia, Filipina, Vietnam, dan kemudian Indonesia. Meski ada versi lain yang menempatkan Malaysia pada peringkat pertama dan Thailand pada peringkat kedua, namun keduanya sama-sama menempatkan Indonesia pada peringkat kelima.

Meski menempati peringkat kelima, namun faktanya, Asosiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo)

48 Dimuat Banjarmasin Post, Tribun Forum. 14 November 2019.

menyebutkan UMKM yang melakukan ekspor kurang dari 1.000 UMKM, lebihnya adalah perusahaan besar yang mengekspor produk UMKM. Merujuk data Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), jumlah UMKM di Indonesia mencapai 62,922 juta unit yang didominasi oleh usaha mikro sebanyak 62,1 juta unit. Artinya, UMKM yang melakukan ekspor sangat kecil sekali, tidak sampai dua persen

Padahal, dengan populasi penduduk terbesar di ASEAN, juga keberadaan UMKM sebagai lapisan usaha paling besar dalam struktur perekonomian, Indonesia sejatinya memiliki kekuatan yang lebih daripada negara lainnya. Sayang, Indonesia hingga saat ini justru menjadi pasar, bukan penghasil utama.

Insentif dan Digitalisasi

Salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM di Indonesia menembus pasar ekspor adalah pemahaman tentang prosedur ekspor-impor, belum memenuhi standarisasi, belum bersertifikasi produk, dan pengemasannya yang belum memadai. Selain itu, masalah klasik yang hingga hari ini masih belum tuntas, yaitu masalah permodalan.

Mengacu data Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, per Desember 2018, *outstanding* kredit UMKM yang disalurkan perbankan masih 19,8 persen dari total kredit perbankan. Dari total kredit UMKM, 25,4 persen berupa kredit usaha mikro, 30 persen kredit usaha kecil, dan 44,5 persen kredit usaha menengah. Dengan jumlah usaha besar hanya sebesar 5,46 juta unit atau 8,67 persen dari total 62,928 juta

unit usaha di Indonesia, jenis usaha ini justru menguasai kredit 80,2 persen dari total kredit perbankan.

Kendala lain yang dihadapi UMKM menembus ekspor adalah tingginya biaya logistik ditambah pajak yang tinggi untuk volume besar. Akumindo menyebut pajak yang berlaku 30 persen. Penerima produk di negara tujuan nantinya juga masih akan dibebani biaya.

Terkait dengan perizinan, hal ini juga masih menjadi masalah tersendiri. Di lapangan, selain pemahaman yang masih minim dari pelaku UMKM terkait prosedur ekspor-impor, tetapi kebijakan ekspor-impor untuk UMKM juga masih belum sejelas usaha besar. Harmonisasi antar lembaga belum serasi dan belum terintegrasi. Dorongan ekspor produk UMKM lebih pada himbauan, belum benar-benar berwujud pada kebijakan. Pada akhirnya, pelaku UMKM lebih memilih pasar domestik.

Menyikapi berbagai persoalan yang terjadi, ada dua kata kunci yang dapat dioptimalkan. Yaitu, insentif dan digitalisasi. Insentif dibutuhkan sebagai stimulus, baik dengan mempermudah persyaratan maupun keringanan pajak. Termasuk dengan menyediakan perizinan digital.

Terkait digitalisasi, diperkirakan baru sekitar 9 persen UMKM yang memanfaatkan pasar digital. Padahal, dari 267 juta populasi penduduk Indonesia, diperkirakan 83,5 juta adalah pengguna *smartphone,* 132,7 juta pengguna internet aktif, 130 juta pengguna media sosial, dan 18 juta diantaranya berbelanja *online*. Strategi bisnis digital dapat menjadi peluang untuk membuka peluang ekspor produk UMKM.

Menolong Perekonomian

Tren perlambatan PDB Indonesia yang cenderung stagnan pada angka pertumbuhan 5 persen sudah terjadi sejak 2014. Seiring bayang-bayang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin melambat pasca perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China yang menekan perdagangan internasional dan ekonomi global, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal II 2019 kembali mencatat semakin melebarnya defisit transaksi berjalan setelah sebelumnya sempat mengalami perbaikan.

Tahun depan, defisit transaksi berjalan masih akan menghantui. Terlebih belanja bunga utang negara jatuh tempo akan meningkat. Itulah sebabnya, pemerintah belakangan semakin menyuarakan dorongan ekspor bagi UMKM. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia tanggal 23-24 Oktober juga memutuskan menurunkan kembali suku bunga acuan hingga menyentuh titik terendah sepanjang 2019, yaitu 5 persen. Hal ini tidak lepas dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, termasuk membantu kredit murah bagi UMKM.

Jelas, UMKM saat ini menjadi harapan bagi pemerintah untuk menolong perekonomian dengan ikut membantu perbaikan defisit transaksi berjalan melalui peningkatan diversifikasi produk yang bisa diekspor ke luar negeri. Saat ini, eksistensi UMKM memang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekspor nonmigas. Pasalnya, defisit transaksi berjalan yang telah berlangsung sejak 2012 dapat berimplikasi pada instabilitas nilai tukar yang pada gilirannya dapat berimplikasi pada instabilitas perekonomian nasional.

Tidak bisa tidak, gaung yang mendorong UMKM menembus pasar ekspor tidak boleh hanya sebatas himbauan belaka, tetapi kongkret menjadi harmonisasi kebijakan. Menjadikan UMKM naik kelas bukan sekedar membantu perbaikan defisit transaksi berjalan semata, tetapi juga dapat membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat golongan menengah ke bawah. Pada gilirannya, hal ini juga membantu mengurangi tingkat kemiskinan. *Wallahua'lam bish showab*.

52
2020, MENUJU LESS CASH SOCIETY [49]

Pernah melihat tayangan Youtube yang menggambarkan pengemis di China menerima sumbangan melalui pindai quick response *(QR) code pada layar* smartphone? *Begitulah kira-kira yang akan terjadi di Indonesia ke depan. Sebagian negara di dunia sudah menjadi* cashless society *dan Indonesia pun bersiap menuju* less cash society.

Per 1 Januari 2020, melengkapi sistem pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia resmi memberlakukan QR *Code Indonesia Standard* (QRIS). QRIS adalah QR *code* berstandar nasional yang berfungsi sebagai alat pembayaran. QRIS adalah upaya Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran untuk mengintegrasikan pembayaran digital berbasis QR *code* di Indonesia, baik berupa *mobile banking* maupun *mobile payment*.

49 Dimuat https://www.jemberpost.net/2020-menuju-less-cash-society/.

QRIS sebenarnya sudah resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2019. Sebelum masa pemberlakuan, para penyedia barang dan jasa *(merchant)* diminta mengajukan aplikasi kepada Bank Indonesia. Penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) berbasis QR *code* pun diminta melakukan penyesuaian sistem selama masa transisi untuk mengimplementasikan QRIS secara menyeluruh.

Saat ini, QR *code* memang merupakan salah satu inovasi teknologi yang mulai banyak digunakan dalam layanan pembayaran digital. Cara pembayaran berbasis QR *code* dinilai juga dapat mendorong efisiensi perekonomian, mempercepat keuangan inklusif, dan memajukan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Terus tumbuhnya penyedia pembayaran digital berbasis QR *code* inilah yang dipandang otoritas perlu diatur melalui QRIS.

Dengan kata lain, QRIS sebagai standar nasional QR *code* dimaksudkan untuk mengantisipasi inovasi teknologi dan perkembangan kanal pembayaran yang menggunakan QR *code*. Teknologi pembayaran ini berpotensi menimbulkan fragmentasi baru pada industri sistem pembayaran. QRIS berpeluang untuk memperluas akseptasi pembayaran nontunai nasional secara lebih efisien.

Less Cash Society

Menjadi *less cash society* mungkin lebih sesuai untuk Indonesia daripada menjadi *cashless society*. Pasalnya, layanan tunai di Indonesia masih memiliki pasar sendiri. Hal ini terindikasi dari Indonesia yang masuk dalam kategori negara dengan pertumbuhan inovasi cepat, namun tingkat kemajuan digitalnya

masih rendah. Pada sektor pembayaran, meski tingkat keuangan inklusif sudah mulai meningkat, namun uang tunai sebagai alat transaksi masih menjadi pilihan mayoritas masyarakat di Indonesia.

Oleh karena itu, kehadiran layanan nontunai digital bersifat opsional yang ke depan akan terus membesar porsinya. Tidak bisa dimungkiri, teknologi digital yang menjadi karakter era revolusi industri 4.0 telah memberikan alternatif baru dalam transaksi pembayaran. Layanan nontunai digital menawarkan efisiensi tidak hanya pada otoritas, tapi juga pada PJSP maupun konsumen. Layanan ini lebih praktis, lebih murah, mengurangi friksi transaksi, memiliki akses atau konektivitas yang lebih luas, dan tata kelola yang lebih transparan.

Dibanding pendahulunya sesama alat pembayaran non tunai digital, QRIS memiliki lebih banyak keunggulan. Sistem pembayaran berbasis QRIS minim biaya investasi karena alat pembayaran ini memanfaatkan jaringan *mobile banking* dan *mobile payment* yang dapat digunakan oleh seluruh segmen masyarakat dan dunia usaha. Bagi konsumen, QRIS menjadikan aplikasi pembayaran QR *code* apapun yang dimiliki konsumen dapat digunakan untuk transaksi. Bagi *merchant,* QR *code* dari PJSP apapun yang menjadi rekanannya dapat digunakan untuk memindai aplikasi yang dimiliki konsumen.

Dari sisi keamanan, Bank Indonesia mensyaratkan PJSP memenuhi ketentuan standar QRIS, yaitu kehandalan sistem dan aplikasi, kemampuan mengindentifikasi dan memitigasi risiko, kemampuan melindungi nasabah termasuk penyelesaian sengketa, kemampuan memonitor transaksi di *merchant* maupun

nasabah, serta kemampuan untuk melakukan proses *know your customer* (KYC) pada registrasi nasabah dan *merchant*.

Perubahan Perilaku

Ke depan, tantangan kebijakan Bank Indonesia tidak cukup hanya fokus pada upaya melakukan *interlink* keuangan digital dengan ekonomi digital atau mendorong tranformasi digital perbankan secara *end to end.* Tantangan kebijakan juga tidak cukup hanya fokus pada penguatan regulasi, *entry-policy,* pelaporan dan pengawasan yang selaras dengan tuntutan era digital serta mendorong keterbukaan ekonomi dengan prinsip *national interest*. Tantangan kebijakan juga tidak boleh hanya fokus pada upaya perluasan akseptasi digital. Literasi keuangan digital juga harus dihadirkan karena keuangan digital menuntut perubahan perilaku penggunanya.

Terkait dengan QRIS, pelaksanaannya pun harus diikuti dengan literasi keuangan digital. Pasalnya, banyaknya alternatif baru sistem pembayaran telah menggeser perilaku masyarakat dalam bertransaksi. Sosialisasi dan edukasi perlu secara masif dilakukan pada seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat harus dapat menentukan pilihan alat pembayaran yang sesuai dengan karakter pribadi. Pada prinsipnya, semua alternatif alat pembayaran bertujuan untuk memudahkan masyarakat bertransaksi keuangan. Namun, ketidaktepatan menentukan alat pembayaran justru dapat mempersulit diri, bahkan dapat menimbulkan bahaya bagi penggunanya.

Belajar dari *Behavioral Economics,* manusia terkadang tidak rasional dan kerap memasukkan unsur emosi dalam mengambil keputusan ekonomi. Itulah sebabnya pengambilan keputusan dapat saja mengandung unsur bias atau terjadi kesalahan berpikir yang berulang. Merujuk pada proses perubahan sistem pembayaran yang akan diimplementasikan ke depan, pesan otoritas dapat diterjemahkan berbeda oleh masyarakat luas. Untuk itu, literasi keuangan digital perlu dihadirkan sebagai mitigasi risiko yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat akan layanan pembayaran non tunai digital. *Wallahua'lam bish showab.*

53
UMKM, FROM ZERO TO HERO[50]

"Ya sudah, Bu Nisa saja ...."

Demikian pesan pendek dari Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Jember, Pak Miqdad, yang juga Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Univesitas Jember (Unej) pada saya. Beliau harus melakukan perjalanan dinas ke Makassar sehingga tidak bisa menghadiri undangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jember.

Akhirul kalam, saya mewakili Pak Miqdad menghadiri undangan bertajuk Temu Responden, *Go Export "From Zero to Hero".* Hadir pula Pak Dekan saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, termasuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) binaan KPwBI Jember.

Surpriseeee, moderator acara tersebut adalah Andy F. Noya, *host* dari *talkshow* terkenal Kick Andy. Kemampuannya membawakan acara menjadikan paparan tiga narasumber pada acara tersebut,

50 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Ruang Kita. 19 November 2019.

yaitu dua orang eksportir dan satu dari Kementerian Perdagangan, terasa segar dan waktu tak terasa beranjak.

Menurut saya, KPwBI Jember mengundang moderator selevel Andy F. Noya jauh-jauh ke Jember bukan sekadar mengapresiasi pelaku UMKM yang telah mampu menembus pasar internasional. Acara tersebut sejatinya memang membawa pesan besar untuk mengajak UMKM di wilayah kerja KPwBI Jember untuk mengepakkan sayap pada pasar luar negeri. Pasalnya, UMKM yang berhasil menembus perdagangan internasional sejatinya adalah pahlawan bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam membantu menjaga stabilitas moneter. Dan kebetulan… Bank Sentral adalah otoritas penjaga stabilitas moneter.

Defisit Transaksi Berjalan

Meski Bank Sentral memprediksi defisit transaksi berjalan atau *current account deficit* (CAD) pada akhir tahun akan turun menjadi 2,8 persen dari produk domestik bruto (PDB), namun bayang-bayang pembengkakan CAD tahun depan masih akan menghantui. Selain belanja pelunasan bunga utang yang meningkat, juga eskalasi perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China masih akan berlanjut sehingga pertumbuhan ekonomi global melambat.

Atas dasar itulah, isu kebijakan moneter saat ini lebih diarahkan pada upaya menjaga stabilitas neraca pembayaran daripada pengendalian inflasi. Pada 2018, membengkaknya CAD mendorong Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan menjadi 6 persen. Namun, pada 2019, Bank Sentral cenderung

mempertahankan dan kemudian secara bertahap menurunkan suku bunga acuan. Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia tanggal 23-24 Oktober, suku bunga acuan menyentuh titik terendah sepanjang 2019, yaitu 5 persen.

Turunnya suku bunga memenuhi harapan pasar. Kebijakan ini tidak lepas dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selain itu, era keemasan suku bunga tinggi di dunia pun mulai meredup. Bank Sentral mengambil peran sebagai agen pendorong pertumbuhan ekonomi. Itulah sebabnya suku bunga acuan turun untuk mendukung iklim investasi dan ekspansi usaha yang kondusif guna menangkal perlambatan ekonomi global.

Pada tataran inilah, UMKM mendapat momentum untuk naik kelas. Turunnya suku bunga acuan menjadi *leading sign* bahwa pembiayaan akan menjadi lebih murah karena otoritas memiliki kepentingan untuk menggerakkan perekonomian nasional. Selain itu, CAD yang berlangsung, juga akan memberi ruang lebih besar bagi UMKM untuk mendapat dukungan menembus pasar internasional.

Penguatan UMKM

Tidak ada yang bisa mengingkari bahwa UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian nasional. Keberadaannya sebagai lapisan usaha yang paling besar dalam struktur perekonomian Indonesia menjadikan UMKM berperan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi.

Di masa lalu, eksistensi UMKM lebih dititikberatkan pada kemampuannya menyerap tenaga kerja dan membuka lapangan

kerja baru. Saat ini, eksistensi UMKM menjadi lebih luas. UMKM bertransformasi menjadi sumber pendorong pertumbuhan ekspor nonmigas. Pasalnya, CAD yang tengah berlangsung dapat berimplikasi pada instabilitas nilai tukar yang pada gilirannya dapat berimplikasi pada instabilitas perekonomian nasional. Salah satu langkah strategis untuk mengatasinya adalah kegiatan ekspor produk UMKM.

Sepertinya kita masih perlu belajar pada pemerintah Thailand yang sukses membangun ekosistem UMKM yang terintegrasi dan berkompetensi sehingga ekspornya didominasi oleh produk UMKM. Pemerintah setempat tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga fasilitator sekaligus *marketer*.

Salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM di Indonesia menembus pasar ekspor adalah pemahaman tentang prosedur ekspor-impor, belum memenuhi standarisasi, belum bersertifikasi produk, dan pengemasannya yang belum memadai. Selain itu, masalah klasik yang hingga hari ini masih belum tuntas, yaitu masalah permodalan.

Terkait permodalan, merujuk data Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, *outstanding* kredit UMKM yang disalurkan perbankan per Desember 2018 sekitar 19,8 persen dari total kredit perbankan. Adapun kredit usaha mikro sebanyak 25,4 persen dari total kredit UMKM atau 5,05 persen dari total kredit perbankan. Porsi kredit UMKM ini memang terus meningkat, namun masih belum optimal. Hal ini mengingat jumlah usaha mikro di Indonesia mencapai

58,91 juta unit dan usaha kecil 59.260 unit, sedangkan usaha besar hanya 4.987 unit.

Jelas, sinergi dan dukungan berbagai pihak sangat penting untuk mendorong ekspor produk UMKM. Pendanaan dengan skema pembiayaan yang terjangkau tanpa agunan dapat menjadi insentif. Mengingat CAD yang terus menerus dapat berimplikasi pada instabilitas moneter dan perekonomian nasional, tidak bisa tidak, Bank Sentral melalui bauran kebijakannya harus menjadi motor yang mendorong dan mengoordinasi pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung UMKM menembus pasar ekspor. *From Zero to Hero.*

54
2020, TAHUN WAKAF PRODUKTIF[51]

"Saya baru baca depannya. Terpikir judul yang lebih greget, 'CWLS: Gerakan Radikal Membangun Ekosistem Wakaf Produktif di Indonesia' ...."

Demikian respon Bu Dwi Irianti Hadiningdyah, Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, atas draf naskah artikel yang akan kami tulis bersama untuk buletin INSIGHT milik Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) edisi Kuartal I-2020. Saya dan Bu Dwi berencana menulis buku Serial Sukuk pada 2020. Mengawalinya, ketika diminta menulis artikel untuk KNKS, saya menawarkan Bu Dwi untuk menulis bersama sebagai pemanasan. Gayung bersambut. Bahkan, Pak Fahrurozi, Komisioner Badan Wakaf Indonesia (BWI), ikut bergabung dalam artikel bersama kami untuk KNKS tersebut.

51 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 20 Desember 2019.

Ya, sebagai pengambil kebijakan atas penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) di Indonesia, Kementerian Keuangan pada 2020 akan menerbitkan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). CWLS telah diluncurkan pada Pertemuan Tahunan *International Monetary Fund* (IMF) - *World Bank* di Nusa Dua, Bali, pada 12-14 Oktober 2018. Kemudian, pada 1 November 2018 dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Bank Indonesia, dan BWI untuk pengembangan CWLS. Berkenaan dengan hal itulah, pada 2020, CWLS akan menjadi motor wakaf produktif. Bu Dwi Irianti meyakini CWLS bukan hanya merevolusi, tetapi akan menjadi gerakan radikal dalam pengembangan ekosistem wakaf di Indonesia dan dunia.

CWLS, Inovasi Pembiayaan

CWLS adalah wakaf uang yang ditempatkan pada SBSN atau yang kerap disebut Sukuk Negara untuk pengelolaan wakaf secara produktif. Kesyariahan CWLS telah terpenuhi dengan keluarnya Pernyataan Kesesuaian Syariah *Cash Waqf Linked Sukuk* dari Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) tanggal 6 Februari 2019. Investasi CWLS aman karena dijamin negara. CWLS produktif karena memberi imbal hasil dari sukuknya. CWLS optimal karena imbal hasil sukuknya kompetitif dan tidak dipotong pajak. CWLS juga berkah karena imbal hasilnya mengalir untuk masyarakat kurang mampu.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, mengembangkan CWLS didorong oleh setidaknya dua alasan

utama. **Pertama,** menjadikan sukuk sebagai alternatif investasi wakaf dengan mengintegrasikan sukuk dan wakaf tunai sebagai instrumen wakaf produktif. **Kedua,** menjadi inovasi pembiayaan untuk membantu pencapaian *sustainable development goals* (SDGs).

Secara umum, CWLS dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu *perpetual* CWLS dan *temporary* CWLS. Bagi yang memilih *temporary* CWLS, maka dana wakaf akan kembali pada tahun yang ditentukan. Bagi yang memilih *perpetual* CWLS, maka setelah periode sukuk berakhir, dana wakaf akan ditempatkan lagi pada sukuk seri berikutnya atau diinvestasikan pada produk lembaga keuangan syariah atau instrumen keuangan syariah lainnya atau diinvestasikan secara langsung.

Pertanyaan yang kerap mengemuka, apakah investasi wakaf tidak berisiko? Tidak bisa dimungkiri, terdapat beberapa pendapat terkait hal tersebut. Lembaga Fikih Islam menyatakan bahwa risiko dalam investasi tidak mungkin dihilangkan, termasuk pula investasi wakaf. Untuk itu, investasi wakaf harus dilakukan dengan tidak memilih jenis investasi yang beresiko tinggi *(high risk)*. Serta, harus ada jaminan sebagai upaya mitigasi risiko.

Tantangan Wakaf Produktif

Wakaf memiliki akar sejarah panjang. Kelembagaan keuangan Islam ini telah dipraktikkan langsung oleh Rasululah SAW dengan mewakafkan tujuh bidang kebun kurma di Madinah. Demikian juga dengan para sahabat seperti Umar bin Khatab dengan tanah

Khaibar, Utsman bin Affan dengan sumur Raumah, juga Ali bin Abi Thalib dengan tanah Yanbu'.

Pada hadis *"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh."* (HR. Muslim), sedekah jariyah dapat dimaknai sebagai wakaf. Wakaf sejatinya bermakna produktif itu sendiri karena esensinya mengandung keberlanjutan atau kesinambungan. Rasulullah mengatakan, *"Tahan pokok hartanya dan salurkan hasilnya."* (HR. Nasa'i). Dari hadis tersebut, pengelolaan wakaf didorong untuk menghasilkan keuntungan yang nantinya dapat disalurkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun perintahnya jelas, namun selama ini tafsir tentang wujud wakaf masih didominasi dengan pemberian sebidang tanah untuk dikelola yayasan Islam yang digunakan untuk pembangunan masjid, musala, panti asuhan, atau sekolah. Belakangan gaung wakaf sebagai penggerak roda ekonomi umat semakin terdengar seiring sosialisasi dan edukasi tentang wakaf produktif yang semakin gencar disuarakan.

Ke depan, terdapat setidaknya dua tantangan besar bagi CWLS. **Pertama,** melakukan *adjustment* CWLS dalam administrasi akuntansi *wakif* yang berlatar belakang lembaga atau badan usaha karena terdapat kendala pembukuan bagi lembaga atau korporasi yang berminat berinvestasi CWLS. **Kedua**, meningkatkan literasi wakaf produktif karena kebanyakan masyarakat memahami wakaf sebagai hal terpisah dari konteks pembangunan ekonomi umat. Salah satu persoalan yang lazim mengemuka adalah keterbatasan

kemampuan *nazhir* dalam mengelola aset-aset wakaf menjadi produktif.

Untuk itu, guna memperkuat ekosistem wakaf di Indonesia, setidaknya dua tantangan besar tersebut dapat dihadapi bersama. Pembinaan dan pendampingan *nazhir* menjadi faktor kunci untuk pengembangan wakaf produktif sebagai lokomotif ekonomi umat. Hal ini pada gilirannya juga membantu menjadikan ekonomi syariah berkontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. *Wallahu a'lam bish showab.*

55
2020, MENUJU BPRS YANG TANGGUH, MAJU, DAN BERMANFAAT[52]

Tantangan perekonomian global dan disrupsi teknologi menciptakan ekosistem yang kian dinamis dan kompetitif. Sebagai salah satu lembaga perbankan syariah di Indonesia, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dituntut pula untuk melakukan adaptasi, inovasi, kolaborasi, dan sinergi, terlebih pada era 4.0 yang merevolusi transformasi proses bisnis melalui teknologi informasi, otomasi, termasuk *internet of things, artificial intelligence,* dan *digital economy*.

Saat ini, BPRS dihadapkan pula pada tantangan penggunaan *e-commerce* yang masif dan melahirkan berbagai model bisnis baru, diantaranya layanan *peer to peer* (P2P) *lending*, dompet digital atau *digital payment*. Sebagai lembaga yang melayani pelaku usaha kecil menengah (UKM) dan masyarakat di tingkat

52 Ditulis bersama Reza Mustafa, Kepala Sub. Bagian Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK. Dimuat INSIGHT, Buletin Komite Nasional Keuangan Syariah, Edisi 7, Desember 2019.

kecamatan, keberadaan BPRS sejatinya strategis dalam menggerakkan pembangunan ekonomi daerah.

Namun demikian, tidak bisa dimungkiri, perkembangan BPRS diusianya yang ke-27 tahun masih belum mengalami peningkatan signifikan sebagaimana diharapkan. Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja BPRS cenderung melambat. Kalaupun mengalami pertumbuhan, tetapi tidak secepat industri lainnya. Seiring dengan intensitas persaingan yang juga ikut meningkat, pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan industri BPRS secara nominal mengalami perlambatan. BPRS masih rentan untuk mengalami kebangkrutan.

Kinerja

Merujuk Statistik Perbankan Syariah September 2019, saat ini terdapat 165 BPRS di Indonesia. Jumlah ini menurun sedikit dibanding Desember 2018 yang masih sebanyak 167 BPRS. Sebaran BPRS didominasi oleh Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Lampung, dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2018, pada bulan Desember 2018, total aset 167 BPRS tersebut baru mencapai Rp12,36 triliun atau baru berkontribusi sebesar 2,52 persen dari total aset perbankan syariah Indonesia.

Pertumbuhan DPK BPRS bulan September 2019 dibandingkan bulan yang sama di tahun sebelumnya (yoy) tercatat sebesar 11,6 persen atau mencapai sekitar Rp8,63 triliun. Komposisi DPK yang berasal dari Deposito mendominasi hingga 65 persen atau mencapai sebesar Rp5,60 triliun. Sedangkan DPK yang berasal dari

Tabungan mencapai Rp3,03 triliun. Keduanya tumbuh yoy pada kisaran 11 persen.

Jumlah nasabah yang dilayani BPRS sebanyak 1.959.746 rekening yang didominasi 82 persen rekening Nasabah DPK yang tumbuh secara yoy 6,57 persen menjadi sebanyak 1.606.695 rekening. Sedangkan jumlah Nasabah Pembiayaan tumbuh secara yoy sebesar 10,58 persen atau menjadi sebesar 353.051 rekening dengan nilai pembiayaan tumbuh 16,11 persen atau mencapai sekitar Rp 10,08 triliun.

Selanjutnya, komposisi pembiayaan yang disalurkan BPRS masih didominasi oleh akad *Murabahah*, *Musyarakah*, dan Multijasa. Menariknya, nilai pembiayaan *Musyarakah* nyaris sama dengan nilai pembiayaan Multijasa yang berkisar Rp960 miliar, namun jumlah rekening nasabah pembiayaan Multijasa sebanyak 6 kali lipat dari rekening nasabah pembiayaan *Musyarakah*.

Sepanjang 2015 hingga September 2019, mayoritas semua jenis akad yang dimiliki BPRS menunjukkan tren pertumbuhan positif, baik *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna', Ijarah, Qardh,* dan Multijasa. Hanya pembiayaan *Salam* yang mulai 2017 tidak ada penyalurannya sama sekali. Dan mulai 2018, pembiayaan dengan akad Multijasa melampaui *Musyarakah*.

Berdasarkan sektor ekonomi, pembiayaan terbesar BPRS saat ini secara berturut-turut disalurkan kepada Sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel, kemudian Sektor Jasa Sosial/Masyarakat, Sektor Konstruksi, Sektor Jasa Dunia Usaha, lalu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Sarana Pertanian. Komposisi ini mengalami pergeseran. Mulai 2016, Sektor Jasa Sosial/Masyarakat menempati

peringkat kedua dan menggeser Sektor Jasa Dunia Usaha menjadi peringkat ketiga. Pada periode yang sama, Sektor Konstruksi juga menempati peringkat keempat dan menggeser Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Sarana Pertanian menjadi peringkat kelima. Sedangkan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Sarana Pertanian menjadi sektor yang paling stagnan pertumbuhannya.

Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS terbesar secara berturut-turut disalurkan pada kategori Konsumsi, Modal Kerja, dan kemudian Investasi. Penggunaan pembiayaan untuk Konsumsi mengalami pertumbuhan paling pesat. Berdasarkan golongan pembiayaan, mulai 2017, penyaluran untuk Selain UKM melampaui penyaluran untuk UKM meski keduanya sama-sama mengalami pertumbuhan positif.

Kekuatan dan Kelemahan

BPRS memiliki keunggulan komparatif yang menjadi kekuatan bagi lembaga ini. Keterbatasan jangkauan layanan cabang dan ATM Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS) memberi ruang bagi BPRS untuk melengkapinya. Secara alamiah, BPRS dibutuhkan untuk melayani daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh BUS/UUS. BPRS memang diharapkan dapat memberi layanan perbankan kepada masyarakat di daerah agar tujuan pembangunan nasional dapat merata ke seluruh lapisan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat secara nasional bisa terwujud.

Oleh karena itu, keberadaan BPRS sesungguhnya menjadi jawaban atas keterbatasan jangkauan layanan BUS/UUS untuk bisa

memberi pemerataan layanan perbankan syariah pada masyarakat luas. Namun demikian, BPRS juga memiliki kelemahan. Data statistik masih menunjukkan bahwa BPRS belum optimal dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari masih dominannya pembiayaan ke sektor konsumtif daripada sektor produktif seperti pembiayaan modal kerja dan investasi. Hal ini tentunya masih menyisakan harapan kepada BPRS yang seharusnya dapat lebih banyak membangun perekonomian di daerah sekitarnya melalui pembiayaan yang produktif.

Tidak bisa dipungkiri, dengan berbagai macam perkembangan industri jasa keuangan yang terjadi pada era 4.0 ini, BPRS sedang berada pada posisi daya saing yang cukup rendah di pasar. Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan permasalahan daya saing BPRS. **Pertama,** produk pembiayaan BPRS yang mahal sehingga kurang menarik minat masyarakat. Diantara penyebabnya adalah faktor sumber pendanaan BPRS yang memang juga sudah mahal. Mahalnya pendanaan ini disebabkan kebanyakan produk yang ditawarkan bank syariah masih *mimicking* bank konvensional, sedangkan pelayanan dan jangkauan masih belum setara sehingga kalah bersaing.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, layanan BPRS masih belum bisa melakukan standar layanan perbankan secara umum, seperti tidak bisa melayani lalu lintas pembayaran (kliring dan transfer uang), menyediakan fasilitas jaringan ATM, dan transaksi valuta asing (valas). Tidak bisa dipungkiri juga bahwa BPRS masih banyak menerima pendanaan dari pola *channeling* dari

BUS/UUS yang tentunya sudah merupakan sumber pendanaan yang mahal.

Kemudian, saat ini semakin banyaknya Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang memberikan berbagai kemudahan untuk menyimpan dan menginvestasikan dana masyarakat melalui teknologi *(fintech)* membuat persaingan semakin tinggi. Beberapa fakta inilah yang membuat BPRS, mau tidak mau, harus memberikan imbal hasil yang tinggi pada produk pendanaannya agar dapat menarik minat masyarakat untuk menempatkan dananya pada BPRS.

Kedua, skala usaha yang kecil menyebabkan inefisiensi proses bisnis serta keterbatasan modal menyebabkan kesulitan untuk mengembangkan infrastruktur. Hal ini berdampak pada masih banyaknya BPRS yang belum bisa memiliki infrastruktur, seperti teknologi informasi (TI), yang memadai serta masih banyaknya proses operasional bisnis yang dilakukan secara manual. Selain itu, keterbatasan modal juga menjadi masalah sulitnya BPRS untuk dapat berekspansi dan berinovasi dalam mengembangkan model bisnisnya, baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan. Ruang untuk rekrutmen dan pengembangan sumber daya insani (SDI) juga menjadi kendala sehingga berdampak pada kuantitas dan kualitas SDI BPRS yang masih sangat terbatas.

Ketiga, belum terlihatnya diferensiasi model bisnis pembiayaan pada BPRS dibanding BPR konvensional. Hal ini menyebabkan rendahnya daya jual produk pembiayaan BPRS ketika menawarkan pembiayaan yang lebih mahal dibandingkan bank konvensional. Beda halnya ketika BPRS dapat menawarkan

produk pembiayaan yang memiliki keunikan sehingga berbeda dengan bank konvensional. Persaingan harga akan menjadi tidak relevan lagi untuk didiskusikan ketika produk yang ditawarkan sendiri memang sudah berbeda.

Menjawab Tantangan

Dari sisi BPRS, setidaknya ada lima tantangan yang harus dijawab dari eksistensi saat ini. **Pertama,** BPRS harus menyasar pada segmen yang memang menjadi keahliannya. Hal ini akan membantu menurunkan *non performing financing* (NPF) jika BPRS memiliki kemampuan untuk menangani segmen yang menjadi keahliannya. Dalam konteks ini, termasuk BPRS juga harus membangun komunikasi dengan nasabah mikro yang umumnya minim pengetahuan tentang bank, membangun kedekatan emosional dengan nasabah, dan melakukan pendampingan, mulai dari proses pengajuan pembiayaan hingga usaha nasabah berkembang.

Kedua, BPRS harus bisa menjawab isu keterbatasan layanan, dana mahal, dan inefisiensi proses bisnis. Untuk menjawab masalah keterbatasan dalam melayani lalu lintas pembayaran, BPRS dapat bekerja sama dengan BUS/UUS sebagai *settlement bank* agar kemudian BPRS bisa melayani transfer antar bank dan menerbitkan kartu ATM.

Meski tidak dapat dimungkiri bahwa kerja sama BPRS dengan BUS/UUS kerap terhambat karena kendala keterbatasan modal dan biaya yang dimiliki BPRS untuk dapat bekerjasama, namun BPRS bisa secara berjamaah bekerjasama dengan salah satu BUS/UUS

agar dibuatkan *virtual account* yang bisa melayani transfer antar bank dan menerbitkan kartu ATM secara *co-branding*. Dengan demikian, biaya akan menjadi lebih murah dan antar BPRS bisa lebih meningkatkan daya saingnya dengan tersedianya layanan Lalu Lintas Giro (LLG) dan ATM. Bahkan, BPRS yang tergabung dalam program ini bisa saja membuat biaya transfer antar BPRS ini menjadi gratis.

Ketiga, BPRS harus semakin mengembangkan model bisnis. Selain agar bisa memberikan pelayanan perbankan secara umum, BPRS juga harus memiliki diferensiasi model bisnis dengan meluncurkan produk-produk khas syariah yang tidak bisa ditiru oleh bank konvensional. Beberapa produk pembiayaan pertanian dengan akad *salam*, produk pemesanan dengan akad *istishna'*, atau produk pembiayaan lainnya seharusnya bisa lebih melihat pada kebutuhan masyarakat sekitar. Terlebih, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Sarana Pertanian yang cenderung menjadi sumber daya yang paling banyak tersedia di daerah nyatanya belum digarap secara serius.

Lebih jauh lagi, diferensiasi ini akan lebih tampak ketika BPRS mampu memberikan pendampingan kepada nasabah mikro sekaligus menerapkan pola *business matching* antara debitur dan pihak-pihak yang ada di lingkungan sekitar BPRS. Hal ini dimaksudkan agar debitur dan nasabah BPRS mendapatkan manfaat lebih luas dari BPRS untuk pengembangan usaha mereka dan usaha-usaha di sekitar wilayah cakupan BPRS tersebut. Pengembangan model bisnis pembiayaan seperti ini diharapkan dapat memberi pembiayaan yang menjawab kebutuhan

pembangunan ekonomi masyarakat dengan berlandaskan prinsip syariah yang adil dan bermaslahat pada umat.

Keempat, BPRS harus semakin meningkatkan kapasitas TI untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Peningkatan kapasitas TI mungkin membutuhkan biaya modal yang tinggi sehingga cukup memberatkan BPRS untuk melakukannya. Hal ini bisa dijawab dengan pola sinergi/berjamaah/*ta'awun* sesama BPRS untuk kemudian membentuk *common platform* yang bisa memberikan sistem TI yang terstandarisasi sesuai dengan kebutuhan pada era 4.0 dan bisa digunakan semua BPRS di Indonesia. Metode *common platform* ini memungkinkan setiap BPRS menggunakan sistem TI secara bersama-sama dengan pola sewa tanpa harus mengeluarkan biaya investasi yang tinggi. Namun demikian, BPRS juga tetap harus bisa menjaga kerahasiaan data masing-masing bank yang harus diatur lebih lanjut dalam protokol keamanan TI tersebut.

Kelima, BPRS bersinergi dengan *fintech*. Sinergi ini bisa menjadi salah satu strategi utama yang dapat dilakukan BPRS guna meningkatkan daya saing di tengah berbagai macam perkembangan industri jasa keuangan yang sudah semakin mengarah pada digitalisasi. Tidak bisa dimungkiri, pengembangan produk dan layanan juga harus mempertimbangkan kemajuan teknologi sehingga dapat mempermudah proses bisnis, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pelayanan yang prima.

Keenam, kapasitas SDI BPRS harus semakin ditingkatkan. Otoritas terkait diharapkan dapat membantu BPRS untuk memberikan peningkatan kapasitas SDI melalui *workshop*

maupun pelatihan berupa pengembangan produk dan model bisnis yang lebih kompetitif dan dapat memberi manfaat pada masyarakat sekitar. Selain itu, pelatihan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan juga menjadi *concern* utama yang harus dikembangkan lebih lanjut oleh manajemen dan pegawai BPRS agar kemudian BPRS bisa beroperasi dengan lebih efisien, profesional, dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian.

Ketujuh, hal terakhir yang seharusnya menjadi prinsip dasar yang harus dimiliki oleh setiap Lembaga Jasa Keuangan Syariah (LJKS), BPRS harus menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah dalam budaya kerja perusahaannya. Prinsip syariah tidak hanya diterapkan dalam konteks pengembangan produk saja, tetapi juga harus terinternalisasi dalam proses bisnis serta perilaku manajemen dan pegawainya sehari-hari. Peningkatan kapasitas akidah, muamalah, dan akhlak setiap personil BPRS harus menjadi prioritas utama. Semakin kuat akidah personel BPRS, maka Allah akan menolong BPRS untuk meningkatkan kredibilitasnya dalam menerapkan prinsip syariah, berkomitmen dalam menjaga integritas, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui adab dan akhlak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Insya Allah.

Menuju BPRS yang Kompetitif, Stabil dan Kontributif

Membantu BPRS sejatinya adalah membantu UKM. Membantu UKM sejatinya menolong rumah tangga masyarakat golongan kecil menengah. Pada gilirannya, hal ini juga membantu mengurangi

kemiskinan. Terlebih, UKM saat ini menjadi harapan pemerintah untuk menolong perekonomian dengan membantu perbaikan defisit transaksi berjalan melalui peningkatan diversifikasi produk yang bisa diekspor ke luar negeri.

Dukungan otoritas untuk perbaikan BPRS semakin besar karena BPRS adalah cermin perkembangan ekonomi daerah. Dukungan ini diwujudkan dalam bentuk penyempurnaan berbagai regulasi yang dilakukan secara bertahap serta dengan menyusun sejumlah program transformasi. Dimulai dari pemetaan secara komperehensif, yakni memetakan ulang berbagai hal yang terkait dengan BPRS yang menjadi kendala, terutama dari sisi kinerja keuangan, kondisi SDI, dan kondisi sarana dan prasarana. Kemudian, mendorong perluasan jangkauan BPRS terhadap nasabah yang potensial dan meningkatkan kemitraan antara BPRS dengan BUS/UUS, perusahaan *fintech*, dan dengan perusahaan penyedia jasa layanan digital.

Menyambut 2020, bersamaan dengan era suku bunga rendah, BPRS diharapkan dapat juga menurunkan *cost of fund* agar pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah menjadi lebih murah melalui sejumlah strategi menjawab tantangan. BPRS harus mampu beradaptasi agar dapat bertahan menghadapi perubahan. Transformasi BPRS tidak hanya menyangkut produk atau pun layanan, tetapi juga tata kelola dan prinsip syariah yang terinternalisasi secara *kaffah*. Dengan pasar yang masih sangat luas di daerah, juga faktor kedekatan dengan nasabah di tingkat kecamatan dan pelaku UKM, BPRS masih memiliki peluang untuk

meningkatkan skala ekonomisnya. Kuncinya adalah melakukan adaptasi, inovasi, kolaborasi, dan sinergi untuk menuju BPRS yang kompetitif, stabil, dan kontributif. *Wallahu a'lam bish showaab.*

2020

56
ANTARA ODISHA, JEMBER, DAN EKONOMI SYARIAH[53]

Dear Dr. Musari,

Namaskar! I am extremely humbled to get your e-mail. Thank you for your interest in nanofinance. The concept truly helps the most under privileged women of the society. Aamara Biswas (Our Trust) organization was started to implement the nanofinance concept in the state of Odisha, India. Currently, we are working in more than 100 villages and helping about 15,000 women. I live in US and come to Odisha every year from 1997 for 3 to 4 months to work for the women of Odisha. I have started another organization, Our Biswas (Our Belief In the Services of Women of All Societies) in US to support/ promote nanofinance concept in other parts of the world. Currently, I am in Odisha until March 18. Please let me know if I can be any help. Looking forward to hearing from you.

53 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 17 Januari 2020.

Regards,
Joyasree (Ranu) Mahanti

Demikian sebagian pesan balasan yang saya terima dari pendiri lembaga Aamara Biswas dan Our Biswas tepat 1 Januari 2020. Senangnya mendapat balasan dari beliau hampir mendekati senang saya ketika mendapat pesan dari Prof. Murat Cizakca, seorang sejarawan dari universitas di Turki yang juga pakar wakaf. Buat saya, kiprah Mrs. Joyasree Mahanti menjadi inspirasi untuk membantu kaum perempuan miskin melalui *nanofinance* yang juga menjadi konsen saya dalam tiga tahun terakhir.

Nanofinance memang belum sepopuler *microfinance* yang hingga hari ini diakui sebagai alat yang efektif untuk pengentasan kemiskinan. Namun demikian, praktek *nanofinance* sudah banyak dilakukan di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Realitas di lapangan menunjukkan *microfinance* tidak selalu ampuh membantu masyarakat miskin. Hal ini tercermin di antaranya dengan masih maraknya praktek rentenir di sekitar kita.

Odisha

Odisha yang dikenal juga dengan sebutan Orissa berada di bagian timur India. Sebagai salah satu negara bagian termiskin di India, 70 persen penduduk Odisha tinggal di pedesaan. Odisha memiliki kondisi alam yang cukup berat. Gelombang panas mematikan kerap menyerang wilayah ini. Termasuk hantaman petir yang beberapa kali memakan banyak korban.

Odisha masih memiliki tradisi kuat pada wilayah-wilayah suku asli. Jumlah penduduk suku asli di wilayah ini mencapai 23 persen dari total jumlah penduduk India. Ibukotanya Bhubaneswar dikenal sebagai kota seribu candi. Secara historis, wilayah ini memang menjadi salah satu pusat perkembangan agama Hindu di India. Siapa sangka, Odisha ternyata juga menyimpan sejarah rute perjalanan kuno yang menjadi saksi interaksi maritim yang kuat antara India dan Indonesia dimasa lalu.

Sejumlah studi menunjukkan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat di Odisha memiliki andil menjadikan perempuan sebagai kelompok termarjinalkan di sana. Diskriminasi terhadap perempuan terjadi pada aspek pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Banyak momen memilukan yang disaksikan Mrs. Joyasree Mahanti terhadap perempuan miskin di Odisha, terutama yang disebabkan oleh rentenir. Inilah yang mendorong dirinya menggagas *„Women Helping Women through Nanofinance"* melalui Aamara Biswas di Odisha pada 2007 dan Our Biswas di Amerika untuk mendukung program-program *nanofinance* di India dan belahan bumi lainnya.

Pada 2013, sebuah media menuliskan Odisha termasuk negara bagian India yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan yang tajam dibandingkan dengan negara bagian termiskin lainnya. Termasuk terjadi penurunan tajam di daerah pedesaan. Jika media itu benar, saya meyakini Aamara Biswas memiliki sumbangsih didalamnya.

Nanofinance dan Ekonomi Syariah

Praktek *nanofinance* Aamara Biswas di Odisha sebenarnya selaras dengan praktek Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) di Jember yang kerap disebut Bank Keluarga Miskin atau Bank Gakin. Bank Gakin memberi pinjaman mulai dari Rp50 ribu hingga Rp1 juta.

Kehadiran Bank Gakin sejatinya adalah upaya pemerintah daerah mengatasi masalah sosial kemasyarakatan, dalam hal ini memerangi praktek rente yang bunganya dapat mencapai 30 persen per minggu. Melalui Bank Gakin, masyarakat bawah dapat mengakses pinjaman tanpa agunan dengan prosedur yang mudah dan cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesaknya, terutama dalam memenuhi modal usaha mikronya.

Keistimewaan praktek *nanofinance* Aamara Biswas yang layak diadopsi oleh Bank Gakin dan pelaku *nanofinance* lainnya adalah pinjaman yang bebas bunga. Bahkan, tidak perlu meminta bagi hasil. Ini sejalan dengan akad *qard* atau *qardhul hassan dalam* ekonomi syariah. Ibnu Majah meriwayatkan, Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, *"Aku melihat pada waktu malam di-isra'kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta, meminta sesuatu padahal ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan."*

Ya, *nanofinance* dengan *qardhul hassan* mungkin bisa menjadi solusi untuk membantu masyarakat miskin dari jeratan rentenir. Inilah titik pertemuan nanofinance dengan

ekonomi syariah *Nanofinance* hadir bukan untuk menyaingi *microfinance.* Nanofinance melengkapi *microfinance* dengan memberi pinjaman bernominal lebih kecil sesuai kebutuhan dan kemampuan peminjam. Penerima manfaat *nanofinance* adalah masyarakat miskin. Untuk itu, pembiayaan kategori ini harus meniadakan bunga atau beban administrasi, bahkan bagi hasil, karena merupakan pinjaman kebajikan *(qardh)*. *Wallahua'lam bish showab.*

57
QRIS, BEHAVIORAL ECONOMICS, DAN LITERASI KEUANGAN DIGITAL[54]

Bank Indonesia telah resmi memberlakukan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) pada 1 Januari 2020. QRIS adalah QR *code* berstandar nasional yang berfungsi sebagai alat pembayaran. QRIS adalah jawaban Bank Indonesia atas perkembangan inovasi teknologi dan maraknya kanal pembayaran berbasis QR *code*.

Seiring kian beragamnya alternatif sistem pembayaran digital, hal yang tidak boleh diabaikan oleh Bank Indonesia adalah meningkatkan literasi keuangan digital. Berlakunya QRIS dapat menjadi momentum untuk digiatkannya literasi keuangan digital. Literasi ini bukan sekedar agar masyarakat melek tentang alat-alat pembayaran nontunai digital semata, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi era keuangan digital, termasuk mengelola dompet digital dan menjaga keamanan data serta perangkat keuangan digital.

54 Dimuat Banjarmasin Post, Tribun Forum, 11 Februari 2020.

Melihat perkembangan *peer-to-peer* (P2P) *lending* berbasis teknologi digital yang memakan sejumlah korban, maka sistem pembayaran digital perlu pula mengantisipasinya. Merujuk *behavioral economics,* manusia dapat tidak rasional dan kerap memasukkan unsur emosi dalam mengambil keputusan ekonomi. Sementara, berbagai kemudahan dalam sistem keuangan digital berpeluang mengubah atau menggeser perilaku penggunanya dengan cepat. Pertanyaannya, perilaku tersebut akan mengarah pada perilaku seperti apa?

Behavioral Economics

Behavioral economics adalah cabang baru dalam ilmu ekonomi yang membantu menjelaskan mengapa pengambilan keputusan ekonomi dapat saja dikacaukan oleh bias atau kesalahan berpikir yang berulang karena terperangkap kekeliruan atau tertipu oleh ilusi. *Behavioral economics* menunjukkan bahwa manusia nyatanya tidak selalu rasional dan objektif.

Dalam cabang ilmu ekonomi ini dikenal *herd behavior.* Yaitu, perilaku mengambil keputusan yang didasarkan atas perilaku orang lain. Manusia ternyata punya kecenderungan untuk bersikap latah. Pilihan-pilihan individu terkadang diambil karena meniru individu lain. Hal ini pula yang mungkin dapat menjelaskan mengapa tingkat literasi keuangan di Indonesia jauh lebih rendah daripada tingkat inklusi keuangan.

Selain itu, terdapat *survivor bias*. Yaitu, perilaku mengambil keputusan yang didasarkan atas data yang tidak valid. Kesimpulan yang diambil merujuk pada kepalsuan statistik sehingga

menggeneralisirnya. Hal ini juga yang mungkin dapat menjelaskan mengapa investasi bodong atau P2P *lending* ilegal tetap dapat memikat masyarakat berdasarkan testimoni satu atau dua orang meski korban yang berjatuhan jauh lebih banyak.

Terkait dengan sistem pembayaran digital, masyarakat harus diedukasi untuk dapat menentukan pilihan alat pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter diri. Pada prinsipnya, semua alternatif alat pembayaran bertujuan untuk memudahkan masyarakat bertransaksi keuangan. Namun, ketidaktepatan menentukan alat pembayaran justru dapat mempersulit diri, bahkan dapat menimbulkan ketidakbaikan bagi penggunanya.

Penggunaan alat pembayaran digital terkadang bukan berlatar faktor kebutuhan atau kesadaran karena pemahaman yang memadai, melainkan *herd behavior* atau *survivor bias* sehingga cukup iming-iming promo atau *cashback* membuat penggunanya langsung mengambil keputusan bertransaksi. Jelas, berbagai kemudahan alat pembayaran digital dengan sejumlah alternatifnya bukan tidak mengandung risiko. Salah satunya adalah kemungkinan memanfaatkan pembiayaan berbasis teknologi digital untuk mengisi dompet digital.

Ya, aplikasi penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) kerap bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyediakan dana talangan. Pembayaran dengan menggunakan dana talangan ini sebenarnya adalah kredit. Pengguna alat pembayaran digital yang memanfaatkan pihak ketiga ini jika tidak diikuti oleh rasionalitas dan objektifitas dapat terjerat pada jebakan utang digital.

Behavioral economics membantu mengingatkan bahwa pesan otoritas terhadap QRIS dan layanan non tunai digital tetap memiliki peluang untuk diterjemahkan berbeda oleh sebagian masyarakat. Secara prinsip, transaksi tunai dan non tunai adalah sama-sama melakukan pembayaran, hanya prakteknya yang berbeda. Meski hal ini sangat mudah dipahami, namun secara psikologis terdapat perbedaan ketika melakukan pembayaran secara tunai dan non tunai berbasis digital. Hal ini yang menjadikan kebijakan tidak boleh bekerja sendiri, tetapi juga harus bersinergi dengan para pemangku kepentingan berupaya meningkatkan literasi.

Literasi Keuangan Digital

Kehadiran teknologi digital terus menawarkan alternatif baru yang semakin efisien dalam transaksi pembayaran. Layanannya cenderung lebih murah, lebih praktis, lebih transparan, mengurangi friksi transaksi, dan konektivitas yang lebih luas. Namun, dalam konteks Indonesia, kehadiran layanan non tunai digital bersifat opsional meski ke depan terus didorong untuk membesar porsinya karena kebermanfaatannya yang lebih besar.

Namun, lagi-lagi *behavioral economics* mengingatkan bahwa pesan layanan non tunai digital dapat diterjemahkan berbeda oleh sebagian masyarakat. Selain dimungkinkannya terjadi pengambilan keputusan karena *herd behavior* atau *survivor bias*, juga implikasi ketika terjadi kerugian akan menimbulkan *loss aversion* sehingga mengalami keraguan atau ketakutan untuk mengambil keputusan strategis ke depannya.

Jelas, teknologi pembayaran digital berpotensi menimbulkan fragmentasi baru pada industri sistem pembayaran. Cara pembayaran ini mendorong efisiensi perekonomian, memajukan usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan mempercepat keuangan inklusif sehingga akseptasi pembayaran non tunai nasional yang lebih efisien akan tercapai.

Tetapi, literasi keuangan digital tidak boleh diabaikan. Jika masyarakat paham, bijak, dan dapat mengelola alat pembayaran digital dan keuangan digital, tentu manfaat yang akan banyak diperoleh. Namun, bila sebaliknya yang terjadi, maka akan dengan mudah justru terjebak pada perangkap keuangan digital. *Wallahua'lam bish showab.*

58
ASURANSI SYARIAH MENJELANG SPIN-OFF 2024, PELUANG DAN TANTANGAN[55]

Mencuatnya kasus gagal bayar yang dialami perusahaan asuransi berpelat merah berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, termasuk Asuransi Syariah. Untuk itu, pemerintah berencana mengubah sejumlah undang-undang (UU) di sektor keuangan, termasuk aturan pada bidang asuransi. Hal ini menjadi hikmah bagi Asuransi Syariah. Pasalnya, meski sudah terdapat sejumlah regulasi yang memadai, namun keberadaannya masih belum cukup untuk terus mendorong pertumbuhan industri asuransi. Terlebih bagi Asuransi Syariah yang membutuhkan penguatan regulasi dan kelembagaan menjelang spin-off *2024.*

55 Ditulis bersama Nina Mudrikah Hariyati, Sharia Strategic and Governance Head PT Allianz Life Indonesia, Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Pengurus Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dan Islamic Insurance Society (IIS). Dimuat INSIGHT, Buletin Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Edisi 9, Februari 2020.

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 87 menyebutkan perusahaan perasuransian yang menjalankan sebagian kegiatan usaha dengan prinsip syariah diwajibkan untuk melakukan *spin-off* tepat 10 tahun setelah UU tersebut ditetapkan atau jika dana *tabarru'* dan dana investasi peserta Unit Syariah telah mencapai paling sedikit 50 persen dari total nilai dana asuransi, dana *tabarru'*, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya. Artinya, mulai 2024, sudah tidak ada lagi Unit Syariah di Indonesia. Semua Unit Syariah harus bertransformasi menjadi Perusahaan Asurasi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah atau mentransfer portofolio syariahnya pada perusahaan perasuransian syariah lain dan mengembalikan ijin Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .

Spin-off bagi perusahaan perasuransian bukan hal mudah, terutama bagi perusahaan yang memiliki Unit Syariah kecil atau yang perusahaan induknya bukan perusahaan besar. Pasalnya, perusahaan harus melakukan penambahan modal terhadap perusahaan perasuransian syariah baru hasil *spin-off*. Merujuk Peraturan OJK (POJK) Nomor 67 Tahun 2016, perusahaan asuransi syariah baru harus memiliki modal disetor sejumlah Rp100 miliar dan Perusahaan Reasuransi Syariah sejumlah Rp175 miliar pada saat pendirian. Ekuitas perusahaan asuransi syariah hasil *spin-off* setelah menerima pengalihan portofolio dari unit syariah minimum Rp50 miliar dan Perusahaan reasuransi syariah minimum Rp100 miliar. Belum lagi ketentuan lain yang harus dipenuhi

sebagai suatu perusahaan yang berdiri sendiri atau terpisah dari perusahaan induknya.

Meski *spin-off* tampaknya menyulitkan dan berpotensi memperamping industri perasuransian syariah, namun aturan ini sejatinya membuka jalan bagi penguatan industri melalui penambahan modal dan pengalihan portofolio yang dapat meningkatkan *size* perusahaan. Hampir 70 persen perusahaan asuransi syariah di Indonesia memiliki modal <Rp50 miliar. Dengan *spin-off,* perusahaan asuransi syariah ke depan diharapkan dapat lebih mandiri dan lebih fokus dalam memperluas bisnis dan menjalankan operasionalnya.

Lalu, bagaimana sebenarnya kinerja industri asuransi syariah saat ini? Apa dasar dan legitimasi perlu dihadirkannya Asuransi Syariah? Bagaimana peluang dan tantangan industri asuransi syariah menjelang berlakunya *spin-off*? Tulisan ini akan mencoba menguraikannya.

Kinerja

Pada Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah di Indonesia, pangsa pasar industri Asuransi Syariah menguasai hingga 58,8 persen sekaligus menempati peringkat pertama. Disusul Lembaga Pembiayaan Syariah menempati peringkat kedua dengan pangsa sebesar 32,1 persen.

Statistik IKNB Syariah per November 2019 menunjukkan aset Perusahaan asuransi syariah telah menembus Rp44.751 miliar dengan kontribusi asuransi jiwa syariah sebesar 82,6 persen, asuransi umum syariah 13 persen, dan sisanya reasuransi syariah

4,4 persen. Berdasarkan sumber data yang sama, diketahui investasi asuransi syariah sebagian besar disalurkan pada pasar modal, terutama pada saham syariah, sukuk negara, dan sukuk korporasi.

Nilai investasi asuransi syariah pada pasar modal mencapai 81,4 persen yang didominasi saham syariah hingga 45,2 persen dan sukuk negara sebesar 20,6 persen. Sedangkan nilai investasi asuransi syariah pada perbankan syariah sebesar 17,9 persen dan seluruhnya dalam bentuk deposito. Investasi asuransi syariah lainnya sebesar 0,7 persen tersalurkan di antaranya pada emas murni, penyertaan langsung atau bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk investasi.

Merujuk data Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) per Juli 2019, terdapat 63 Perusahaan Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah maupun Unit Syariah dari Asuransi dan Reasuransi di Indonesia. Data tersebut juga menunjukkan masih ada 50 Unit Syariah yang harus melakukan *spin-off* dalam kurun waktu 4 tahun ke depan. Tentu saja ini merupakan pekerjaan rumah yang cukup besar bagi industri asuransi syariah.

Dasar dan Legitimasi

Pertanyaan atau perdebatan apakah Asuransi Syariah bertentangan dengan ajaran Islam, maka hal ini sejatinya sudah selesai dengan hadirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa ini memang hadir untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat

muslim tentang asuransi, termasuk untuk meluruskan pandangan tentang asuransi syariah yang dinilai tidak berbeda dengan asuransi konvensional.

Merujuk Fatwa DSN-MUI Nomor 21 tersebut, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Adapun akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), riba, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Fatwa ini menyetarakan asuransi syariah dengan *ta'min* (melindungi), takaful (saling menjamin) atau *tadhamun* (saling menanggung).

Perintah Allah dalam QS. al-Hasyr [59]: 18 menjadi rujukan pertama dalam Fatwa DSN-MUI yang menimbang perlunya asuransi syariah, *"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* DSN-MUI menilai bahwa menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, maka perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini. Salah satu upaya untuk memenuhi hal tersebut adalah melalui asuransi.

Peluang Asuransi Syariah

Meski banyak yang harus disiapkan, namun sejatinya *spin-off* akan mendorong industri asuransi syariah menjadi lebih fokus, sehat, dan mandiri serta dengan sendirinya akan meningkatkan kapasitas industri asuransi syariah. Menjelang berlakunya *spin-off,* sedikitnya terdapat lima peluang berarti bagi industri asuransi syariah.

Pertama, potensi pasar syariah yang besar. Hal ini didukung oleh dua faktor, yaitu jumlah penduduk muslim yang besar dan *market share* Asuransi Syariah yang masih kecil. Dengan jumlah penduduk muslim mencapai 85 persen dari populasi atau sekitar 207 juta orang, maka Indonesia merupakan pasar asuransi syariah yang masih sangat luas. Potensi bisnis yang prospektif ini yang harus digarap oleh perusahaan asuransi syariah.

Selain itu, merujuk data AASI per Juli 2019, *market share* asuransi syariah masih berada pada kisaran 5 persen. Hal ini juga mengindikasikan masih besarnya peluang pasar asuransi syariah.

Kedua, dukungan pemerintah/regulator. Banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah/regulator untuk memajukan industri keuangan syariah, termasuk asuransi syariah. Di antaranya adalah pembentukan lembaga seperti Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sebagai komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kehadiran KNKS diharapkan dapat menjadi katalisator dalam upaya mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan

ekonomi syariah dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi nasional.

Bagi asuransi syariah, juga sudah banyak regulasi yang mengatur agar industri ini dapat berkembang baik dengan tetap memenuhi aspek kehati-hatian sehingga tercipta praktik industri yang sehat yang dapat melindungi penyedia jasa asuransi maupun nasabah. Yang terbaru adalah disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian. PP ini memberi kepastian hukum bagi asuransi patungan *(joint venture)* mengenai aspek permodalan (kepemilikan asing) terkait dengan *spin-off.*

Peraturan tersebut menyebutkan bahwa berkaitan dengan *spin-off* unit syariah menjadi perusahaan asuransi syariah, maka batasan kepemilikan asing pada perusahaan asuransi syariah mengikuti batasan kepemilikan asing perusahaan asuransi (induknya). Hal ini mengecualikan dari ketentuan kepemilikan asing maksimum 80 persen dalam pengaturan sebelumnya.

Ketiga, penetrasi asuransi syariah masih rendah. Dibandingkan *gross domestic product* (GDP), merujuk Statistik OJK November 2019, penetrasi asuransi syariah masih pada kisaran 0,1 persen. Angka ini sangat rendah, namun juga mengindikasikan peluang yang sangat besar untuk dikembangkan dengan sinergi mensosialisasikan asuransi syariah kepada masyarakat

Keempat, meningkatnya kelas menengah**.** Peningkatan kelas menengah yang menjadi target asuransi syariah juga merupakan peluang yang harus digarap dengan baik oleh asuransi syariah.

Industri asuransi syariah harus menyiapkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan segmen ini. Untuk itu, perusahaan asuransi syariah harus memahami karakteristik kelas menengah, terutama yang muslim, untuk dapat menyediakan produk yang diminati.

Kelima, gaya hidup halal**.** Gaya hidup halal kian marak digaungkan. Penyedia produk halal juga semakin banyak dan beragam. Dari mulai makanan, *fashion*, wisata hingga produk keuangan yang halal. Gaya hidup halal belakangan bahkan menjadi tren pada anak muda Indonesia dan masyarakat saat ini. Hal ini tentu menguntungkan industri keuangan syariah, termasuk asuransi syariah, yang harus segera menyambut pasar ini dengan baik

Tantangan yang Dihadapi

Setidaknya terdapat 10 tantangan yang dihadapi industri Asuransi Syariah di Indonesia menjelang *spin-off* 2024. **Pertama**, menyiapkan sumber daya insani (SDI) yang unggul dan profesional termasuk profesi-profesi pendukungnya seperti broker asuransi syariah, agen, dan *adjuster.* Tidak bisa dipungkiri, bertambahnya perusahaan asuransi syariah di Indonesia belum diikuti dengan ketersediaan SDI, baik secara kuantitas maupun kualitas. Ini juga yang menyebabkan produk dan layanan Asuransi Syariah kadang masih tertinggal dari konvensional. Melalui *spin-off,* maka Unit Syariah yang akan menjadi perusahaan terpisah dari induknya memerlukan manajemen (direksi, komisaris, dewan pengawas

syariah/DPS), karyawan maupun tenaga pemasar yang cukup banyak untuk mendukung operasionalnya.

Kedua, mengatasi minimnya modal atau dana. Harus diakui, salah satu penyebab relatif rendahnya pasar Asuransi Syariah adalah minimnya ketersediaan dana untuk melakukan promosi, sosialisasi, dan edukasi bagi masyarakat. Ditambah lagi dengan persyaratan modal bagi perusahaan asuransi syariah untuk meningkatkan *size* bisnis dari unit syariah menjadi perusahaan asuransi syariah.

Ketiga, menyediakan inovasi produk dan layanan yang memberi nilai tambah atas manfaat dan keterjangkauan untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama yang bersumber dari akad atau konsep syariah. Hal yang utama bagi penyedia produk asuransi syariah adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bersaing dengan produk konvensional, dan tentu saja memenuhi prinsip-prinsip syariah. Tidak hanya itu, dengan perkembangan teknologi saat ini, asuransi syariah juga dituntut memberikan layanan yang mudah, *simple,* dan *digital based.*

Keempat, literasi asuransi syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Saat ini pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah masih rendah. Untuk itu, diperlukan sosialisasi, promosi, dan edukasi kepada masyarakat. Namun, hal ini kerap terbentur dana. Maka, sinergi antar lembaga asuransi syariah menjadi jalan keluar. Jelas, meningkatkan literasi masyarakat menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan inklusi asuransi syariah sehingga masyarakat paham bahwa industri

keuangan sudah menyediakan solusi pengelolaan risiko yang sesuai syariah.

Kelima, menghadapi pasar bebas Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang berimplikasi dibukanya cabang-cabang baru oleh Perusahaan Asuransi asing di Indonesia dengan membawa produk-produk digital yang kedepan akan semakin marak. Padahal, industri asuransi syariah di Indonesia masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur jaringan, kantor cabang maupun teknologi untuk menjangkau nasabah asuransi.

Keenam, mendorong penguatan regulasi yang menjadi bukti dukungan pemerintah untuk membangun industri asuransi syariah yang kuat. Termasuk mendorong UU tentang Asuransi Syariah sebagaimana UU Perbankan Syariah dan UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), juga penguatan Fatwa DSN-MUI yang diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia.

Ketujuh, mendorong insentif agar industri asuransi syariah dapat berekspansi dan berkembang lebih cepat. Insentif ini terutama terkait dengan beban iuran OJK yang diharapkan tidak dihitung berdasarkan total aset asuransi syariah dan aturan perpajakan yang mewajibkan pembayaran pajak ditambah dengan kewajiban pembayaran zakat sebesar 2,5 persen dari total laba yang diperoleh. Terlebih adanya keinginan agar industri asuransi ikut mendorong tersedianya sumber dana pembiayaan jangka panjang, termasuk untuk infrastruktur. Maka, insentif dapat diberikan kepada perusahaan maupun nasabah melalui

pemotongan pajak atas kupon surat utang dan pemotongan pajak penghasilan (PPh).

Kedelapan, menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi induk *(shared service)*. Unit Syariah yang telah bertransformasi menjadi Perusahaan asuransi syariah pasca *spin-off* diharapkan tetap bekerjasama dengan perusahaan induk. Hal ini penting untuk menjamin standarisasi layanan bagi nasabah asuransi syariah antara sebelum dan sesudah *spin-off.* Terutama dalam hal *information technology* (IT) yang membutuhkan investasi sangat besar jika membangun dari awal.

Kesembilan, mencegah kebocoran objek pertanggungan dari bisnis syariah ke pertanggungan asuransi konvensional. Hal ini terkait dengan komitmen perusahaan asuransi dalam mengembang-kan industri asuransi syariah. Tidak bisa dipungkiri, kerap kali objek pertanggungan bisnis syariah diproteksi oleh asuransi konvensional dengan alasan kapasitas, ketersediaan produk maupun insentif bagi tenaga penjual.

Kesepuluh, mendorong segera dibentuknya lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan polis sebagaimana amanat UU Perasuransian. Kasus gagal bayar dari perusahaan berpelat merah menjadi peringatan pentingnya *risk-based supervision* untuk mitigasi sehingga dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan secara cepat dan tepat sebelum berdampak sistemik.

Namun demikian, belajar dari perusahaan pelat merah yang tidak hanya diawasi oleh OJK, tetapi juga oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dapat mengalami gagal bayar setelah

dua tahun berturut-turut memiliki *risk based capital* (RBC) -282 persen pada 2018 dan kemudian menembus -805 persen per 30 September 2019, mengindikasikan pentingnya pengawasan yang lebih intensif. Juga, perlunya dihadirkan lembaga penjamin polis untuk memastikan adanya perlindungan konsumen dari gagal bayar asuransi. Untuk itu, dibutuhkan segera kajian lebih lanjut tentang aspek kesyariahan dari penjaminan polis. Hal ini mengingat akad-akad asuransi syariah sangat spesifik dan mengusung konsep *ta'awun* (saling menolong) pada sesama peserta asuransi syariah. *Wallahu a'lam bish showab.*

59
MEWASPADAI PROPERTI SYARIAH BODONG[56]

"Bu Is, tolong telepon saya diangkat …"

Demikian Pak M. Fathorrazi, Ketua Program Studi (Kaprodi) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember (Unej) yang juga Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Jawa Timur, memberi pesan pada grup media sosial sekitar pukul 9 malam. *Handphone* saya memang hampir selalu dalam keadaan *silent*. Juga hampir selalu dalam keadaan *off* saat di rumah. Namun, hari itu, saya menjanjikan untuk aktif 24 jam agar teman-teman IAEI dan media dapat menghubungi saya bila membutuhkan data atau informasi terkait siaran pers yang kami sebar luaskan.

Selang setengah jam kemudian, usai membaca pesan, saya menghubungi Pak Rozi, demikian beliau kerap dipanggil. Pak Rozi mengatakan bahwa *handphone* beliau tidak berhenti berdering

---

56 Dimuat Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 6 Maret 2020.

sejak siang hingga malam lantaran nama beliau dijadikan salah satu *personal in contact* (PIC) pada siaran pers IAEI Jawa Timur tentang "Sikap dan Rekomendasi IAEI Jawa Timur terhadap Kasus Properti Syariah". Mereka yang menghubungi beliau, ada yang mendukung, juga ada yang keberatan. Tidak tanggung-tanggung, yang menghubungi Pak Rozi bukan saja pihak-pihak yang berada di wilayah Jawa Timur, tapi juga yang berada di sekitaran Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).

Ya, sebagaimana diduga, siaran pers yang dirumuskan dan disepakati dalam *focus group discussion* (FGD) pengurus DPW dan komisariat-komisariat IAEI Jawa Timur hari itu mengandung konsekuensi. Syukurlah, dua hari berselang, Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur menyelenggarakan Dialog Properti Syariah dengan mengundang sejumlah media. Berikutnya, Pimpinan Wilayah (PW) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Timur juga mengirimkan surat kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur dan REI Jawa Timur tentang sikap dan rekomendasi terkait kasus properti syariah. Apa yang diuraikan oleh REI Jawa Timur dan MES Jawa Timur senada serta menguatkan sikap dan rekomendasi IAEI Jawa Timur.

Kasus Properti Syariah

Apa yang dilakukan IAEI Jawa Timur, REI Jawa Timur, dan MES Jawa Timur adalah respon atas bermunculannya sejumlah kasus penipuan properti syariah di sekitaran Jabodetabek yang kemudian meluas hingga ke Jawa Timur. Dalam rangka menyikapi keresahan masyarakat atas pemberitaan tersebut,

juga mempertimbangkan maraknya penawaran properti syariah di berbagai wilayah Jawa Timur, maka IAEI Jawa Timur merasa perlu hadir untuk menyampaikan sikap dan rekomendasi guna meredakan dan meluruskan persoalan tersebut.

Industri Properti Syariah memang menggeliat dalam lima tahun terakhir. Hingga pada penghujung 2019, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya mengungkap dua kasus penipuan penjualan rumah syariah. Sebagaimana pemberitaan, bulan November 2019, kasus pertama menipu 270 orang dengan total kerugian mencapai Rp 23 miliar. Perumahan syariah dijanjikan akan dibangun di lima lokasi, yakni dua perumahan di kawasan Bogor, satu di Bekasi, satu di Bandung, dan satu perumahan di Lampung. Bulan Desember 2019, kasus kedua menipu 3.680 korban dengan total kerugian mencapai Rp40 miliar. Perumahan syariah pada kasus kedua ini rencananya akan dibangun di daerah Tangerang Selatan dan Banten.

Membuka 2020, penggiat ekonomi syariah di Jawa Timur dikejutkan kembali oleh kasus penipuan properti syariah di Sidoarjo. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya mengungkap status lahan yang dipasarkan untuk pembangunan perumahan merupakan milik orang lain yang disewa oleh pelaku penipuan. Bahkan, sebagian lahan tersebut masih berupa rawa, sementara sisanya sudah dilapisi *paving block*.

Hasil FGD IAEI Jawa Timur menemukan tindak promosi yang banyak digunakan oleh *developer* properti syariah di antaranya adalah murah, berkonsep syariah, bebas riba, pembelian angsuran, tidak ada bunga kredit, tidak melibatkan bank, tidak ada

BI Checking, tidak ada denda keterlambatan dan tidak mengenal sita. Ya, umumnya operasi properti syariah tidak melibatkan pihak ketiga, baik itu pemerintah maupun lembaga keuangan. *Developer* properti syariah tidak memakai modal dari perbankan. Mereka mengelola *cash flow* dari dana *booking fee*, uang muka, angsuran, dan sebagainya untuk membangun rumah. Mereka bekerjasama dengan pemilik lahan dan menjanjikan bagi hasil dari keuntungan penjualan rumah. Proses jual beli langsung dilakukan antara pembeli dengan *developer*.

Meningkatkan Literasi

IAEI Jawa Timur menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi terkait ekonomi dan bisnis syariah, termasuk didalamnya adalah perumahan atau properti syariah. Masyarakat ke depan diharapkan memperhatikan reputasi dan legalitas *developer* sebagai bentuk kehati-hatian meski produk yang ditawarkan berlabel syariah.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan juga ikut hadir untuk meningkatkan literasi investasi terkait properti syariah kepada masyarakat dan mendorong bank syariah untuk berpartisipasi dalam pembiayaan properti syariah, baik komersil dan bersubsidi. Yang terpenting, OJK hadir dalam rangka perlindungan konsumen sesuai amanat Undang-Undang (UU) OJK.

Kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) diharapkan untuk menerbitkan fatwa DSN-MUI tentang perumahan atau properti syariah dan investasi yang terkait

dengannya. Ke depan, diharapkan DSN-MUI juga menerbitkan sertifikasi bagi *developer* dan agen perumahan syariah serta mewajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi *developer* perumahan atau properti syariah.

Kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), diharapkan pula ikut mengedukasi masyarakat tentang prosedur pembelian properti syariah, menetapkan persyaratan kualifikasi bagi *developer* properti syariah serta mempublikasi *developer* yang legal.

Ya, pesatnya perkembangan ekonomi syariah membuka peluang untuk terjadinya *moral hazard.* Terlebih, gaya hidup halal kini menjadi tren dan menjadi pasar prospektif. Masyarakat perlu memiliki literasi bahwa ekonomi syariah tidak cukup hanya memiliki *embel-embel* syariah. Syariah sejatinya menawarkan keamanan dan perlindungan. Kasus bodong berlabel syariah sudah menciderai gerakan-gerakan ekonomi syariah yang selama ini dibangun. Untuk itu, mari saling menjaga agar tidak sampai nila setitik membuat rusak susu sebelanga. *Wallahu'alam bish showab.*

60
CORONA, MOMENTUM CETAK BIRU LOGISTIK HALAL NASIONAL MENUJU INDONESIA PUSAT HALAL DUNIA [57]

Merebaknya kasus virus Corona yang menyebabkan penyakit Covid-19 berimbas pula pada sektor industri logistik. Dampaknya terutama terjadi pada arus barang ekspor dan impor Indonesia dengan Tiongkok. Sejatinya situasi ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah bersama para pemangku kepentingan untuk menyusun cetak biru logistik halal nasional menuju Indonesia sebagai pusat halal dunia.

Indonesia menjadi negara ke-10 yang menetapkan kebijakan penutupan sementara akses penerbangan dari dan ke Tiongkok untuk mengurangi risiko penyebaran virus Corona. Kebijakan ini menyebabkan ekspor jalur udara diperkirakan mengalami penurunan 40-60 persen. Tidak bisa dimungkiri, virus Corona

57 Ditulis bersama Zaroni, *Chief Financial Officer* (CFO) Pos Logistik Indonesia, Senior Consultant of Supply Chain Indonesia. Dimuat INSIGHT, Buletin Komite Nasio nal Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Edisi 10, Maret 2020.

memengaruhi kinerja ekspor pabrikan nasional karena Tiongkok merupakan mitra dagang utama pabrikan domestik. Meski jalur laut masih dimungkinkan untuk dilakukan pengiriman, namun pertumbuhan industri logistik nasional 2020 yang semula diprediksi tumbuh 9 persen diyakini akan sulit dicapai.

Kasus Corona menyadarkan tentang betapa pentingnya pemahaman akan risiko rantai pasokan global. Aliran material dan produk sejatinya tersebar sangat luas, baik sumbernya (*sourcing* atau *origin*) maupun tujuan *(destination),* sehingga Indonesia tidak boleh bergantung hanya pada satu atau dua pemasok. Keberadaan logistik halal dibutuhkan untuk menjamin proses aliran material dan produk tersebut, mulai dari pemasok, pabrikan atau pengolah, distributor, pengecer, sampai ke konsumen akhir, harus dapat menjamin material serta produk tetap terjaga halal dan *thayyib* (higienis, bersih, dan berkualitas). Karenanya, Indonesia perlu melalukan pengelolaan dan mitigasi risiko secara efektif, untuk memastikan bahwa material dan produk memenuhi kaidah halal, baik isi maupun proses di sepanjang rantai pasokannya. Di sinilah perlunya sistem rantai pasokan dan logistik halal.

Untuk itu, kasus Corona sejatinya dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk menyusun cetak biru logistik halal nasional. Logistik halal kerap kali dianggap bukan sebagai kebutuhan. Padahal, logistik halal sejatinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari industri halal. Sektor logistik memiliki andil dalam penciptaan ekosistem halal. Untuk itu, dalam rangka menuju Indonesia sebagai pusat halal dunia, maka memiliki cetak biru

logistik halal nasional menjadi keniscayaan dalam membangun ekosistem halal.

Urgensi logistik halal

The State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019 mencatat *market size* untuk seluruh industri halal global pada 2017 mencapai US$2,107 triliun. Pada 2023, *market size* ini diprediksi meningkat menjadi US$3,007 triliun. Meningkatnya *market size* produk halal global tidak hanya dilatarbelakangi oleh meningkatnya populasi muslim dunia saja, tetapi juga kesadaran masyarakat muslim untuk menjalankan ajaran agama yang semakin meningkat yang ditandai dengan kesadaran untuk memilih menggunakan produk halal.

Selain itu, masyarakat nonmuslim yang memilih produk halal juga semakin meningkat. Itulah sebabnya, halal kini tidak lagi menjadi simbol agama semata. Halal saat ini telah menjadi standar dalam menentukan tingkat kebersihan, keamanan, dan kenyamanan yang diakui masyarakat global. Halal telah melampaui batas ras, agama, dan negara.

Dalam ketidakpastian ekonomi global, produk halal memiliki peluang pasar yang terus membesar. Namun demikian, tidak bisa dimungkiri, perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok sejak 2018 memicu meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi dua negara tersebut melambat. Perlambatan ini menyebar pada negara lain dan berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi dan perdagangan internasional. Sebagian besar harga komoditas turun tajam. Penurunan ekonomi

ini diprediksi masih terus berlanjut, terlebih dengan merebaknya kasus Corona.

Menurunnya kinerja ekspor mendorong pemerintah memberi perhatian terhadap produk halal. Hal ini mengingat potensi produk halal dalam memasuki pasar ekspor global sehingga dapat membantu memperbaiki defisit transaksi berjalan atau *current account deficit* (CAD). Terlebih produk halal Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk bersaing pada pasar ekspor negara muslim. Produk halal Indonesia pada gilirannya pula akan membantu mengurangi impor produk halal yang sebenarnya juga menjadi penyebab CAD yang membebani neraca perdagangan.

Perbaikan CAD tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek karena masalahnya adalah pada ekspor komoditas sebagai tumpuan struktur perekonomian. Oleh karena itu, investasi domestik harus diarahkan untuk membangun industri bahan baku bernilai tambah yang mendorong ekspor. Ekspor menjadi opsi terbaik daripada pemerintah mencari pinjaman luar negeri untuk memperbaiki CAD guna mengendalikan nilai tukar Rupiah. Pasalnya, meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat eskalasi perang dagang dapat memicu *capital outflow* dari Indonesia menuju *safe haven.*

Keinginan Indonesia sebagai pusat halal dunia, maka cetak biru logistik halal harus terintegrasi dengan cetak biru industri halal nasional. Peningkatan permintaan produk halal tentunya mendorong kebutuhan logistik halal. Logistik halal merupakan bagian dari sistem manajemen rantai pasokan halal (*halal supply chain managemen*t/HSCM). HSCM secara sederhana dapat

didefinisikan sebagai rantai pasokan produksi yang bersertifikasi halal mulai dari bahan baku hingga menjadi produk jadi yang siap dikonsumsi oleh konsumen akhir.

Saat ini HSCM telah menjadi standar halal dalam pengaturan penyediaan bahan baku produksi, proses pengolahan, pemasaran, promosi, hingga produk siap konsumsi. Logistik halal bersama *halal procurement, halal manufacturing,* dan *halal distribution* merupakan komponen utama pembentuk HSCM. Ruang lingkup logistik meliputi gudang *(warehouse),* pelabuhan *(port)*, kapal udara, dan laut serta semua hal yang berhubungan dengan fasilitas penanganan *(handling facility)*.

Berdasarkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, logistik halal dipetakan sebagai rantai nilai dari klaster makanan dan minuman halal, fesyen halal, media dan rekreasi halal, serta farmasi dan komestik halal. Bahkan, perbankan syariah didorong untuk meningkatkan pembiayaan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan basis *start up* yang terdapat pada sektor logistik.

Terkait dengan ekonomi digital yang digaungkan pemerintah, MEKSI 2019-2024 juga telah memetakan kebutuhan pengembangan teknologi tepat guna dan mutakhir untuk efisiensi produk halal, diantaranya melalui sistem informasi yang terintegrasi untuk *traceability* produk halal. *Traceability* berperan dalam memastikan kehalalan komponen produk halal untuk meningkatkan kepercayaan pasar terhadap proses sertifikasi halal. *Traceability* digunakan untuk mengecek produk halal, mulai

dari perolehan komponen bahan baku, proses produksi, hingga logistik dan distribusi produk yang dilakukan secara sistematis.

Masalah yang dihadapi

Merujuk Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), maka kewajiban bersertifikat halal pada produk yang masuk dan beredar di seluruh wilayah Indonesia per 17 Oktober 2019 telah berlaku. Pasca berlakunya UU JPH, diperkirakan permintaan sertifikasi halal untuk sektor logistik akan terdongkrak pula. Sertifikasi halal untuk sektor logistik bertujuan untuk menjamin produk yang halal tetap terjaga status halal sejak dari bahan baku hingga menjadi produk jadi sampai pada tangan pelanggan. Perusahaan logistik yang telah bersertifikasi halal berarti telah memberi jaminan bahwa proses operasi di dalamnya halal dalam menangani produk halal.

Merujuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), terdapat delapan perusahaan logistik halal di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah pemain asing. Kedelapannya bergerak dalam bidang penyediaan jasa pergudangan dan *transporter*. Mereka bermain pada sektor ini umumnya lebih disebabkan *market driven*. Tuntutan dari produsen produk halal, terutama produk makanan halal, mendorong perusahaan logistik untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Sebelumnya, sertifikasi logistik halal dilakukan oleh LPPOM MUI. Sertifikasi dilakukan sebagai bentuk jaminan dari perusahaan bahwa produk halalnya tidak terkontaminasi produk nonhalal.

Perusahaan logistik harus menjamin produk yang mereka kelola, mulai dari saat menerima dari pemasok, kemudian disimpan lalu didistribusikan hingga sampai pada konsumen akhir tidak berinteraksi dengan produk nonhalal.

Pengembangan logistik halal di Indonesia saat ini dihadapkan sedikitnya pada lima persoalan. **Pertama**, masalah literasi. Kebanyakan masyarakat, termasuk pelaku logistik, halal lebih diorientasikan pada konten kandungan produk. Proses distribusi produk, mulai dari pengiriman bahan mentah kepada pabrikan hingga disalurkan kepada konsumen akhir, kerap dianggap bukan sebagai bagian yang inheren dengan produk halal. Padahal, dalam HSCM, logistik halal merupakan bagian terintegrasi dari ekosistem halal.

Selain itu, pemahaman sebagian besar masyarakat bahwa kriteria halal sebatas halal zatnya. Padahal, kriteria lainnya adalah halal dalam memperolehnya dan halal dalam pengolahannya. Logistik halal berada pada ranah pengolahan produk halal yang meliputi rangkaian kegiatan penyediaan bahan, produksi, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Kedua, praktek industri halal Indonesia saat ini masih berkutat pada sertifikasi halal produk, belum pada pergerakan atau perpindahan produk, Kewajiban sertifikasi halal bagi industri makanan dan minuman sebagai sektor industri pertama yang dikenai kewajiban lantaran dinilai paling siap dan berhubungan langsung dengan masyarakat menjadikan kebutuhan akan logistik halal dianggap belum mendesak. Hal ini juga sekaligus

mengindikasikan bahwa Indonesia masih memerlukan waktu lebih panjang untuk membangun ekosistem halal.

Ketiga, kurangnya regulasi dari pemerintah yang dapat menjadi landasan bagi sektor logistik berperan lebih besar dalam rantai pasokan produk-produk halal. Payung hukum bagi logistik halal masih mengandalkan UU JPH yang juga belum diturunkan menjadi peraturan pemerintah. Namun demikian, tidak bisa dimungkiri, kehadiran UU JPH membawa gaung besar yang kondusif bagi terciptanya ekosistem industri halal.

Keempat, di Indonesia saat ini pengembangan produk halal belum dilakukan dalam sistem rantai pasokan secara menyeluruh mulai dari pengadaan bahan baku, pengepakan, pergudangan, transportasi, dan distribusi. Perlu dikembangkan rantai nilai produk halal dengan membangun kawasan "*halal logistics park*", kewirausahaan produk halal, kawasan "industri dan UKM produk halal", pengembangan ekspor produk-produk halal, serta dukungan dari lembaga keuangan syariah, utamanya perbankan syariah, dalam pembiayaan produk-produk halal.

Kelima, belum terintegrasinya prosedur, proses, pengawasan sertifikasi produk halal antara MUI dan/atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai penerbit sertifikasi produk halal dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan. Harmonisasi, standardisasi, dan perluasan cakupan proses sertifikasi halal—tidak hanya produk halal, harus juga mencakup proses rantai pasokan dan proses logistiknya. Implementasi sertifikasi produk halal yang dilakukan MUI dan/atau BPJPH perlu

diintegrasikan dengan Kementerian Perhubungan, misalnya standardisasi perlakuan proses transportasi produk halal, dan Kementerian Perdagangan dalam proses pergudangan produk halal.

Keenam, masih sedikitnya penyedia jasa logistik halal yang memberikan layanan logistik halal dengan standardisasi dan tersertifikasi. Untuk itu, pemerintah perlu menciptakan insentif atau peraturan pemerintah sebagai turunan UU JPH untuk mendorong penyedia jasa logistik ikut memberi layanan halal atau mendorong hadirnya pemain baru yang bergerak pada logistik halal. Insentif dan peraturan pemerintah ini bisa berupa pengurangan pajak, memfasilitasi penyediaan dan perbaikan infrastruktur logistik di bandara, pelabuhan, terminal, depo, yang mendukung operasional dan standardisasi logistik halal, serta mendorong investasi perusahaan penyedia jasa logistik nasional untuk menyelenggarakan usaha logistik halal.

Cetak biru

Keberadaan cetak biru logistik halal nasional menjadi mendesak jika Indonesia memang berkomitmen untuk menjadi pusat halal dunia. Masih sedikitnya pemain di sektor logistik halal memberi keuntungan tersendiri bagi Indonesia untuk segera menyusunnya sebelum semakin banyak pemain asing masuk pada sektor logistik nasional.

Cetak biru ini dibutuhkan di antaranya juga mengingat sektor logistik halal berpotensi menciptakan *multiplier effect* terhadap lapangan kerja baru. Sektor ini dapat membuka usaha baru pada

bidang jasa *halal logistics park*, jasa konsultan rantai pasokan halal, pelatihan dan sertifikasi kompetensi, serta jasa pembersihan dan pemeliharaan fasilitas logistik.

Adapun komponen cetak biru harus memuat koordinasi kelembagaan, kebijakan dan regulasi, pengembangan industri, integritas halal, sektor prioritas, teknologi, kompetensi sumber daya insani (SDI) serta penelitian dan pengembangan. Literasi masyarakat juga merupakan komponen yang tidak boleh terlupakan. Perlunya peningkatan literasi yang masif agar logistik halal dapat menjadi arus baru industri logistik nasional. Mengingat potensinya yang besar, selain juga dalam rangka melaksanakan amanat UU JPH, terutama karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Pengembangan logistik halal di Indonesia perlu melibatkan setidaknya tujuh pemangku kepentingan. **Pertama**, inisiator atau asosiasi logistik halal. Inisiator melakukan campaign produk halal dan logistik halal ke berbagai segmen masyarakat, untuk menyadarkan pentingnya logistik halal untuk pengelolaan rantai pasok produk-produk. **Kedua,** regulator. Pemerintah sebagai regulator sistem logistik halal perlu memberikan kebijakan sistem logistik halal, yang mencakup kebijakan infrastruktur, regulasi, standardisasi pergudangan logistik halal, standardisasi transportasi logistik halal, sertifikasi logistik halal, pengawasan, dan pembinaan pelaku usaha penyedia jasa logistik halal. Dalam melaksanakan fungsi ini, pemerintah dapat membentuk Badan Logistik Halal Indonesia.

Ketiga, perguruan tinggi atau edukator. Perguruan tinggi berperan sebagai pusat studi dan riset logistik halal dan pengembangan kompetensi SDI dan organisasi logistik halal. Riset logistik halal diarahkan untuk mengembangkan sistem logistik, infrastruktur, teknologi, dan proses bisnis logistik halal. Riset juga diarahkan untuk pengembangan pasar logistik halal, baik segmen pasar domestik maupun internasional.

Keempat, penyedia teknologi. Penyedia teknologi logistik halal akan memberikan dukungan teknologi, baik teknologi *material handling*, *information and communications technology* (ICT), maupun transportasi yang diperlukan dalam proses operasi logistik halal. **Kelima,** jasa penyedia logistik halal. Jasa penyedia logistik halal merupakan perusahaan *third party logistics* (3PL) yang menyediakan jasa pengelolaan logistik halal. Diperlukan standardisasi dan sertifikasi SDI dan organisasi perusahaan penyedia logistik halal ini.

Keenam, produsen. Produsen berperan penting sebagai penyedia produk-produk halal, dan memastikan bahwa produk-produk telah mendapat sertifikasi halal. **Ketujuh,** pelanggan. Pelanggan sebagai pengguna produk halal memperoleh layanan dan produk halal sesuai standar dan sertifikasi produk halal dan logistik halal. Kemauan membayar dari pelanggan salah satu isu penting dalam mendukung implementasi logistik halal.

Pengembangan logistik halal ini akan memberikan banyak peluang bisnis, antara lain: (1) Jasa logistik (3PL atau *fourth-party logistics*); (2) Solusi teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas sistem *traceability* asal dan tujuan

aliran material dan produk di sepanjang rantai pasokan; (3) Jasa *halal logistics park*, pabrik, dan gudang; (4) pengembangan dan pemeliharaan aset; (5) Jasa konsultan rantai pasokan; (6) Perancangan dan pengadaan penanganan material dan sistem rak; (7) Pelatihan dan sertifikasi kompetensi SDI dan organisasi; (8) Jasa pembersihan dan pemeliharaan fasilitas logistik.

Pendapat bahwa logistik yang telah menerapkan International Organization for Standardization (ISO) maka secara otomatis telah menerapkan praktek logistik halal bukanlah hal yang tepat. Termasuk juga pendapat bahwa Indonesia tidak perlu menerapkan logistik halal karena akan meningkatkan biaya logistik. Keduanya tidak menjadi pembenaran bahwa Indonesia tidak membutuhkan sertifikasi logistik halal. Sertifikasi bukan sekadar masalah sertifikat halal *an sich* belaka, melainkan juga bentuk transformasi struktural untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing melalui rantai nilai halal sehingga tercipta ekosistem bagi industri halal.

Jelas, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mewujudkan logistik halal di Indonesia. Untuk itu, cetak biru logistik halal nasional dibutuhkan sebagai panduan menuju arah tersebut. Kasus Corona dapat menjadi momentum bagi pemangku kepentingan halal di Indonesia untuk menggaungkan kebutuhan akan hadirnya cetak biru ini. *Wallahu a'lam bish showab.*

BIOGRAFI PENULIS

Khairunnisa Musari adalah Doktor Ilmu Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Saat ini dia adalah Lektor pada Program Studi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana dan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Dia juga saat ini menjadi Wakil Koordinator Indonesia Tengah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Sekretaris II Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IAEI Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Jember, dan Anggota Dewan Pakar Pimpinan Daerah (PD) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Lumajang. Dia memiliki perhatian besar untuk isu-isu terkait sukuk, wakaf, *esham,* kebijakan fiskal & moneter, dan *Islamic microfinance/nano-finance*. Tulisannya lebih dari 170 artikel telah diterbitkan pada koran harian lokal dan nasional, majalah, dan jurnal internasional. Pada 2019, ia masuk dalam *Top 300 Most Influential Women in Islamic Business & Finance 2019* yang diselenggarakan oleh Cambridge-IFA.